



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 591.2/Kep. 93 -Bag.Org/2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka diperlukan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Proses Bisnis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagan yang digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai:
- a. acuan bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan; dan
 - b. dasar sebagai pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana, efisien, efektif dan akuntabel.
- KEEMPAT : Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Tangerang dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 21 Januari 2021

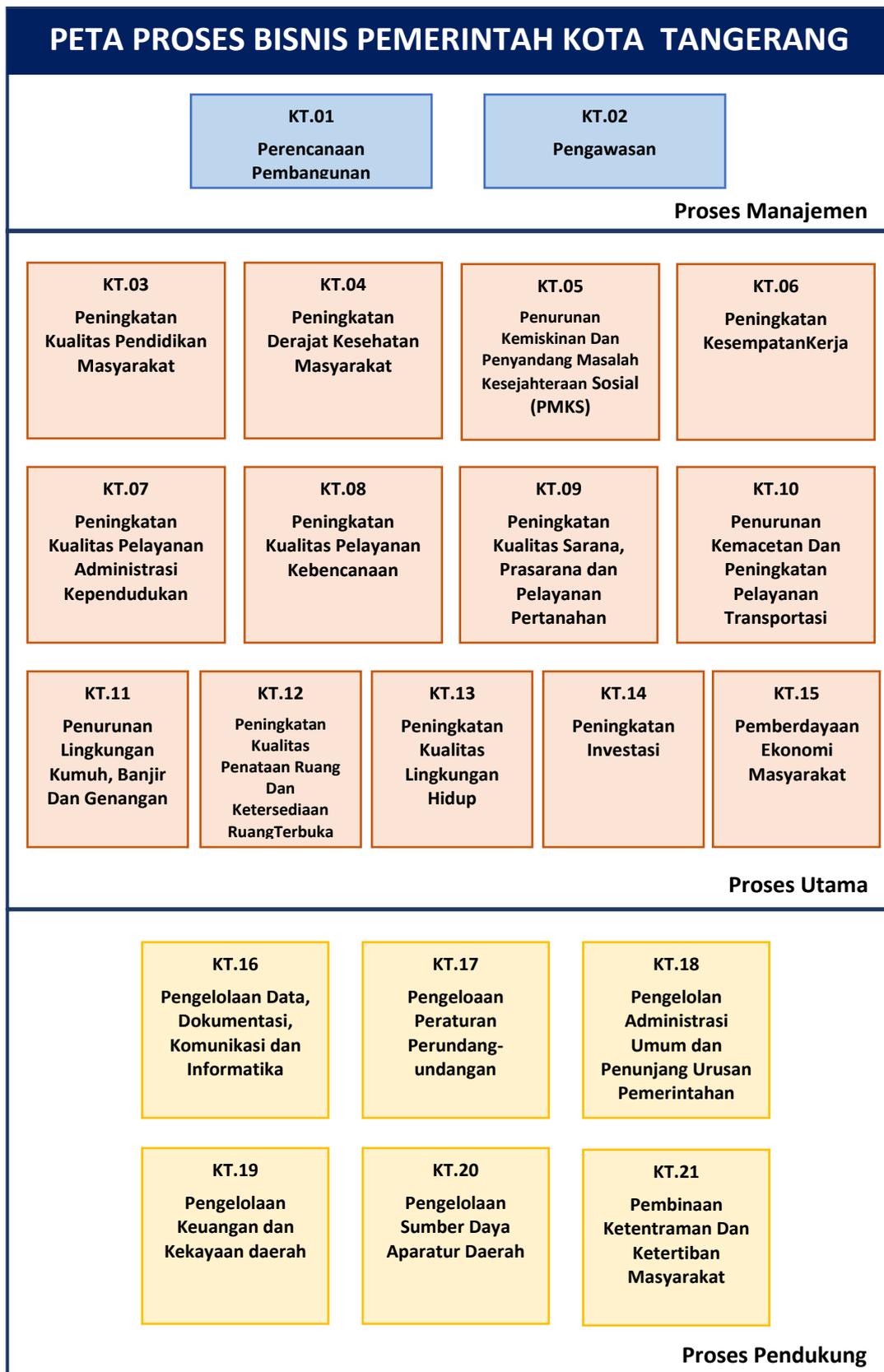


LAMPIRAN

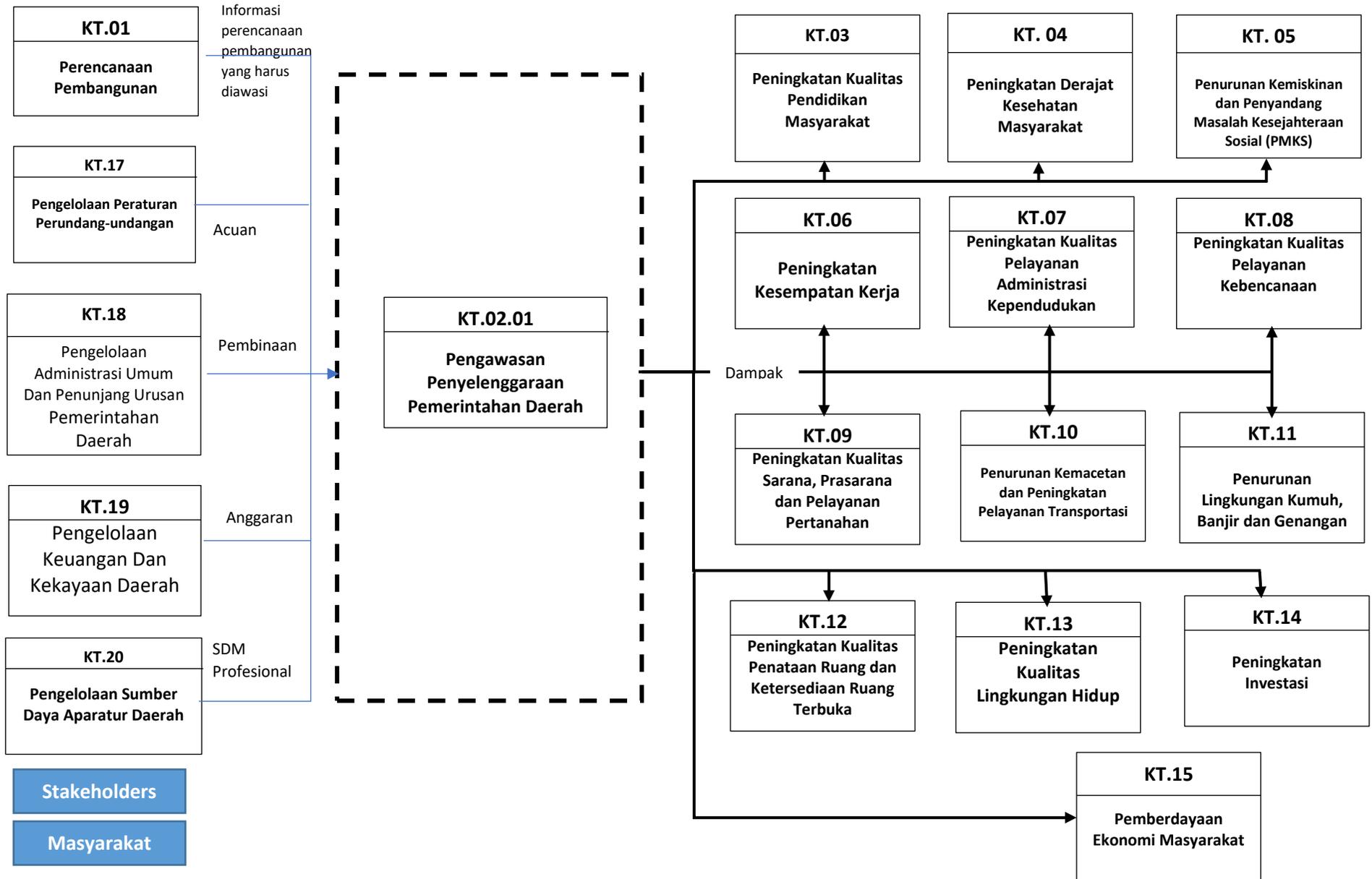
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 591.2/Kep.93-Bag.Org/2021

TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

A. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA TANGERANG

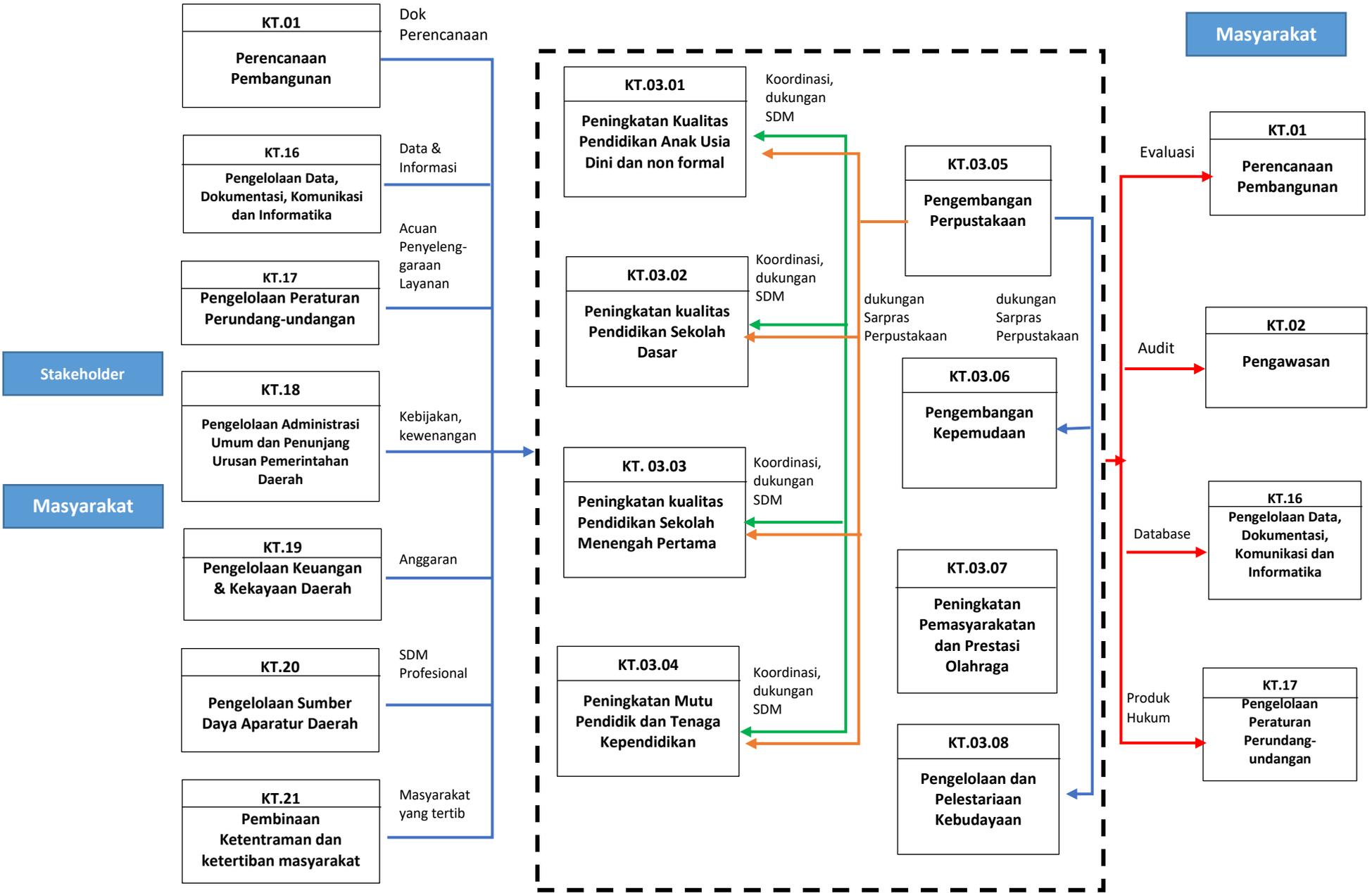


Peta Subproses KT.02. Pengawasan



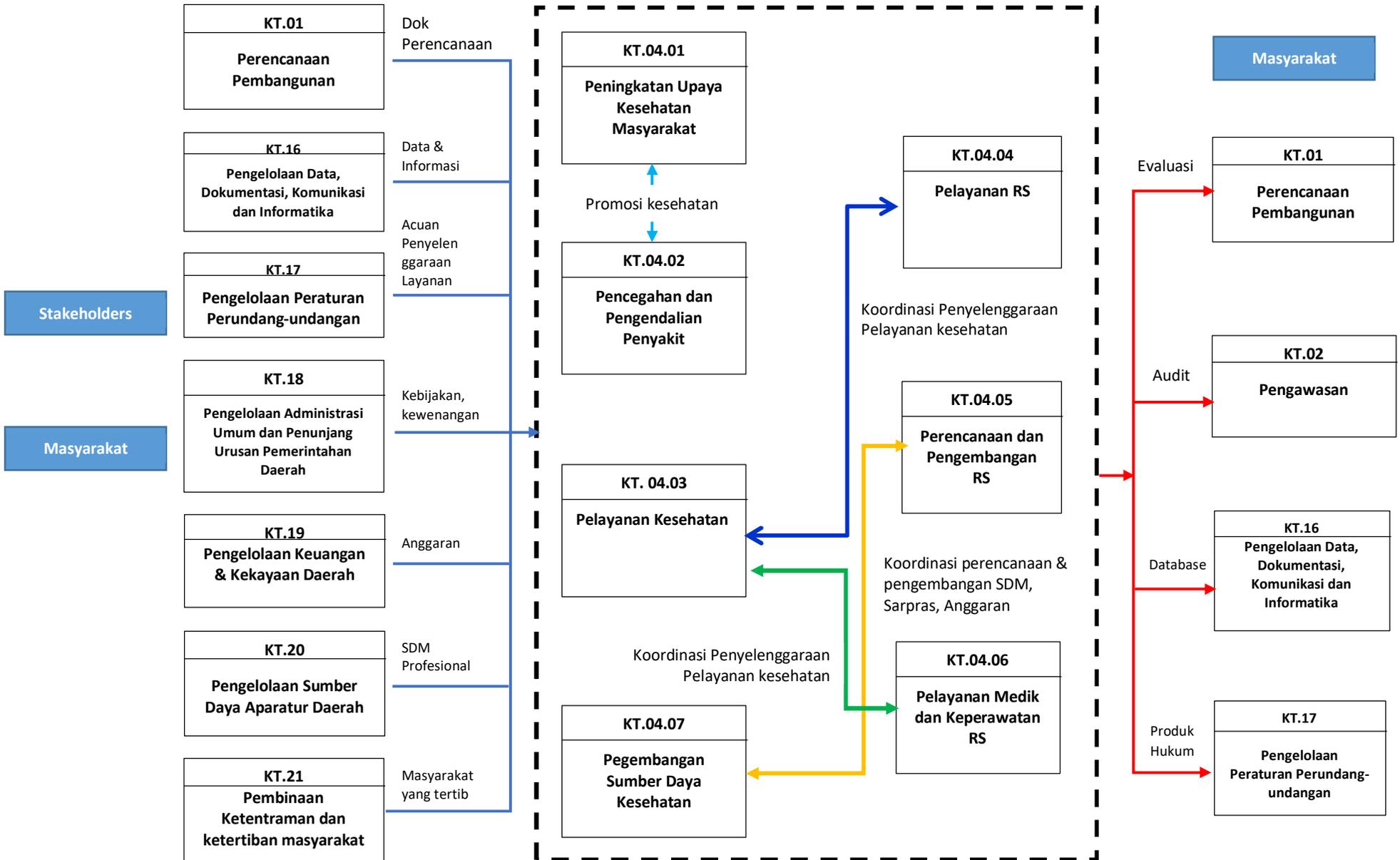
Peta Subproses

KT.03. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat



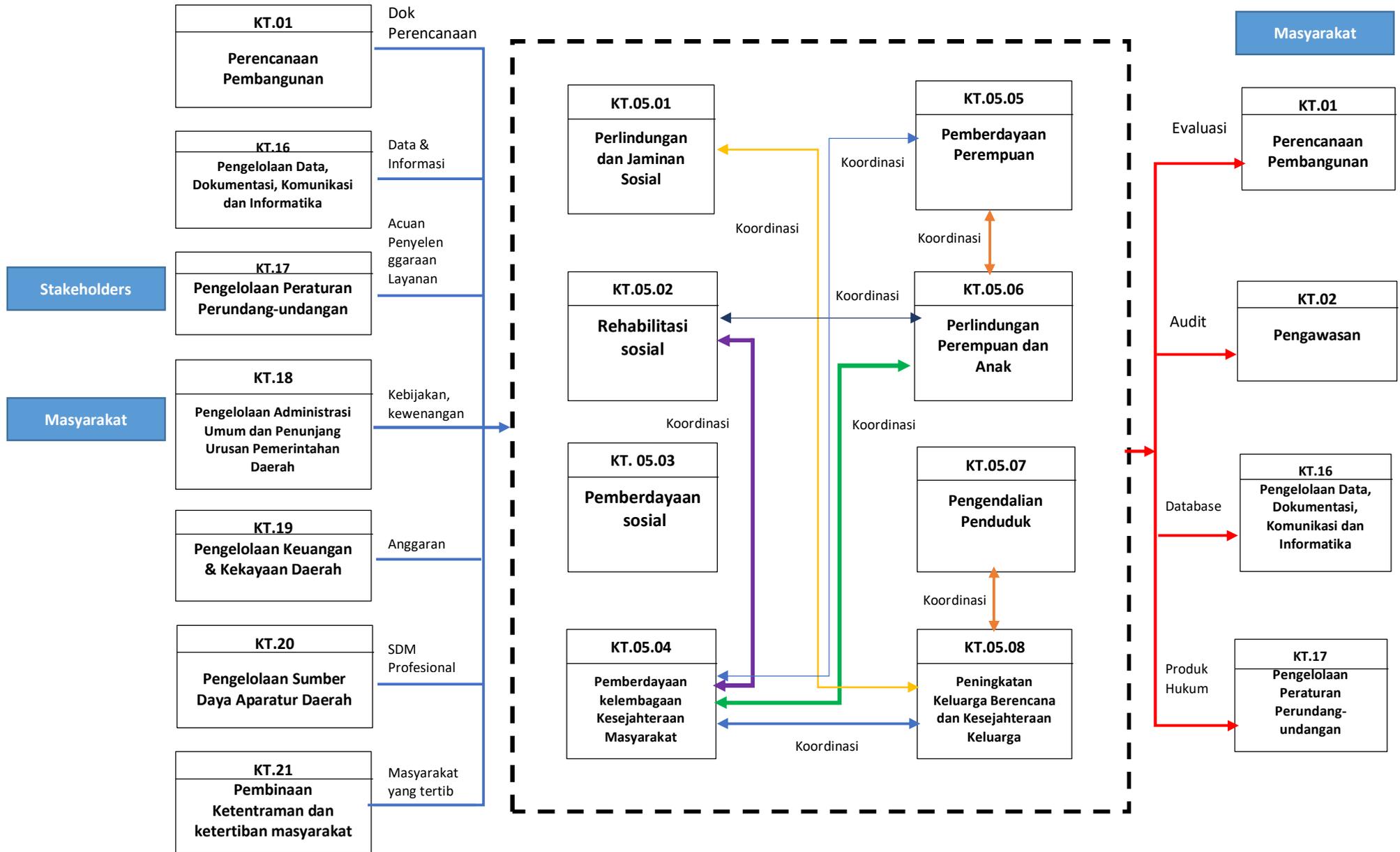
Peta Subproses

KT.04. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

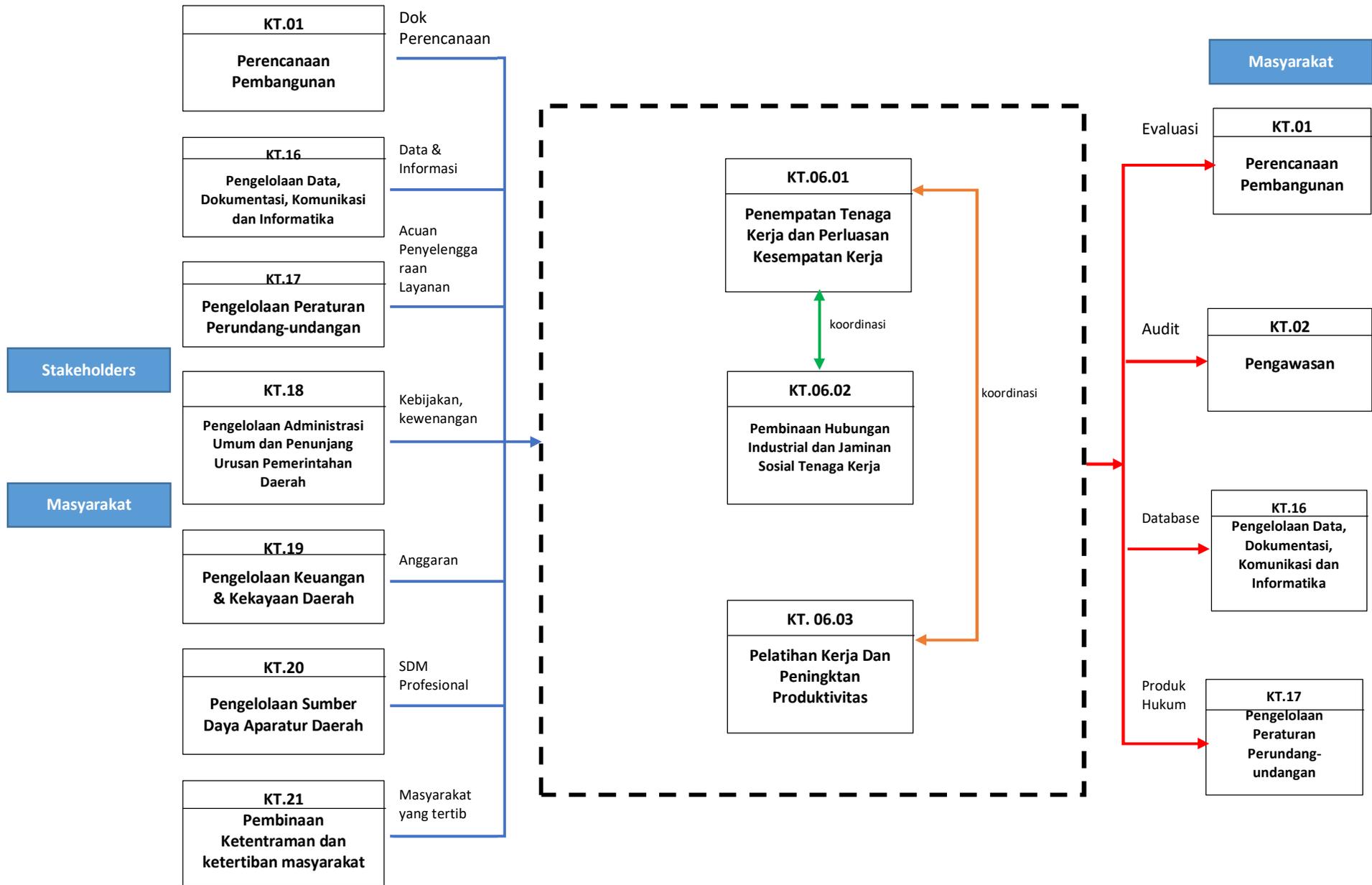


Peta Subproses

KT.05. Penurunan Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

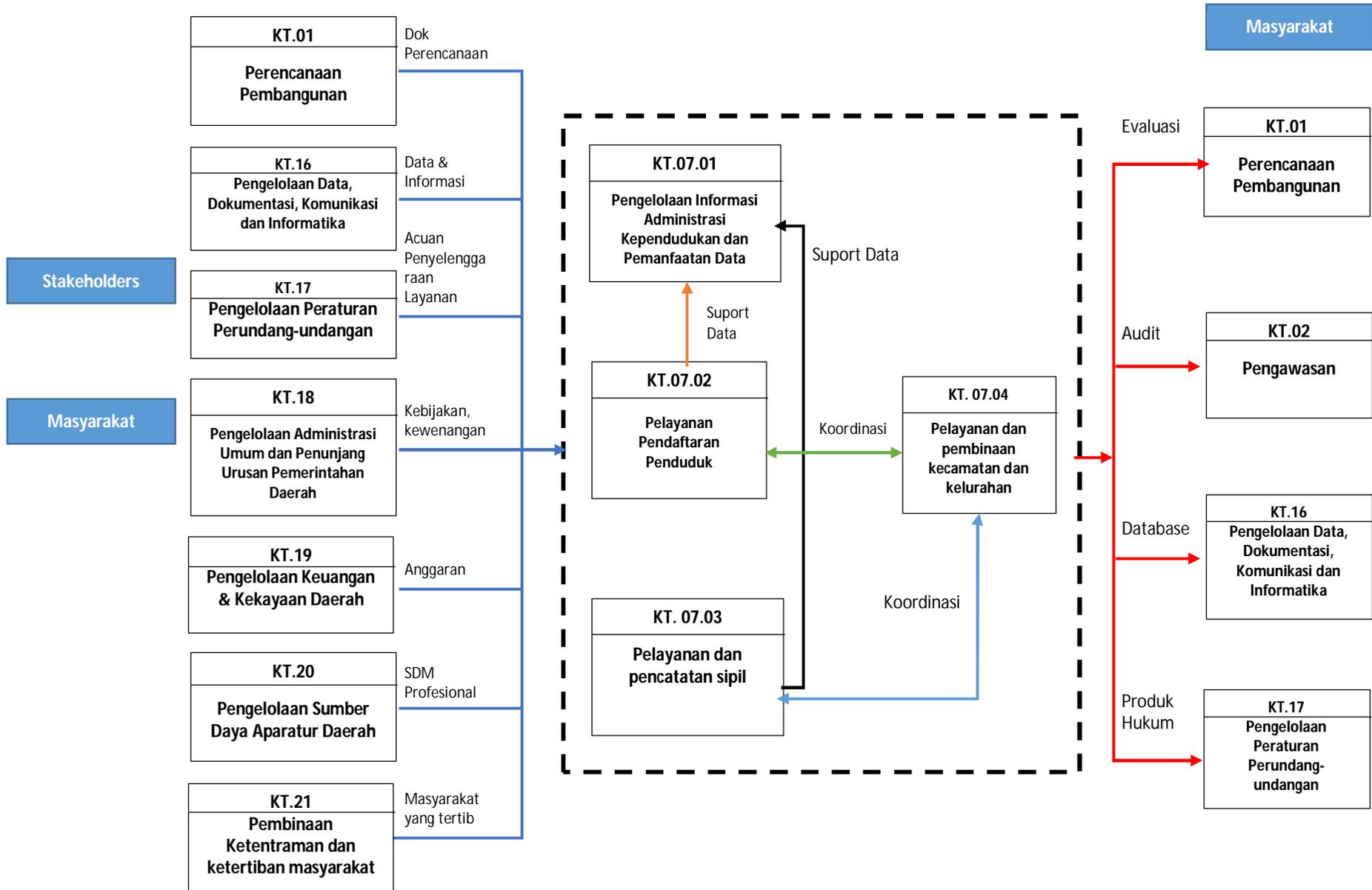


Peta Subproses KT.06. Peningkatan Kesempatan Kerja

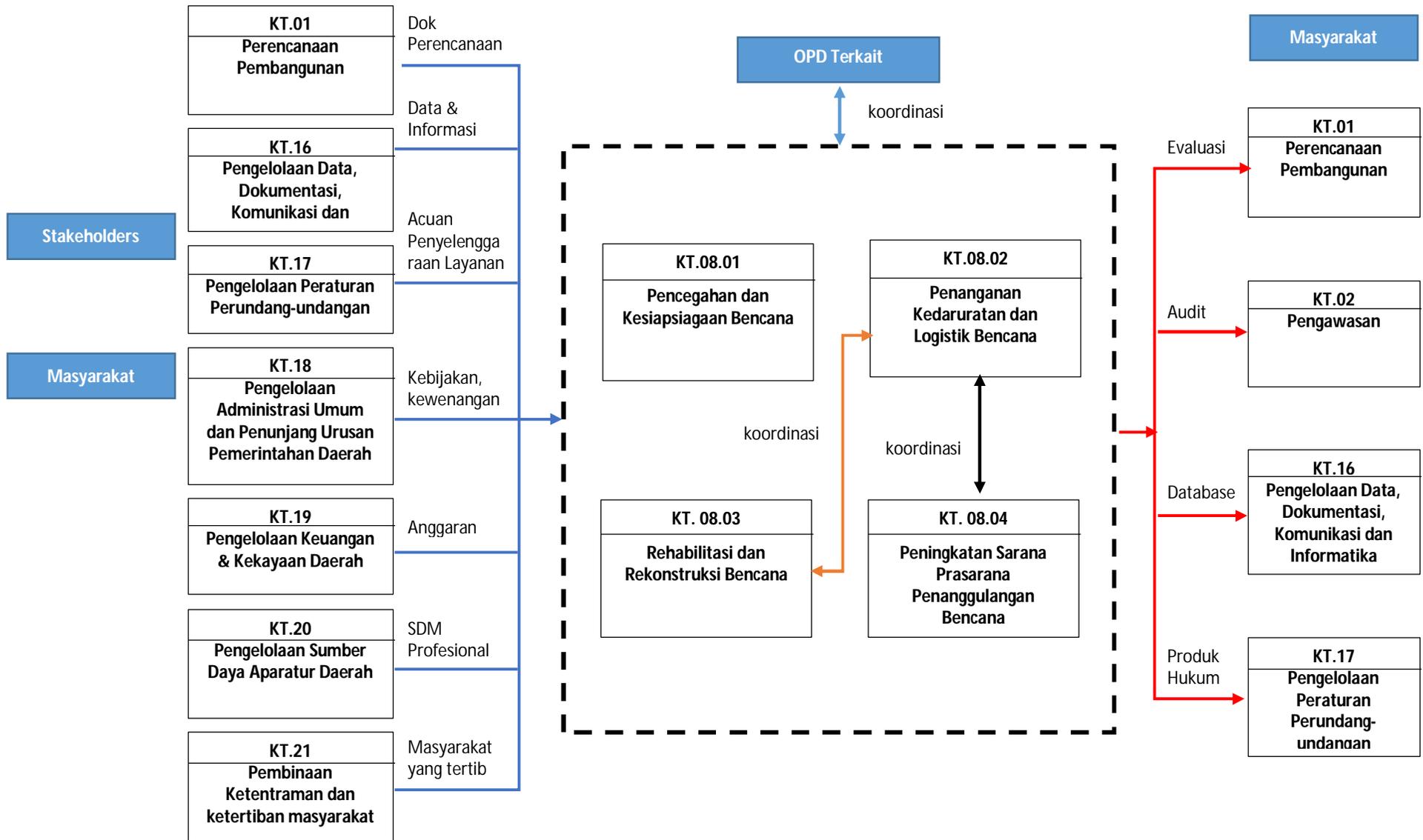


Peta Subproses

KT.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

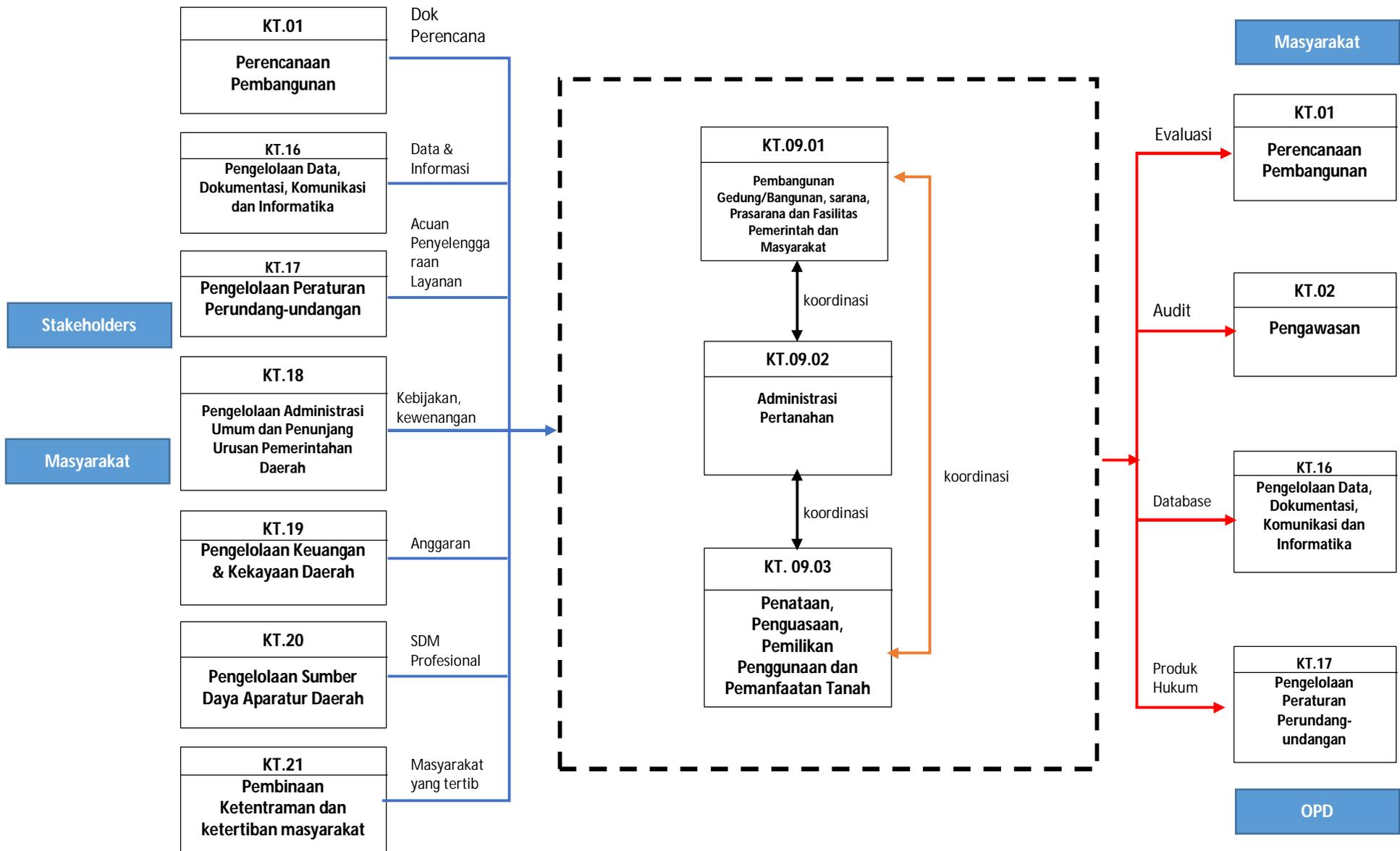


Peta Subproses KT.08. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebencanaan



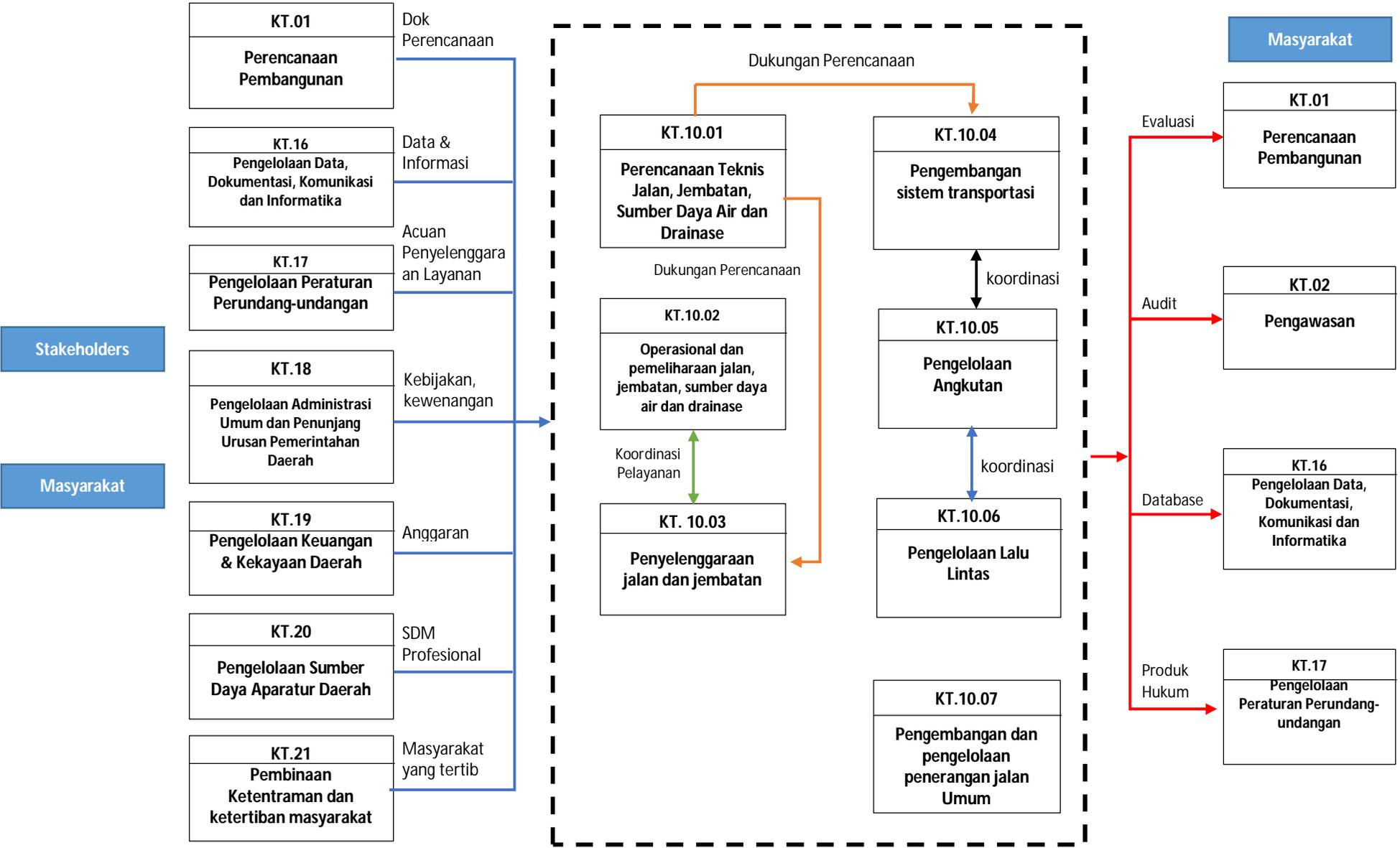
Peta Subproses

KT.09. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Pelayanan Pertanahan

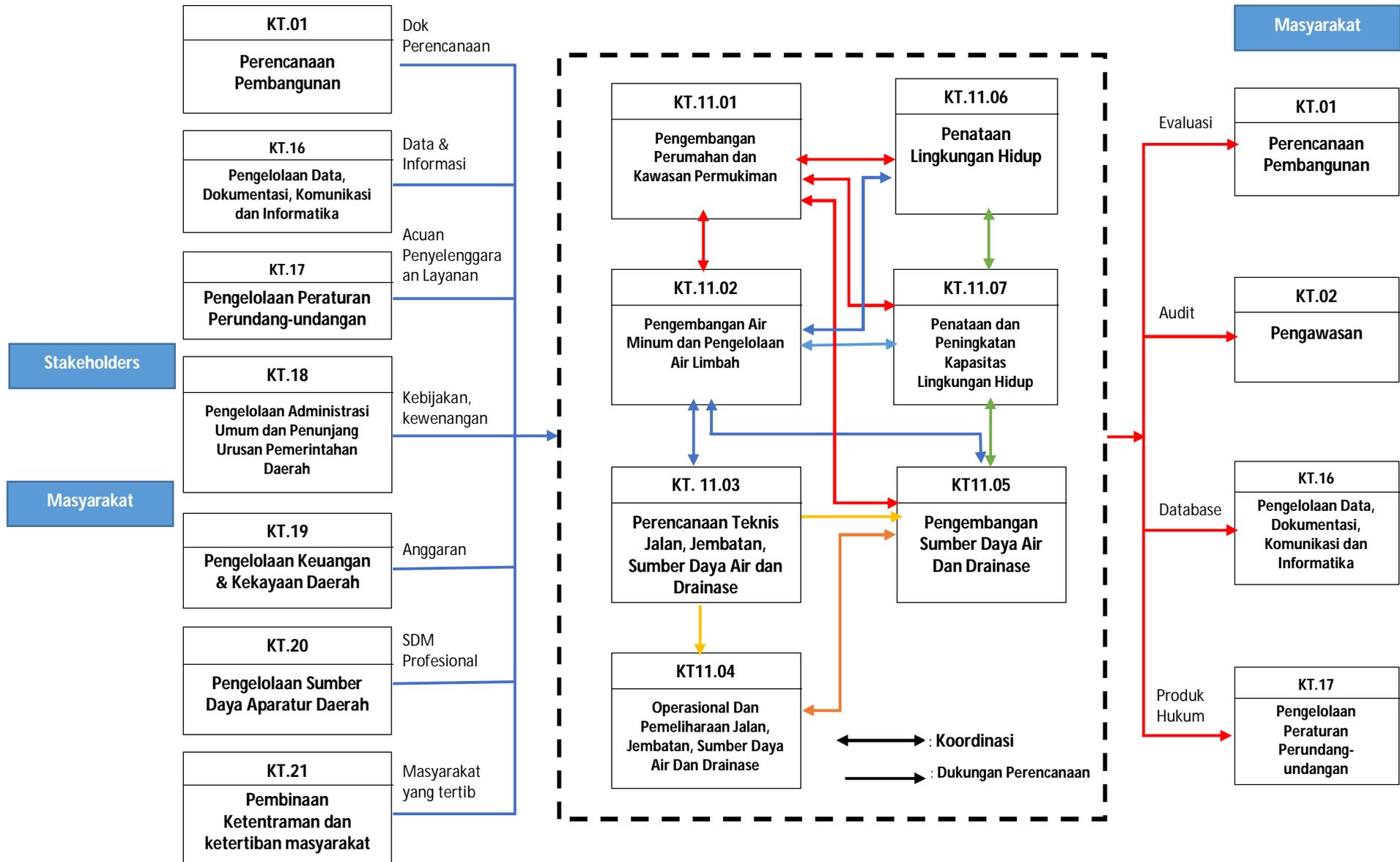


Peta Subproses

KT.10. Penurunan Kemacetan Dan Peningkatan Pelayanan Transportasi

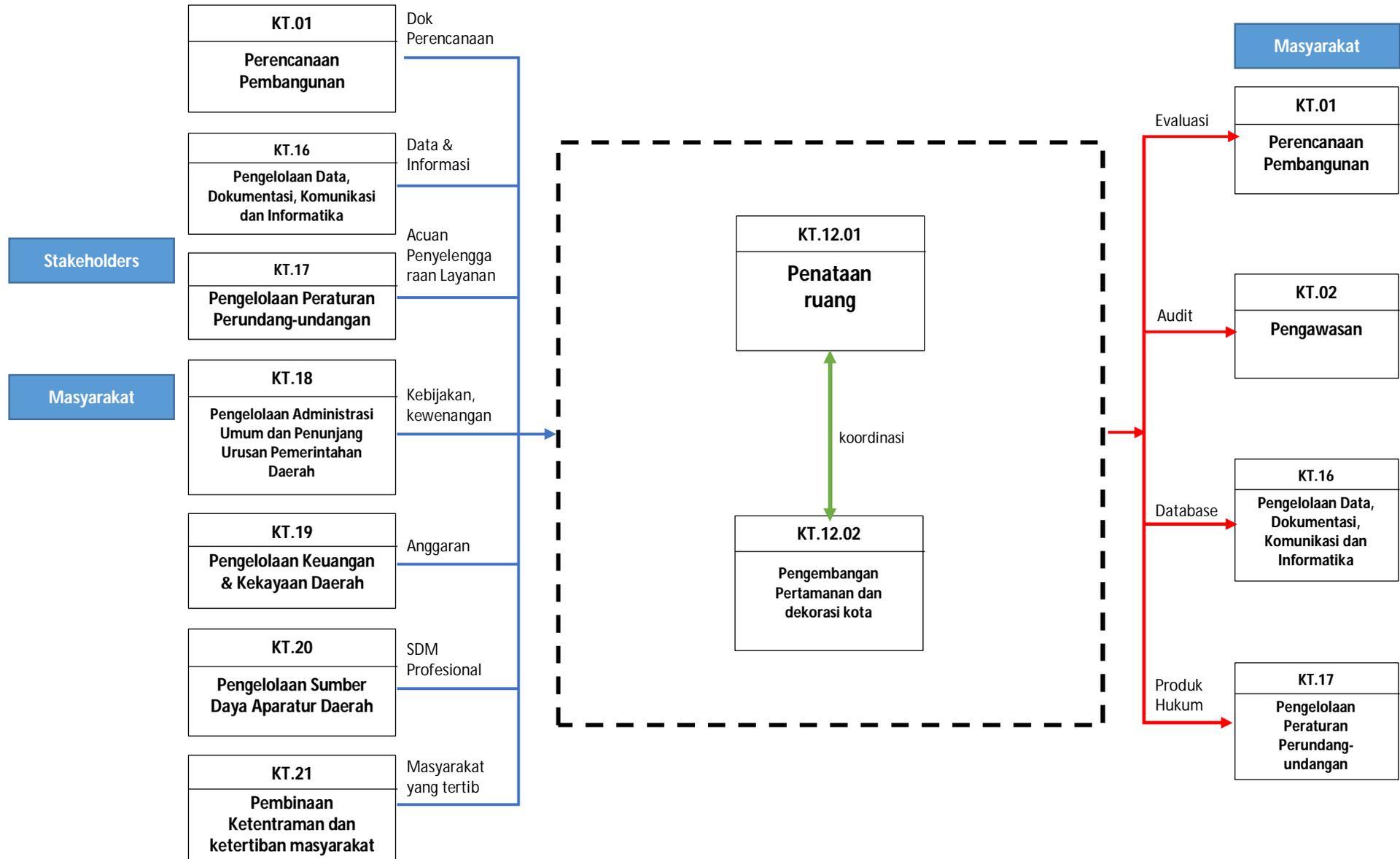


Peta Subproses KT.11. Penurunan Lingkungan Kumuh, Banjir dan Genangan

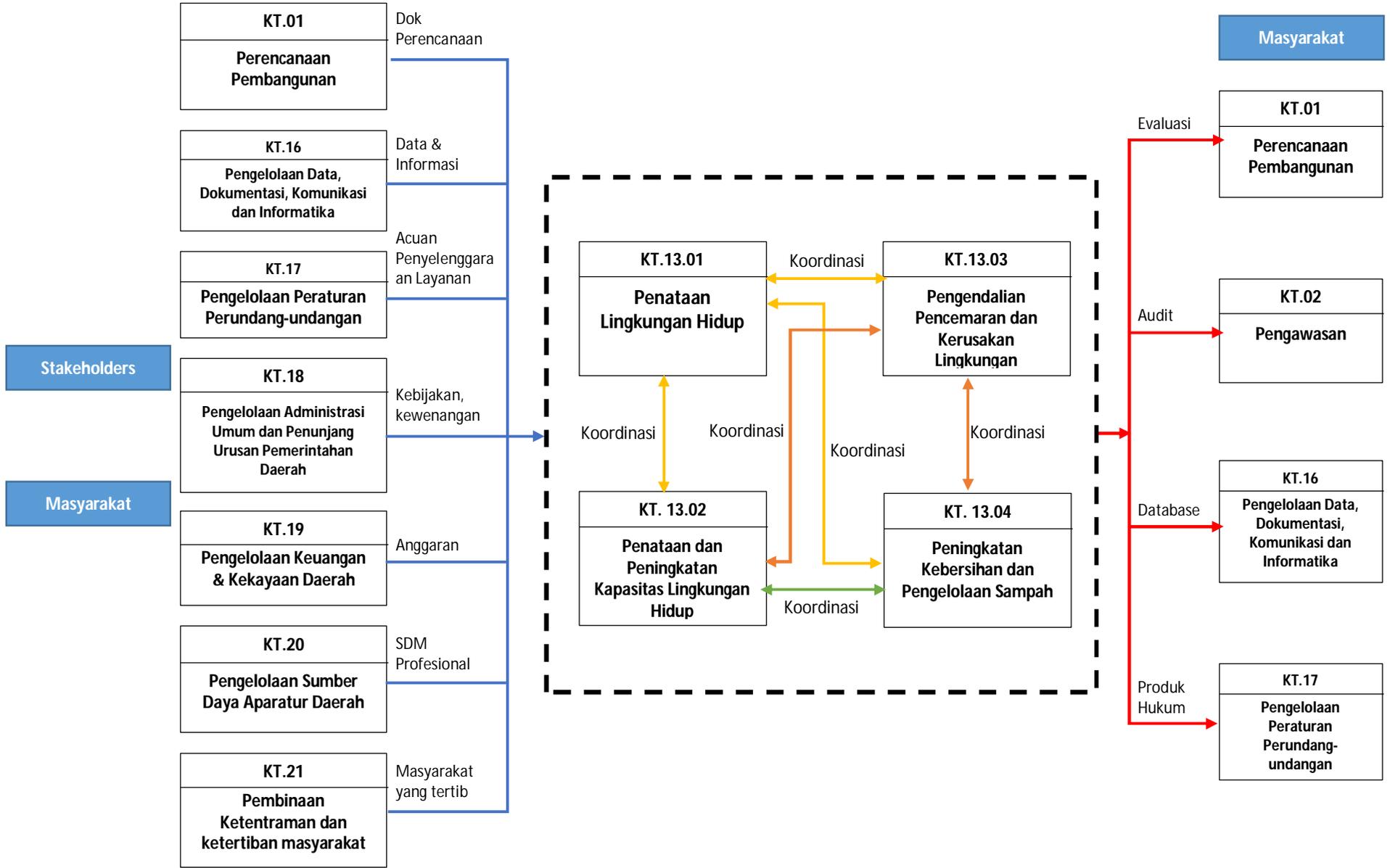


Peta Subproses

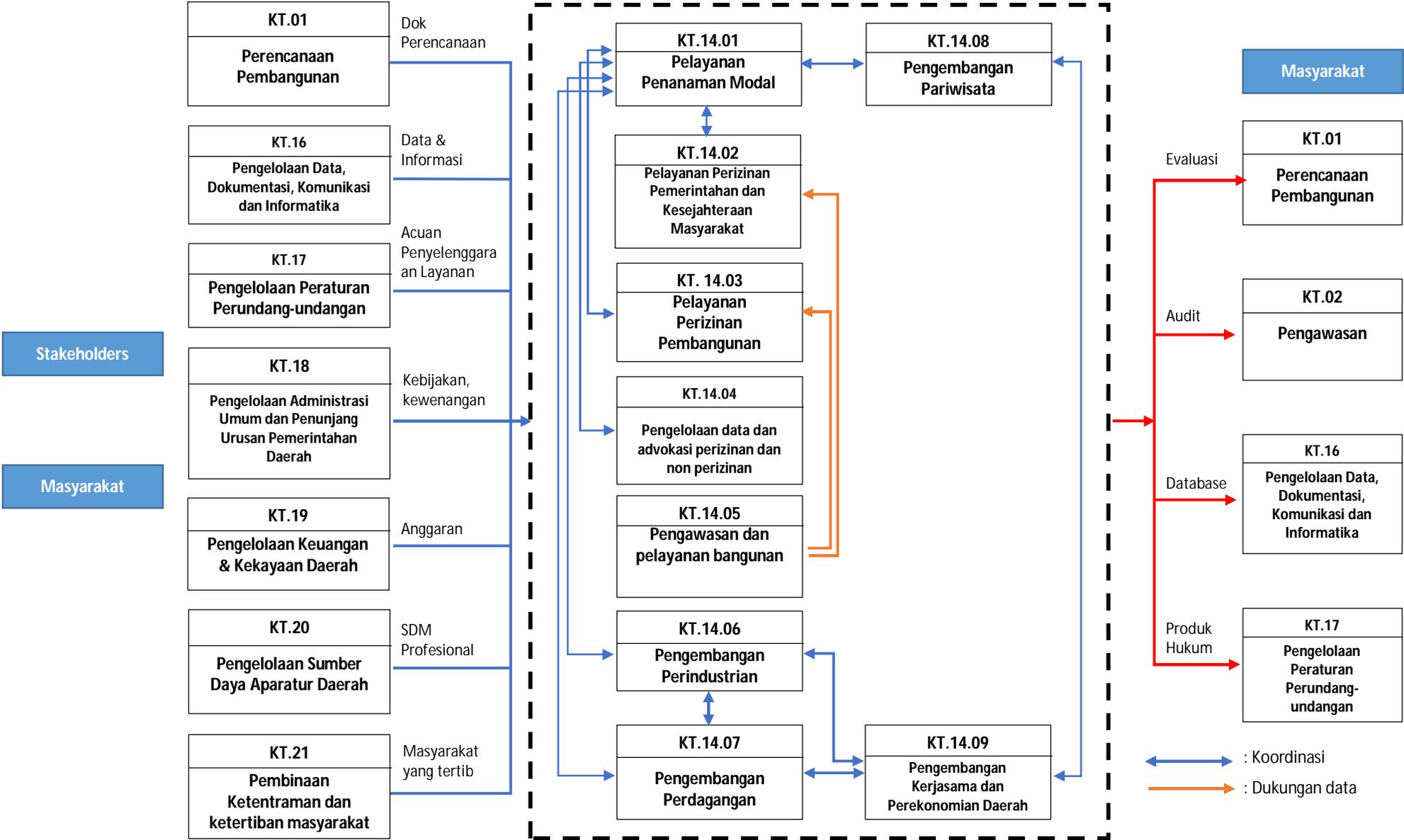
KT.12. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan Ketersediaan Ruang Terbuka



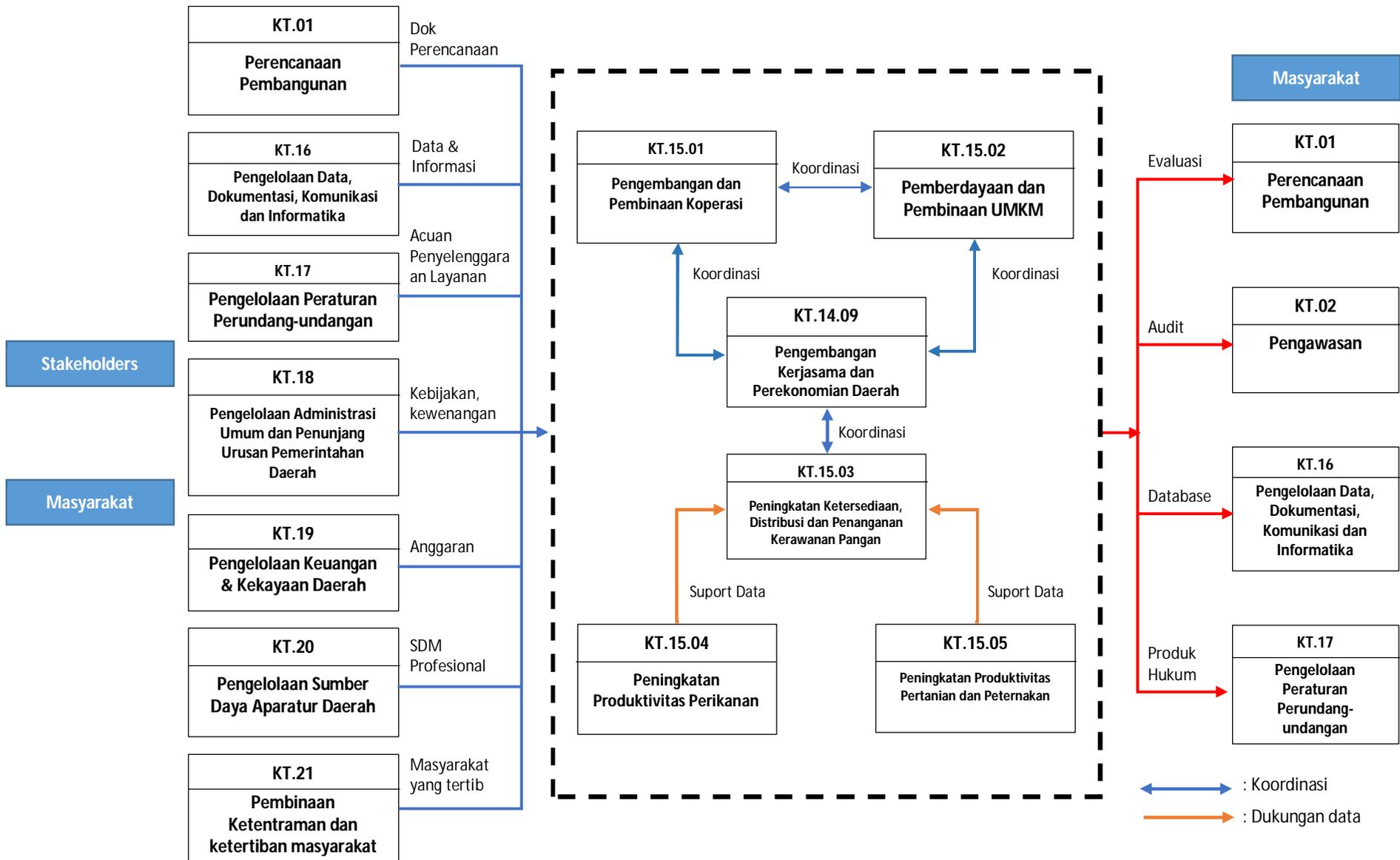
Peta Subproses KT.13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



Peta Subproses KT.14. Peningkatan Investasi

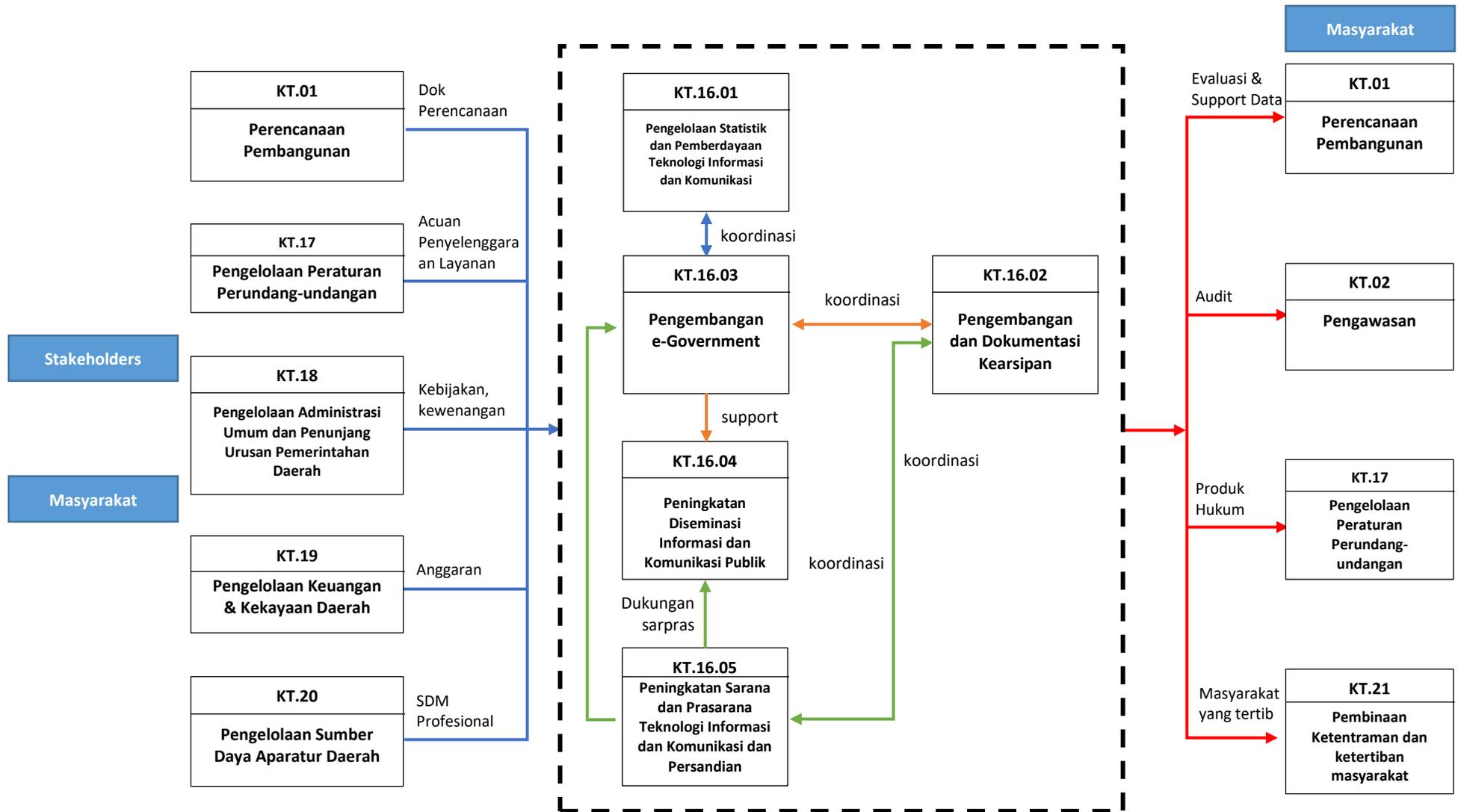


Peta Subproses KT.15. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



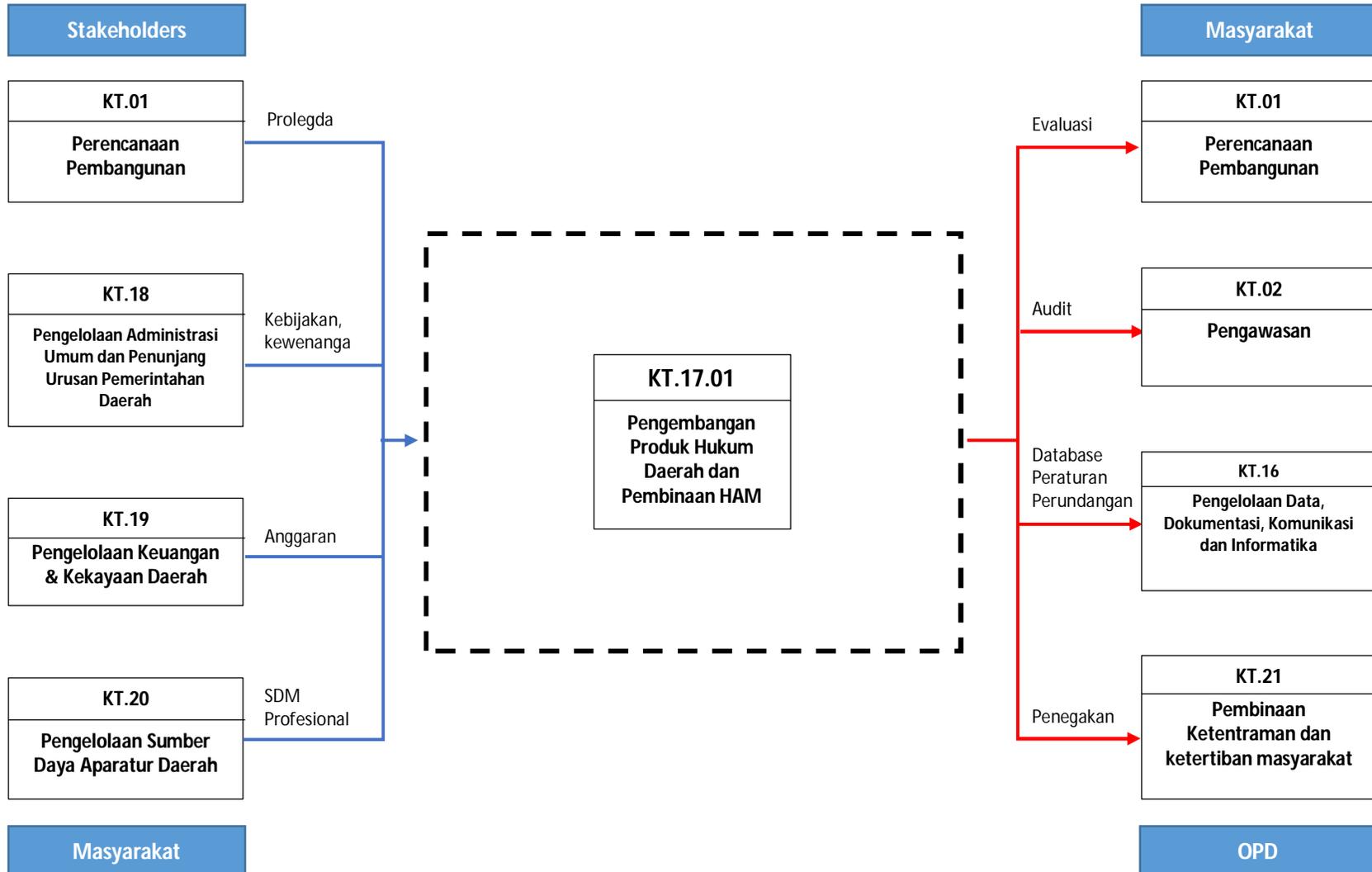
Peta Subproses

KT.16. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Komunikasi dan Informatika



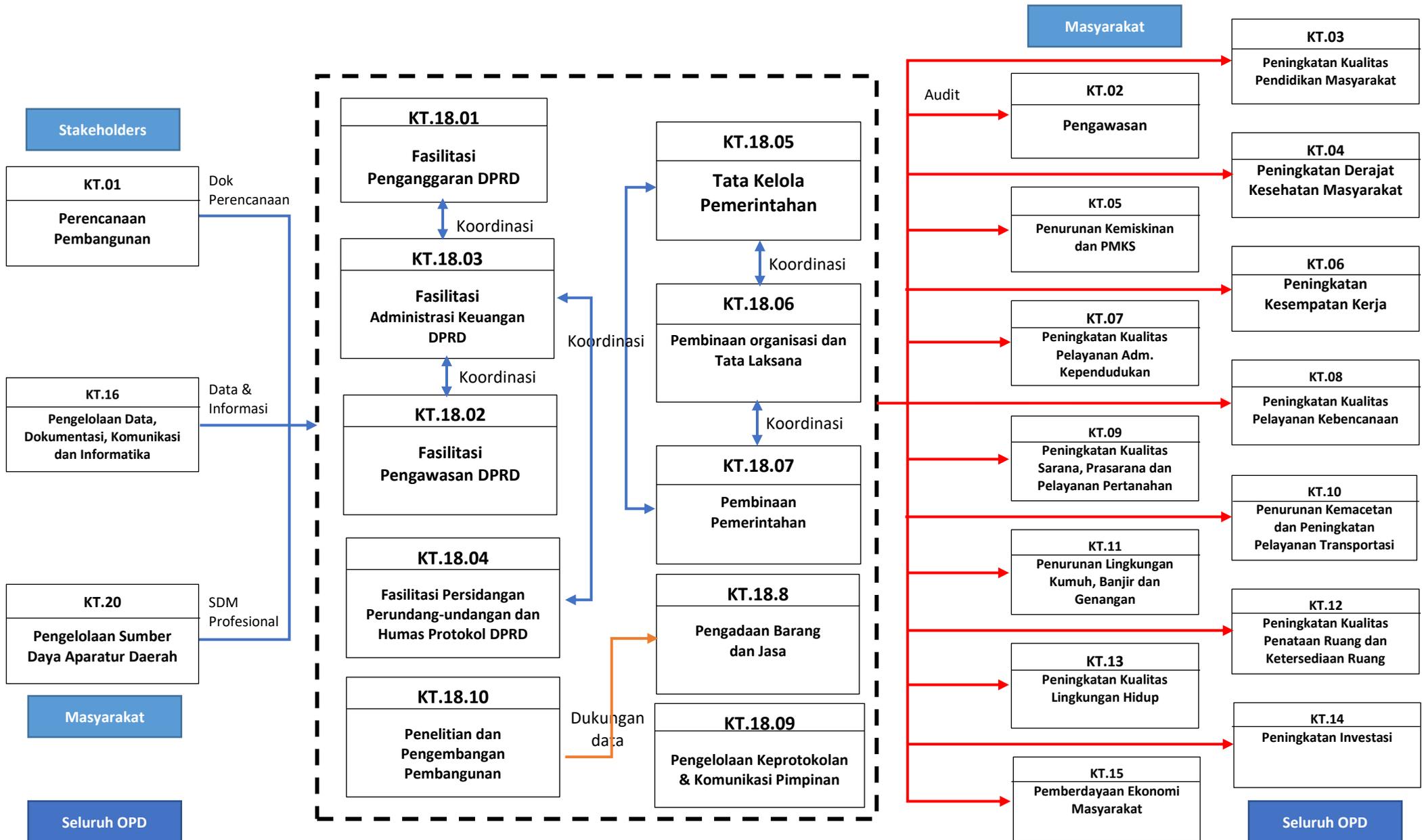
Peta Subproses

KT.17. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan

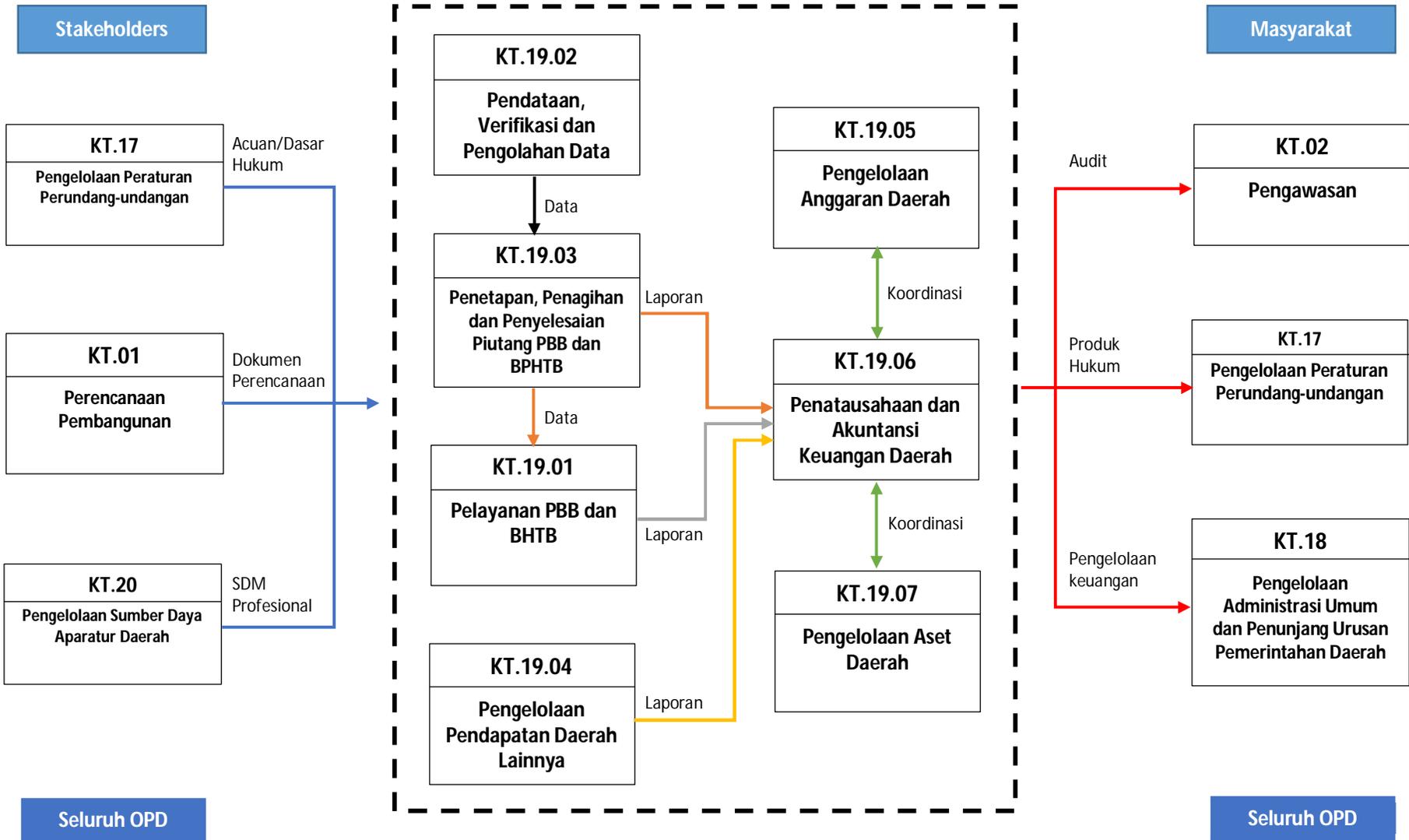


Peta Subproses

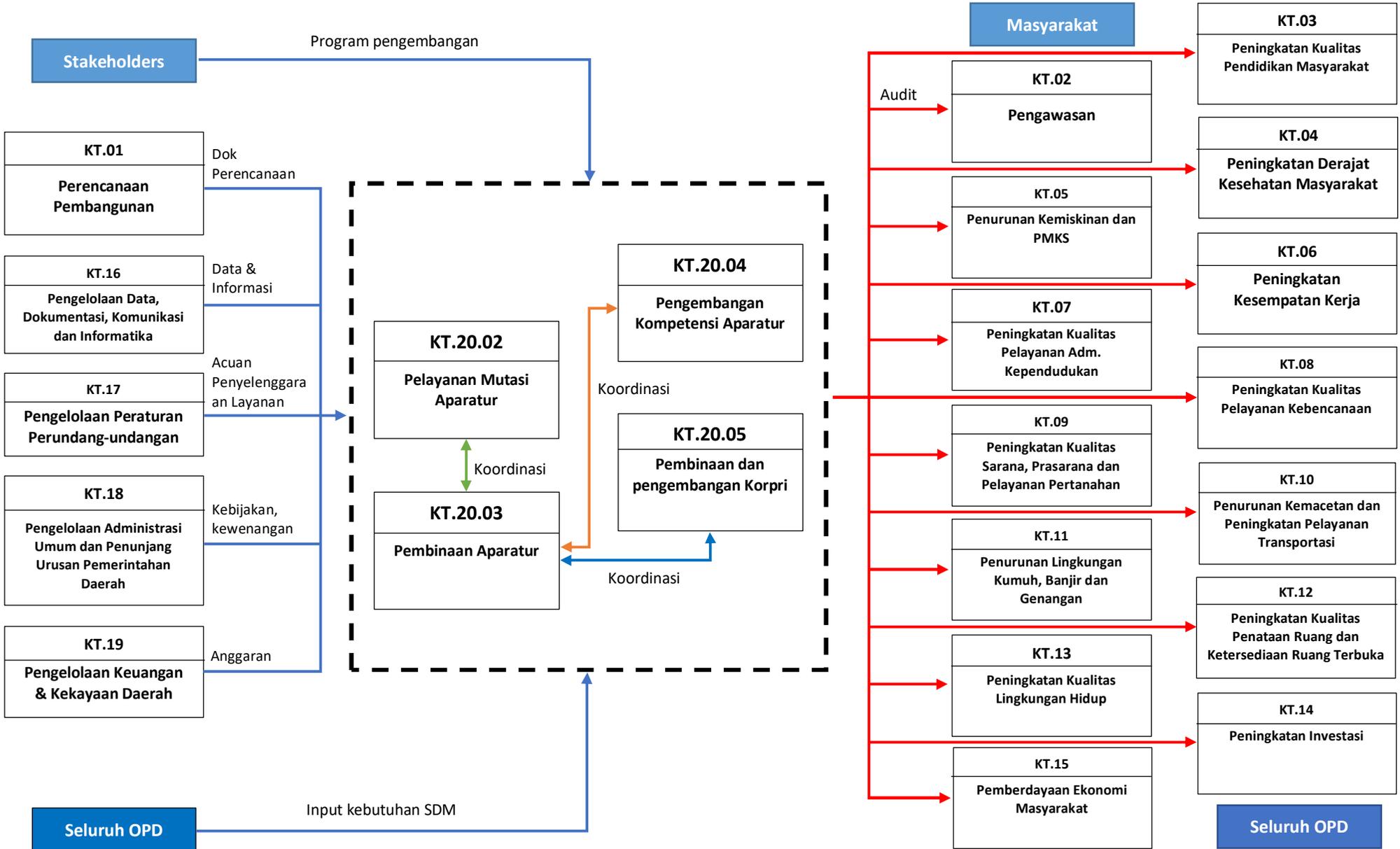
KT.18. Pengelolaan Administrasi Umum dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



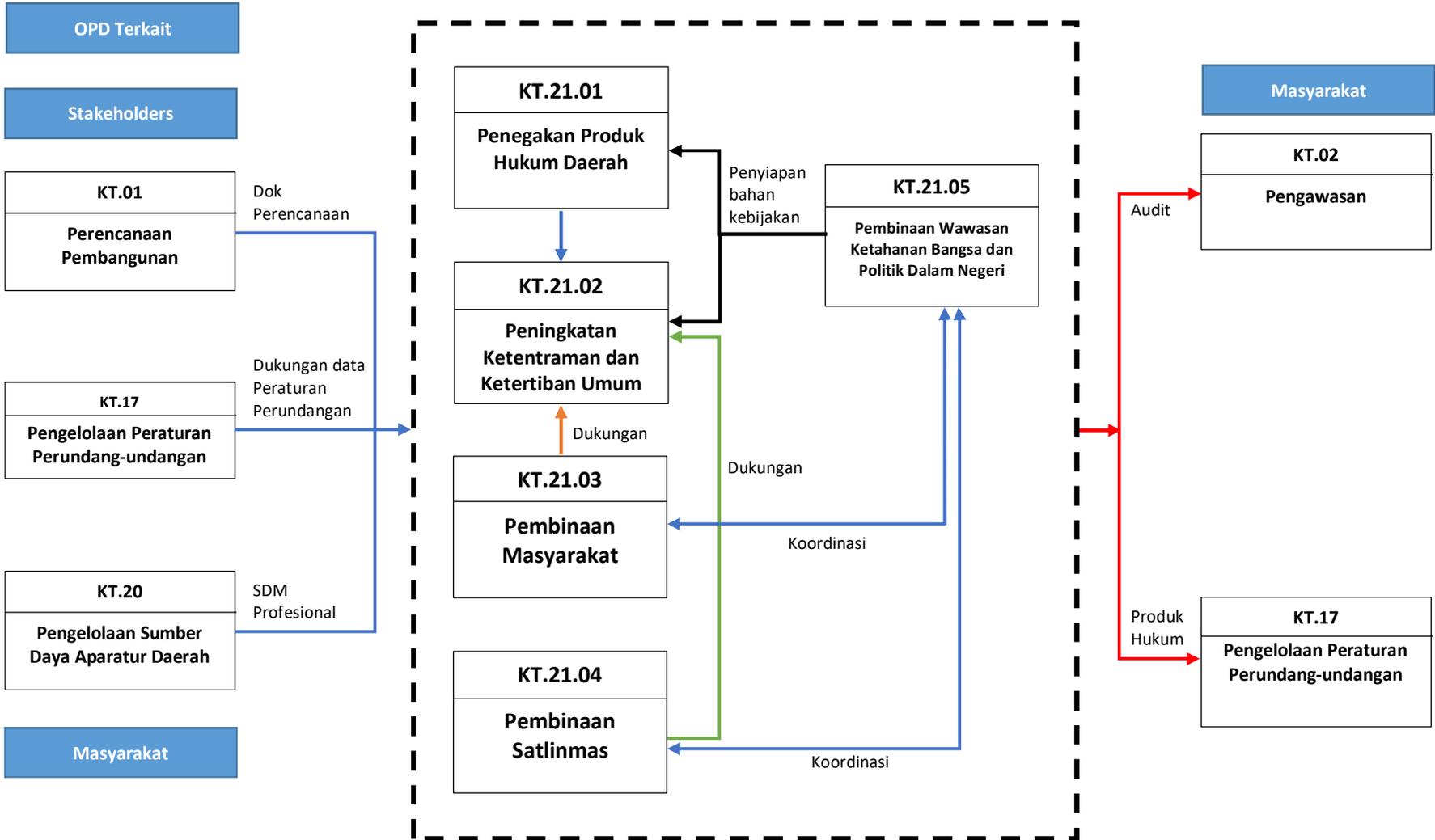
Peta Subproses KT.19. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



Peta Subproses KT.20. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah

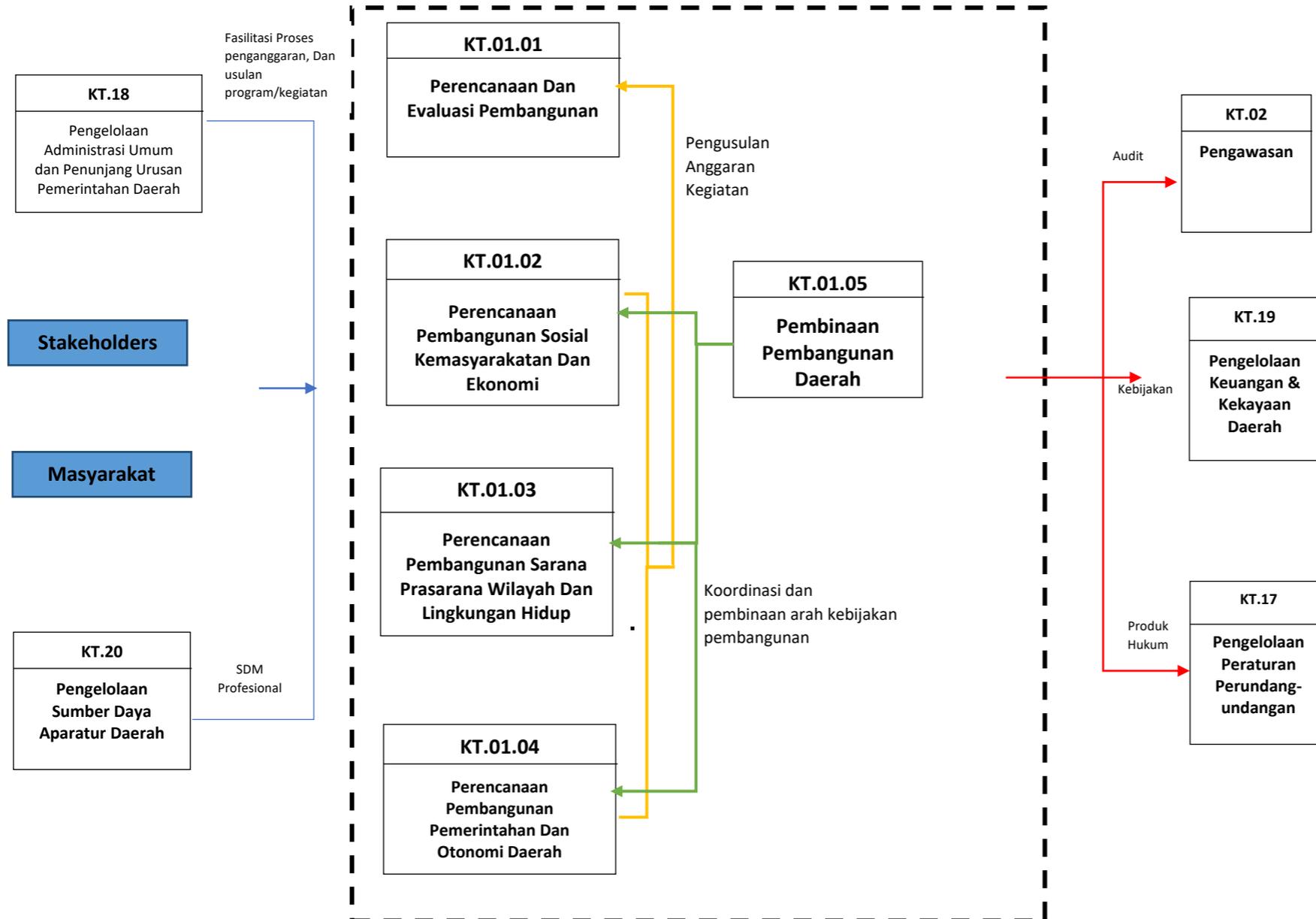


Peta Subproses KT.21. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat



B. PETA SUB PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Peta Subproses KT.01. Perencanaan Pembangunan



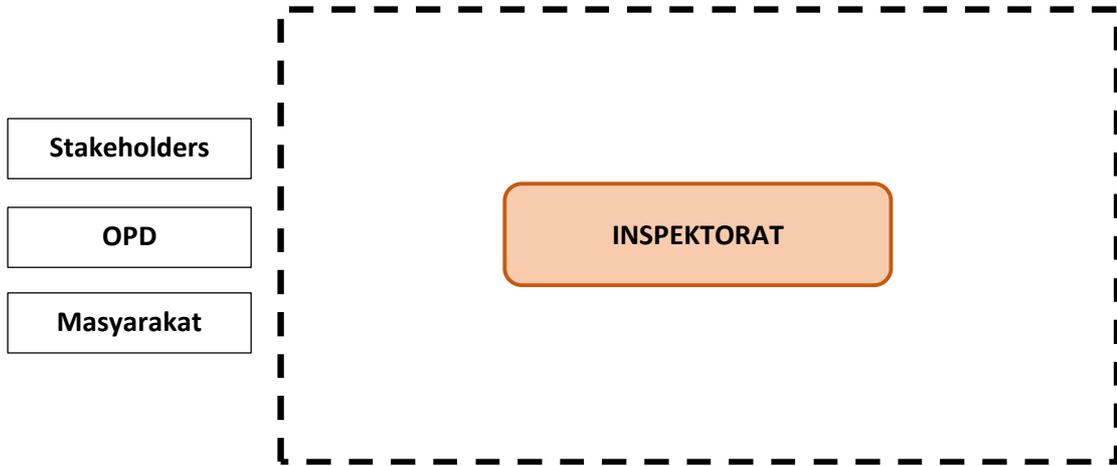
Peta Relasi

KT.01. Perencanaan Pembangunan



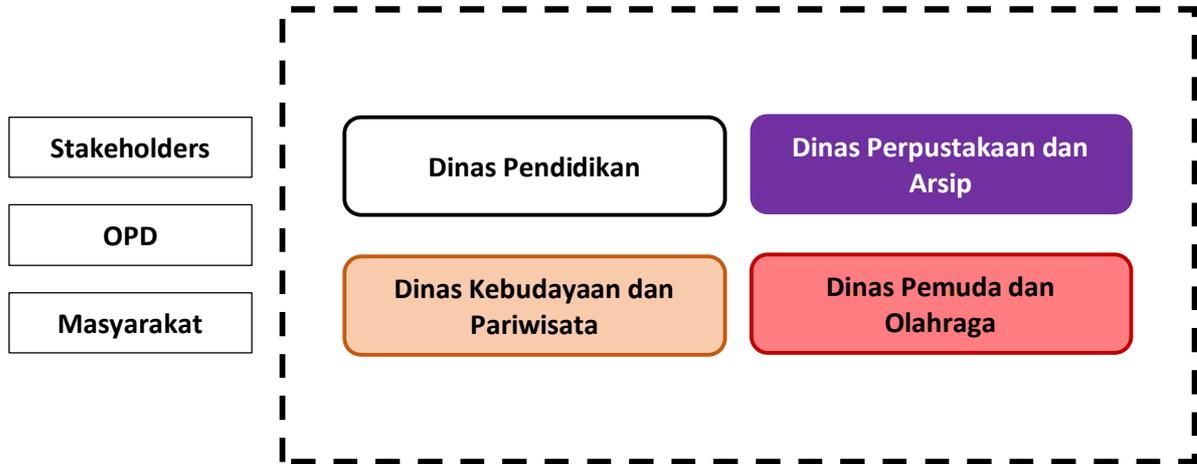
Peta Relasi

KT.02. Pengawasan

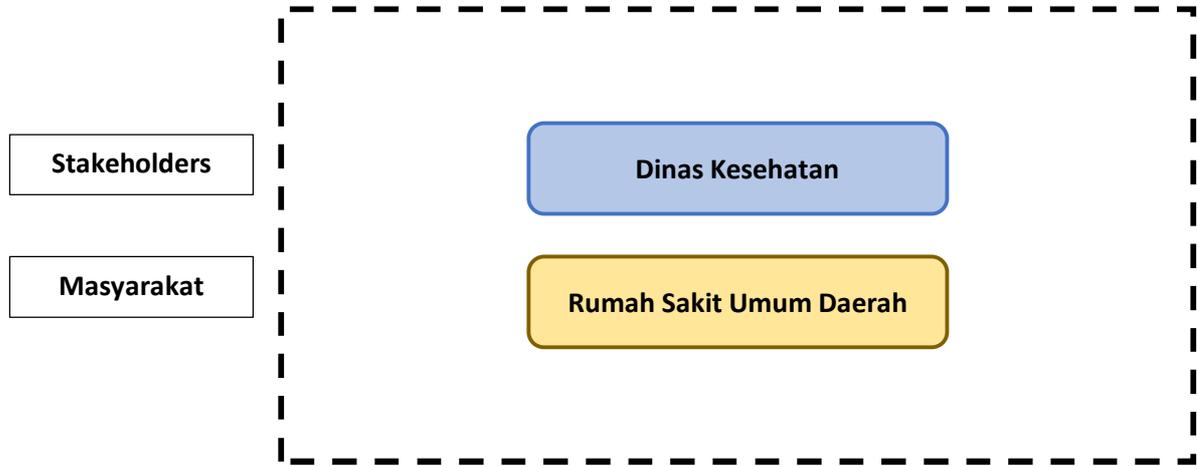


Peta Relasi

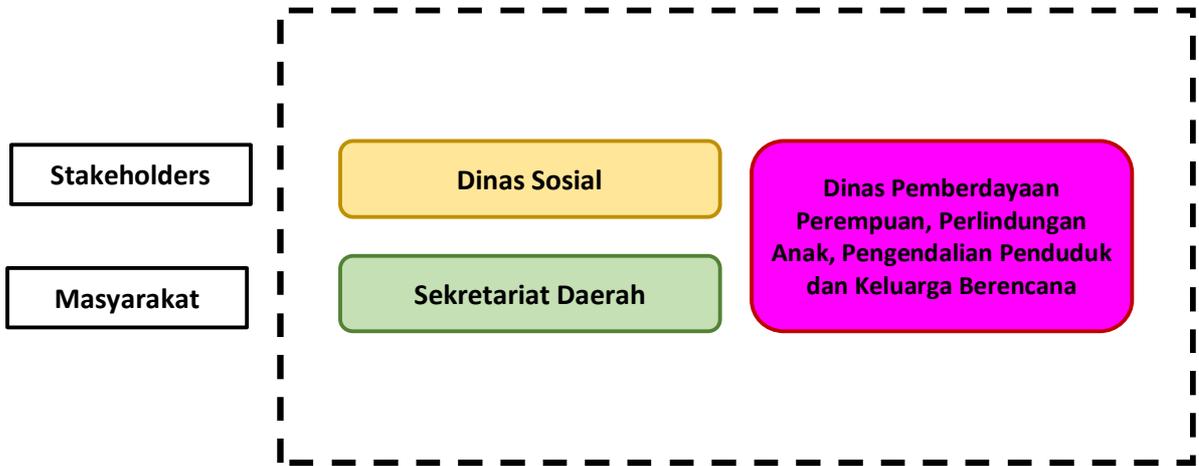
KT.03. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat



Peta Relasi
KT.04. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat



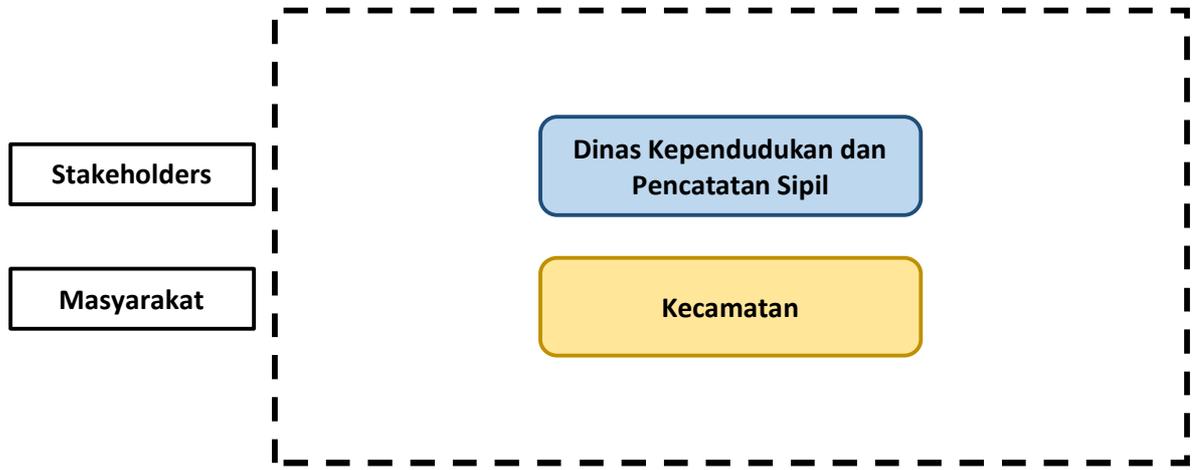
Peta Relasi
KT.05. Penurunan Kemiskinan dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial



Peta Relasi
KT.06. Peningkatan Kesempatan Kerja



Peta Relasi
KT.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan



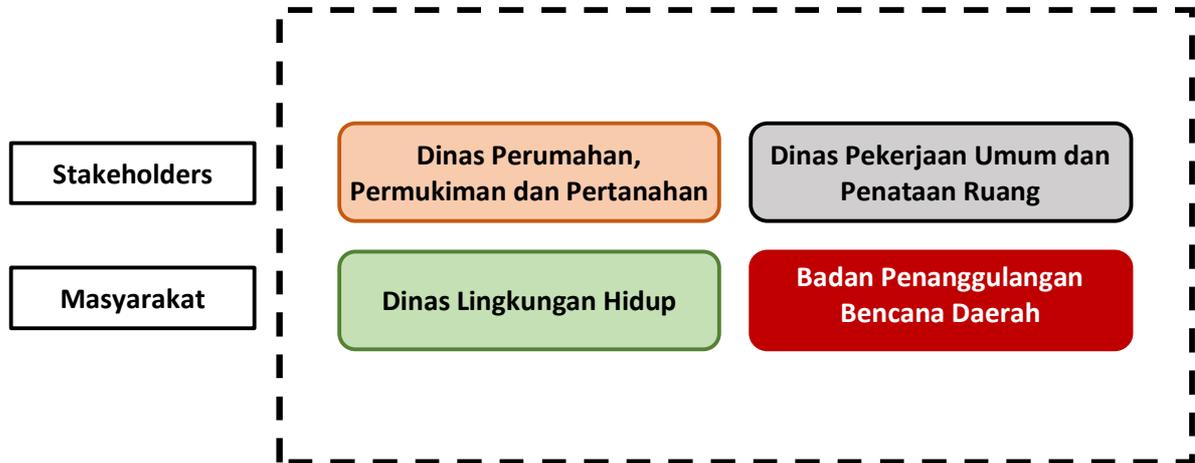
Peta Relasi

KT.08. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebencanaan



Peta Relasi

KT.09. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Pelayanan Pertanahan



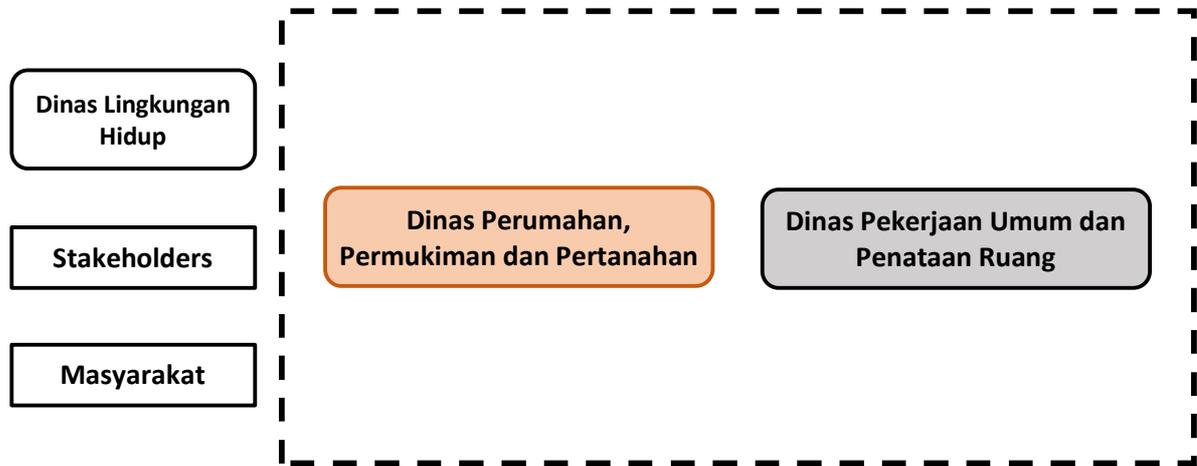
Peta Relasi

KT.10. Penurunan Kemacetan dan Peningkatan Pelayanan Transportasi

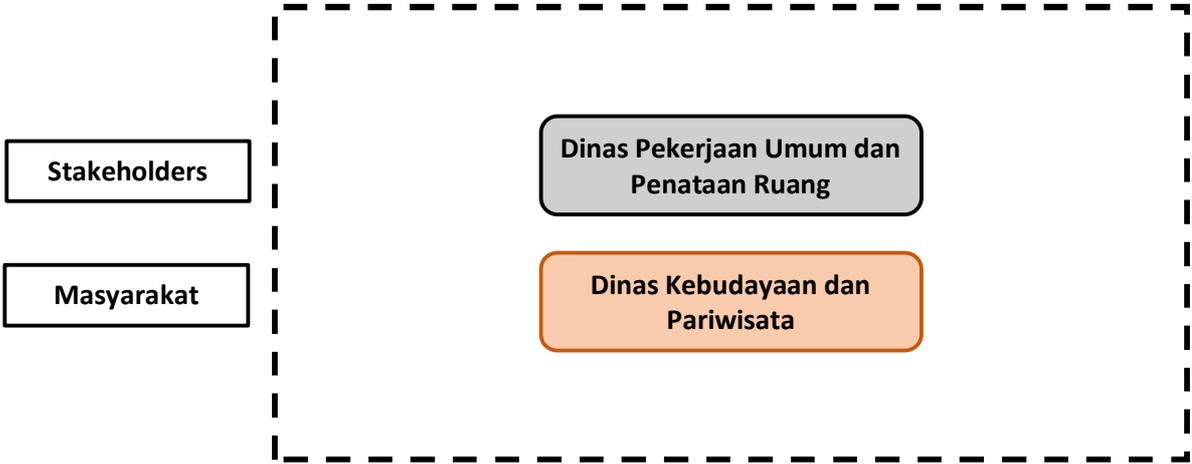


Peta Relasi

KT.11. Penurunan Lingkungan Kumuh, Banjir Dan Genangan



Peta Relasi
KT.12. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan
Ketersediaan Ruang Terbuka



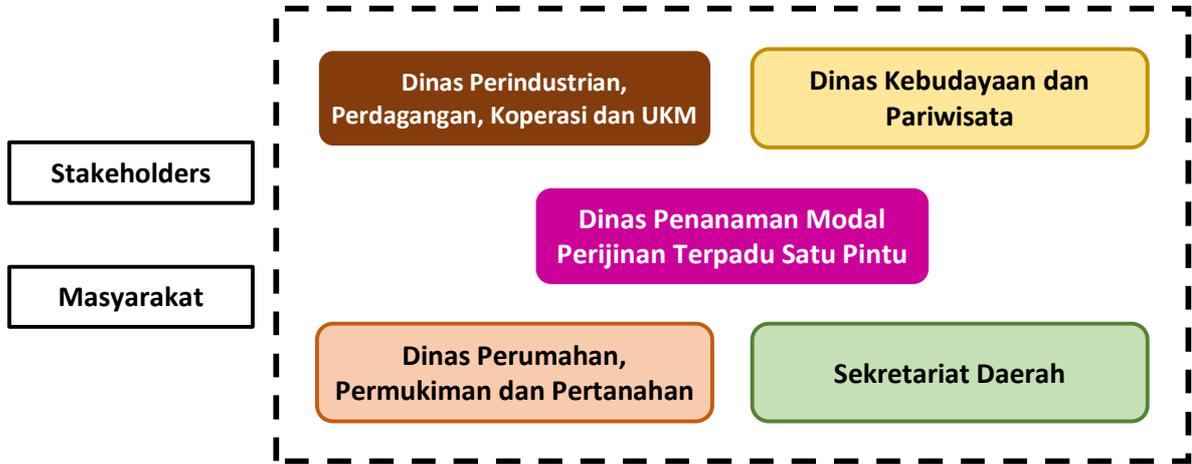
Peta Relasi

KT.13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup



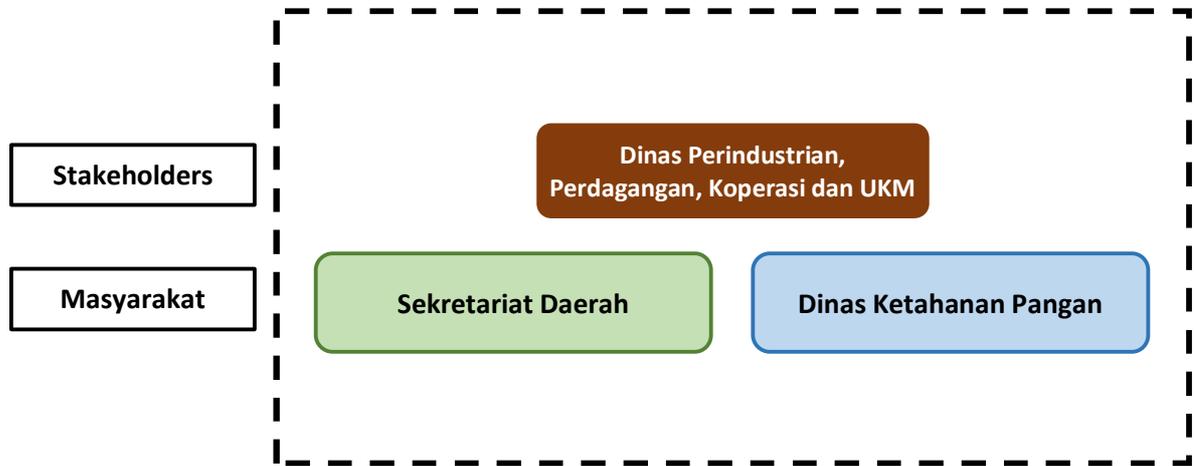
Peta Relasi

KT.14. Peningkatan Investasi

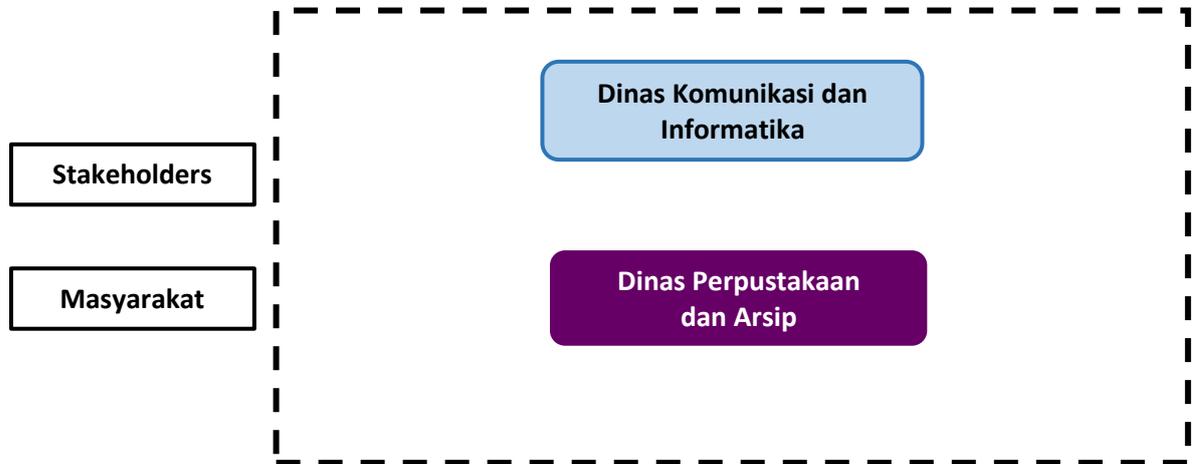


Peta Relasi

KT.15. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



Peta Relasi
KT.16. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Komunikasi dan Informatika

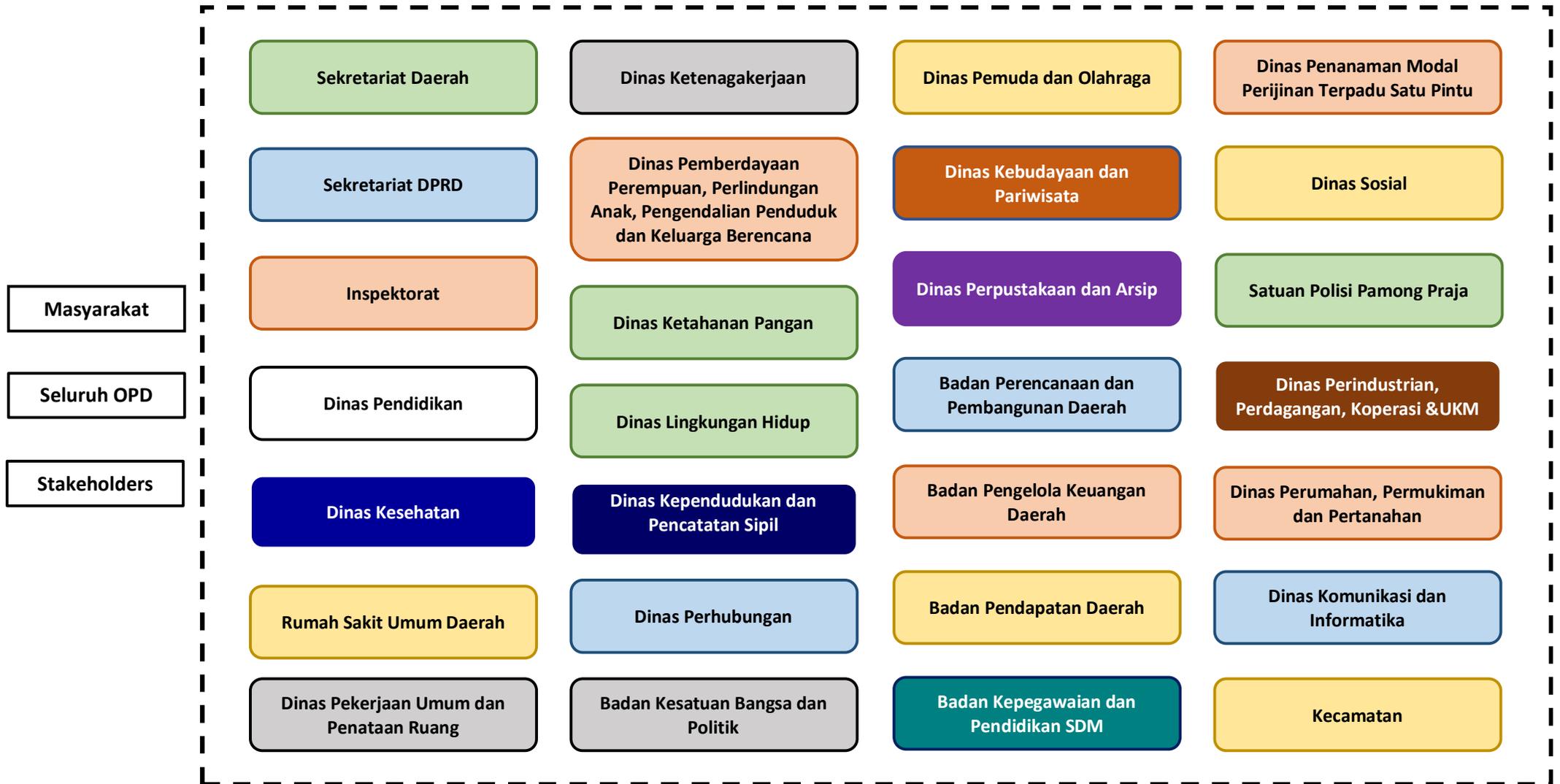


Peta Relasi
KT.17. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan



Peta Relasi

KT.18. Pengelolaan Administrasi Umum dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Peta Relasi

KT.19. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



Peta Relasi
KT.20. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah



Peta Relasi

KT.21. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

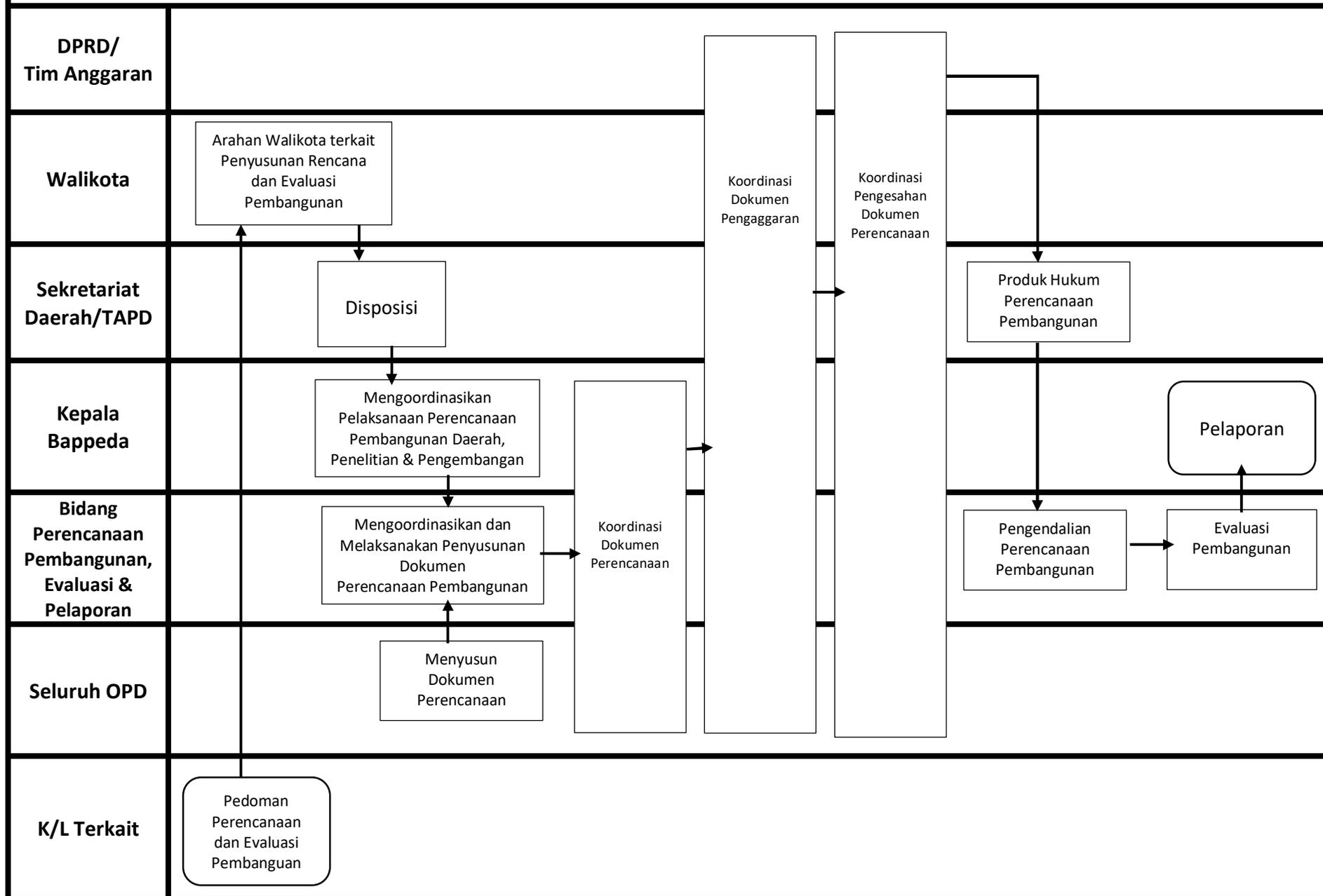


C. PETA RELASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

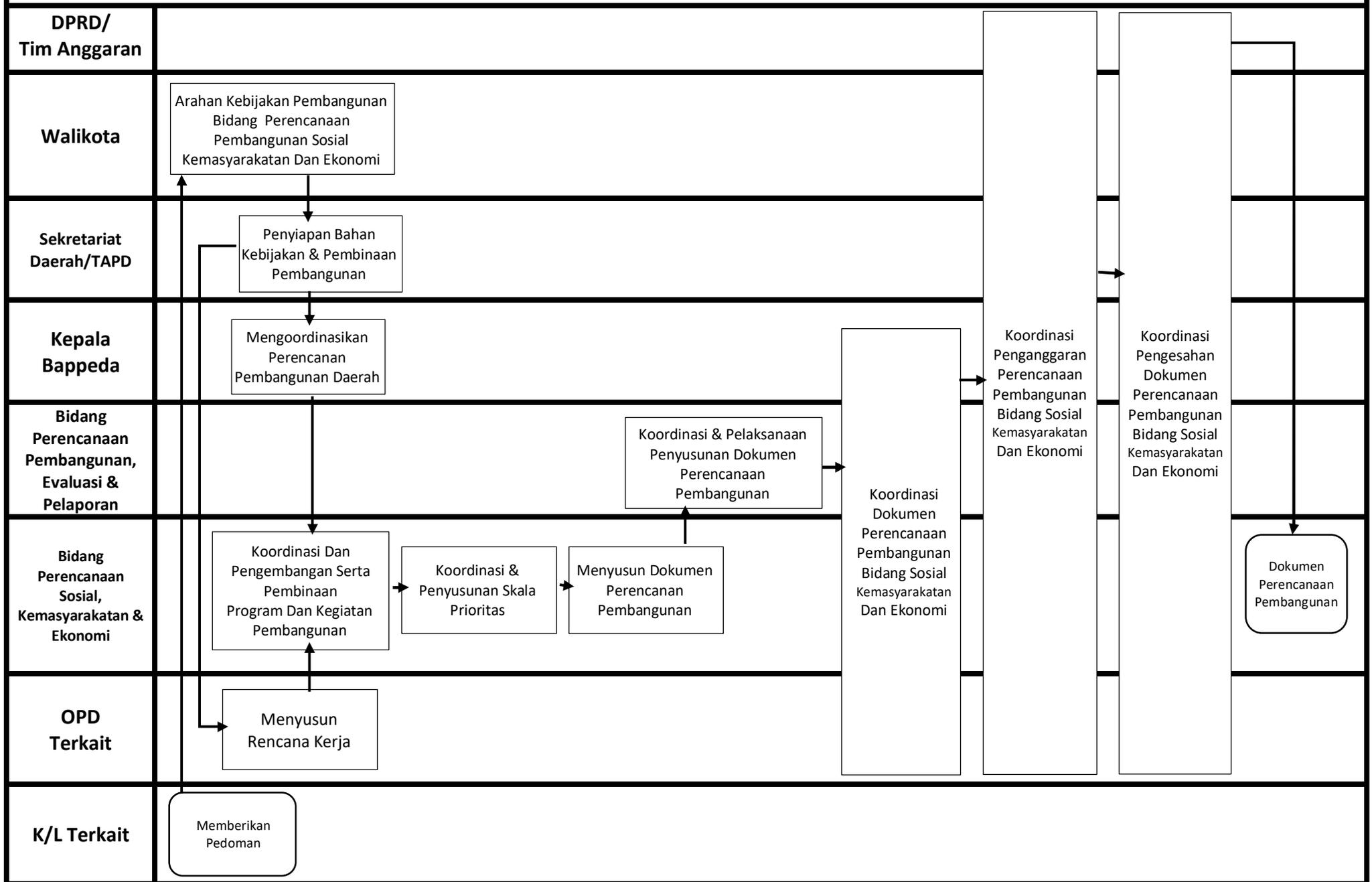
Peta Relasi KT.01. Perencanaan Pembangunan



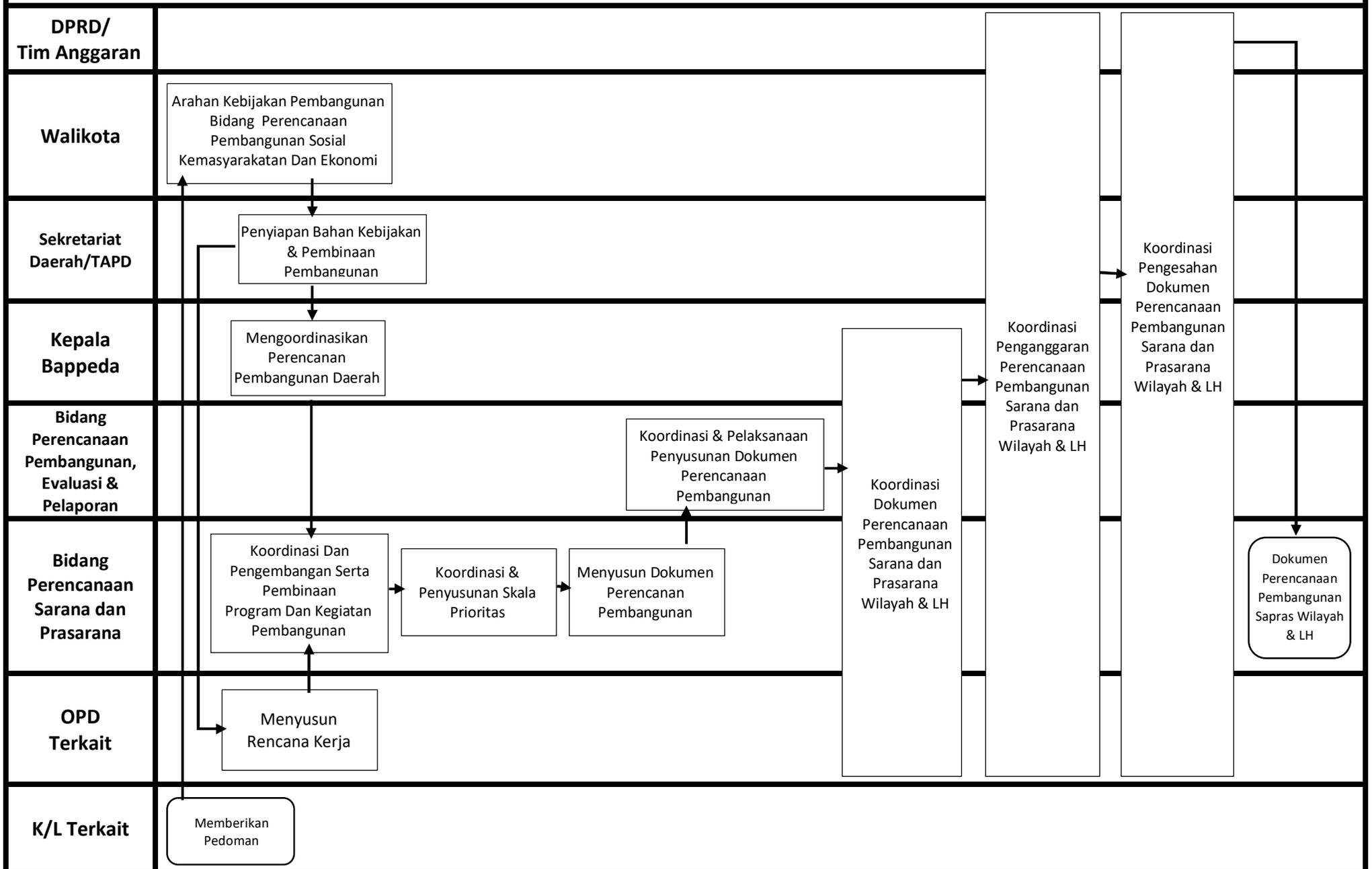
KT.01.01 : Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan



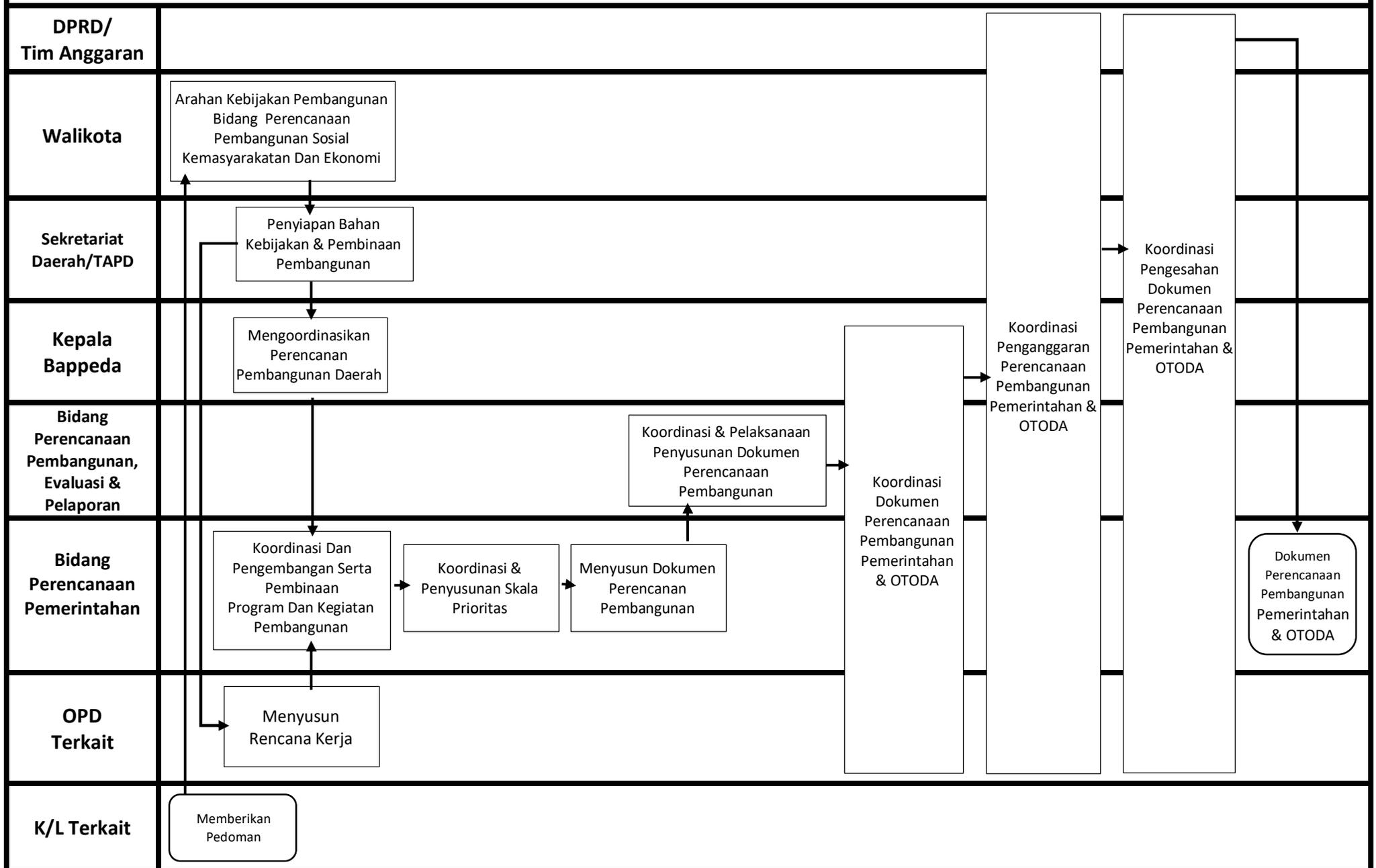
KT.01.02 : Perencanaan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Dan Ekonomi



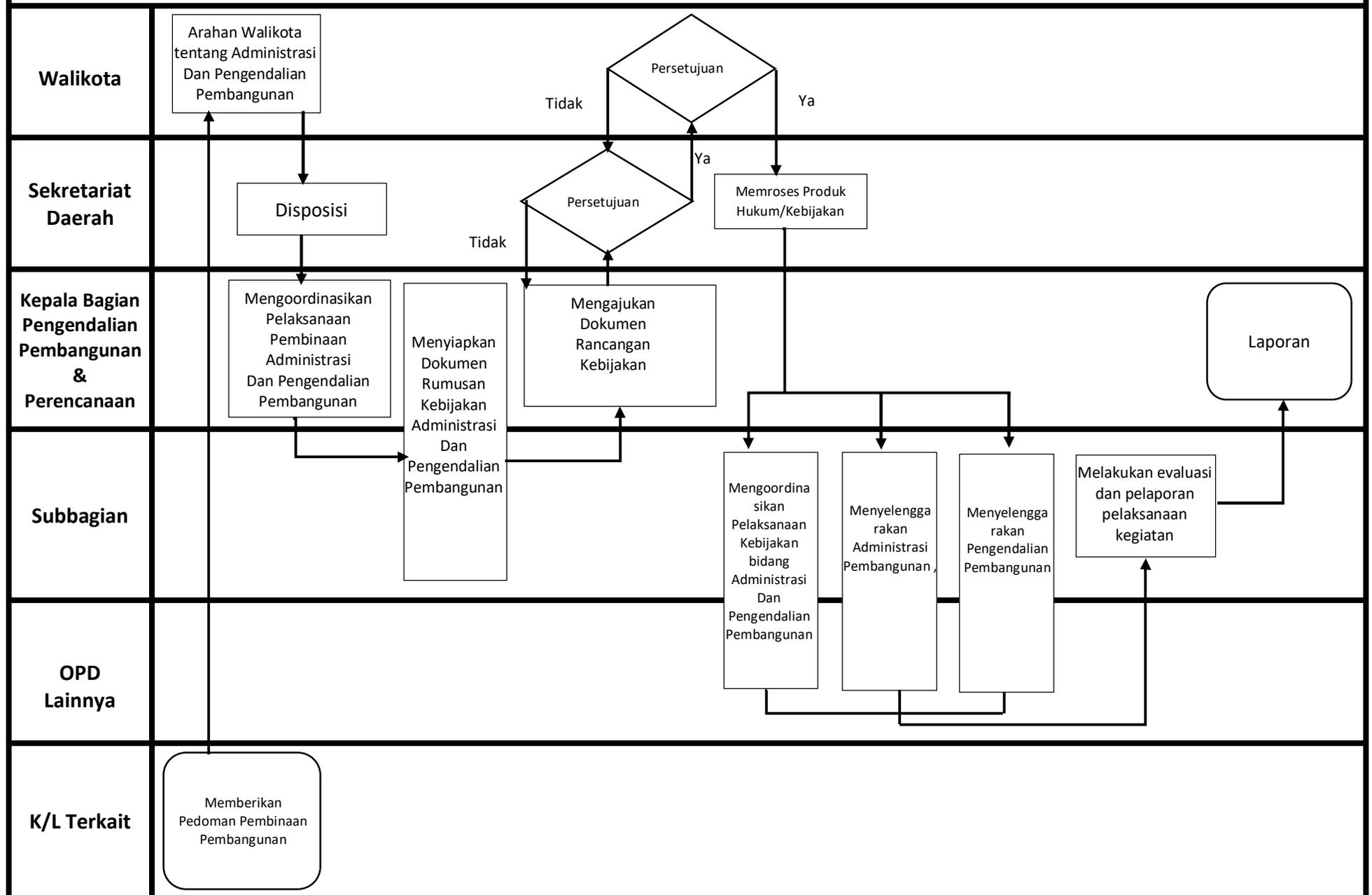
KT.01.03 : Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup



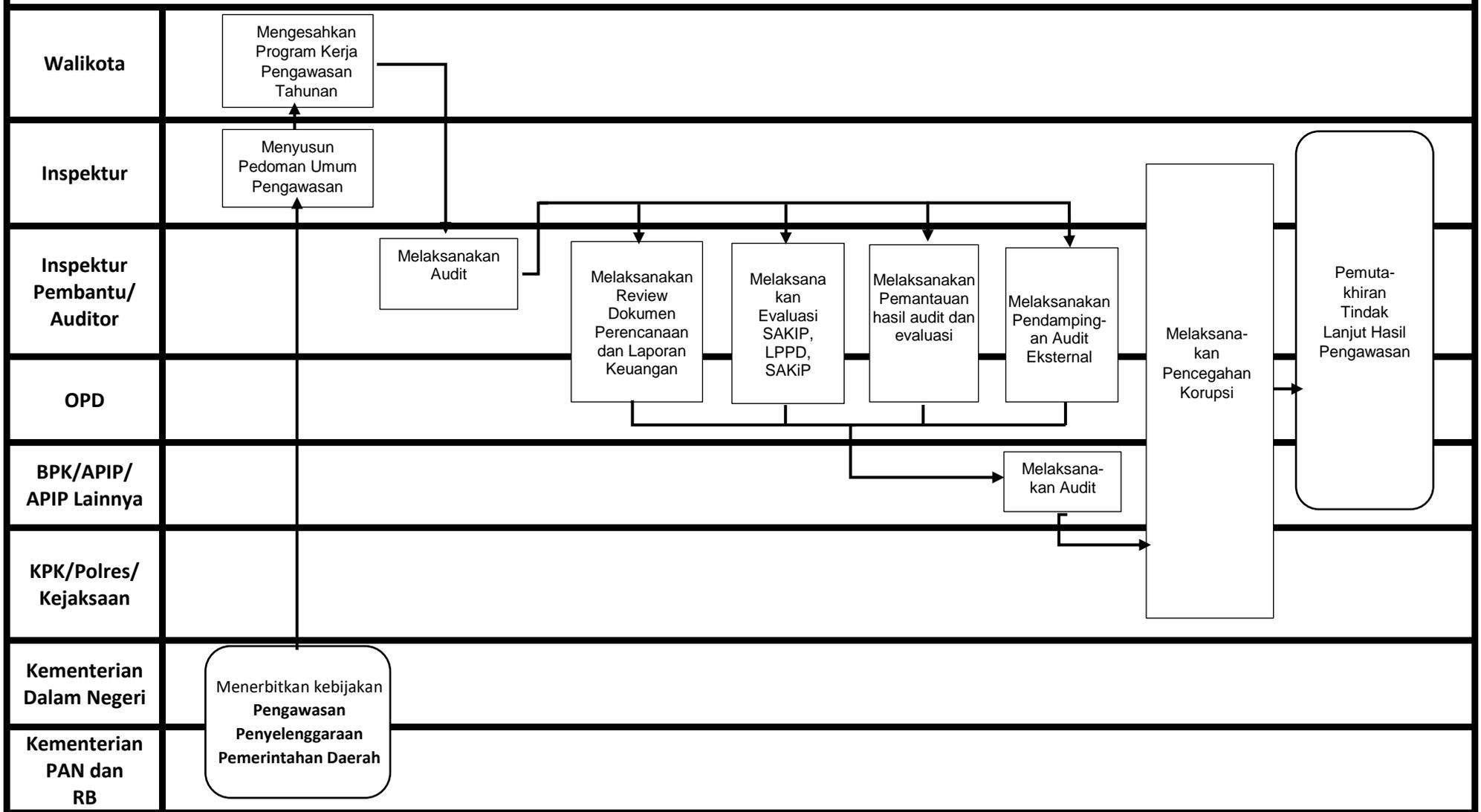
KT.01.04 : Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah



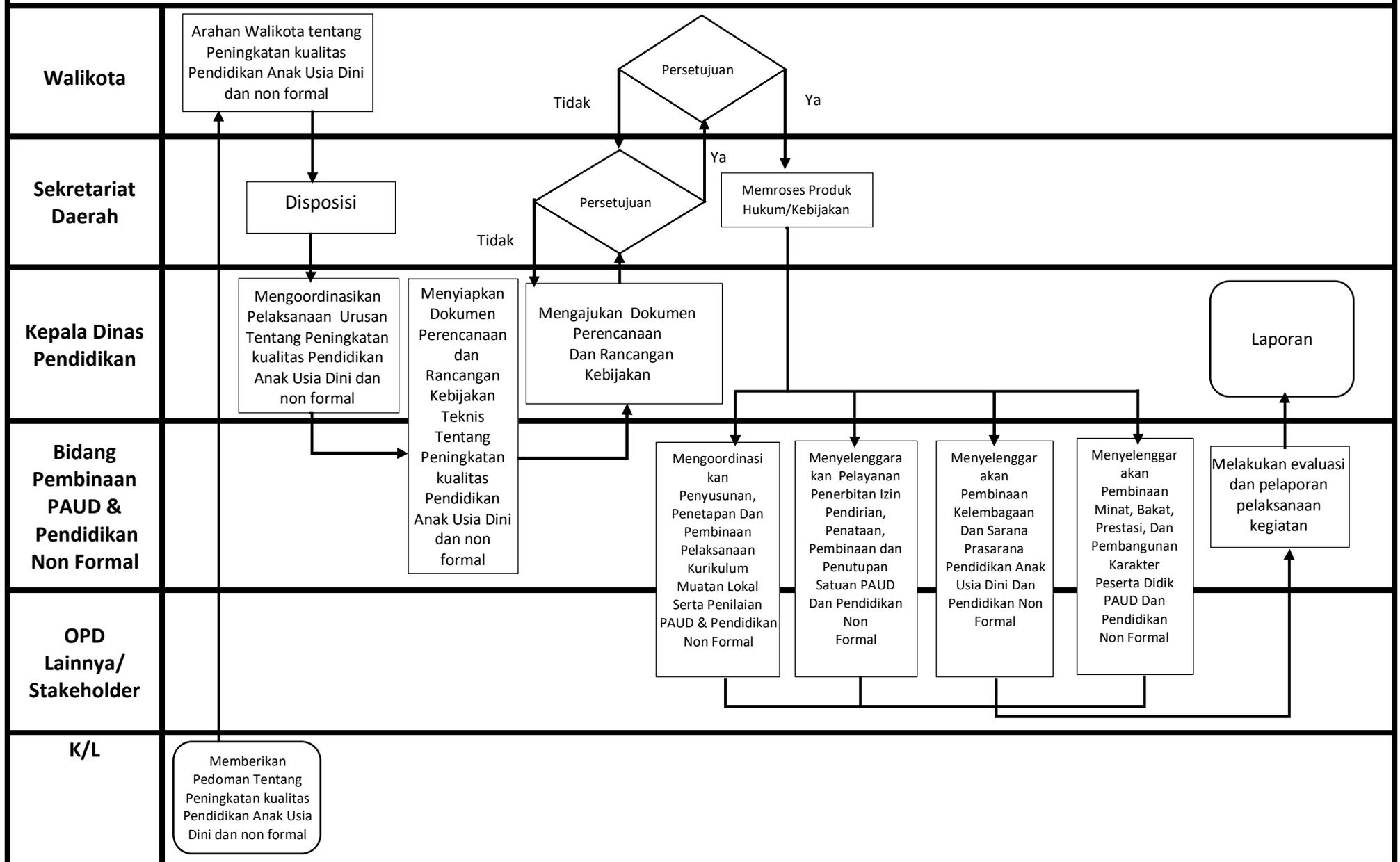
KT.01.05 : Pembinaan Pembangunan Daerah



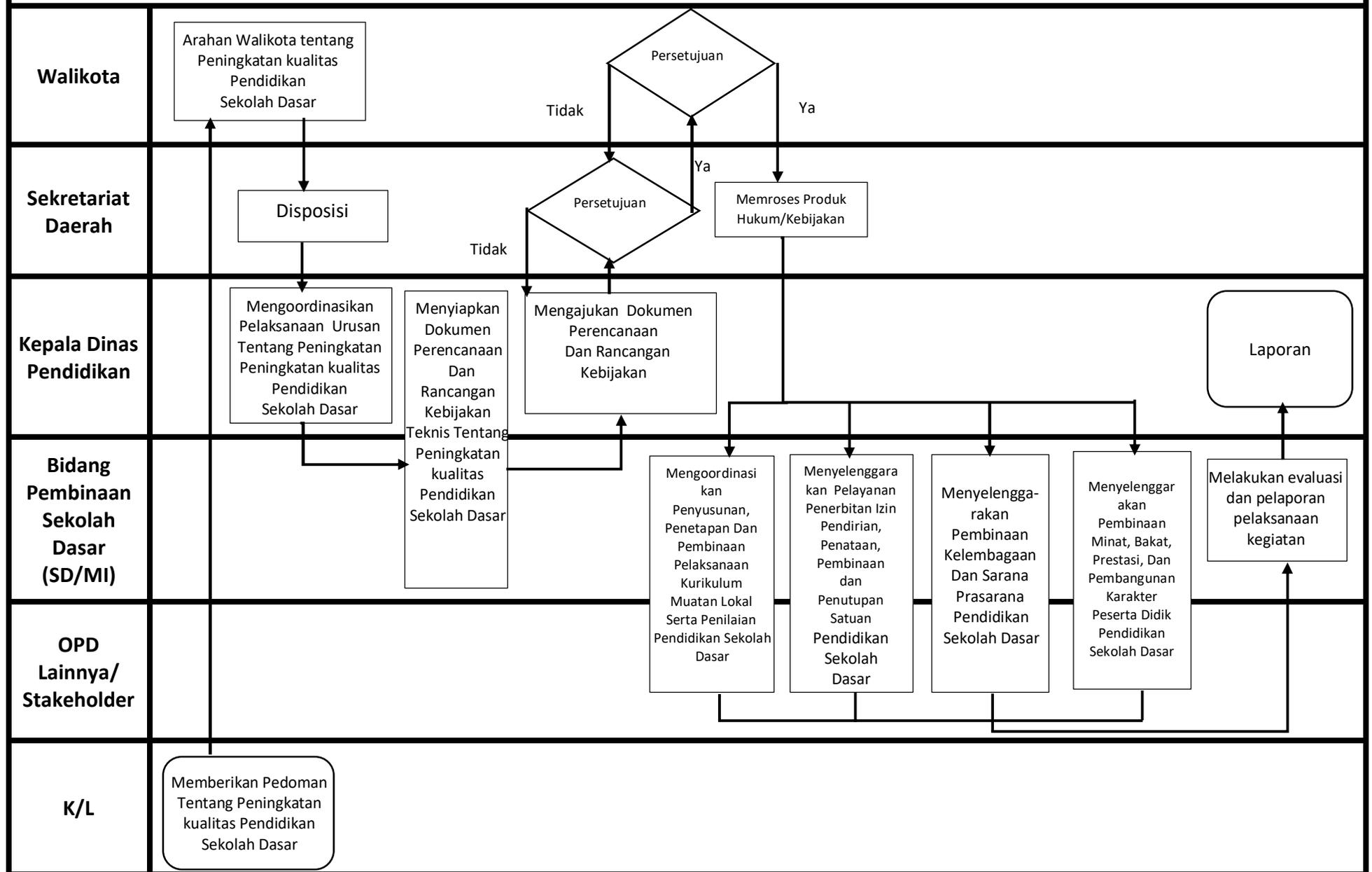
KT.02.01: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



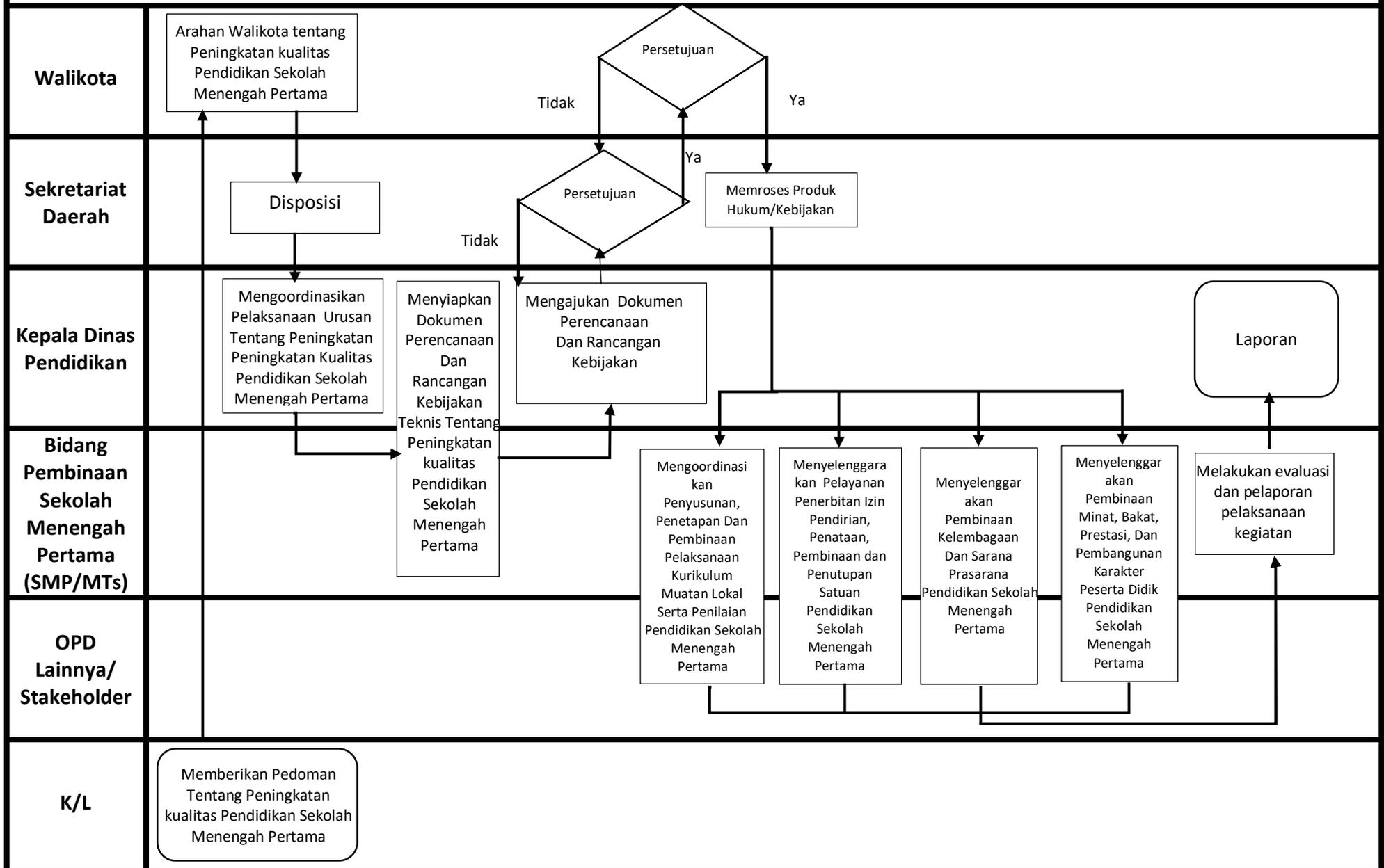
KT.03.01 : Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal



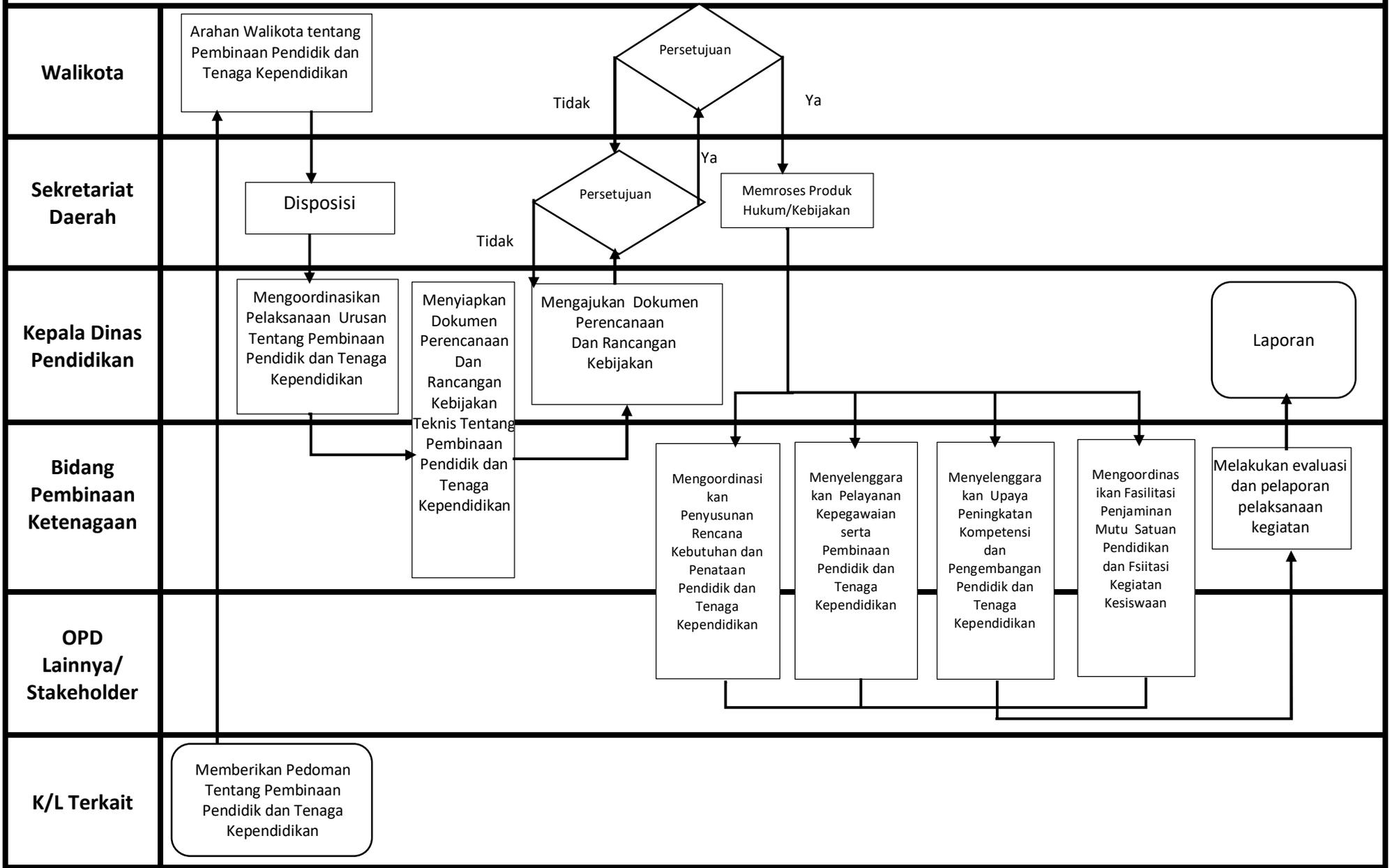
KT.03.02 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar



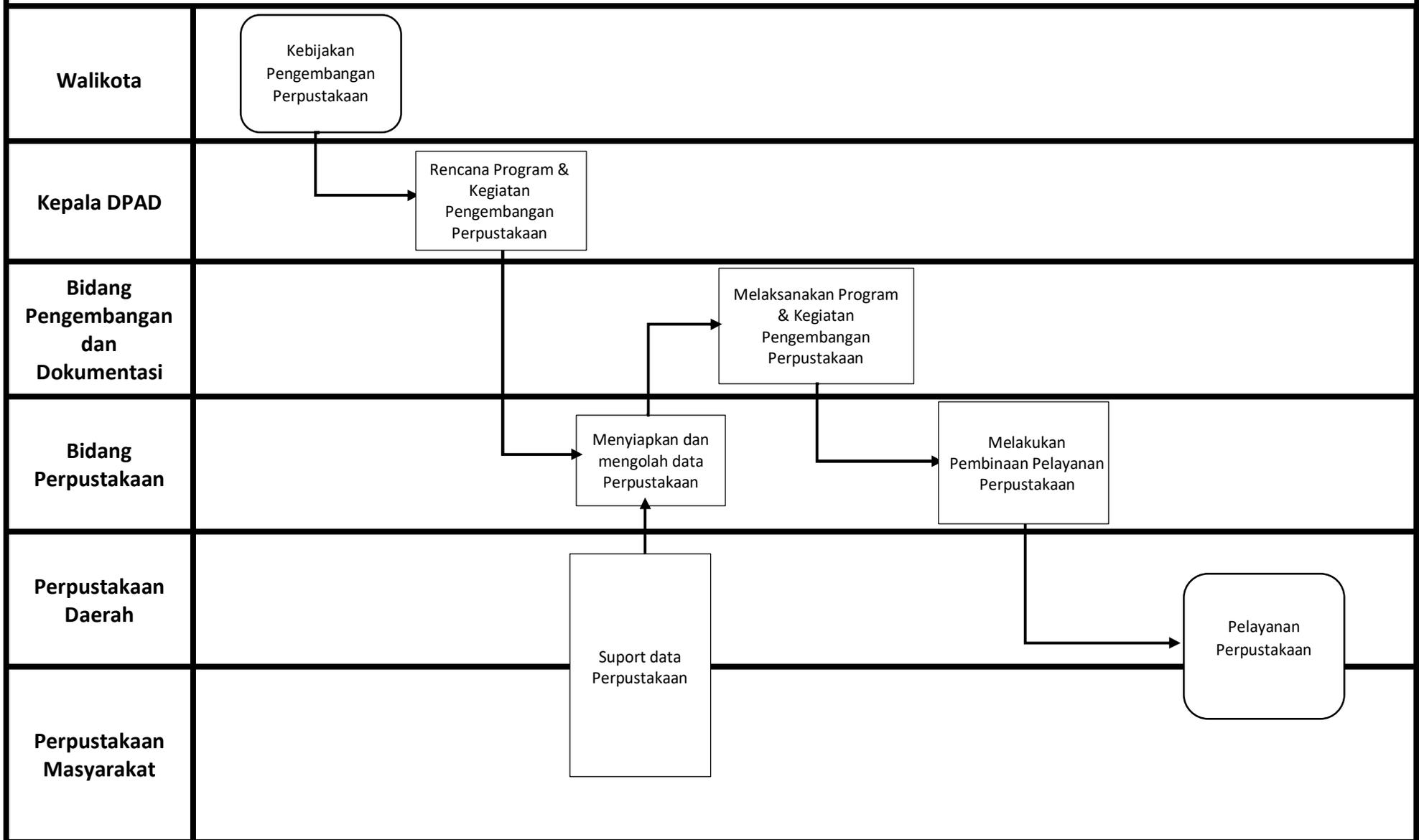
KT.03.03 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



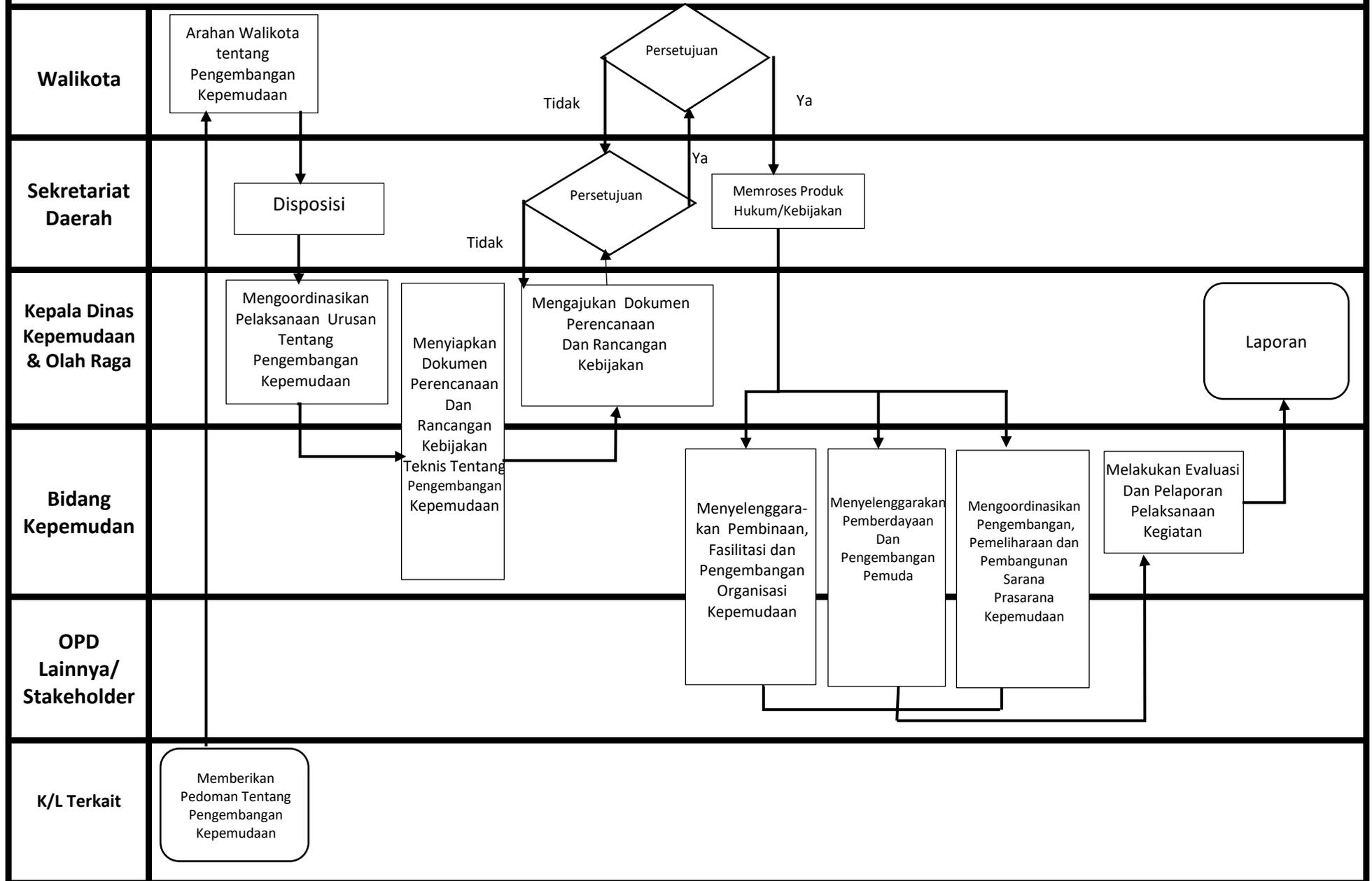
KT.03.04 : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



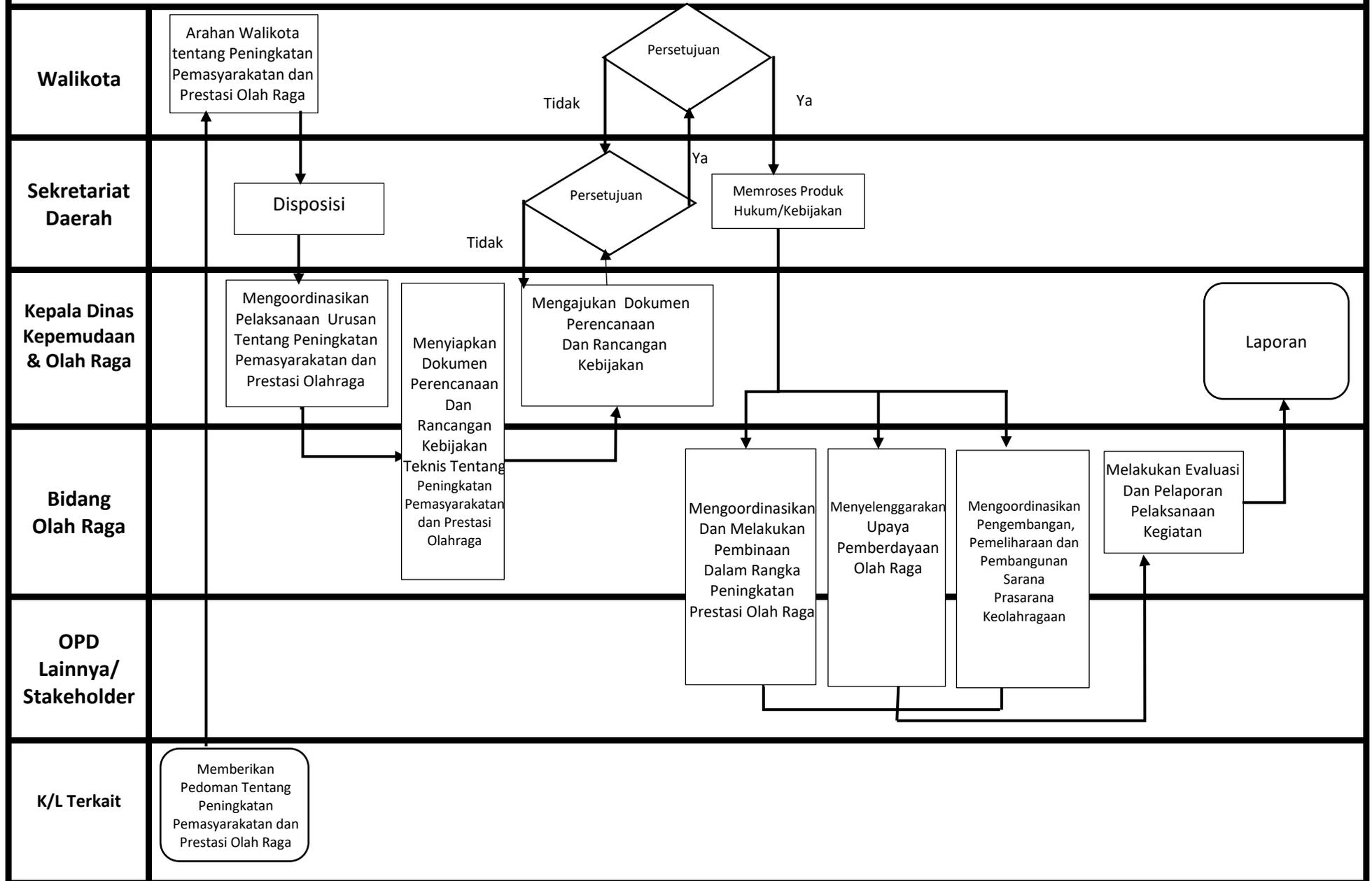
KT.03.05 : Pengembangan Perpustakaan



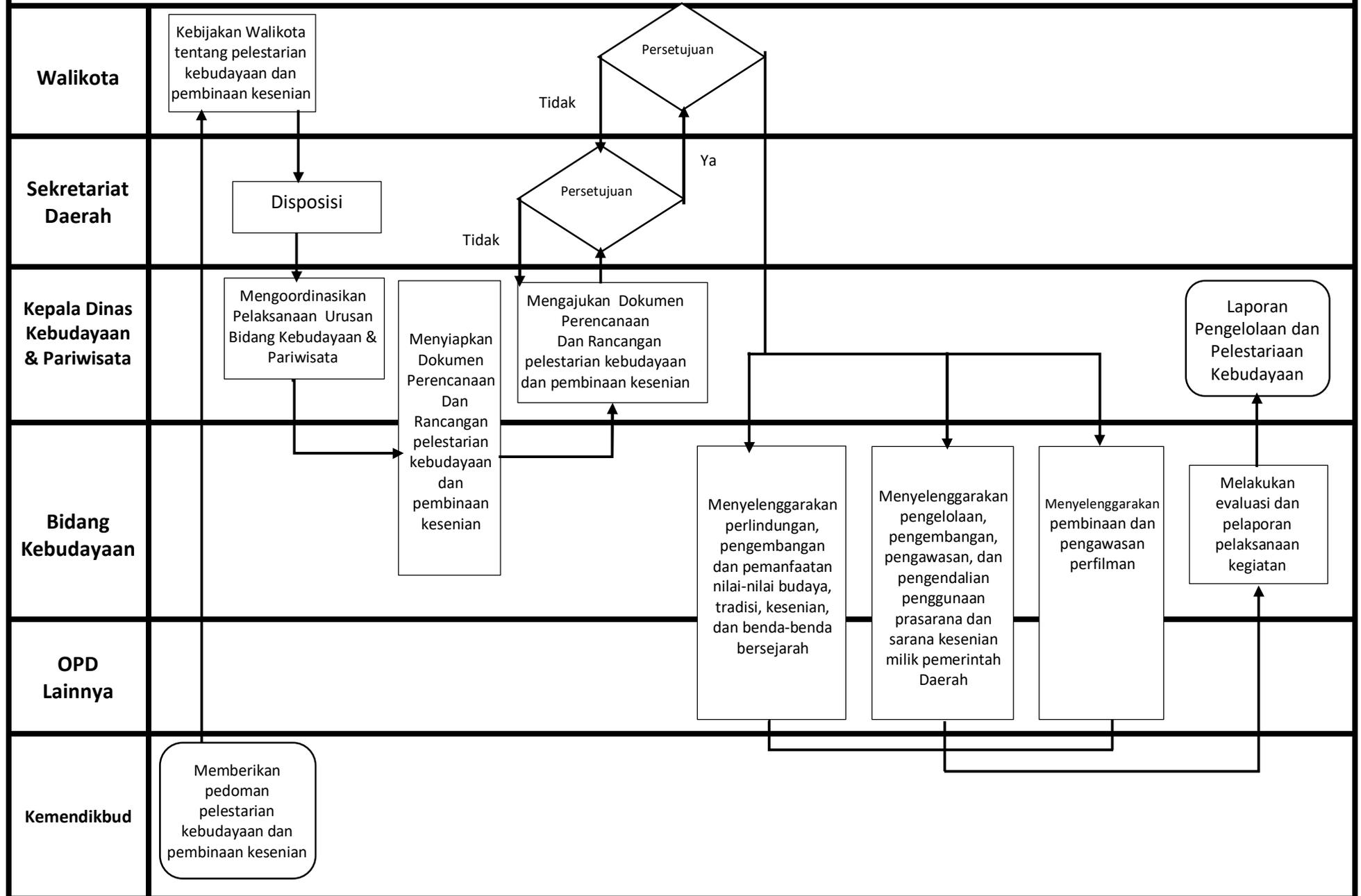
KT.03.06 : Pengembangan Kepemudaan



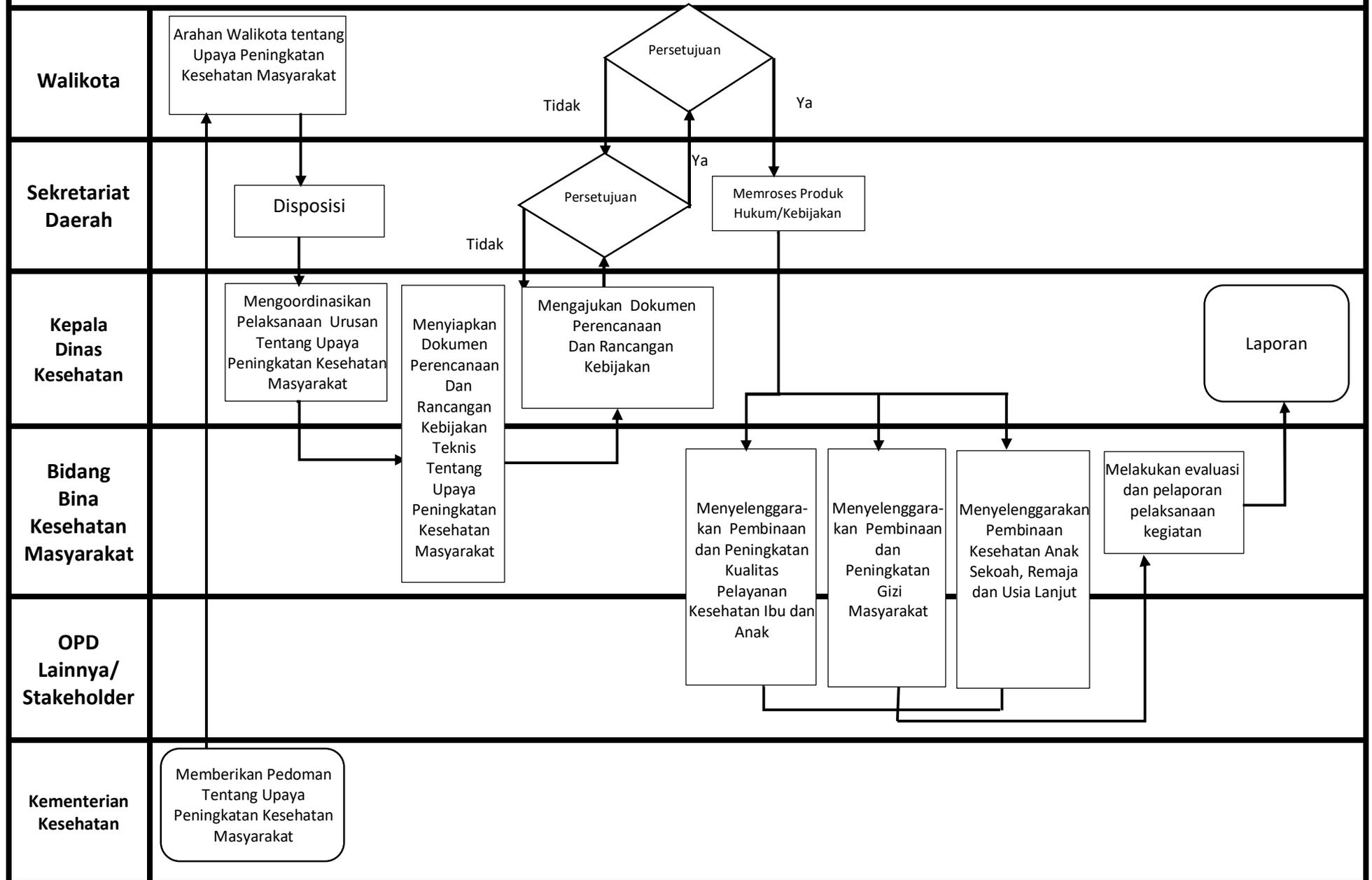
KT.03.07 : Peningkatan Pemasarakatan dan Prestasi Olah Raga



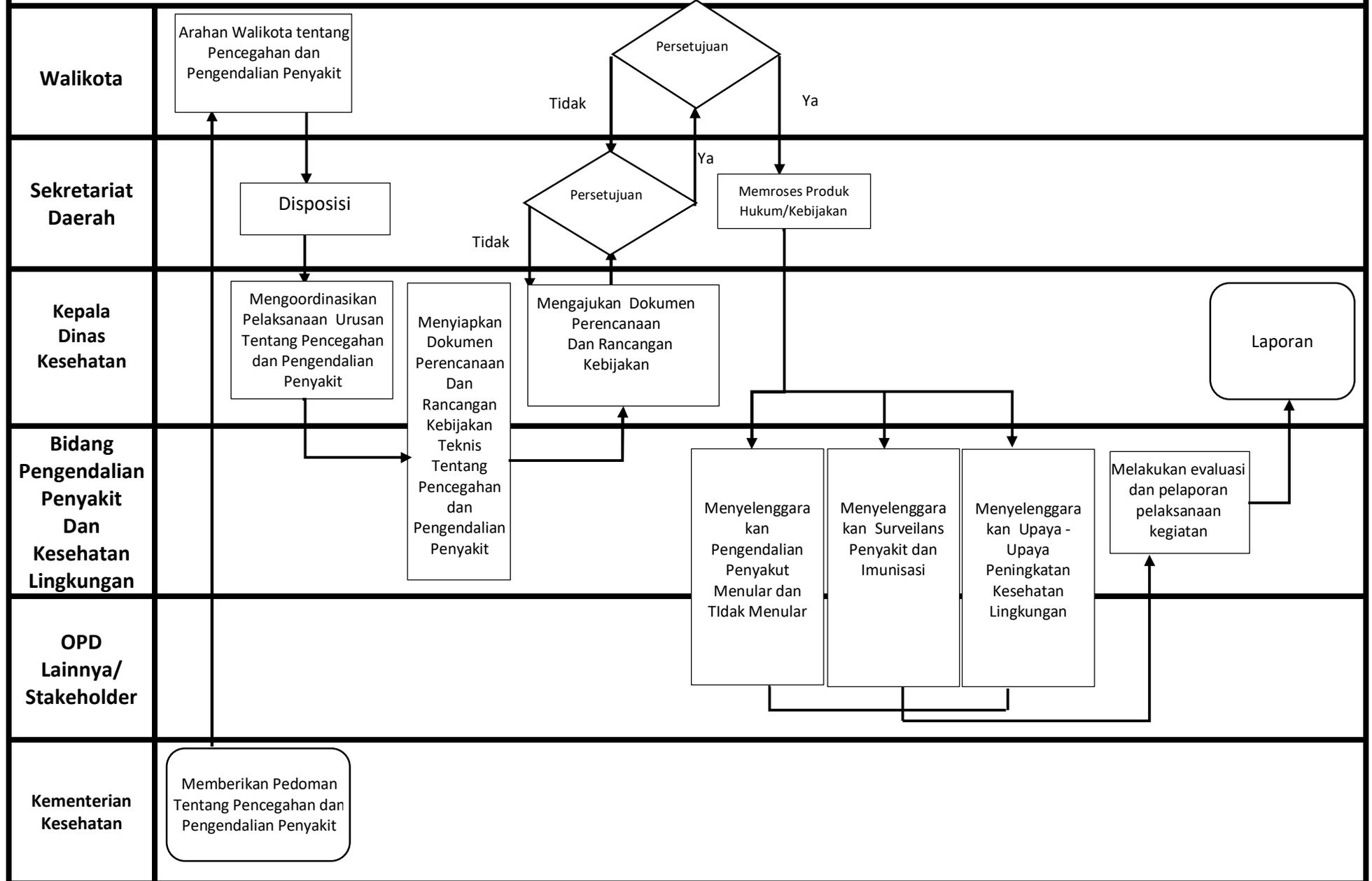
KT.03.08 : Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan



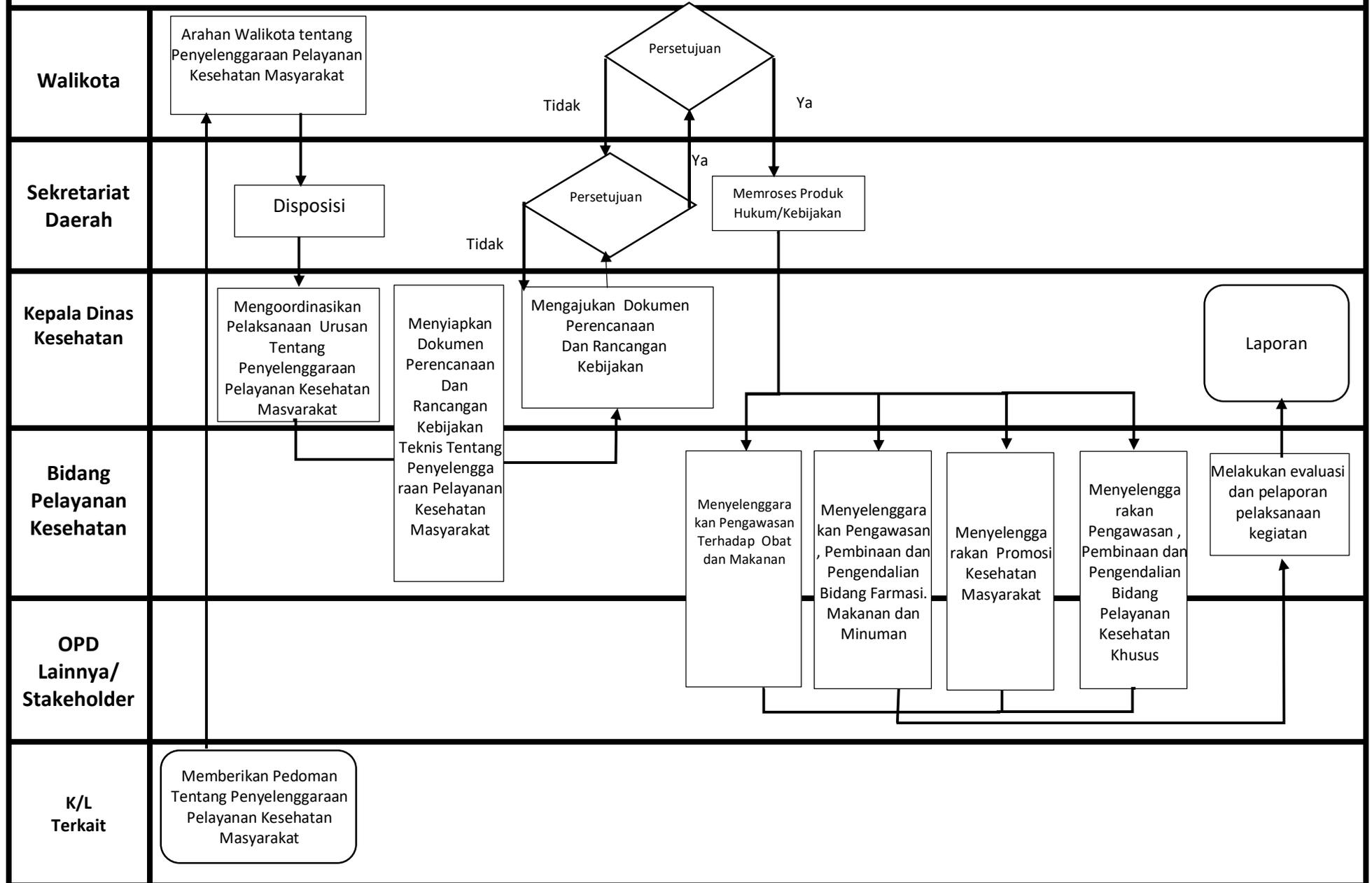
KT.04.01 : Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat



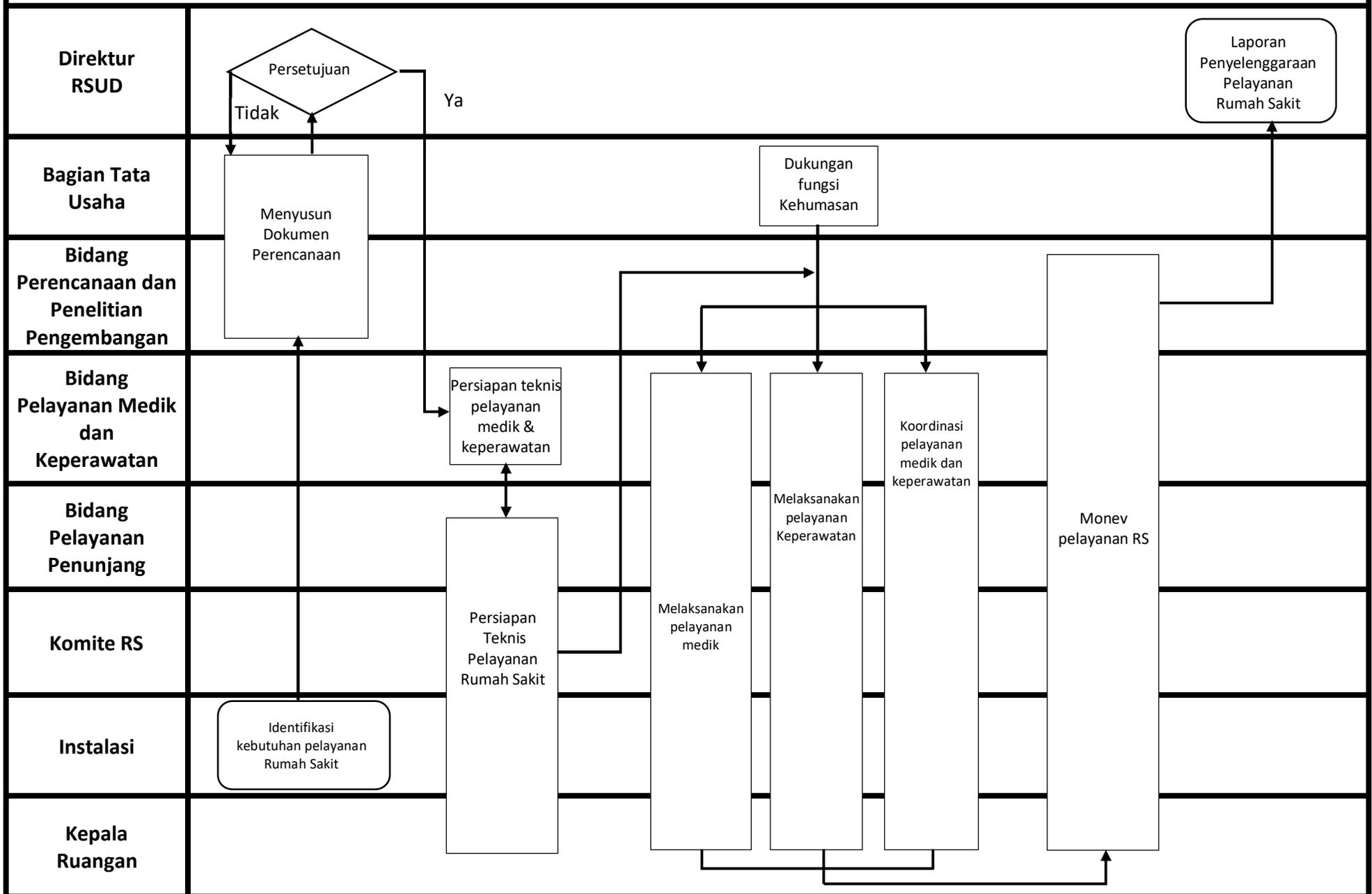
KT.04.02 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



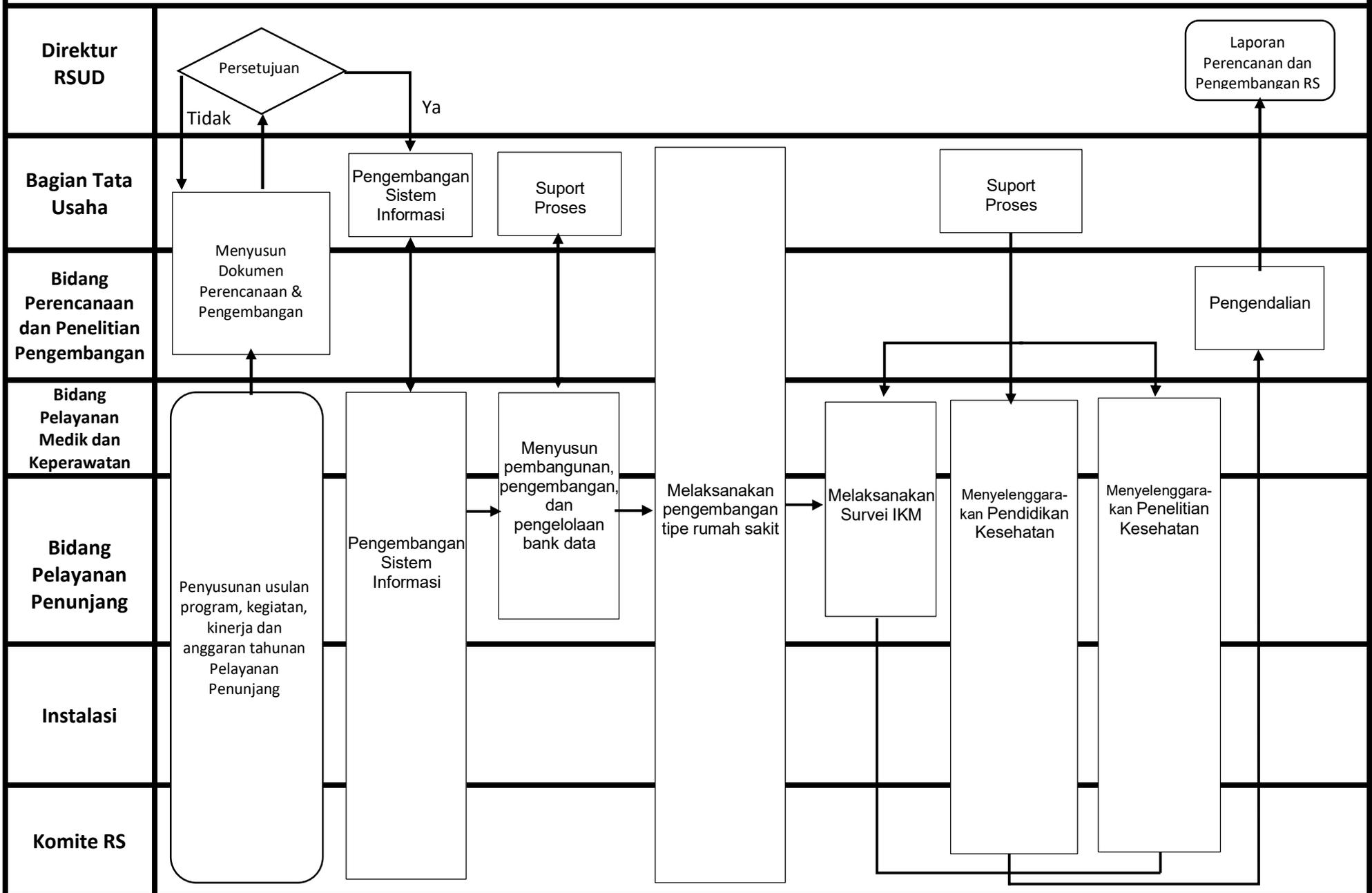
KT.04.03 : Pelayanan Kesehatan



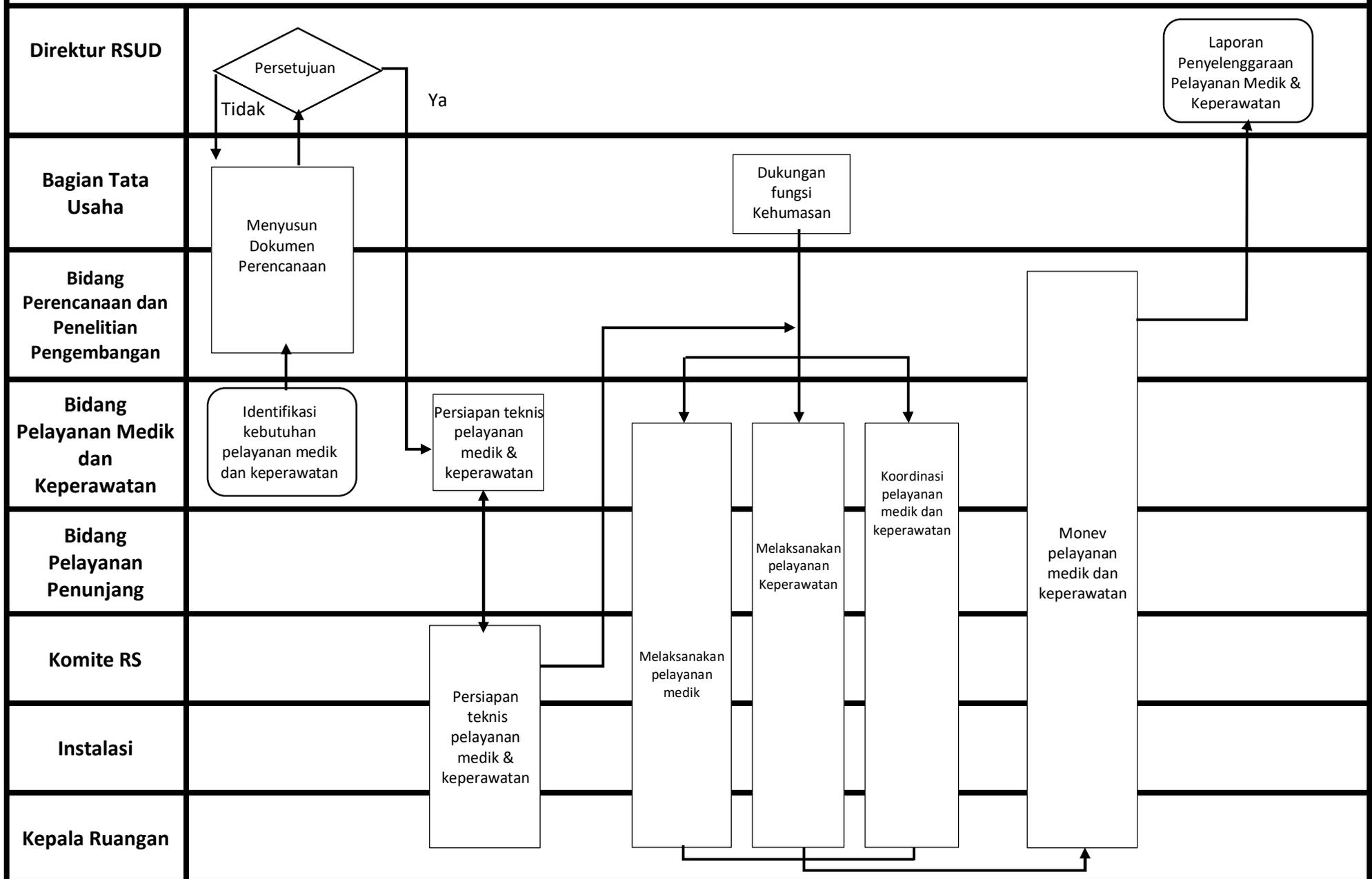
KT.04.04 : Pelayanan RS



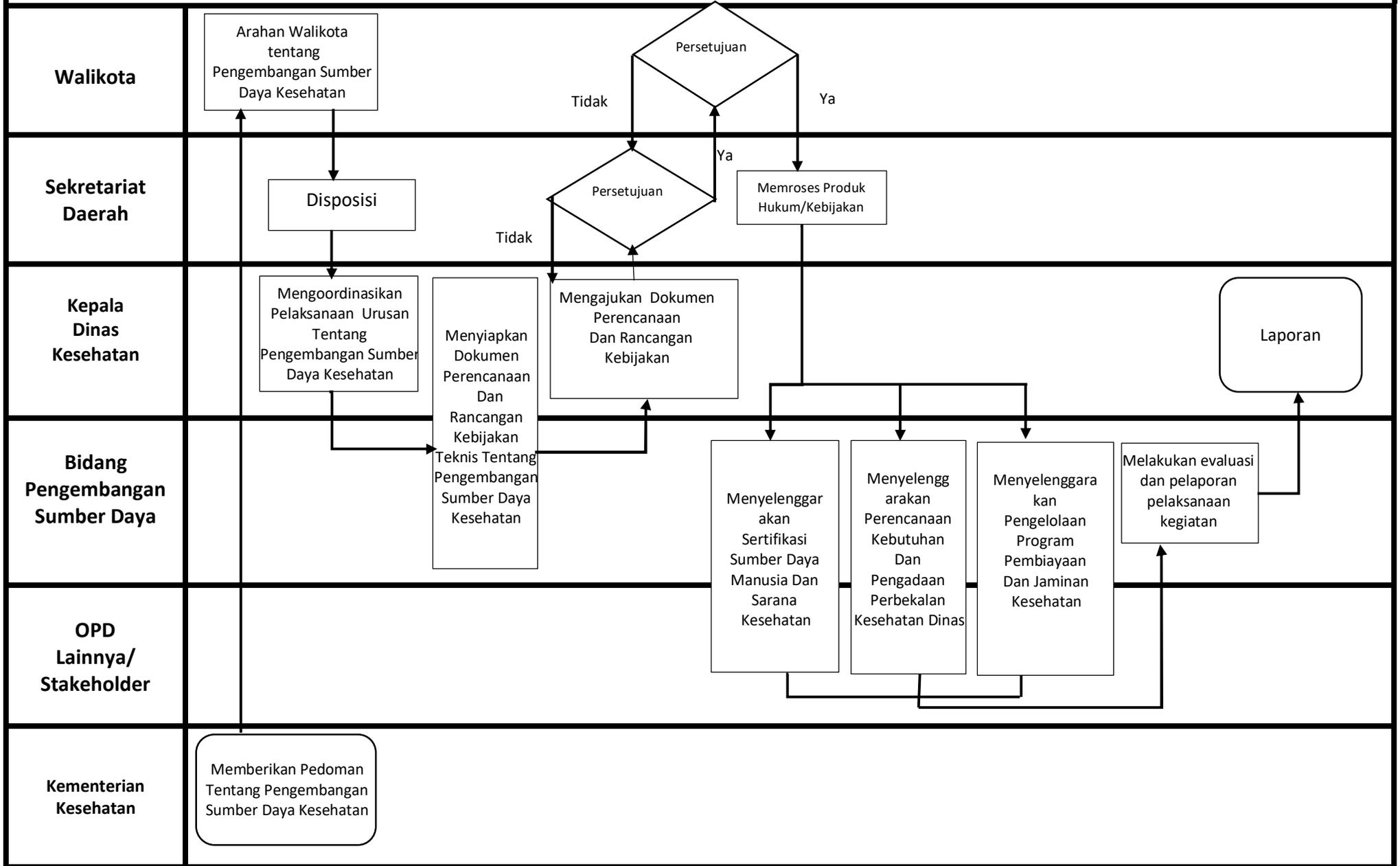
KT.04.05 : Perencanaan dan Pengembangan RS



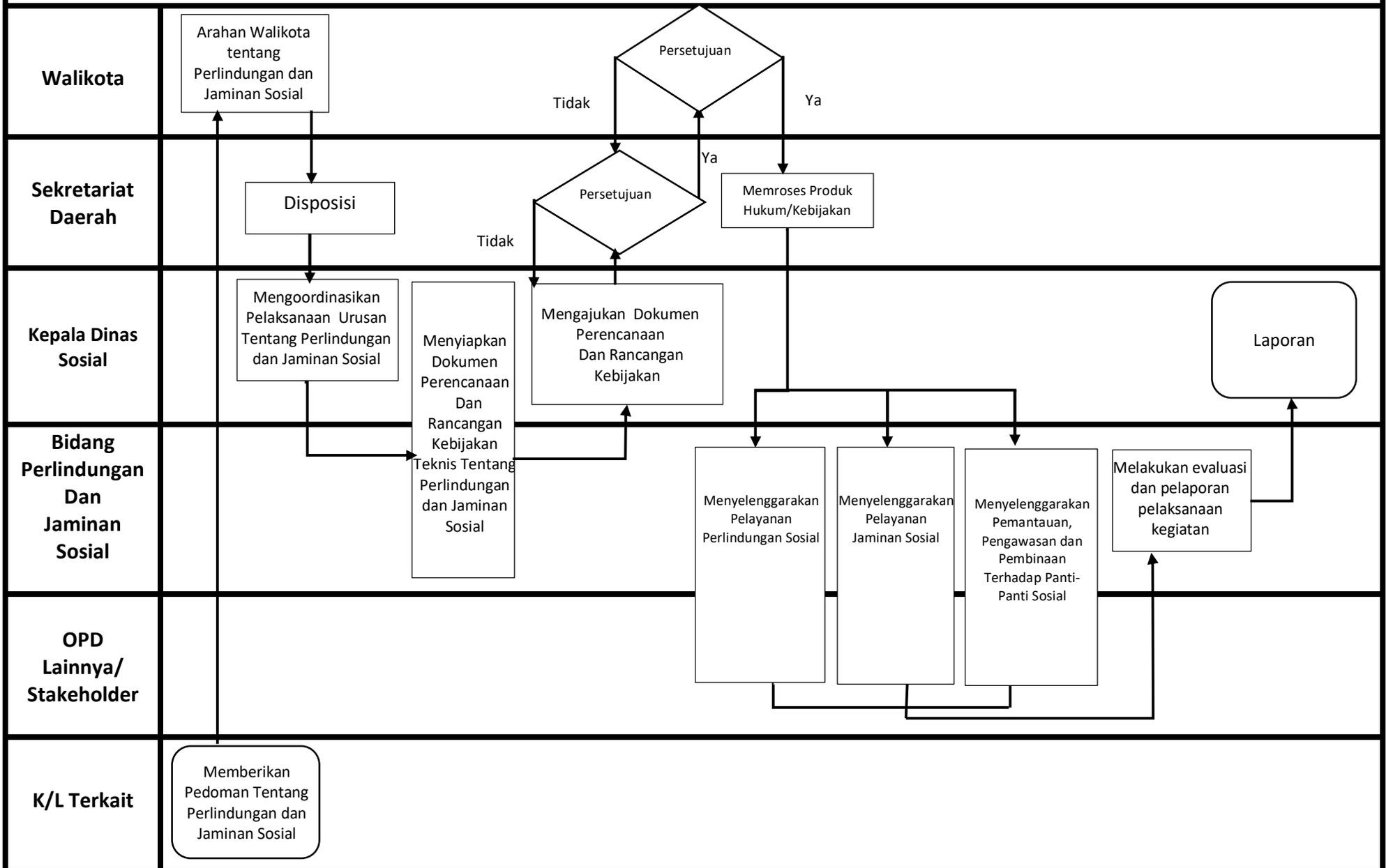
KT.04.06 : Pelayanan Medik dan Keperawatan RS



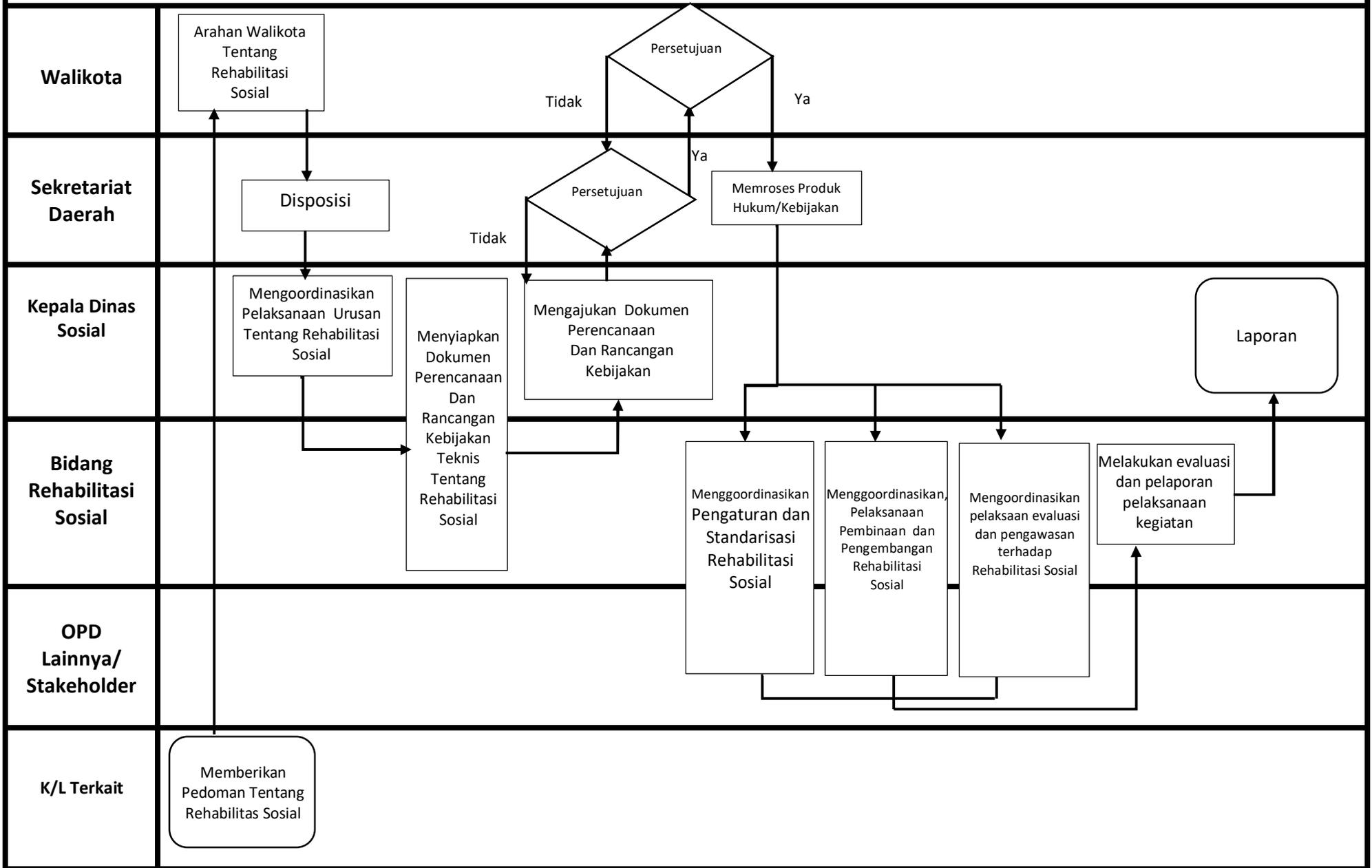
KT.04.07 : Pengembangan Sumber Daya Kesehatan



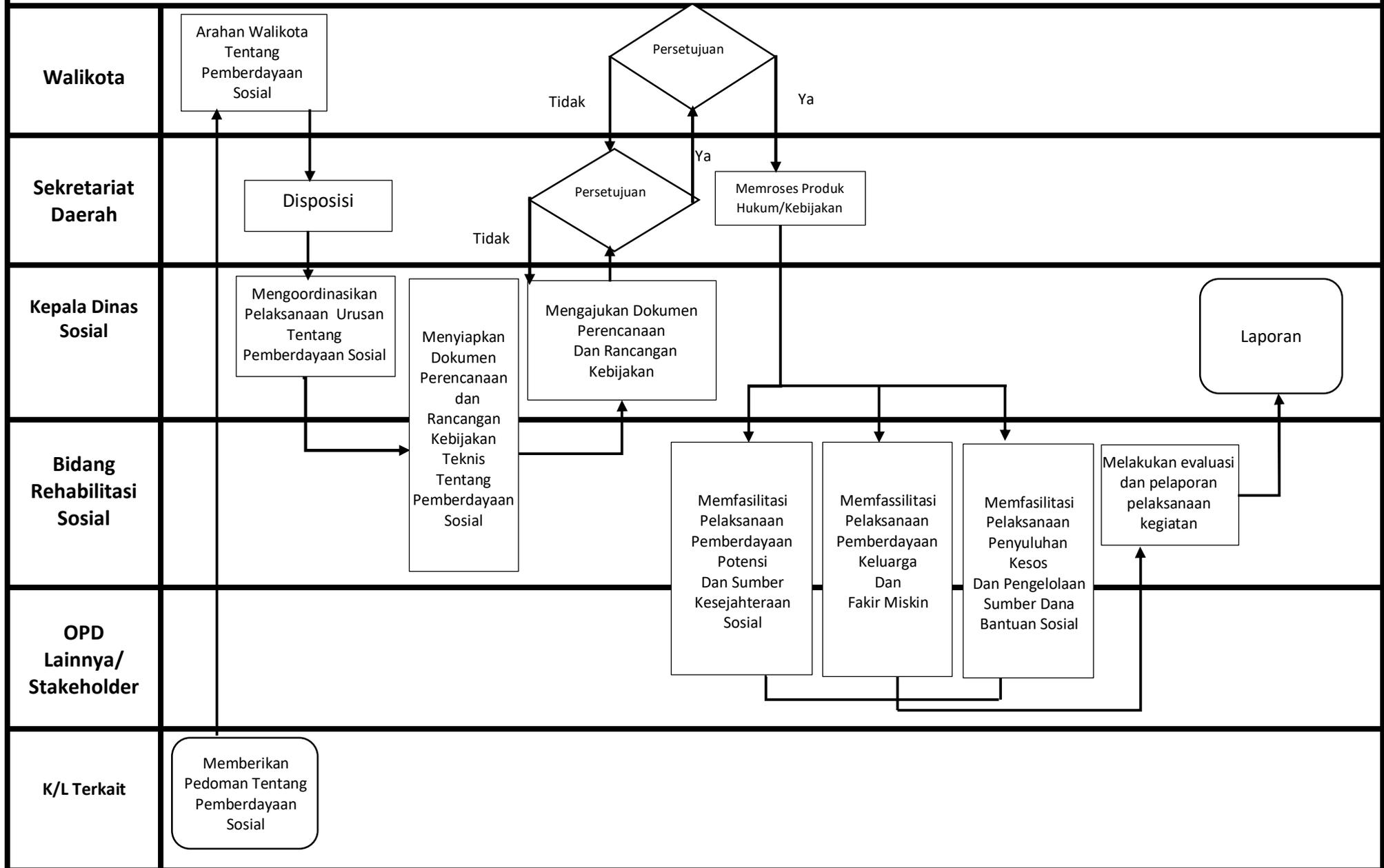
KT.05.01 : Perlindungan dan Jaminan Sosial



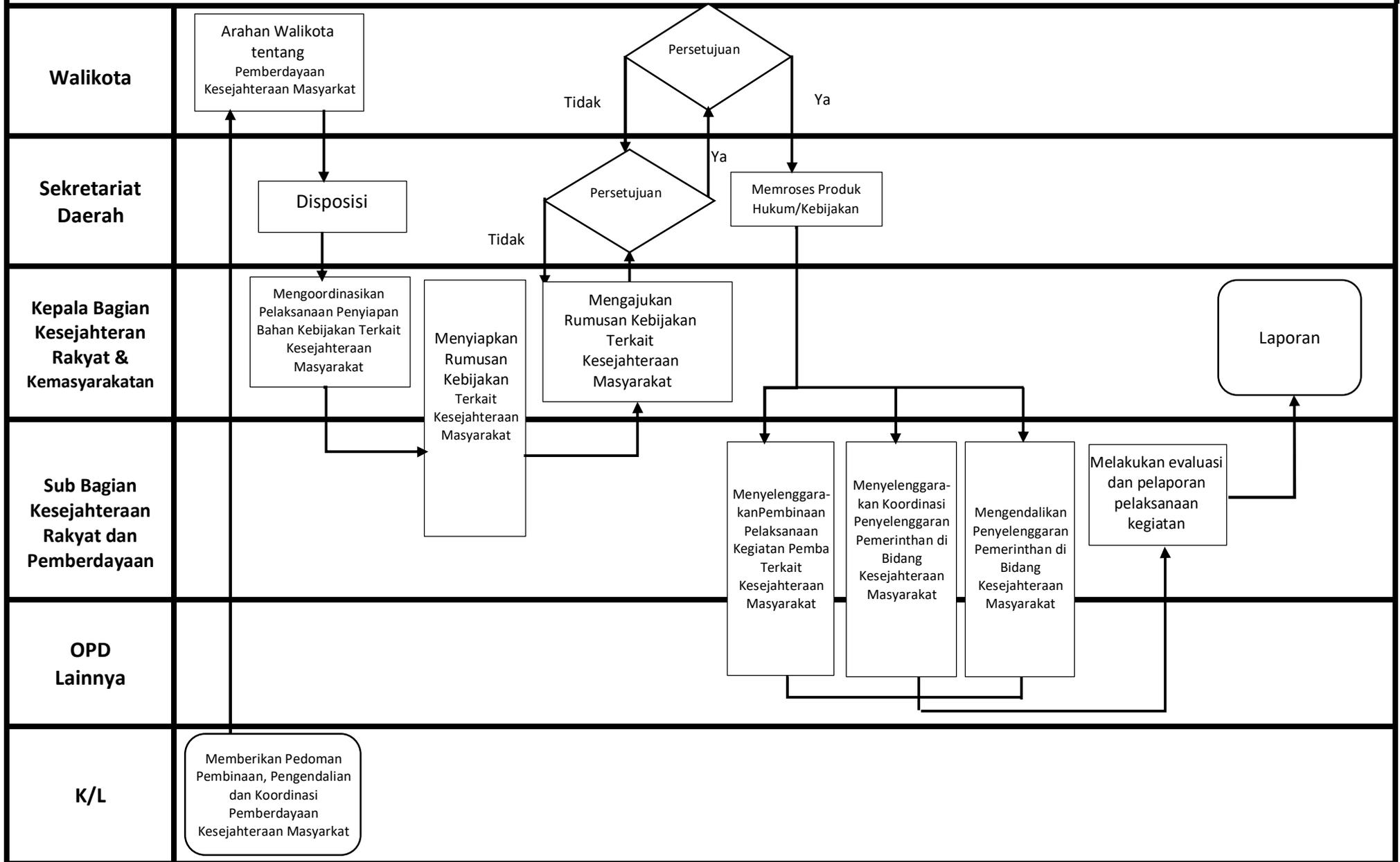
KT.05.02 : Rehabilitasi Sosial



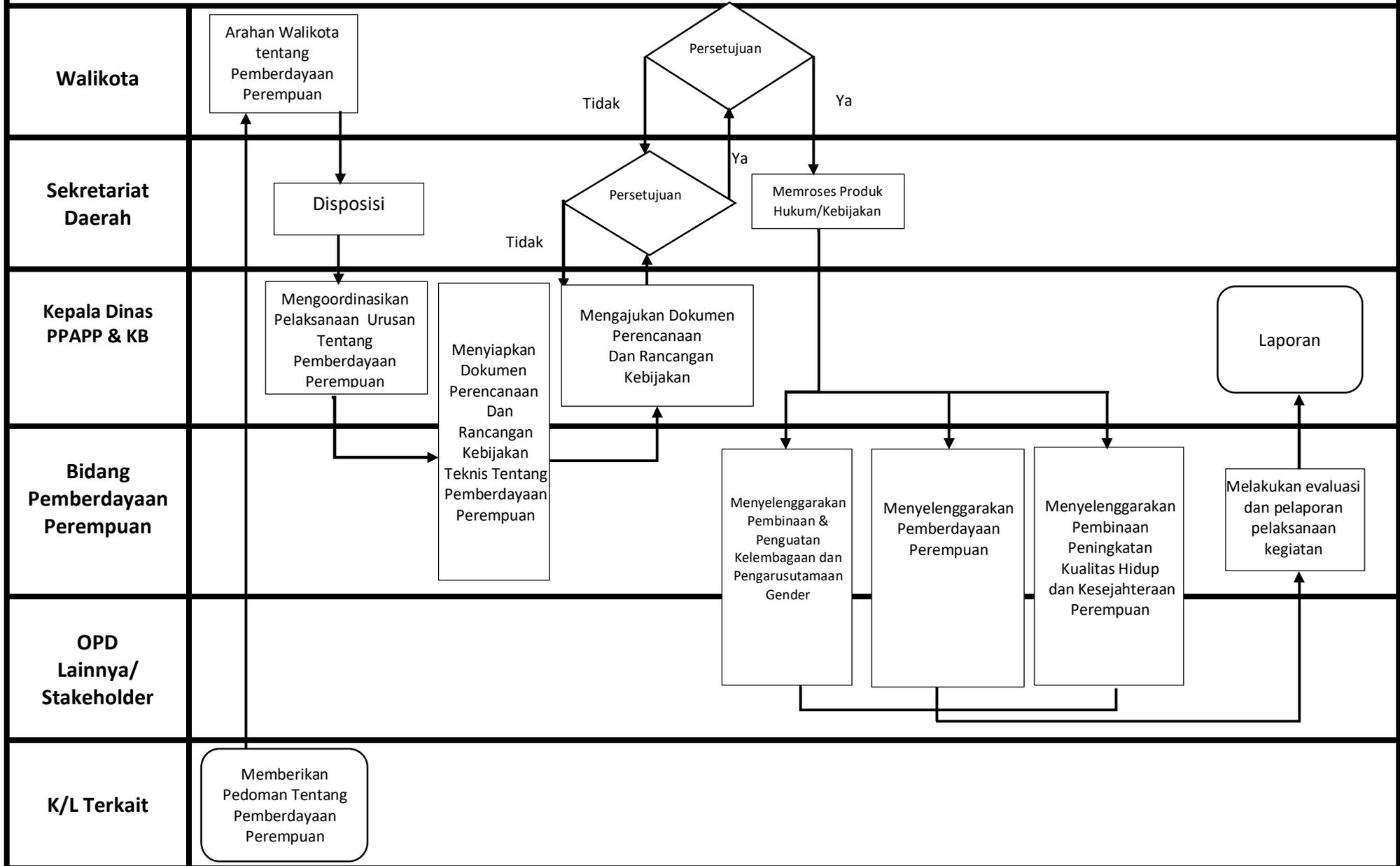
KT.05.03 : Pemberdayaan Sosial



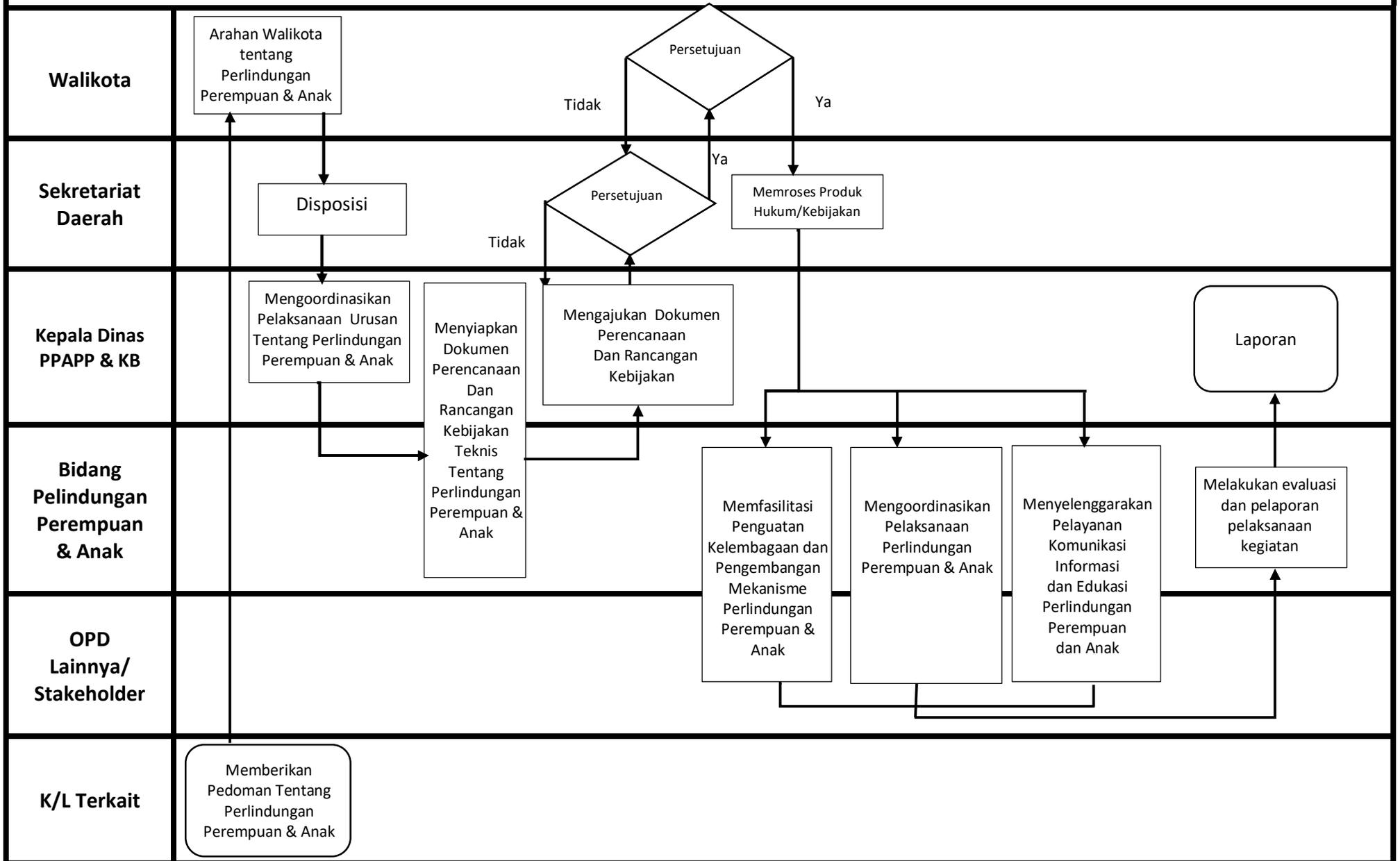
KT.05.04 : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat



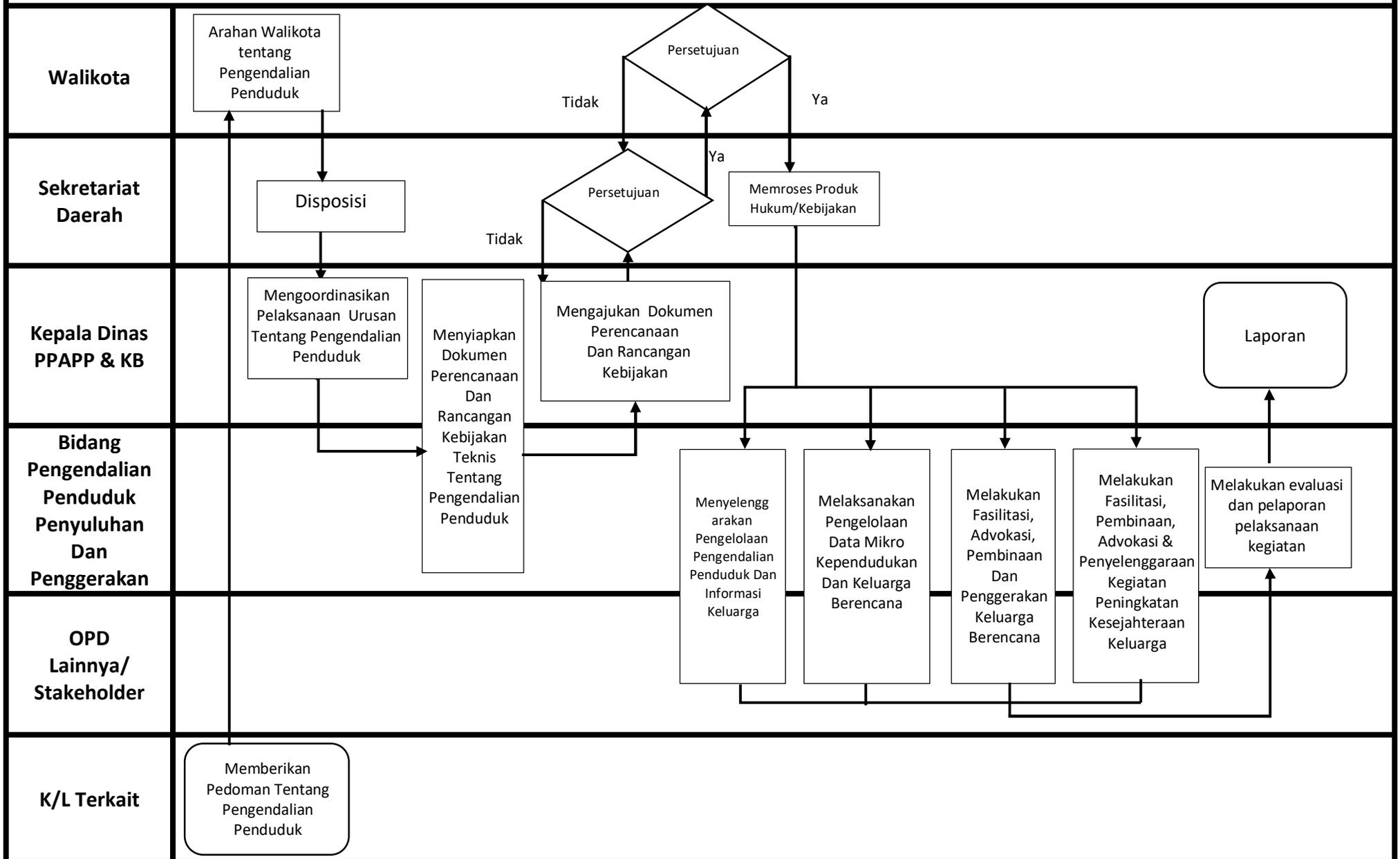
KT. 05.05 : Pemberdayaan Perempuan



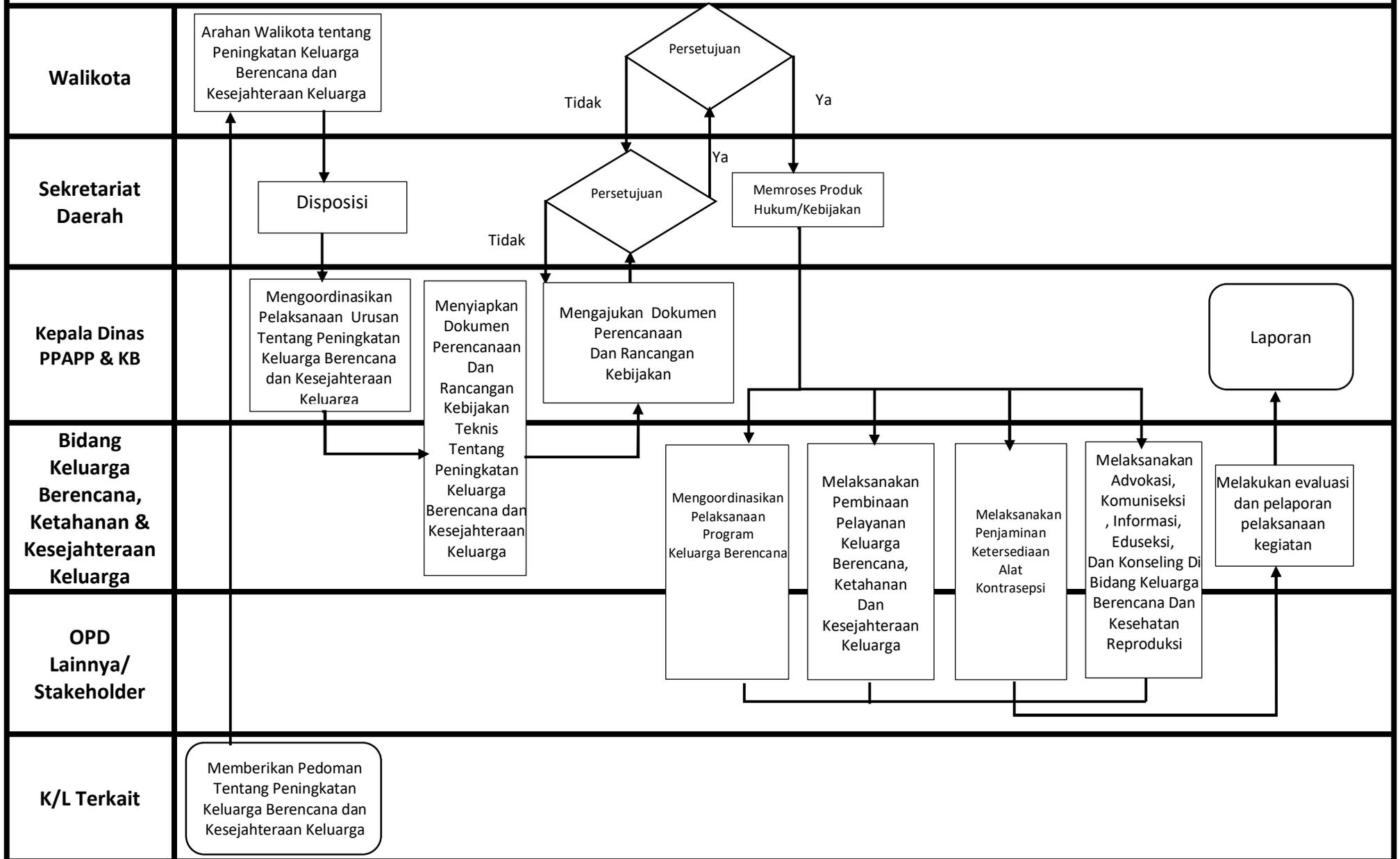
KT. 05.06 : Perlindungan Perempuan dan Anak



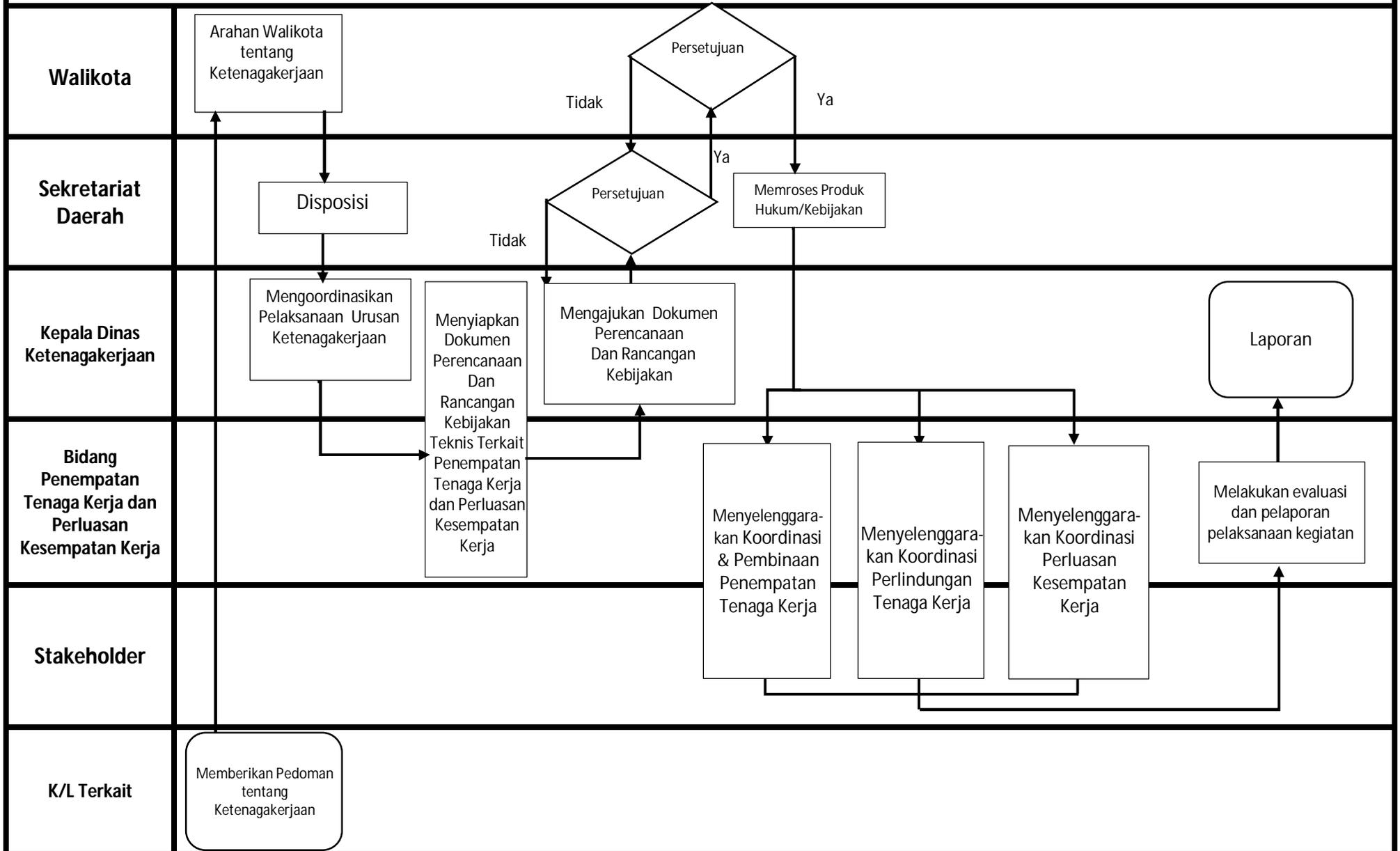
KT. 05.07 : Pengendalian Penduduk



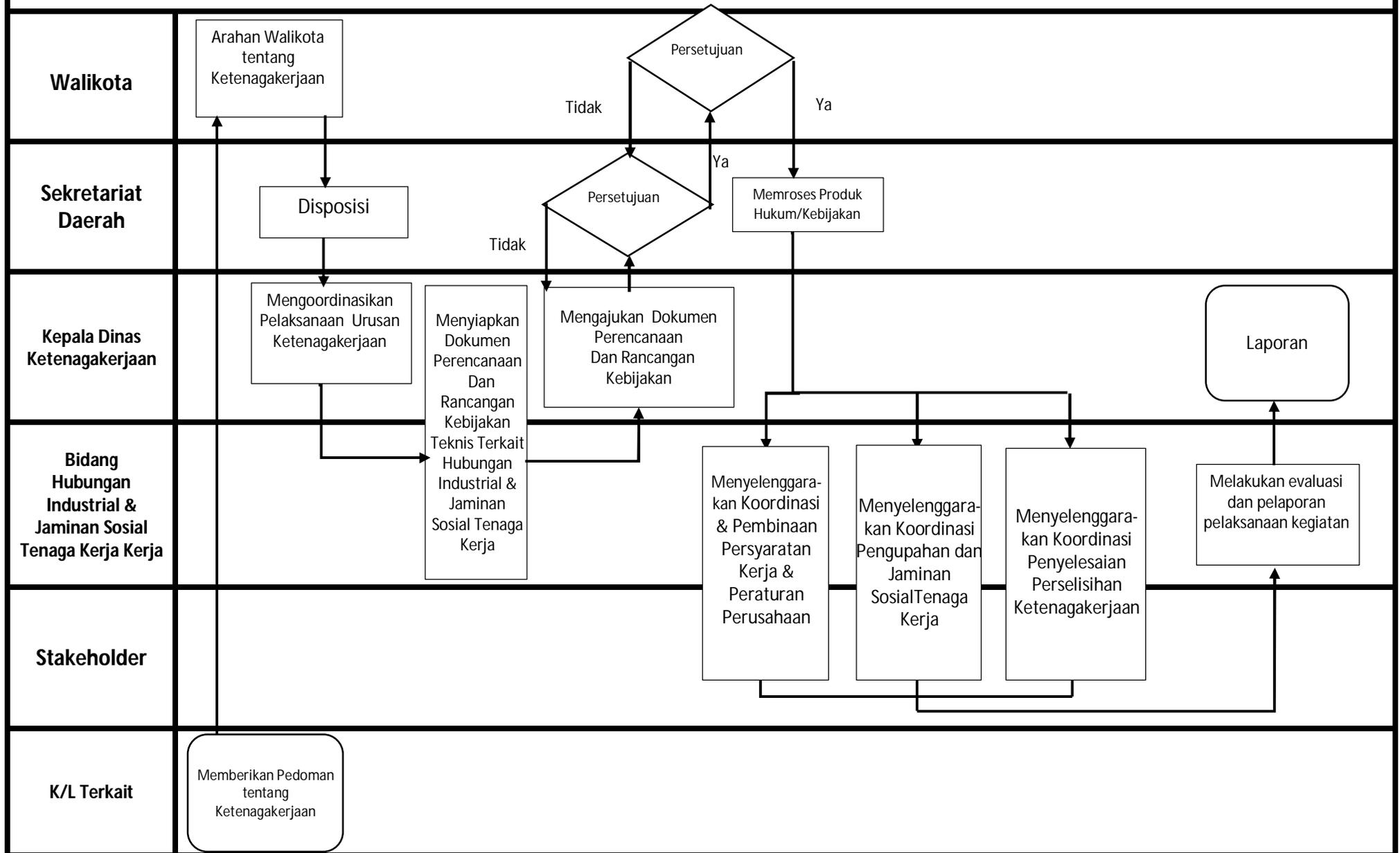
KT. 05.08 : Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga



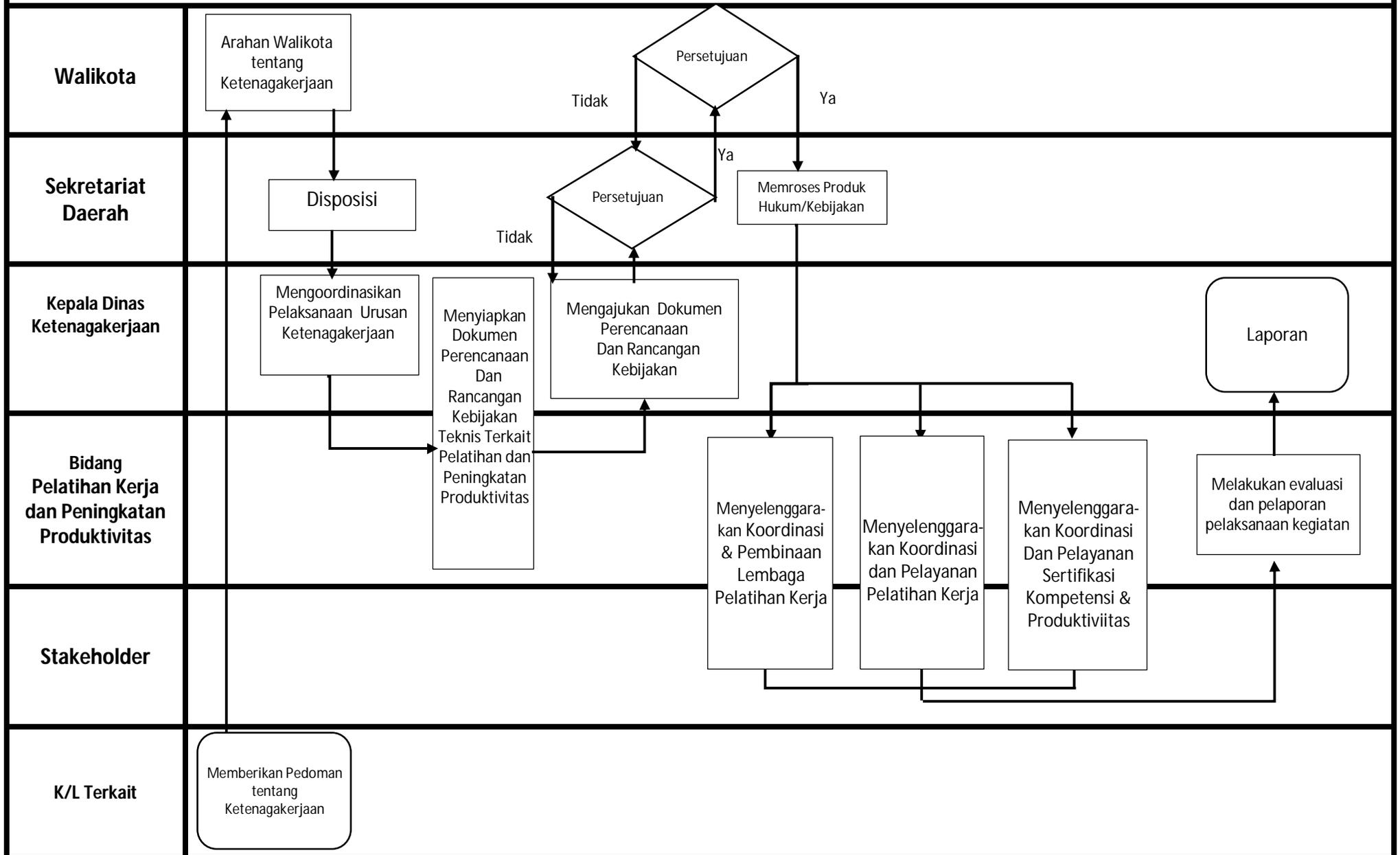
KT.06.01 : Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja



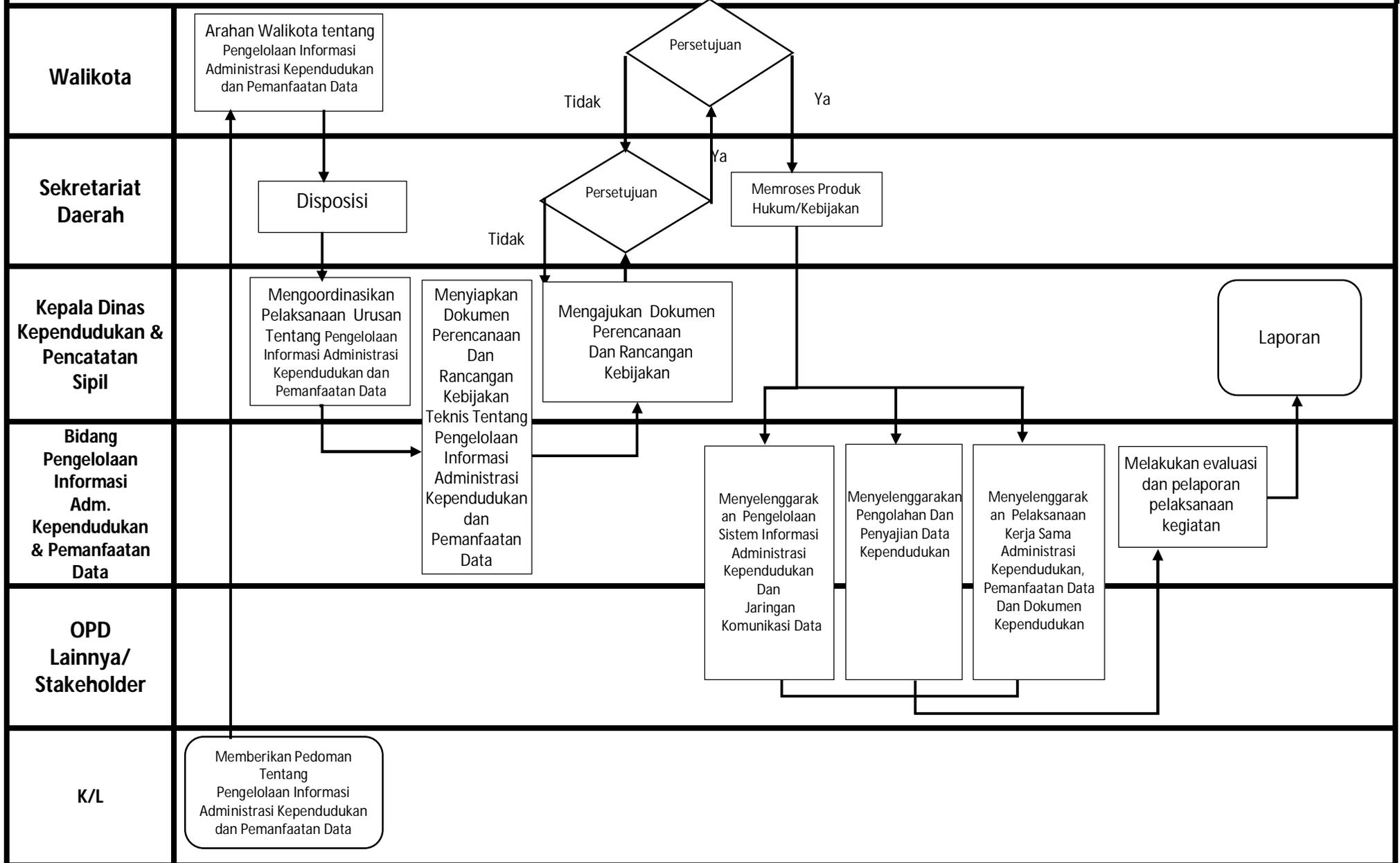
KT.06.02 : Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



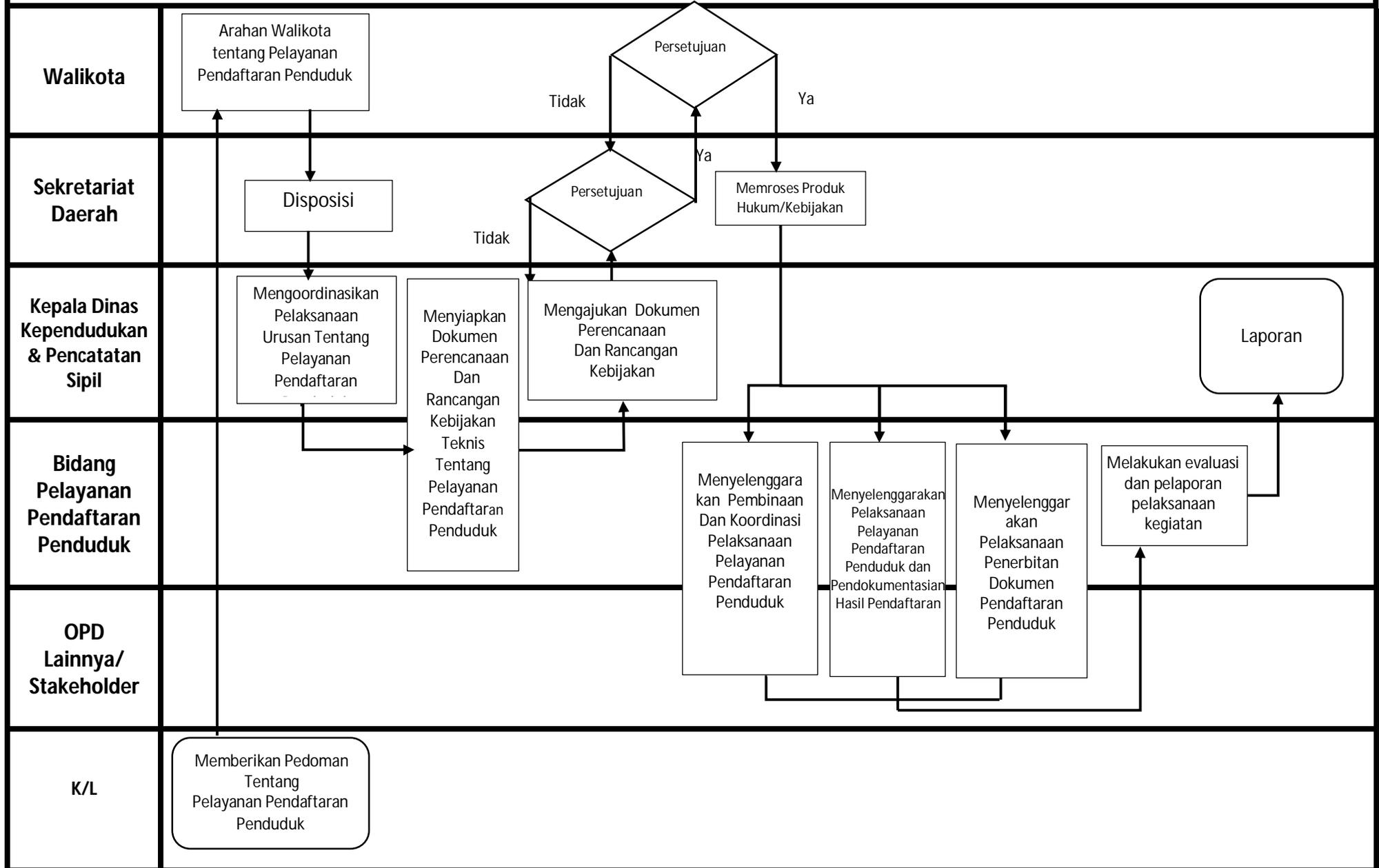
KT.06.03 : Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas



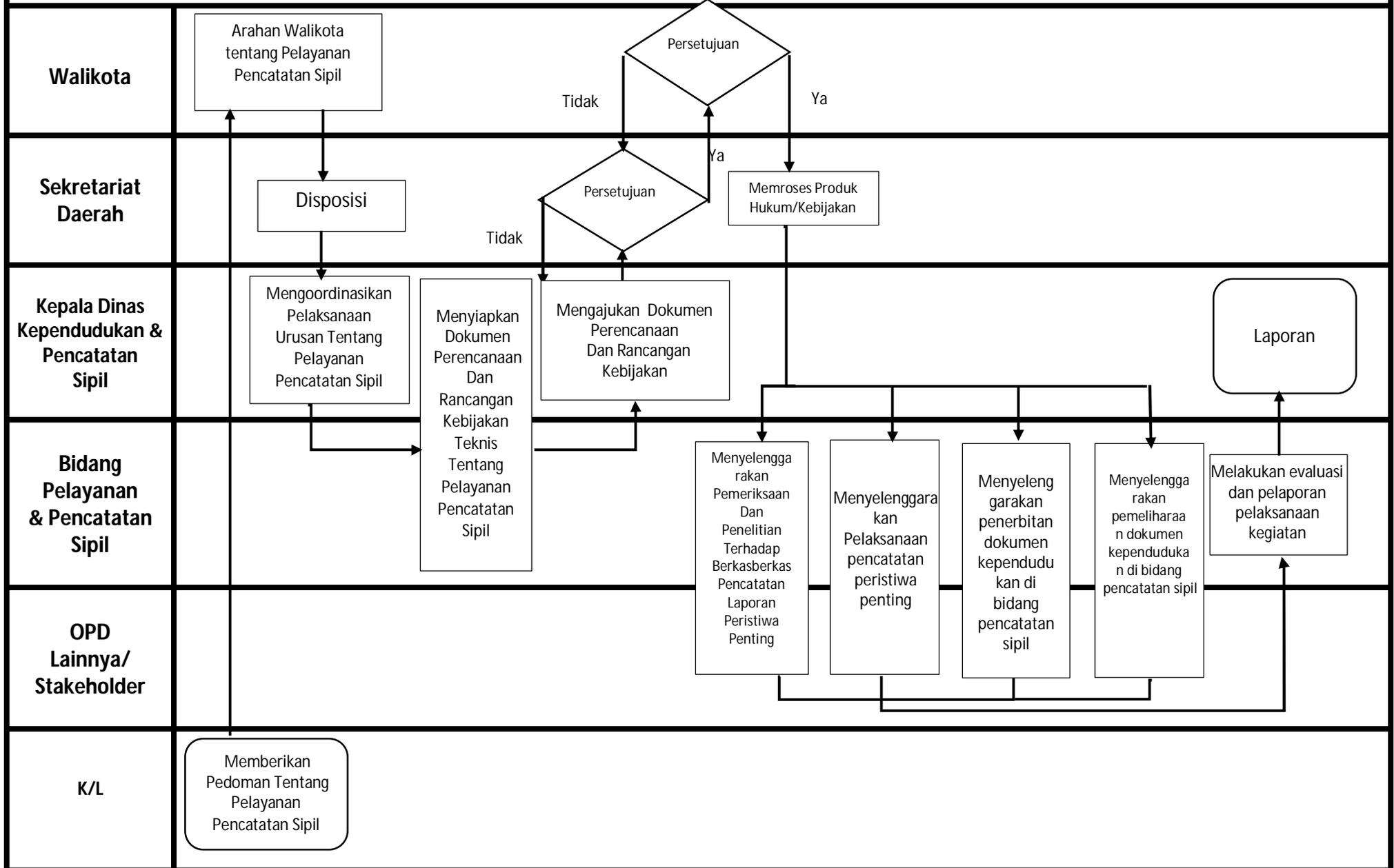
KT.07.01 : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data



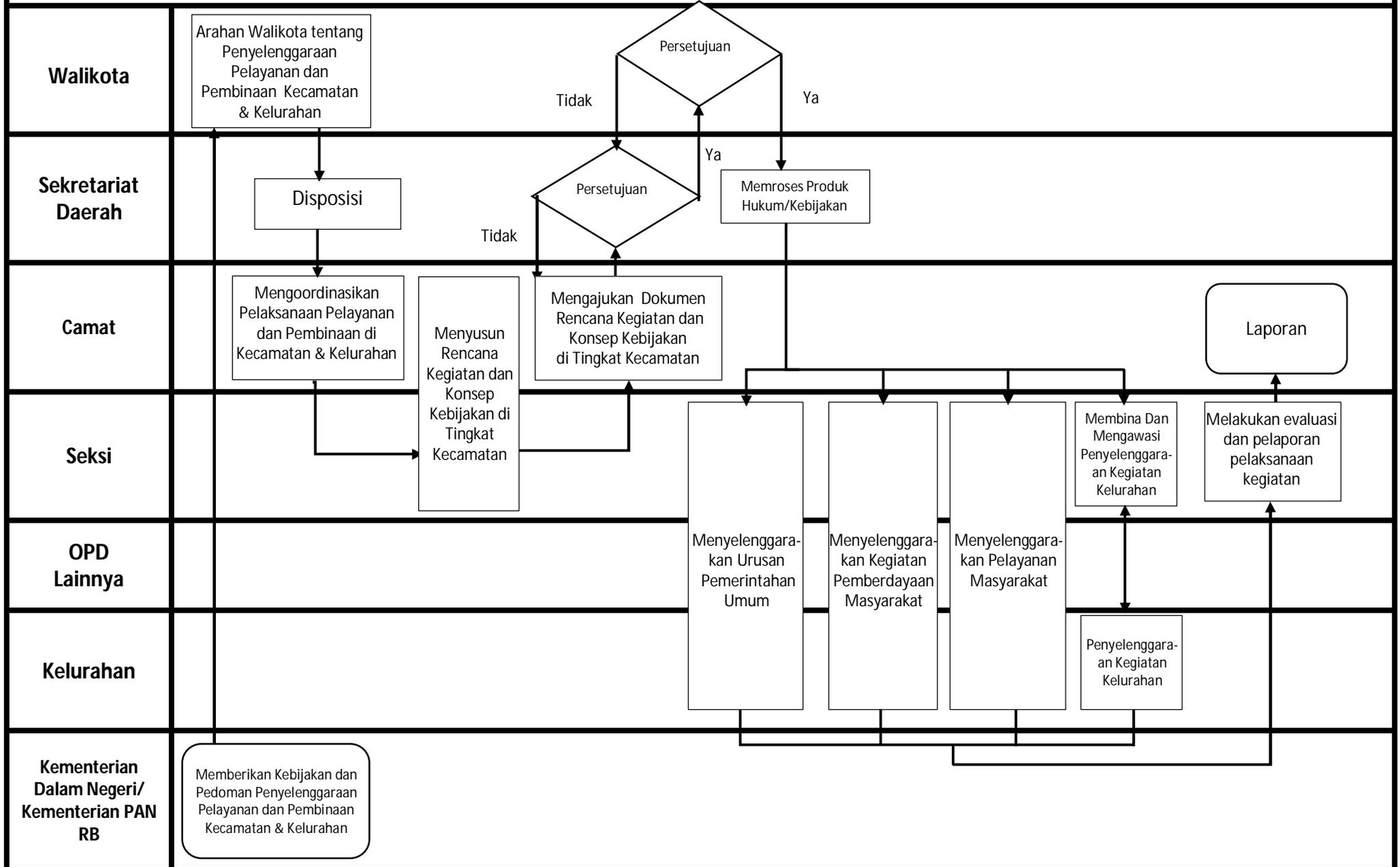
KT.07.02 : Pelayanan Pendaftaran Penduduk



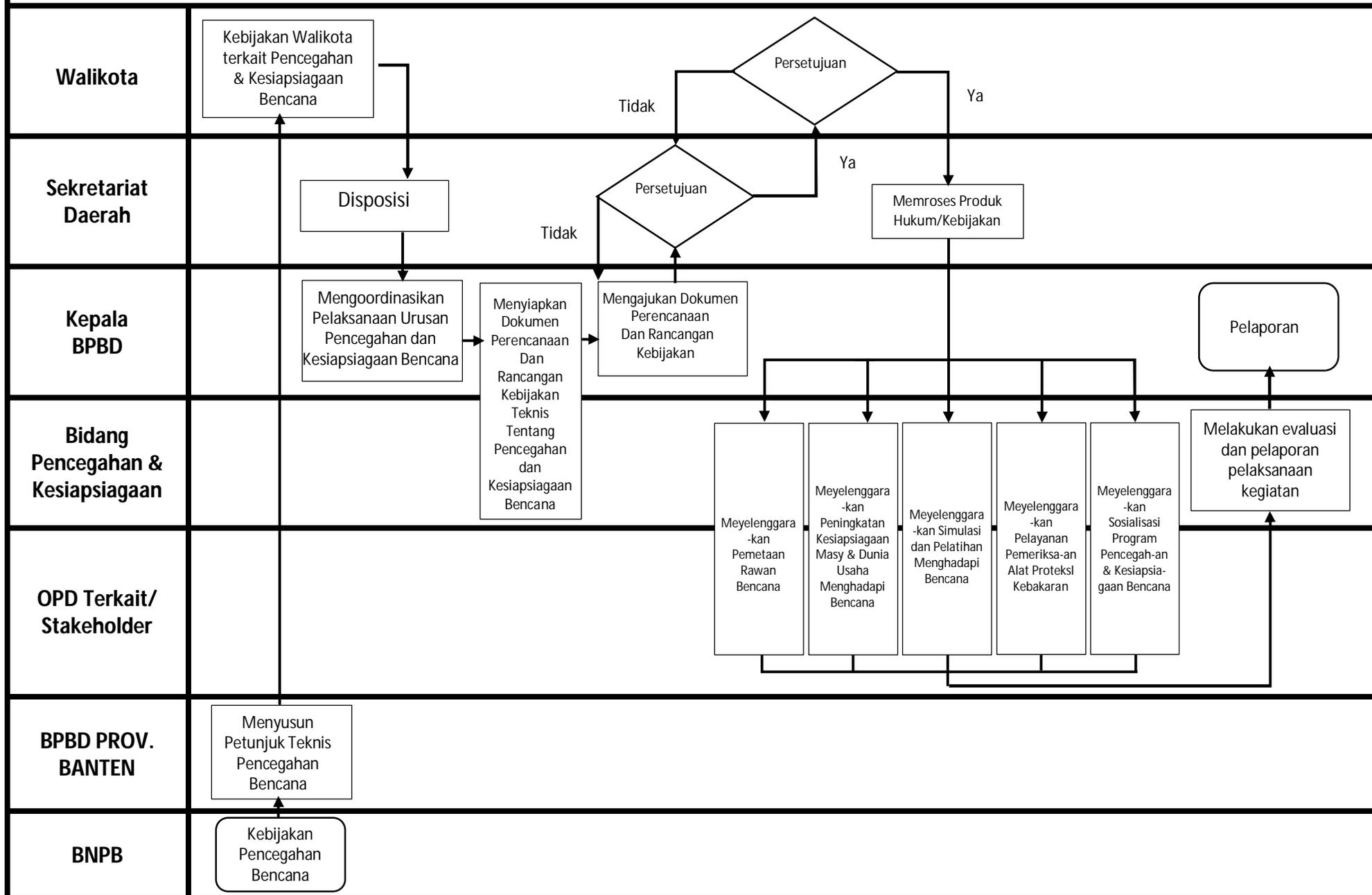
KT.07.03 : Pelayanan Dan Pencatatan Sipil



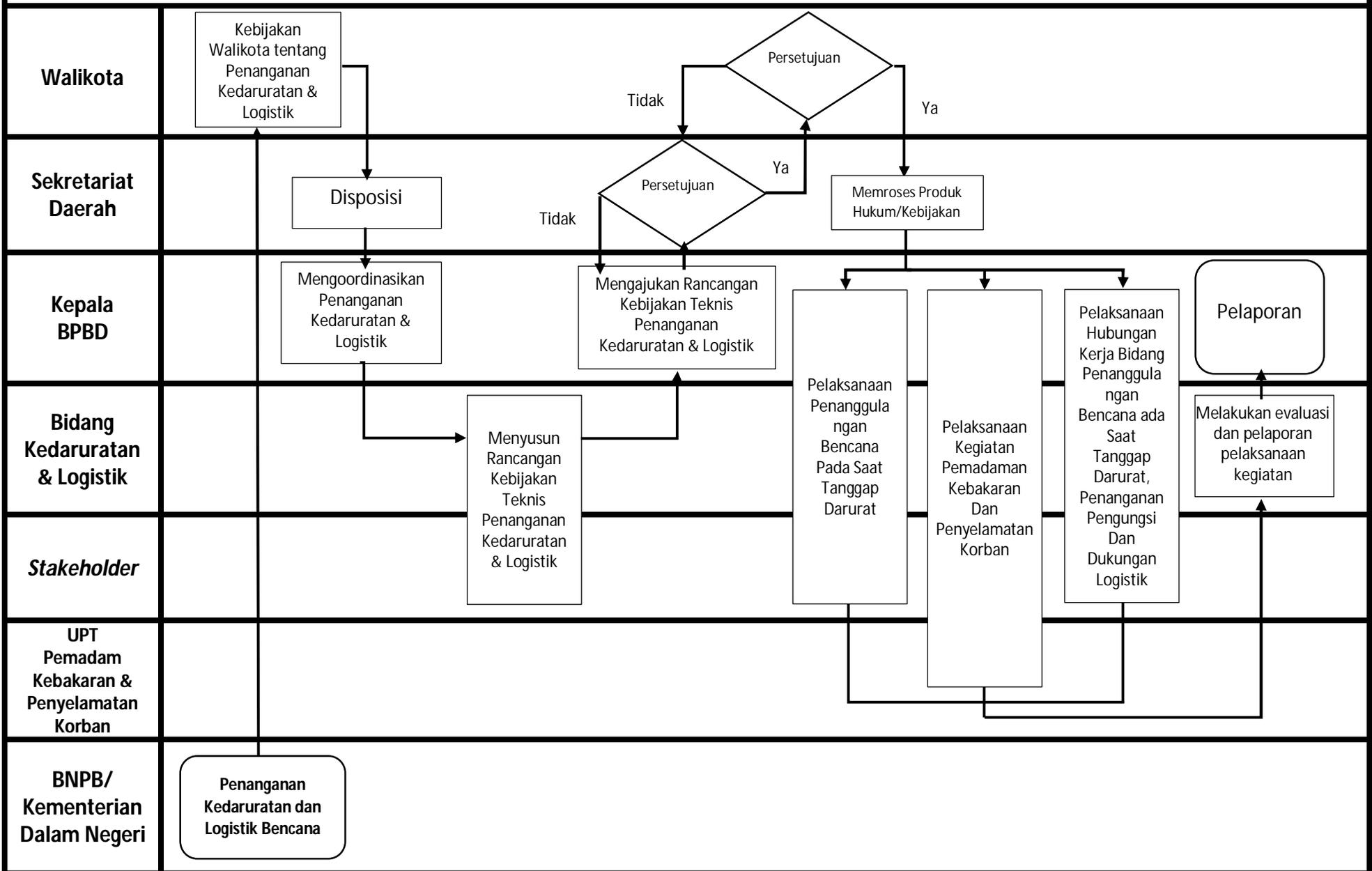
KT.07.04 : Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan



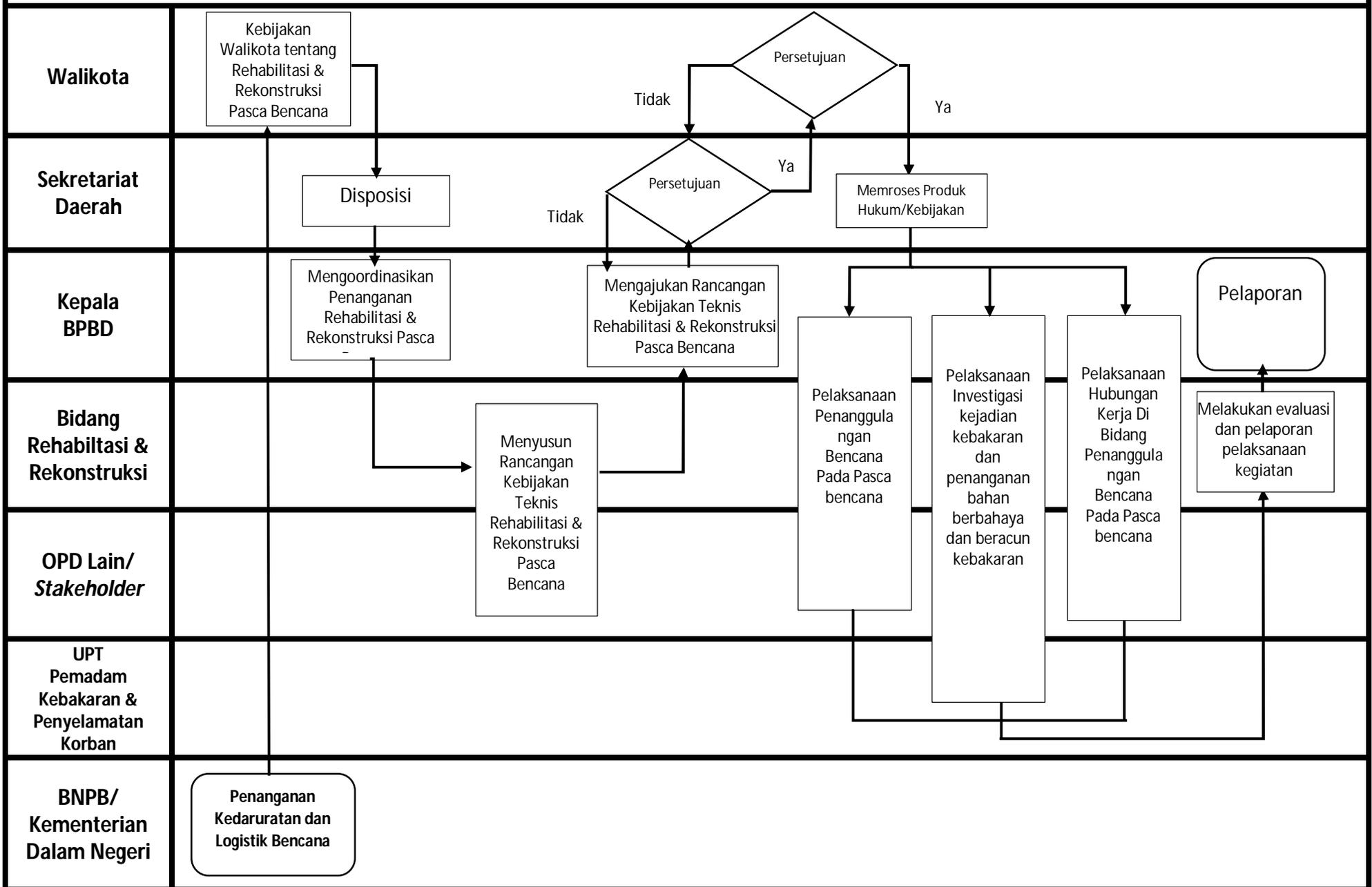
KT.08.01 : Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana



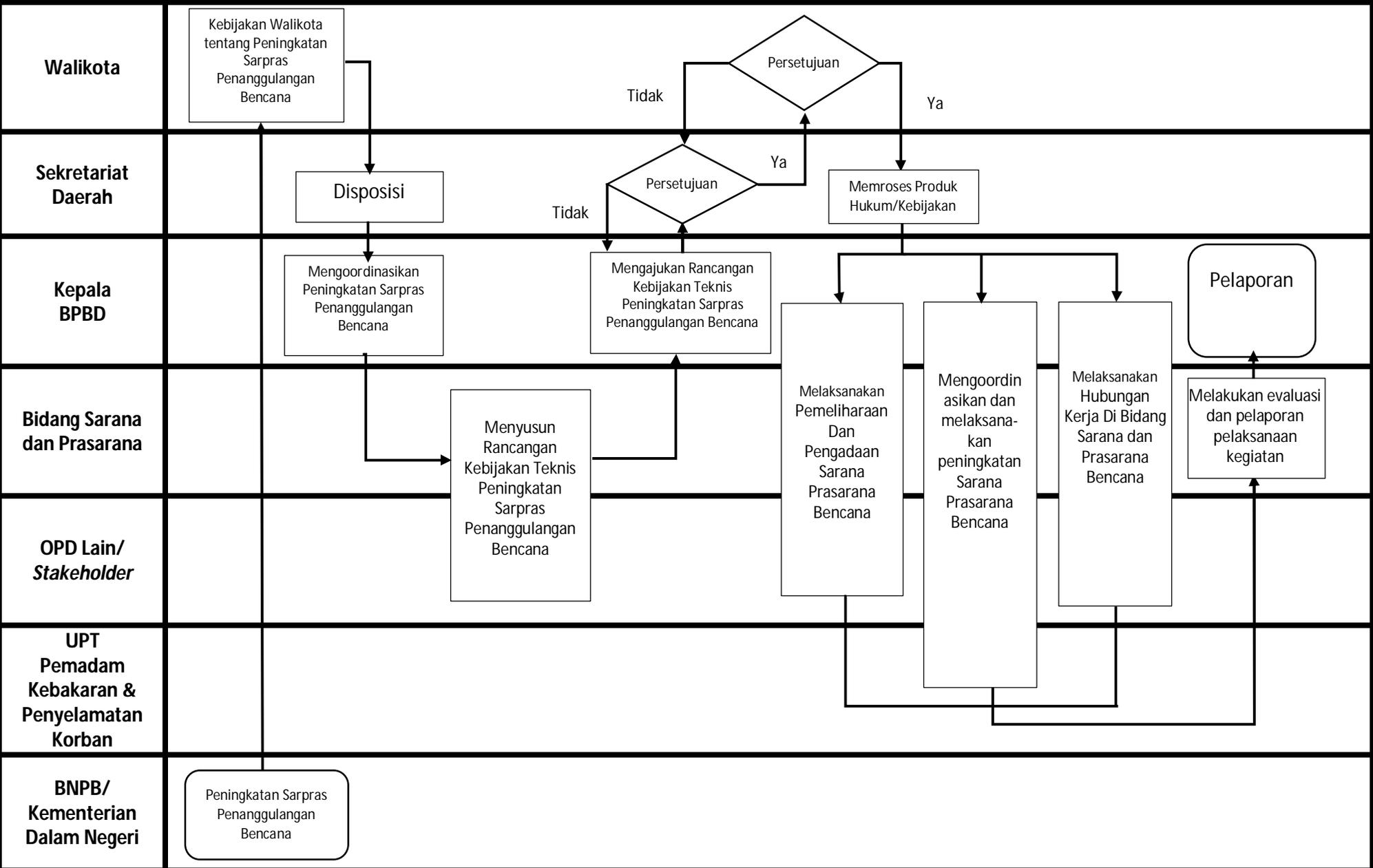
KT.08.02 : Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana



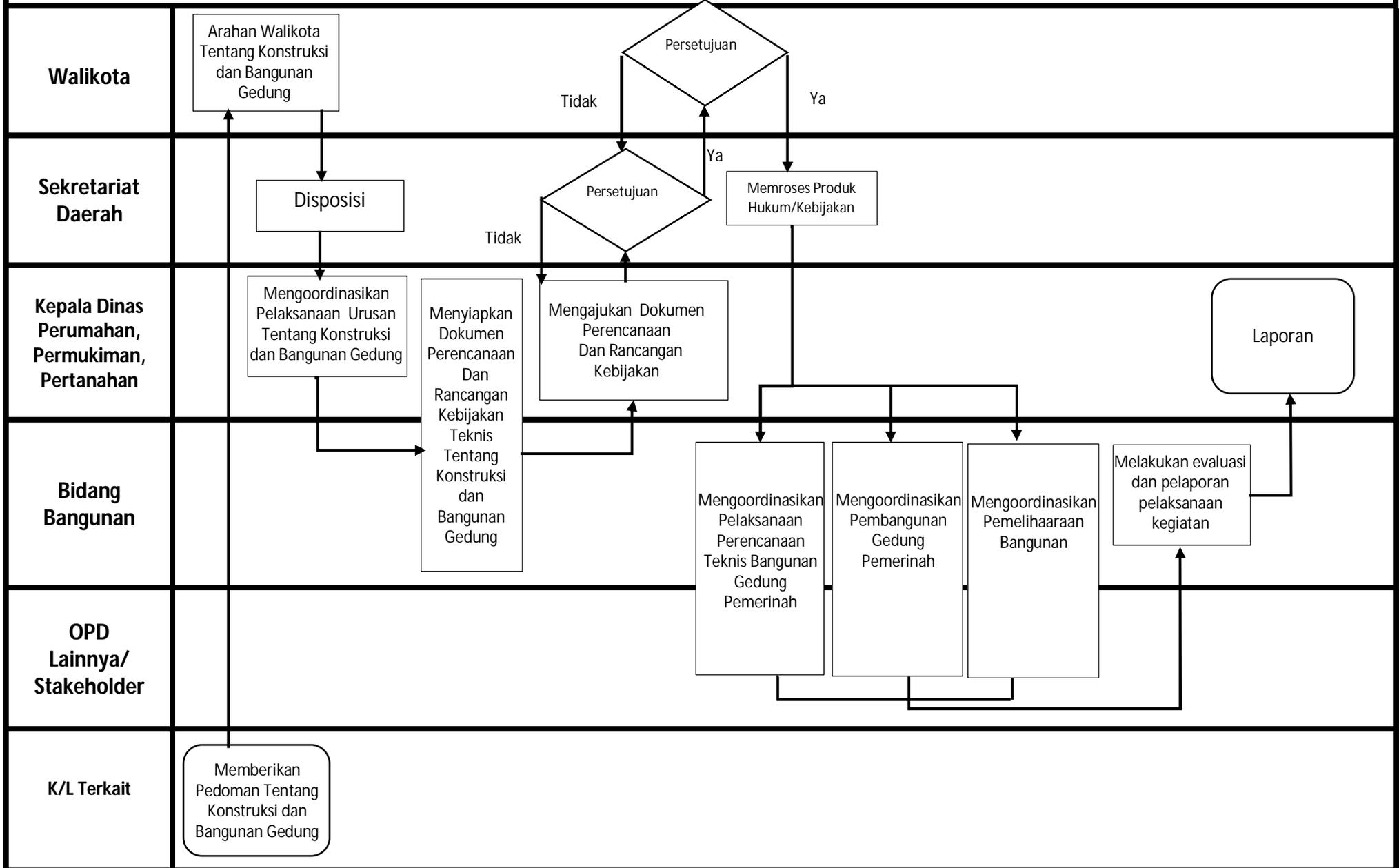
KT.08.03 : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana



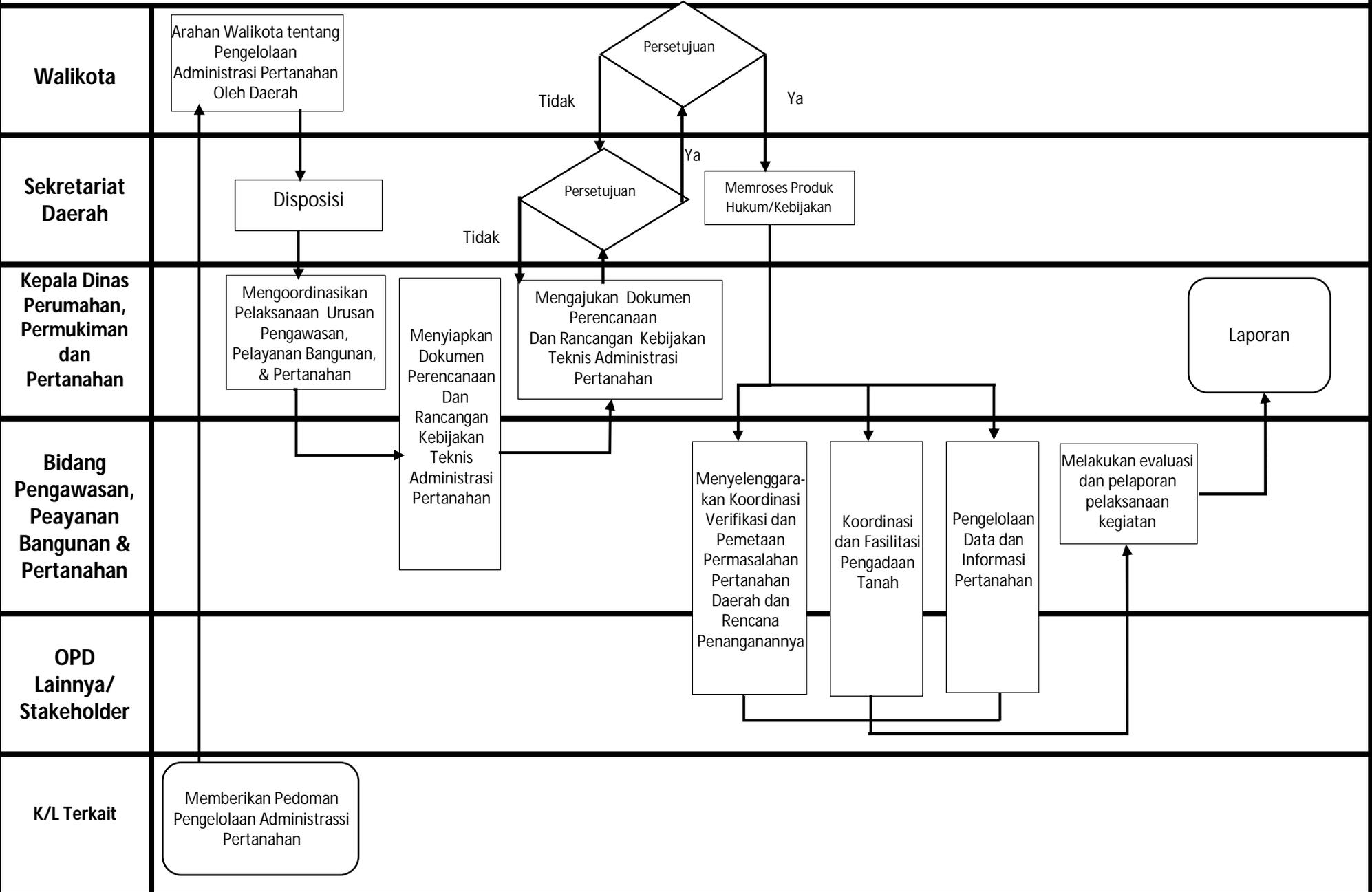
KT.08.04 : Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana



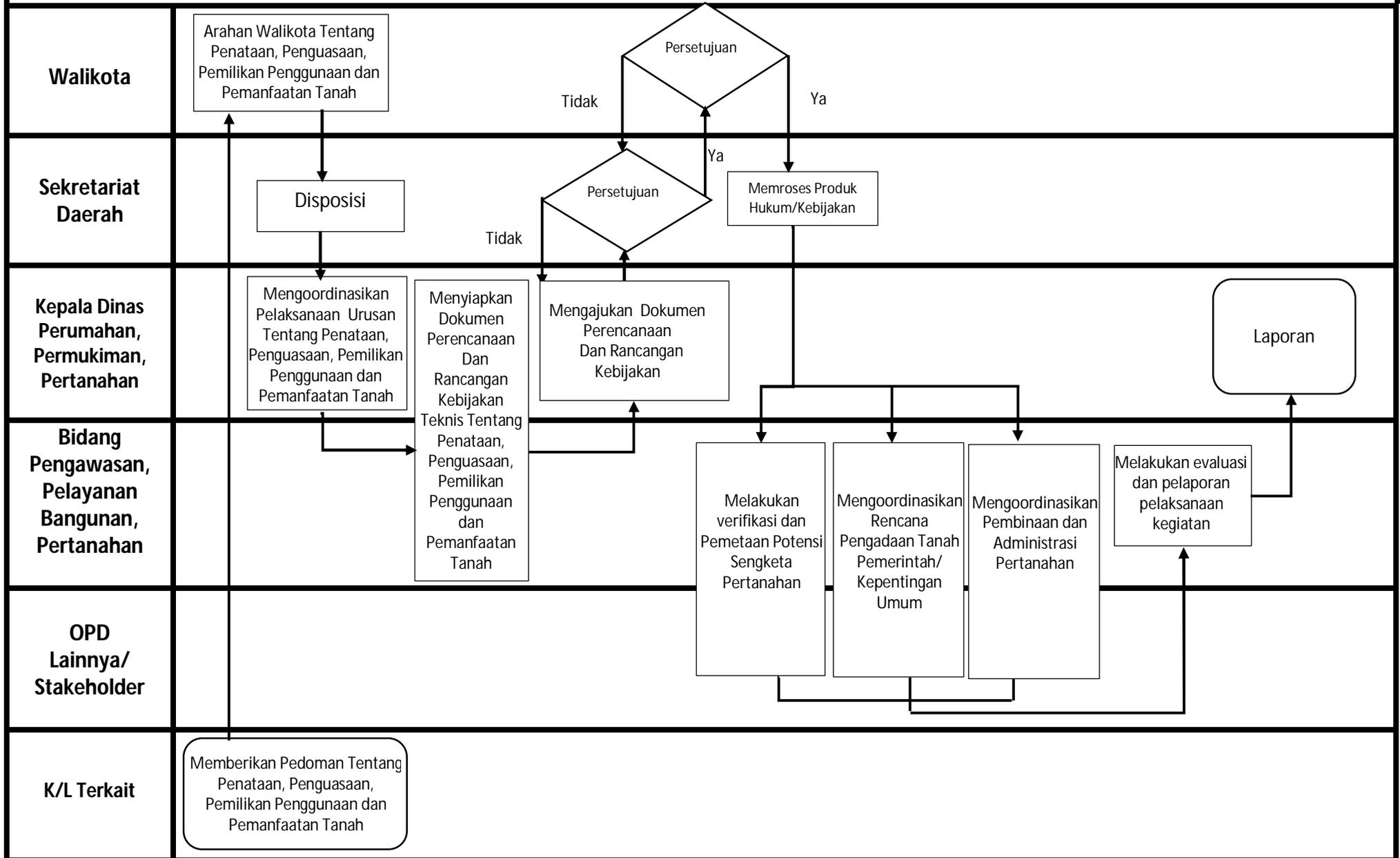
KT.09.01 : Pembangunan Gedung/Bangunan, Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pemerintah dan Masyarakat



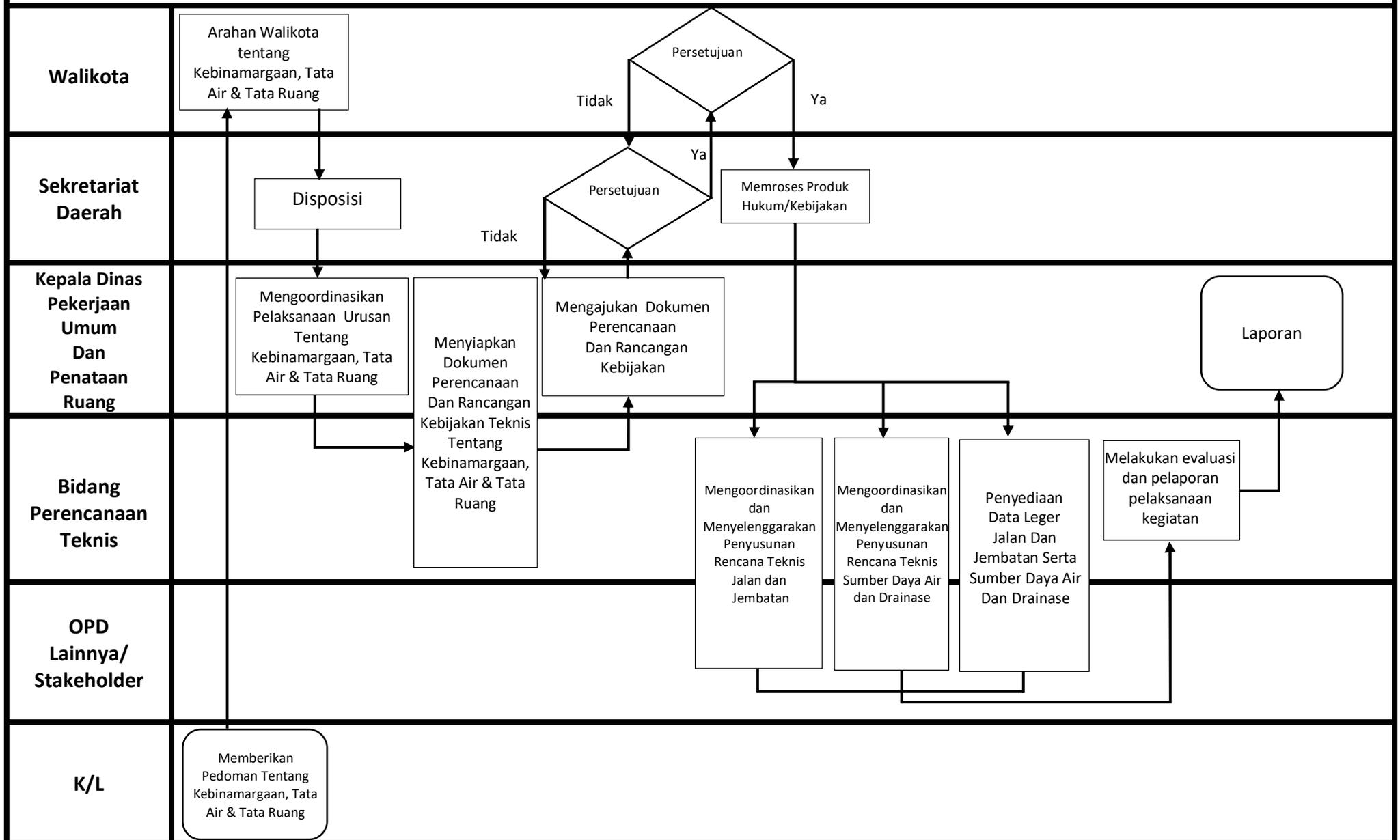
KT.09.02 : Administrasi Pertanahan



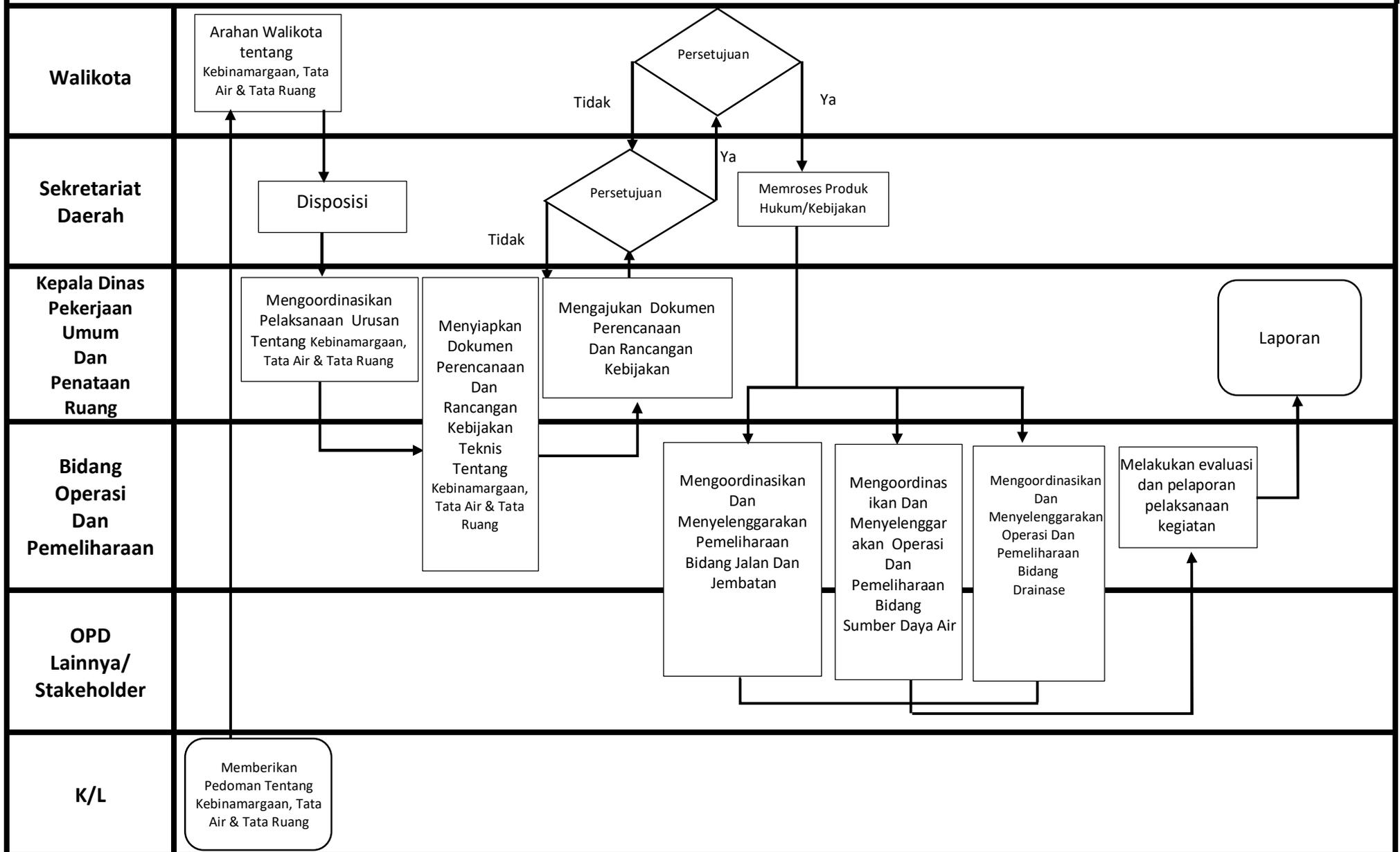
KT.09.03 : Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



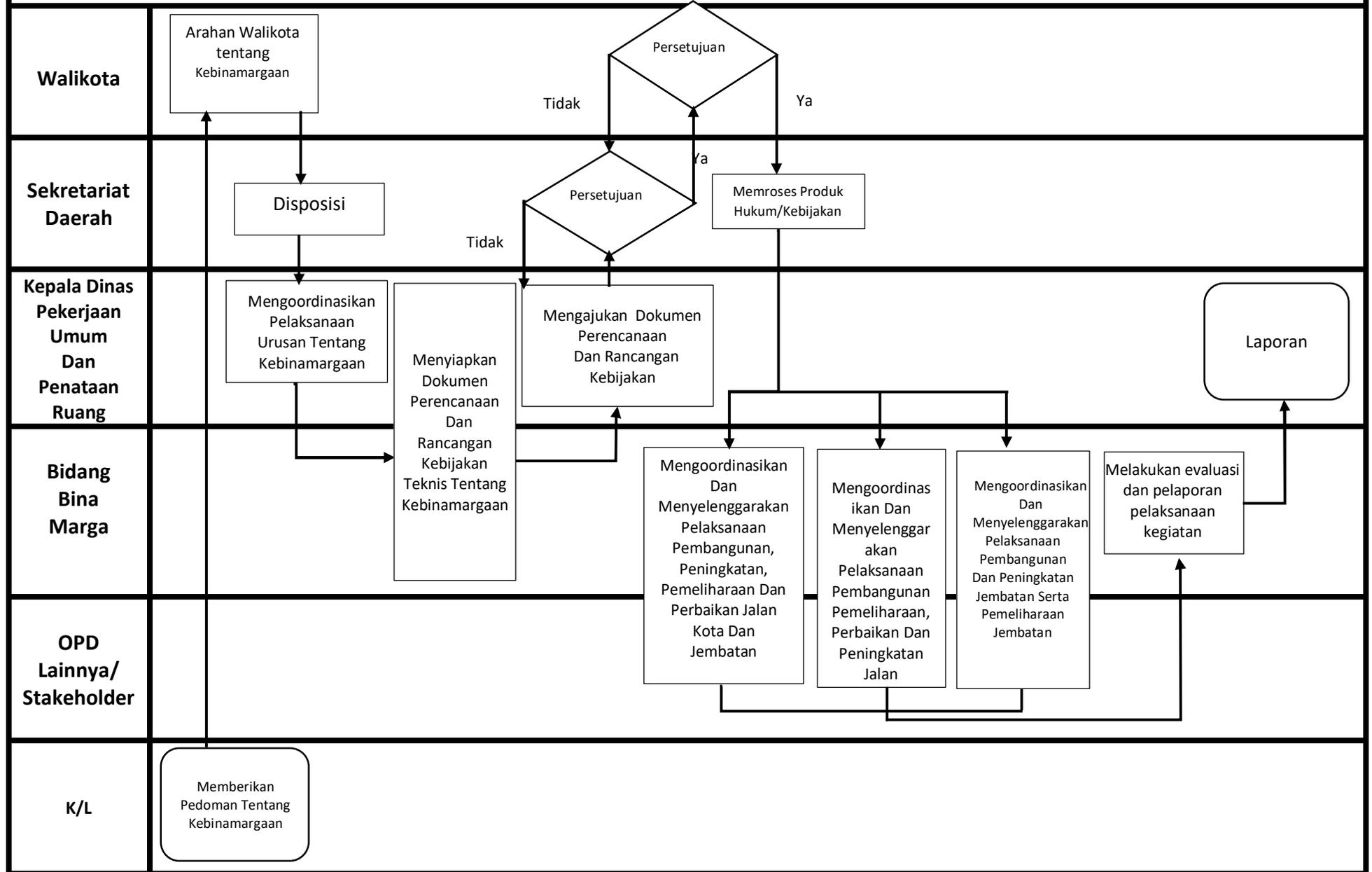
KT.10.01 : Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase



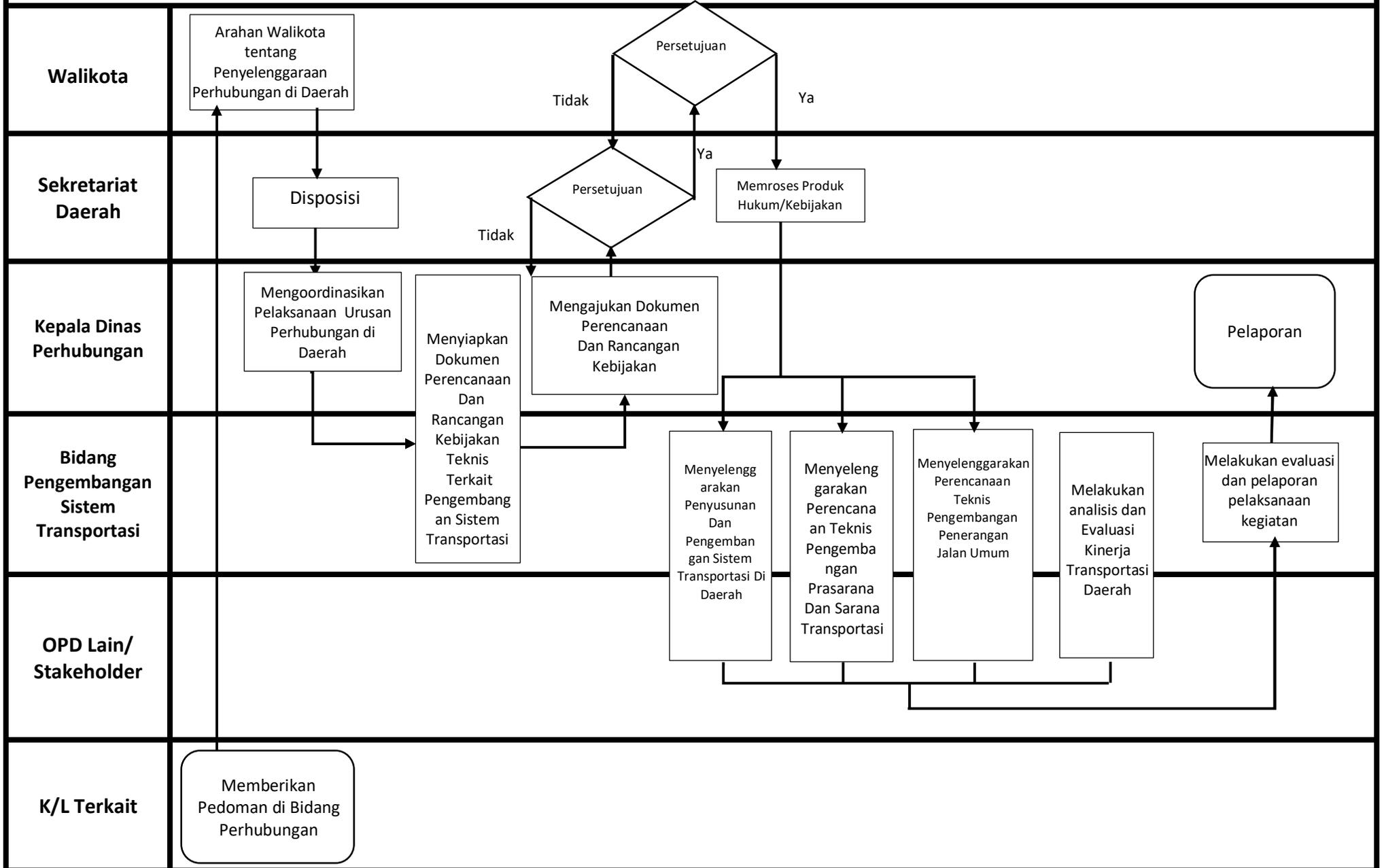
KT.10.02 : Operasional dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase



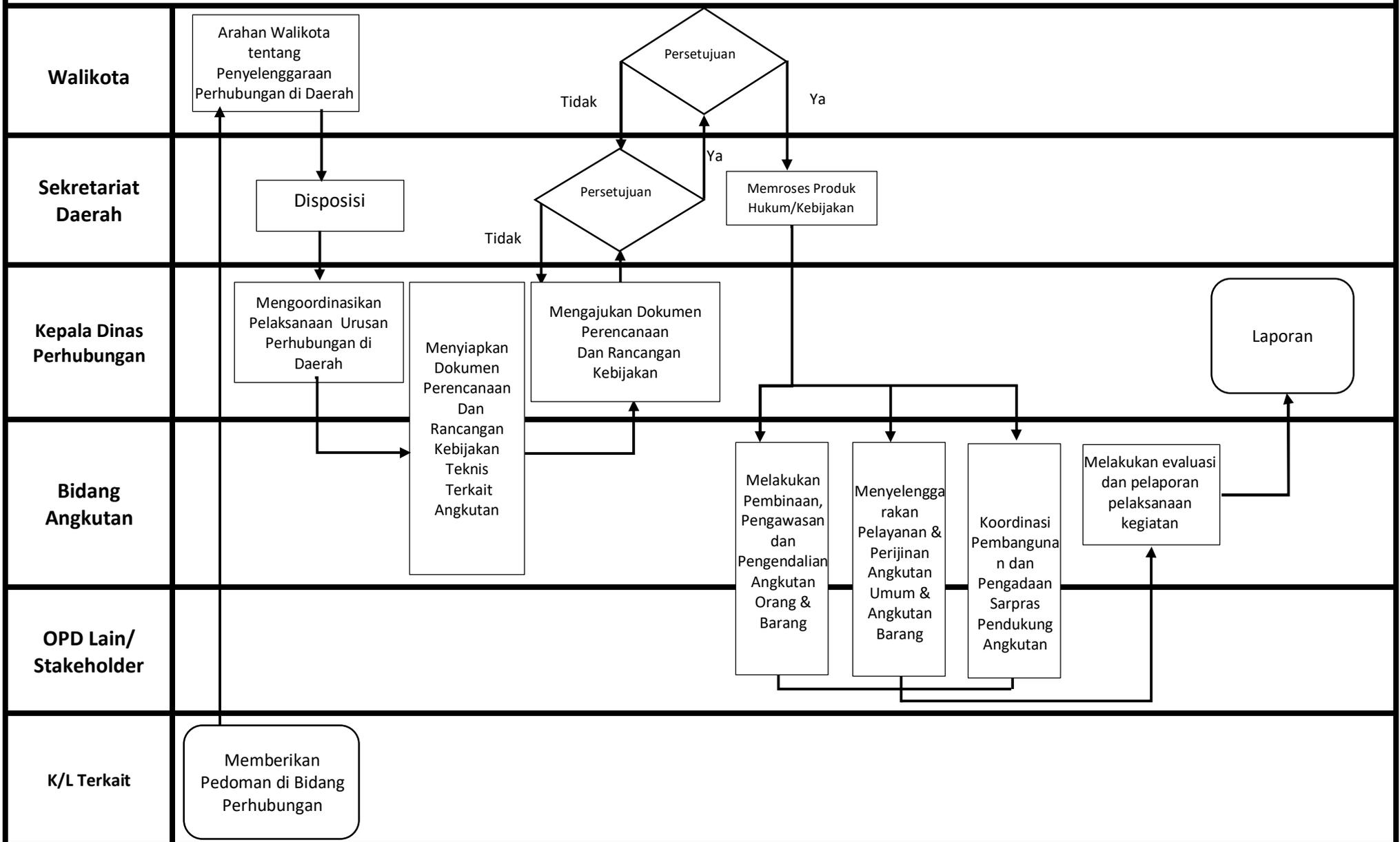
KT.10.03 : Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan



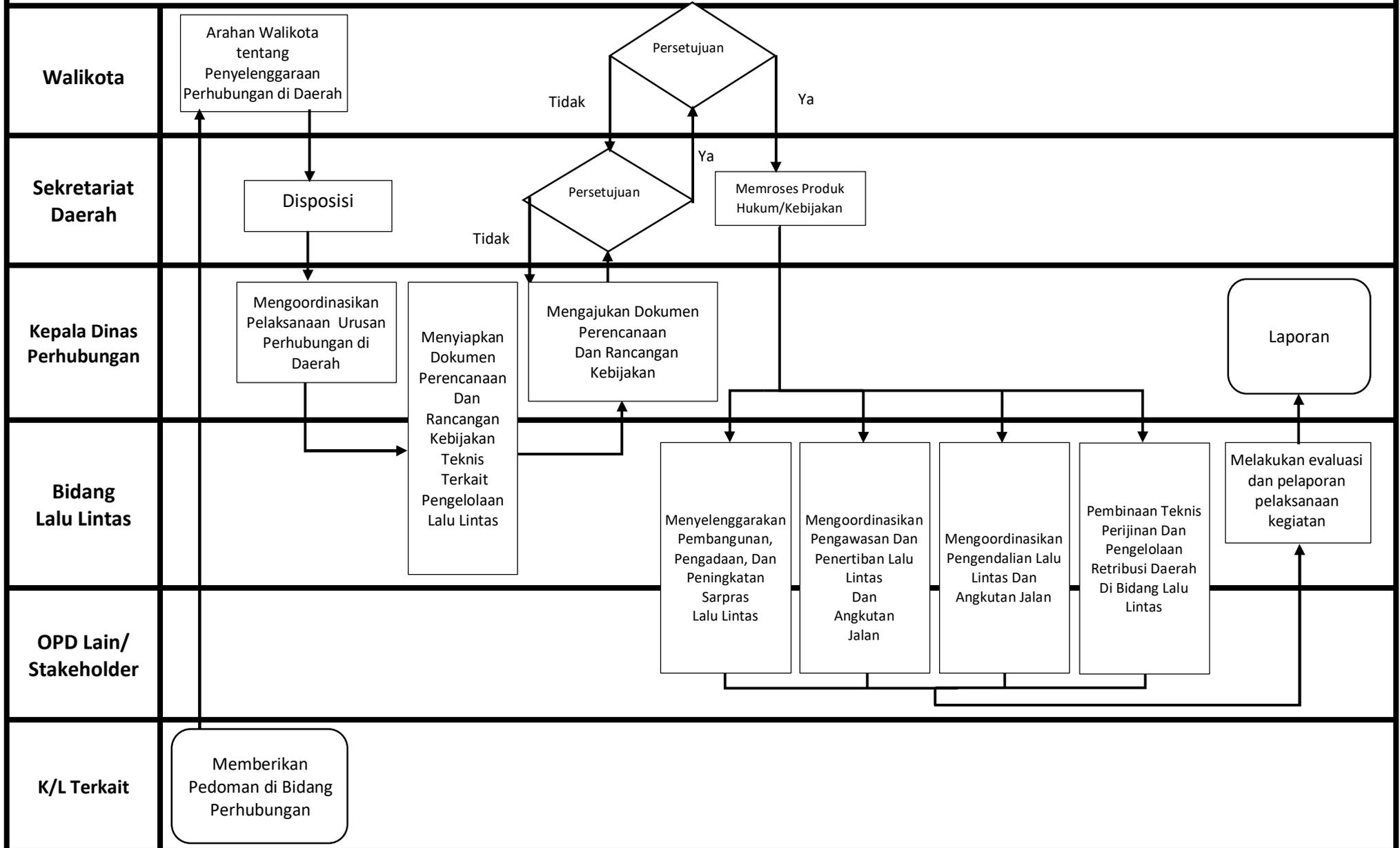
KT.10.04 : Pengembangan Sistem Transportasi



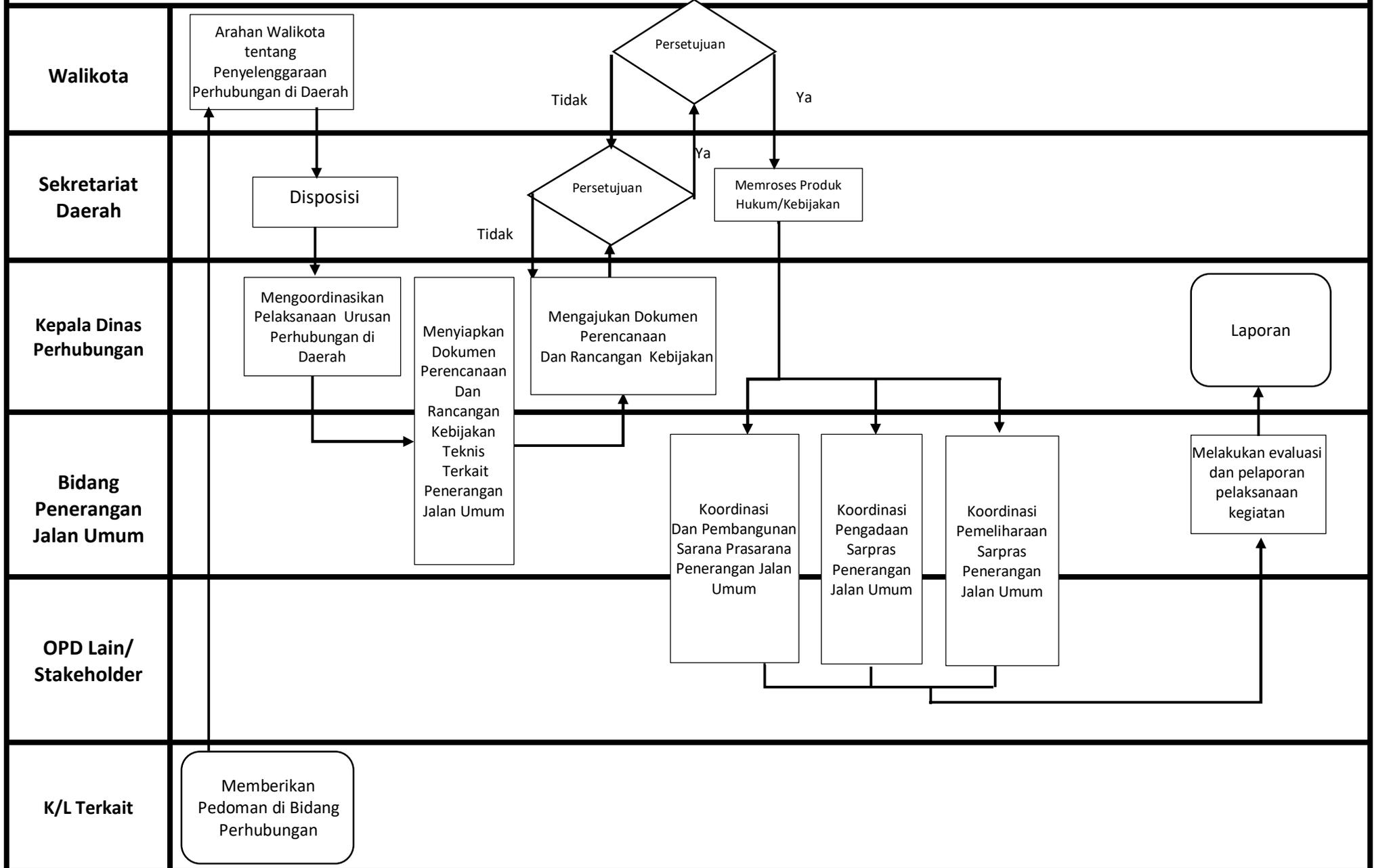
KT.10.05 : Pengelolaan Angkutan



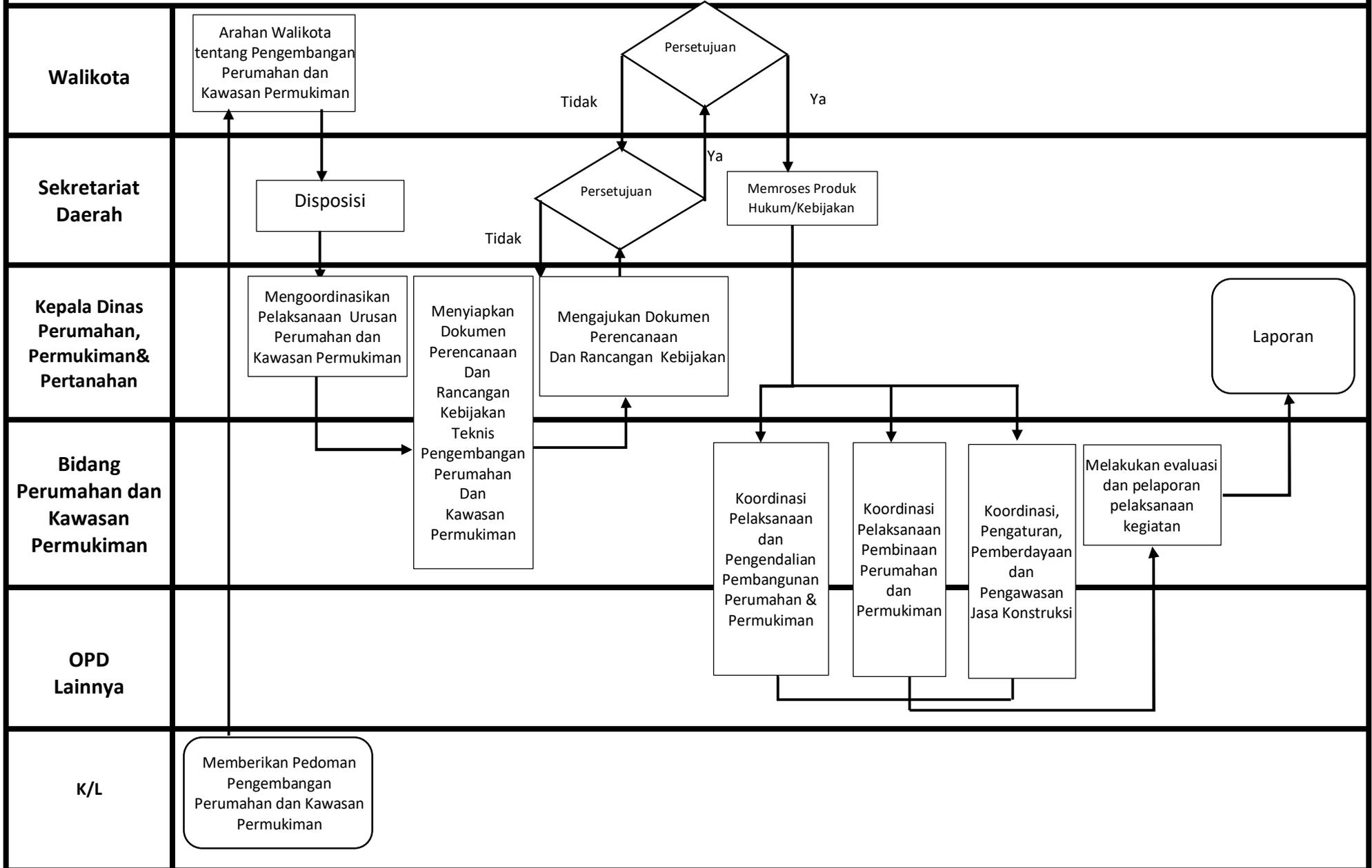
KT.10.06 : Pengelolaan Lalu Lintas



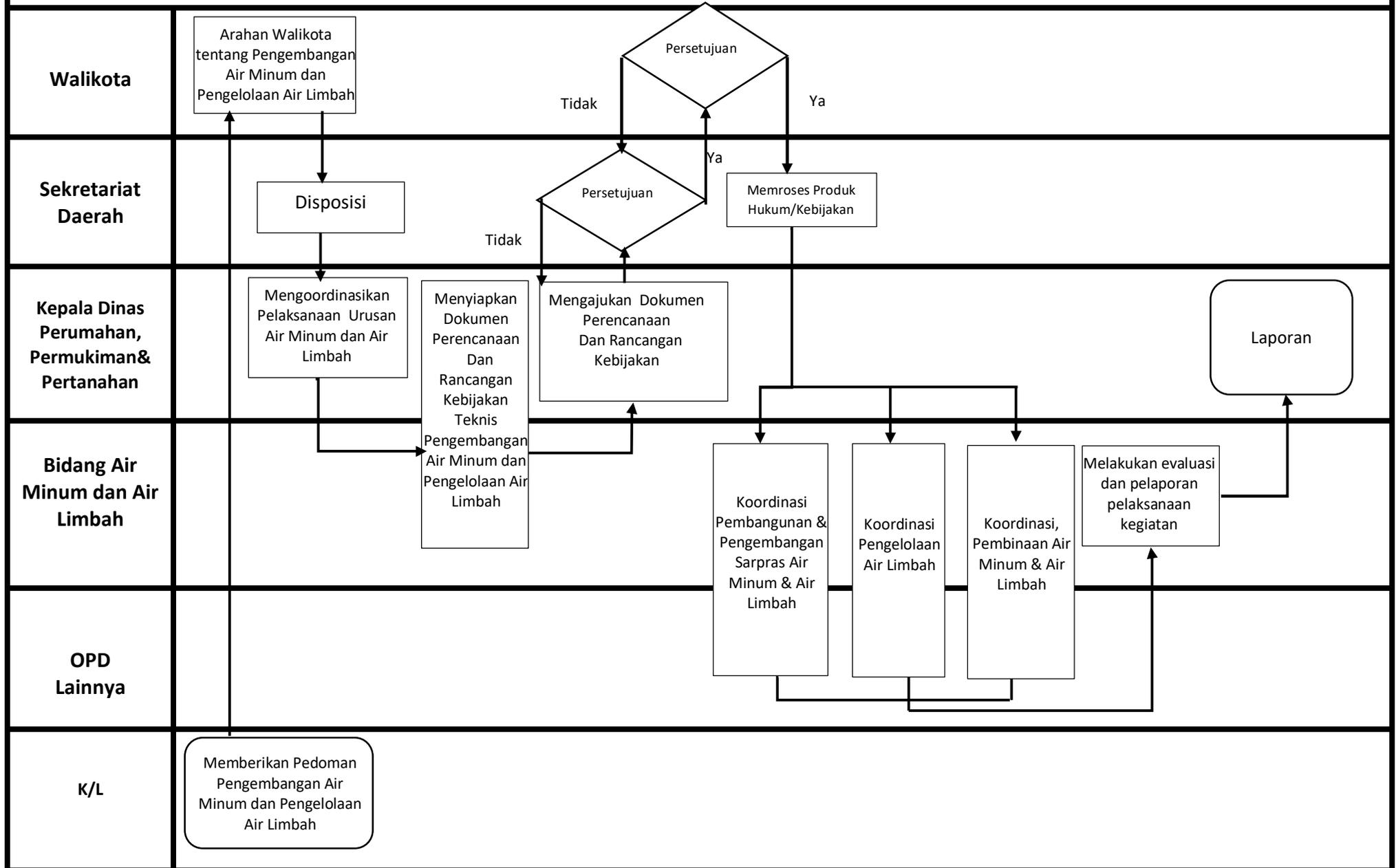
KT.10.07 : Pengembangan Dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum



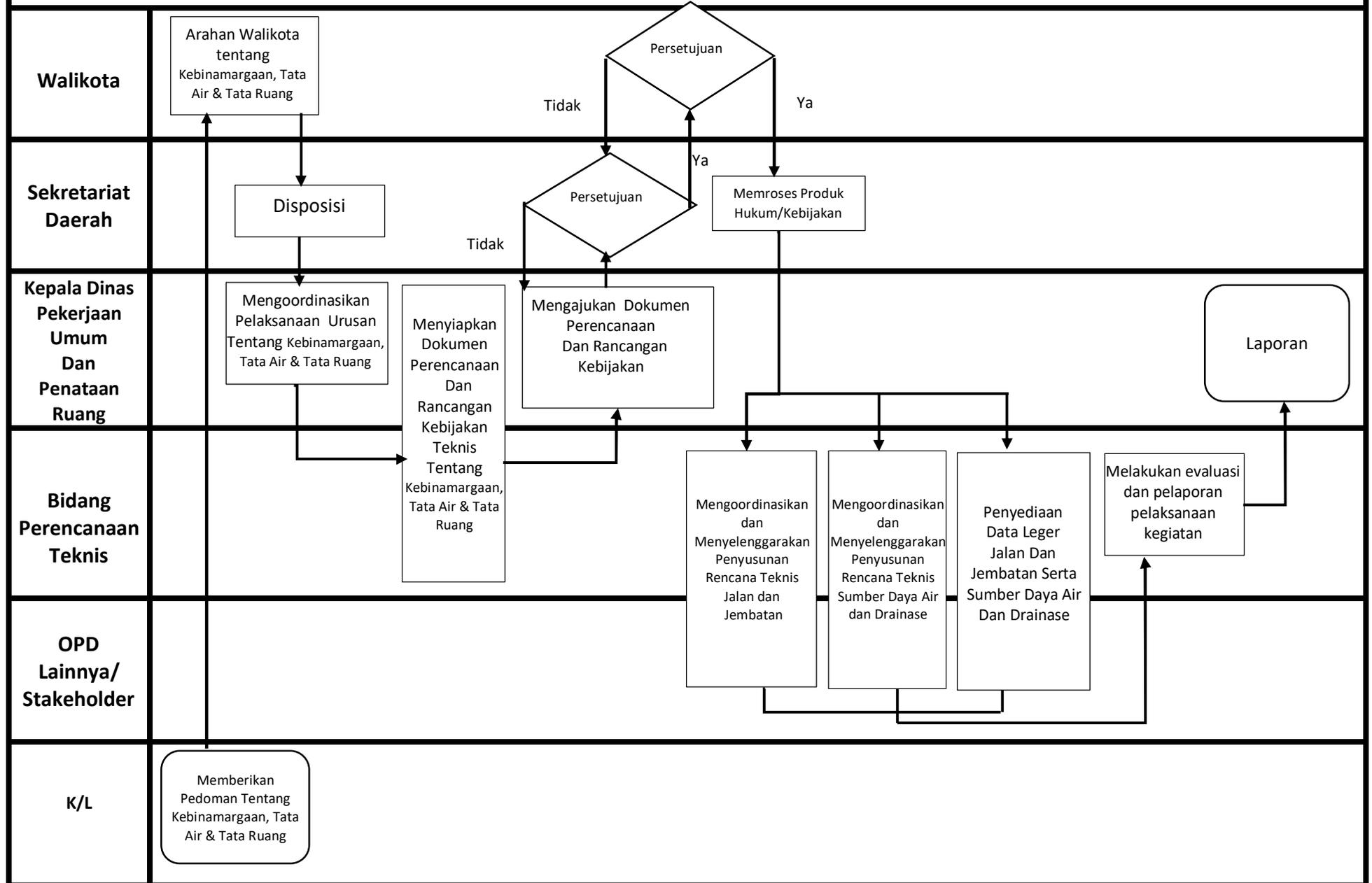
KT.11.01 : Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman



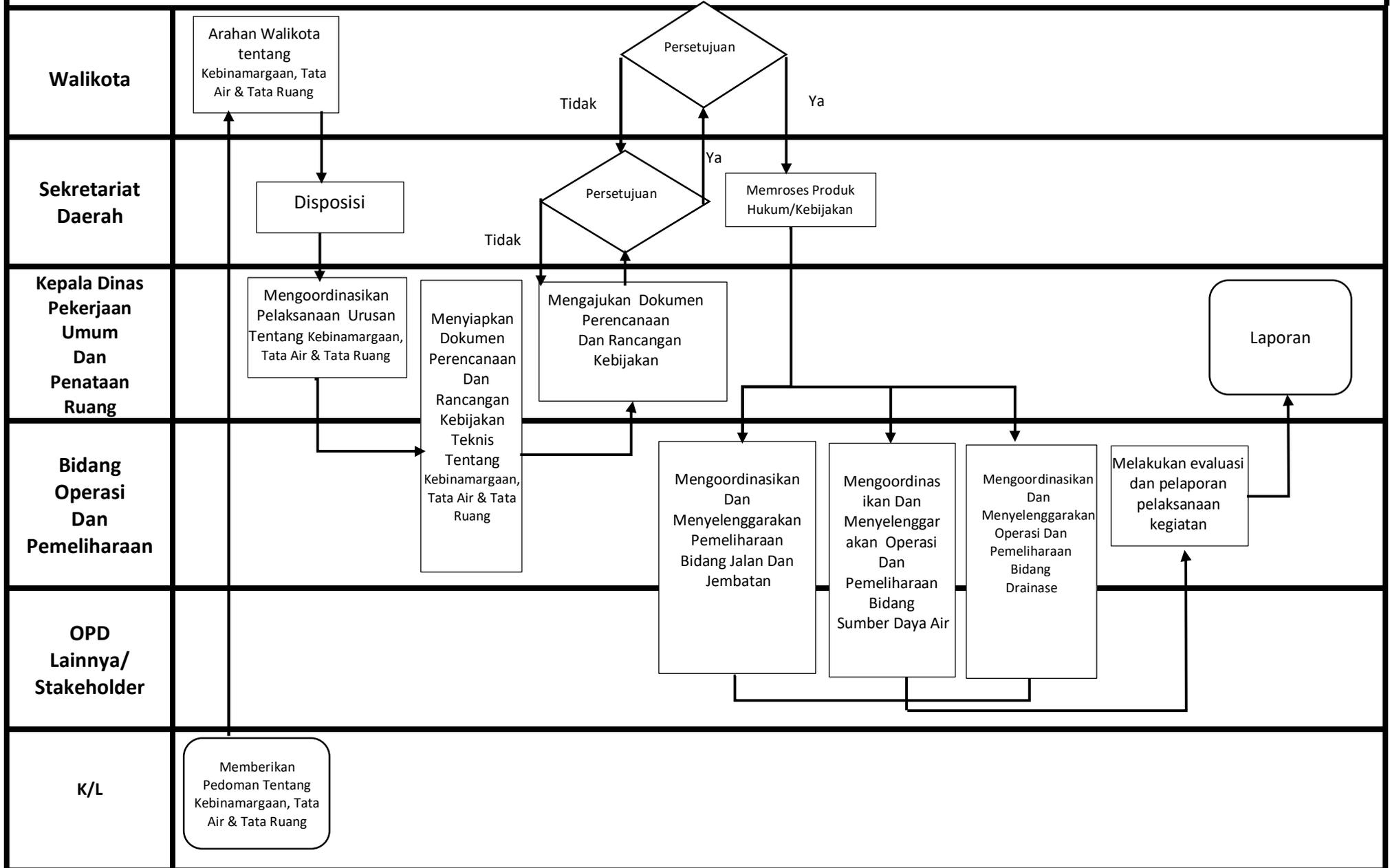
KT.11.02 : Pengembangan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah



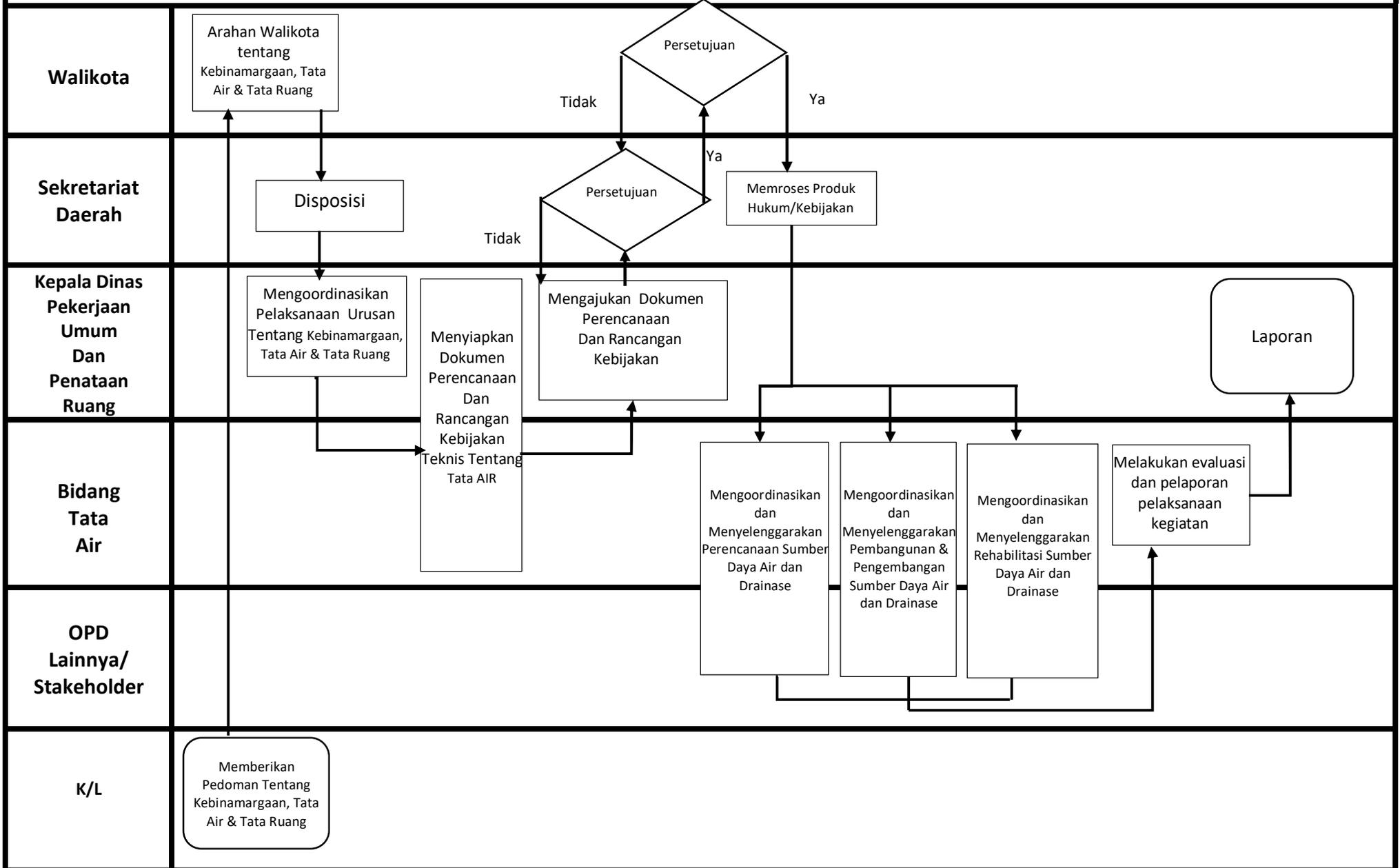
KT.11.03 : Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase



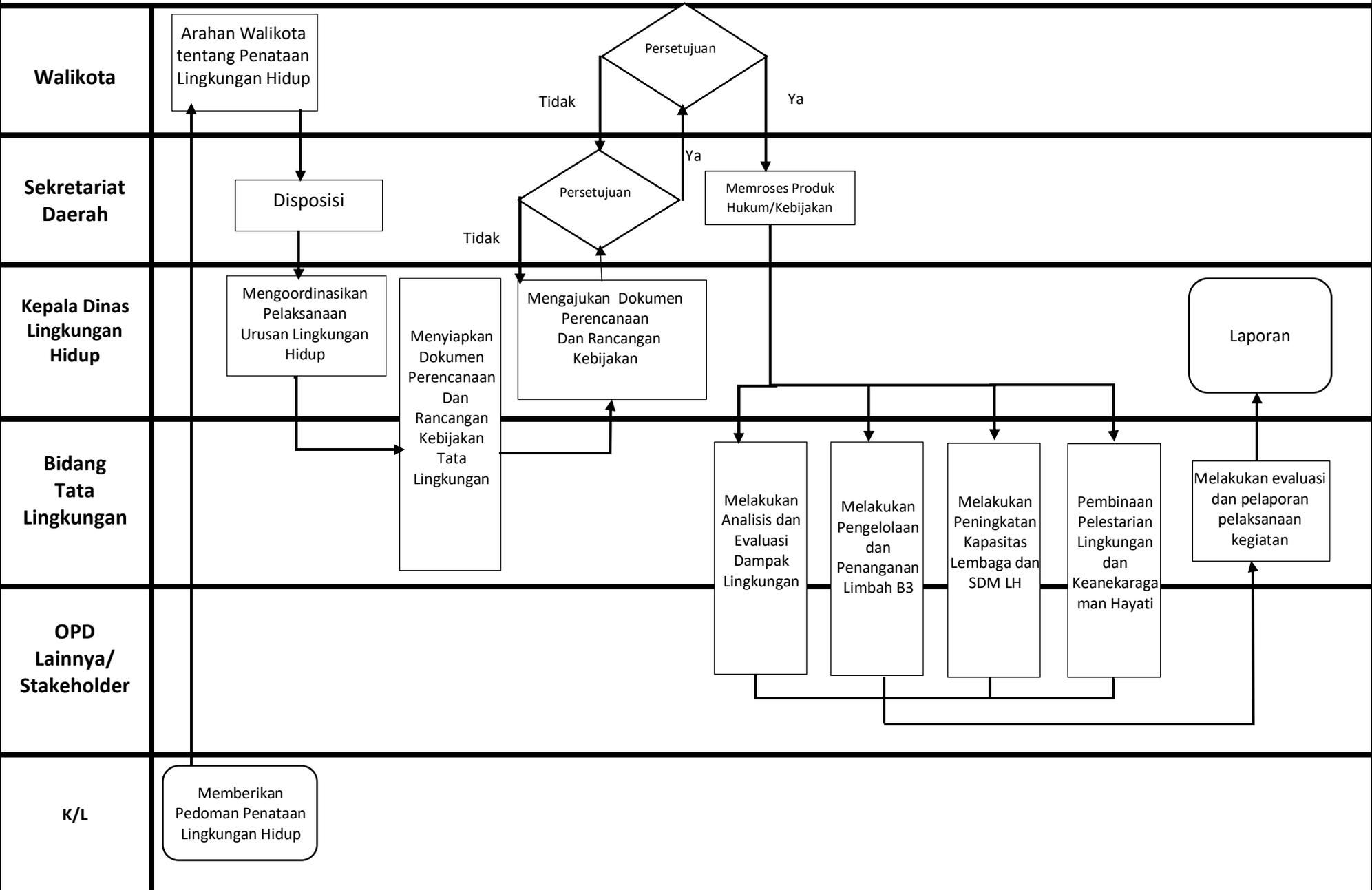
KT.11.04 : Operasional Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air Dan Drainase



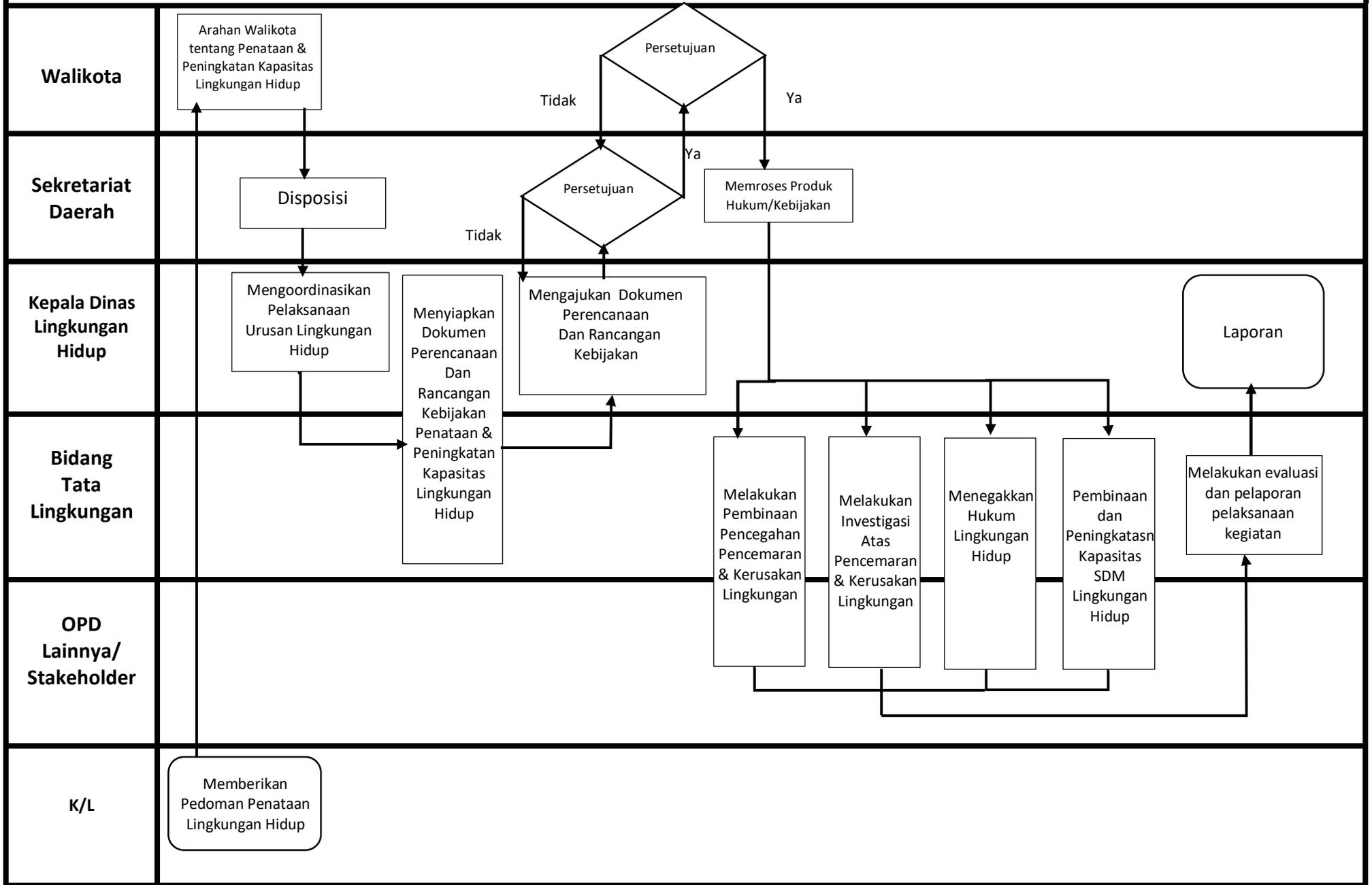
KT.11.05 : Pengembangan Sumber Daya Air dan Drainase



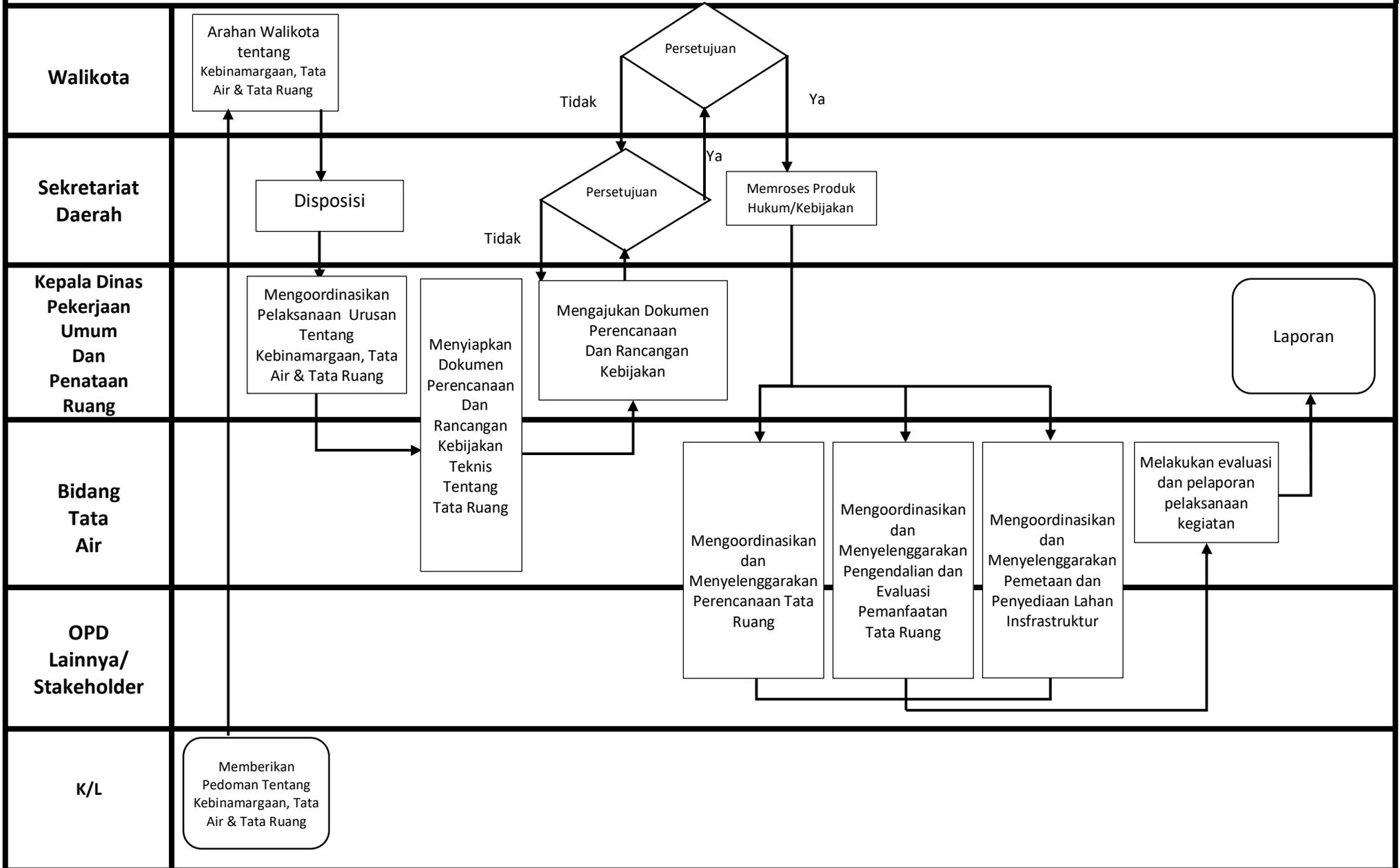
KT.11.06 : Penataan Lingkungan Hidup



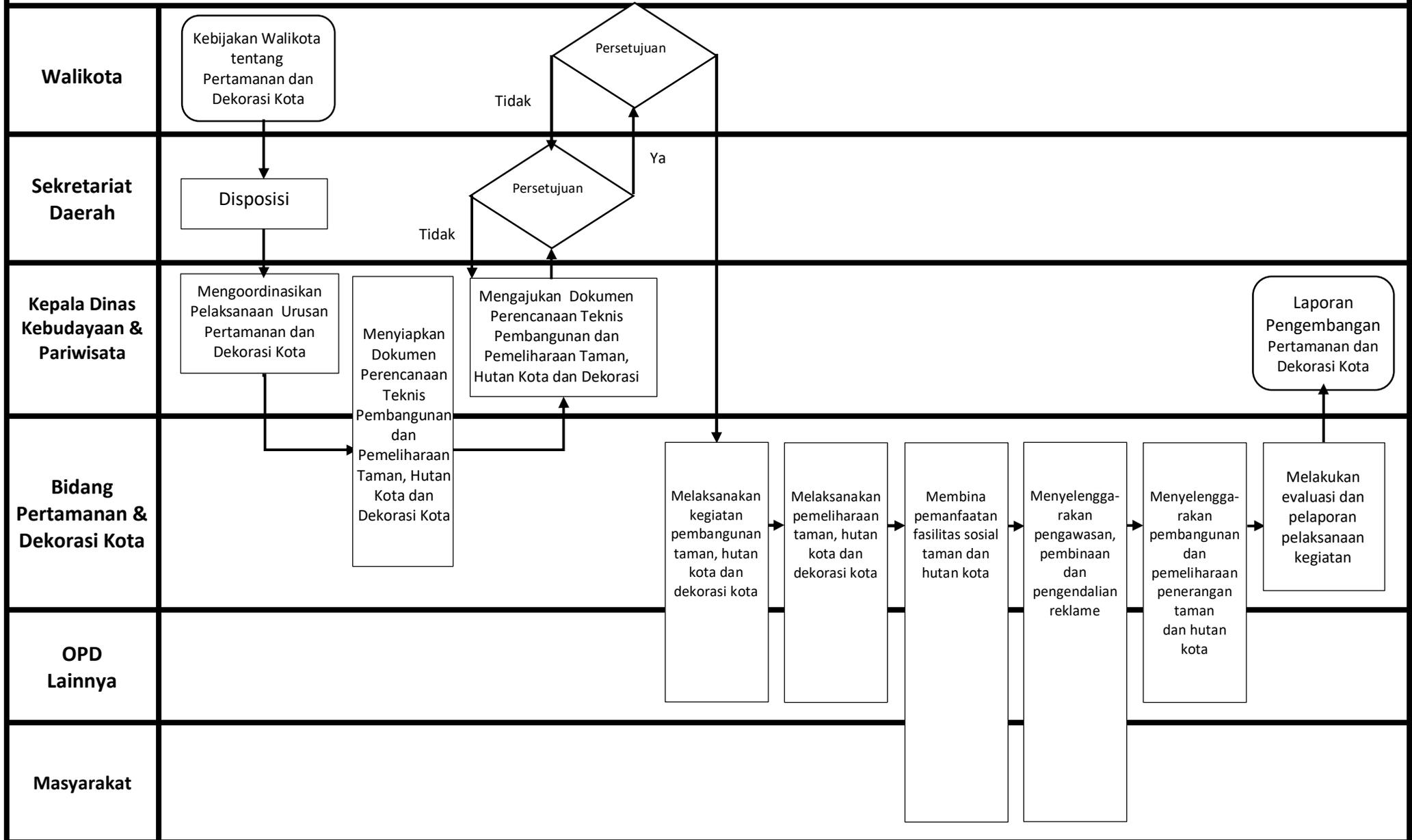
KT.11.07 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup



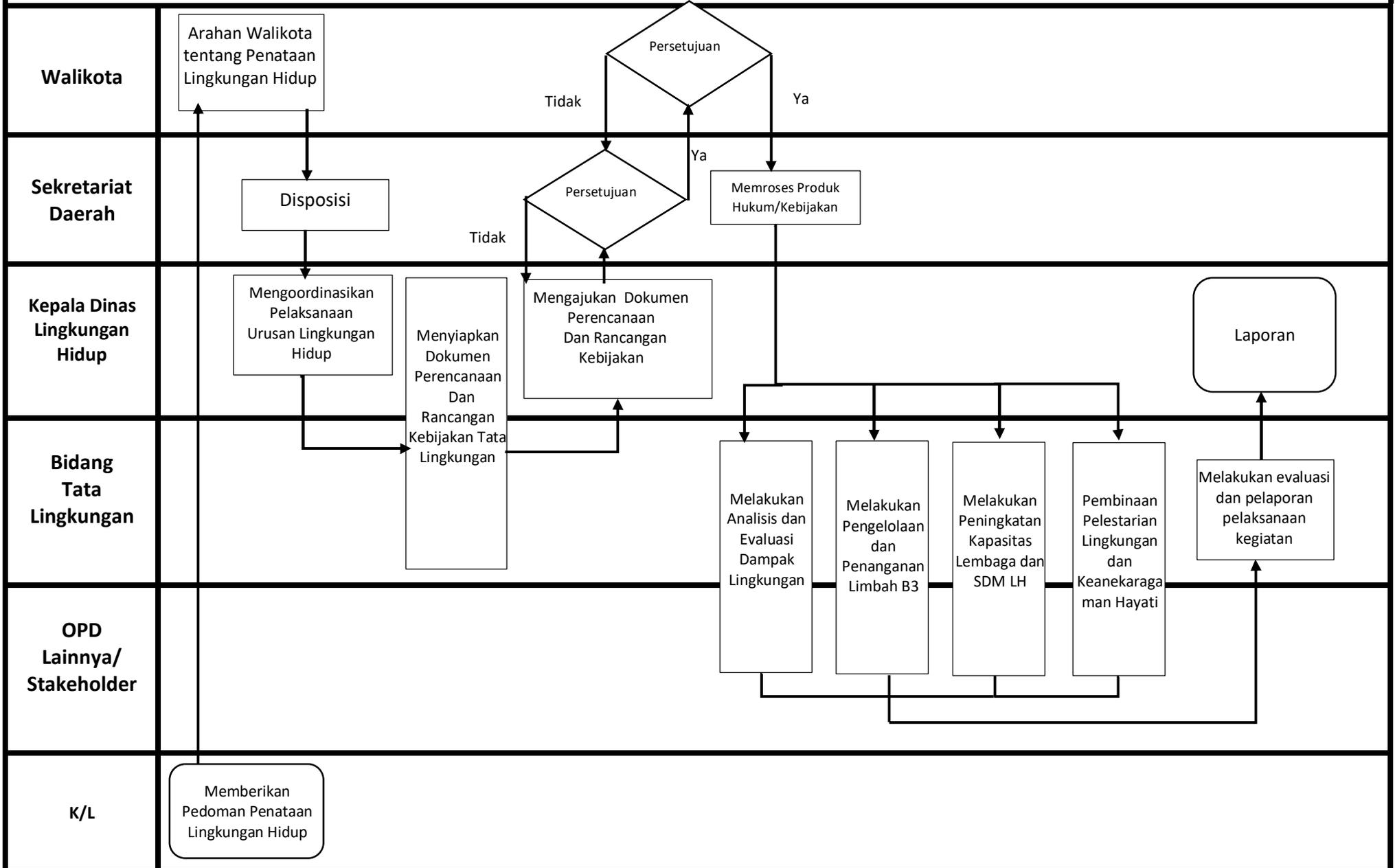
KT.12.01 : Penataan Ruang



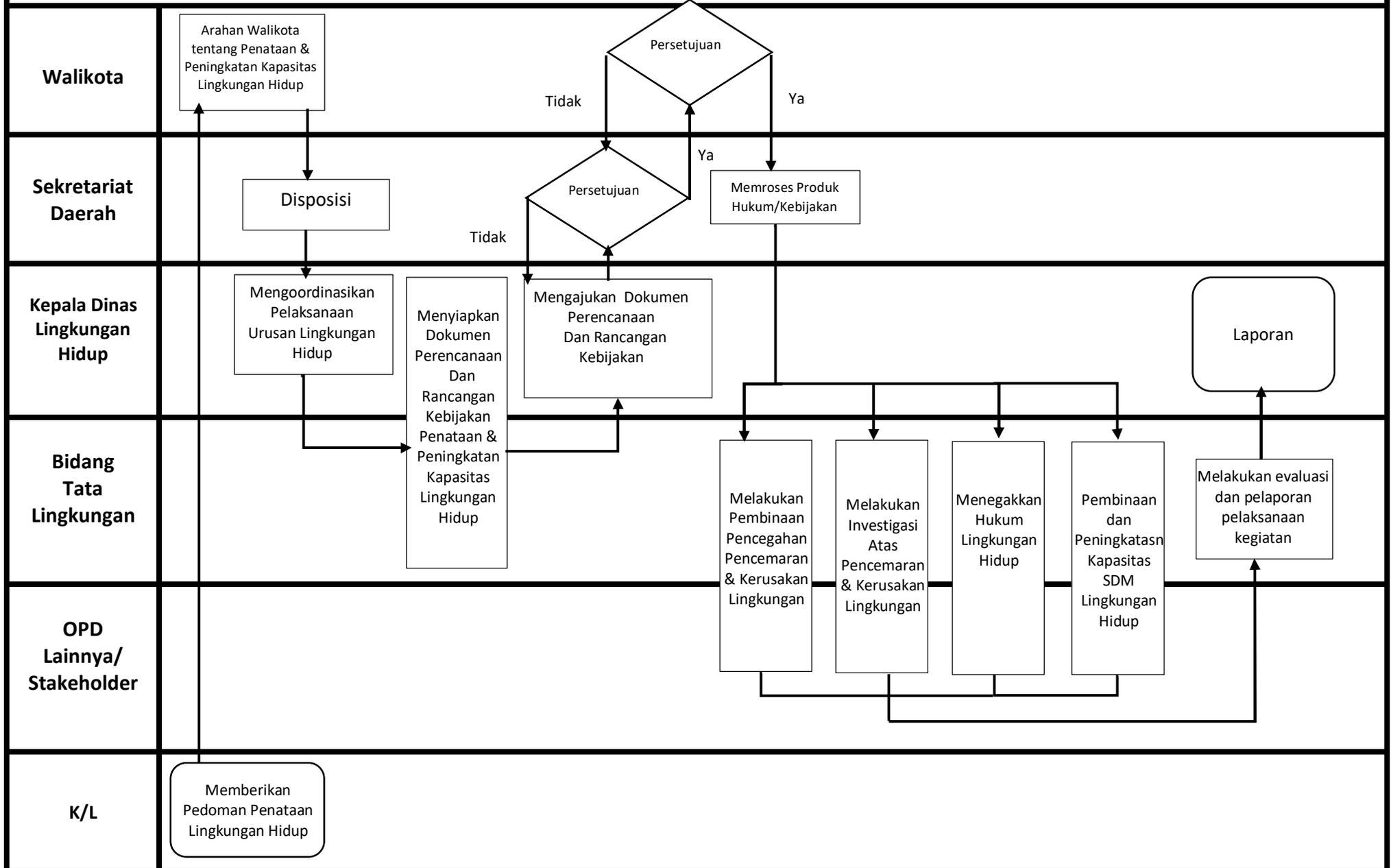
KT.12.02 : Pengembangan Pertamanan dan Dekorasi Kota



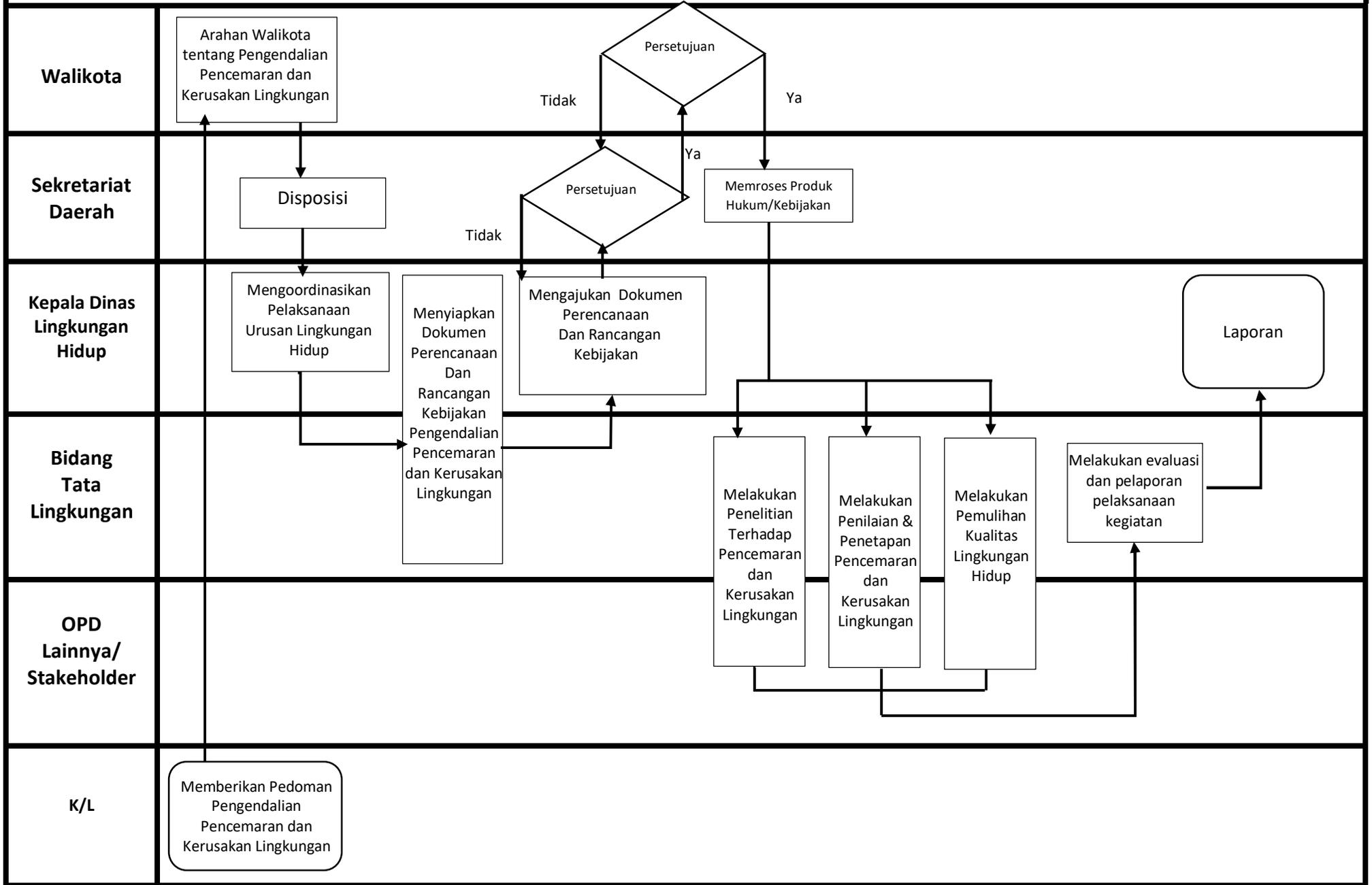
KT.13.01 : Penataan Lingkungan Hidup



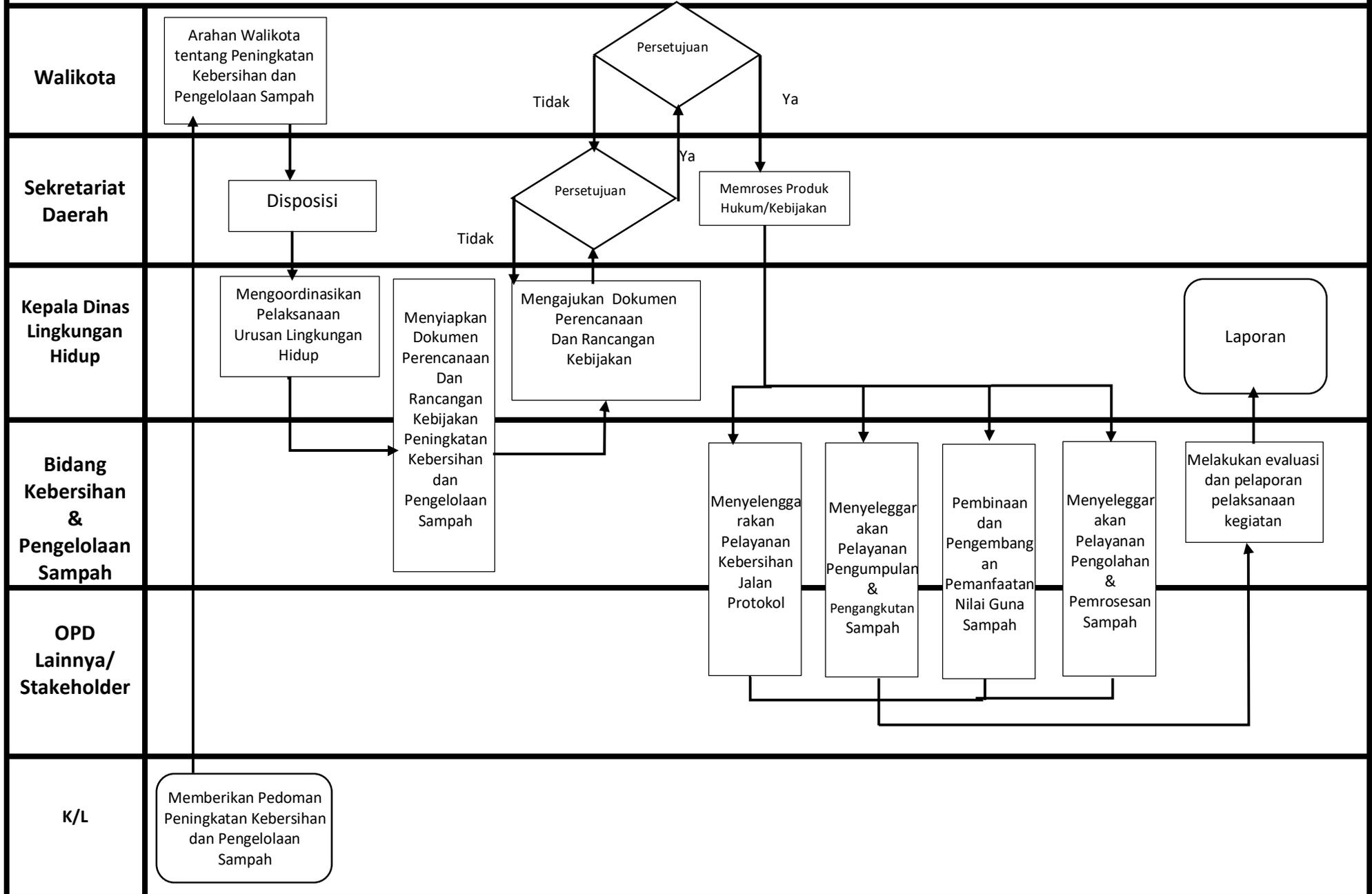
KT.13.02 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup



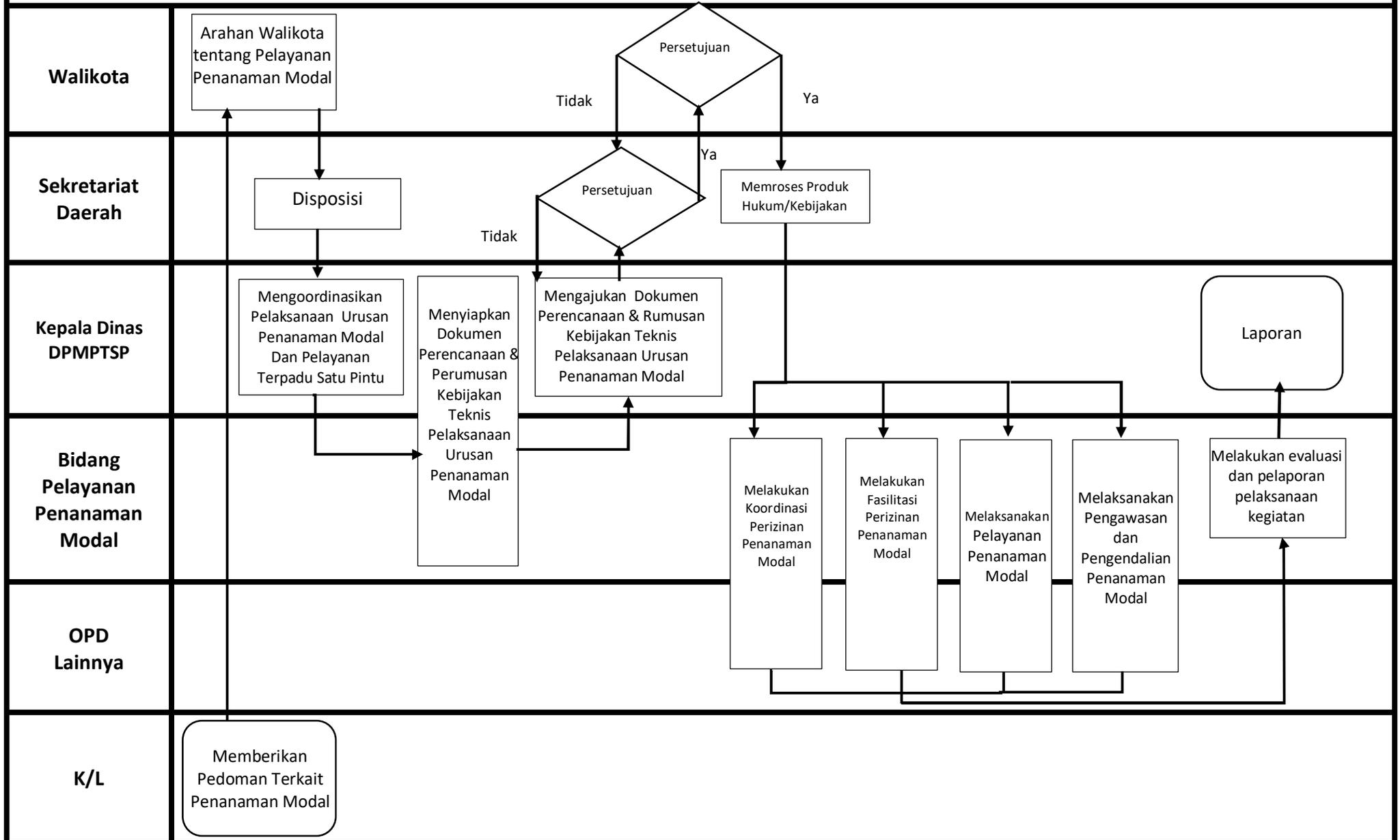
KT.13.03 : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



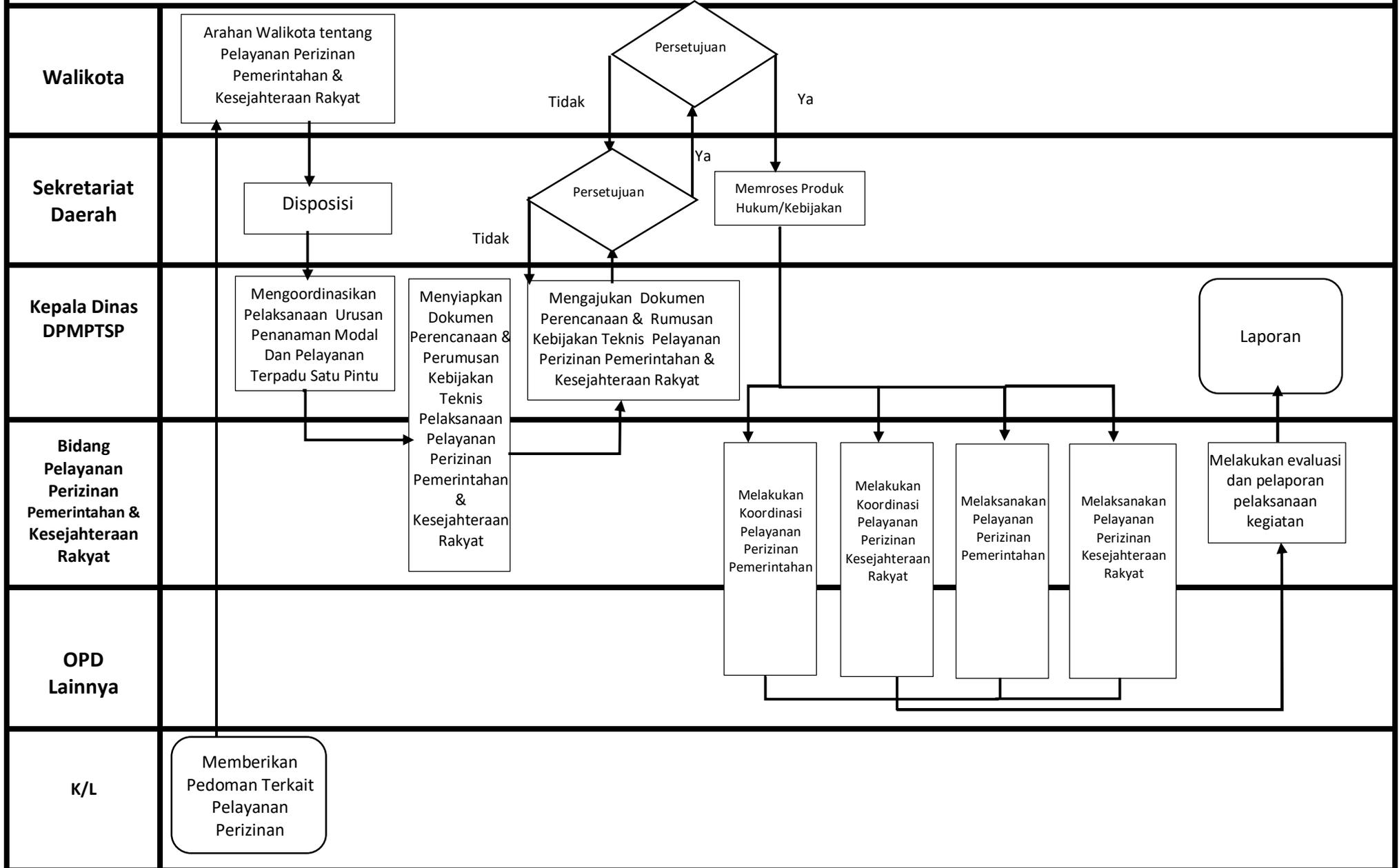
KT.13.04 : Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah



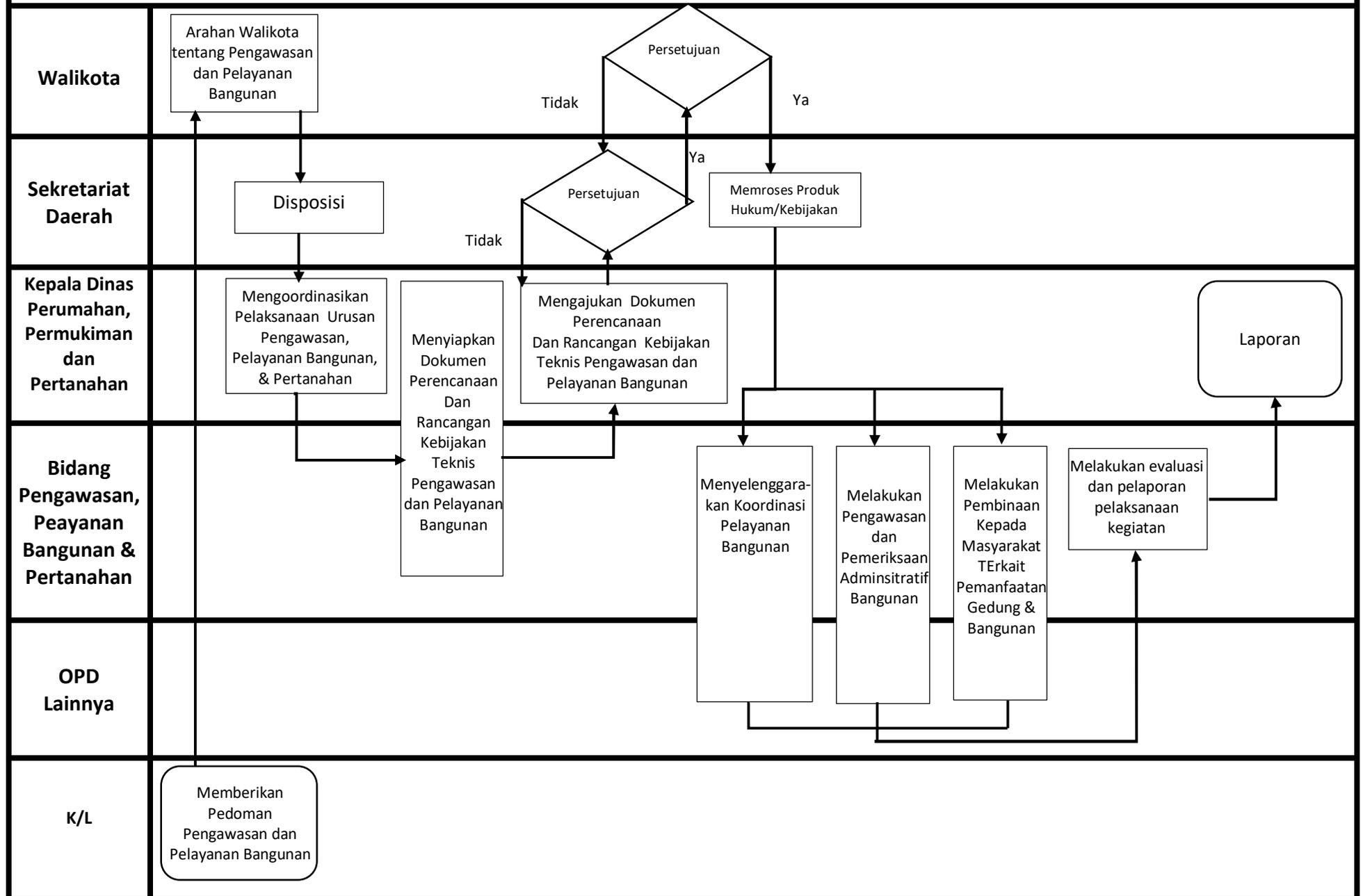
KT.14.01 : Pelayanan Penanaman Modal



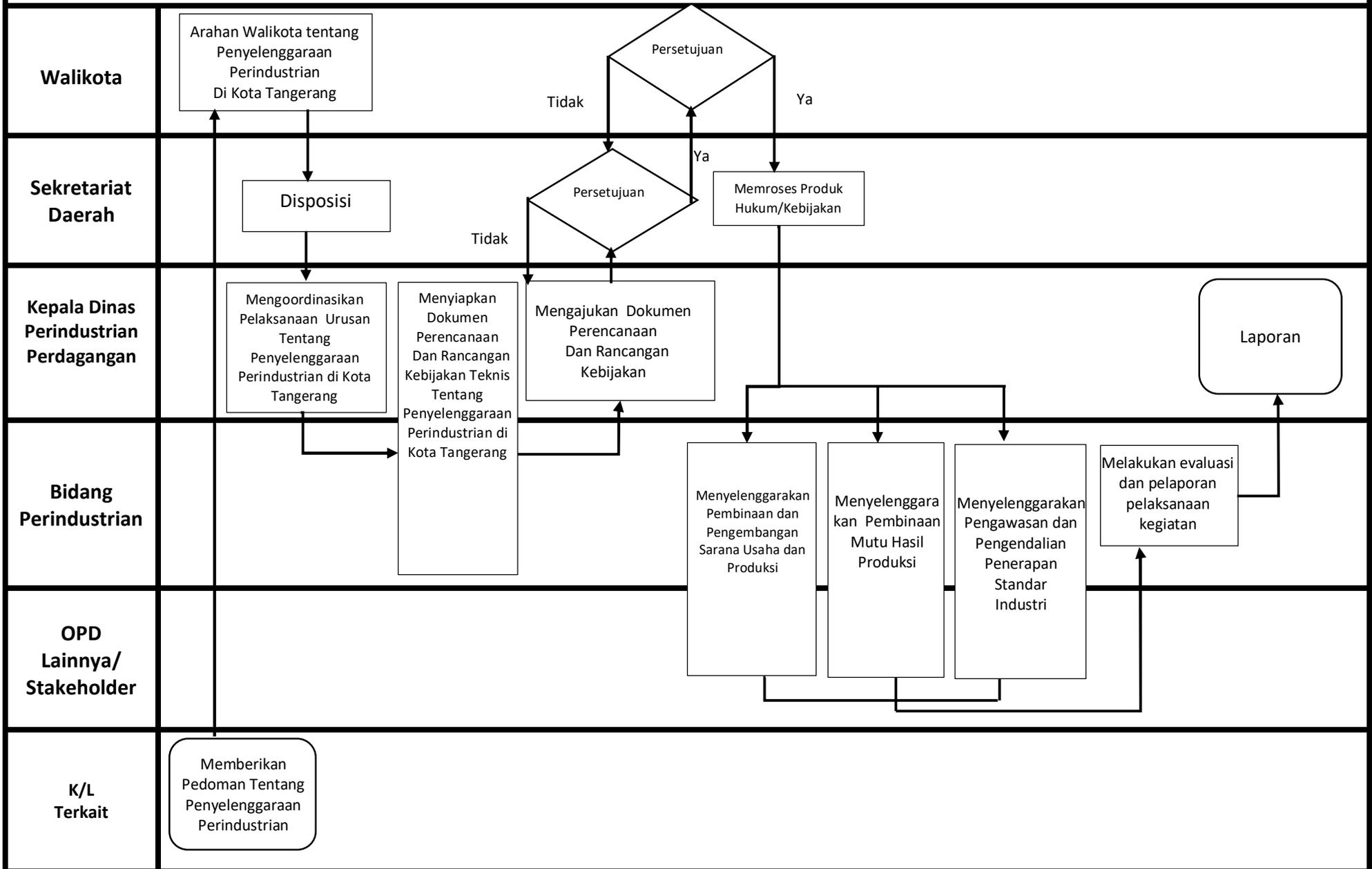
KT.14.02 : Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat



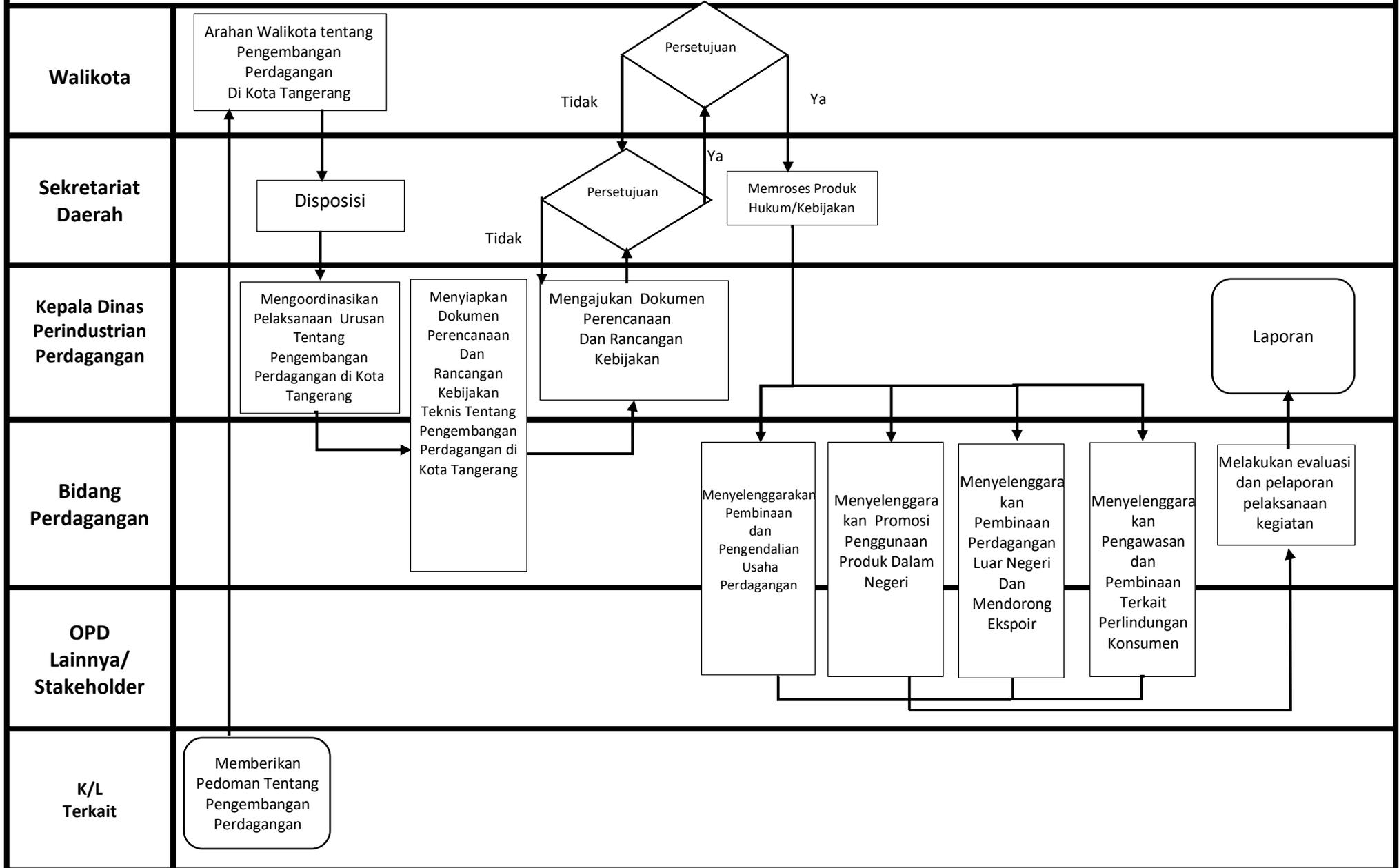
KT.14.05 : Pengawasan dan Pelayanan Bangunan



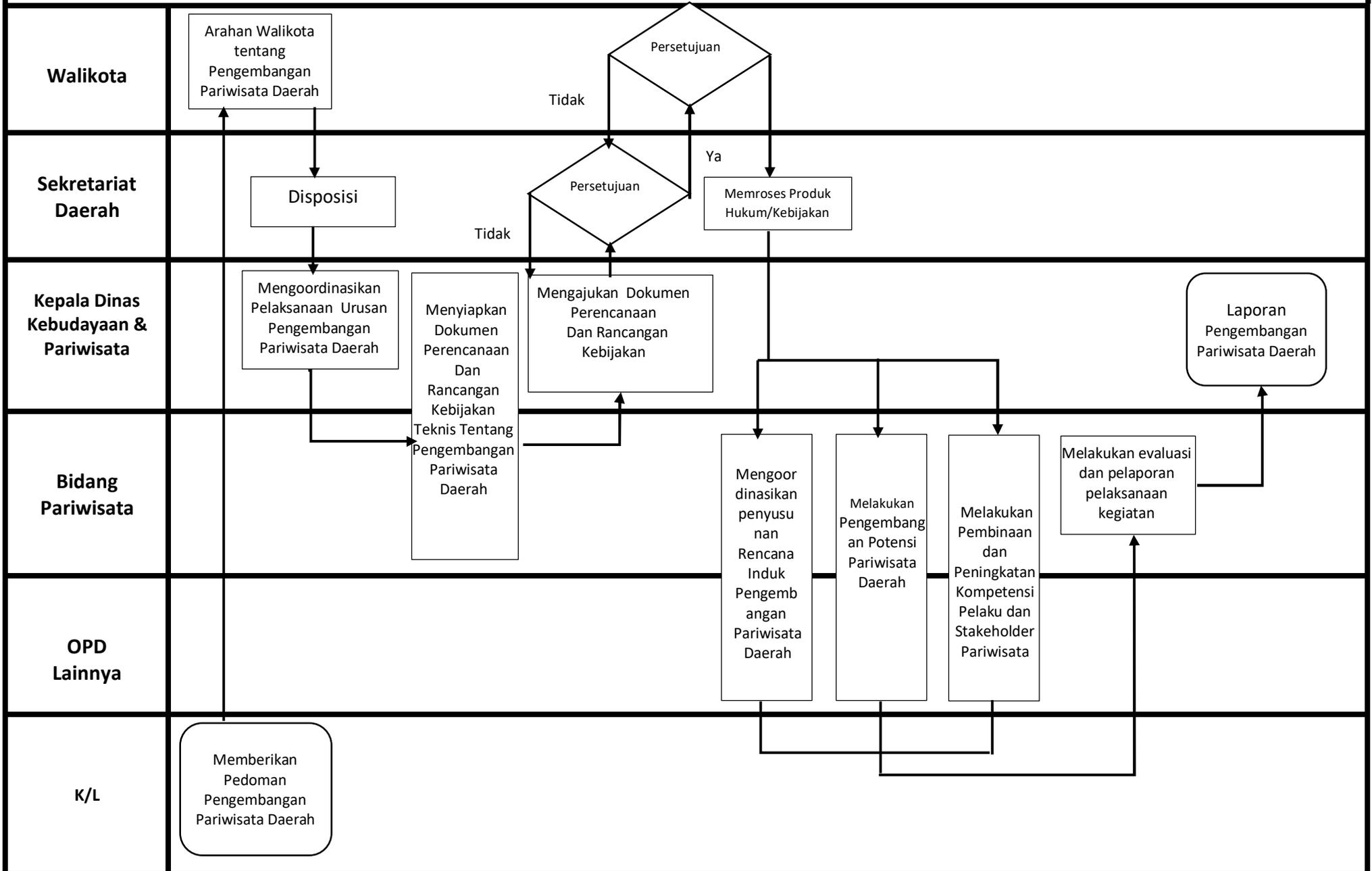
KT.14.06 : Pengembangan Perindustrian



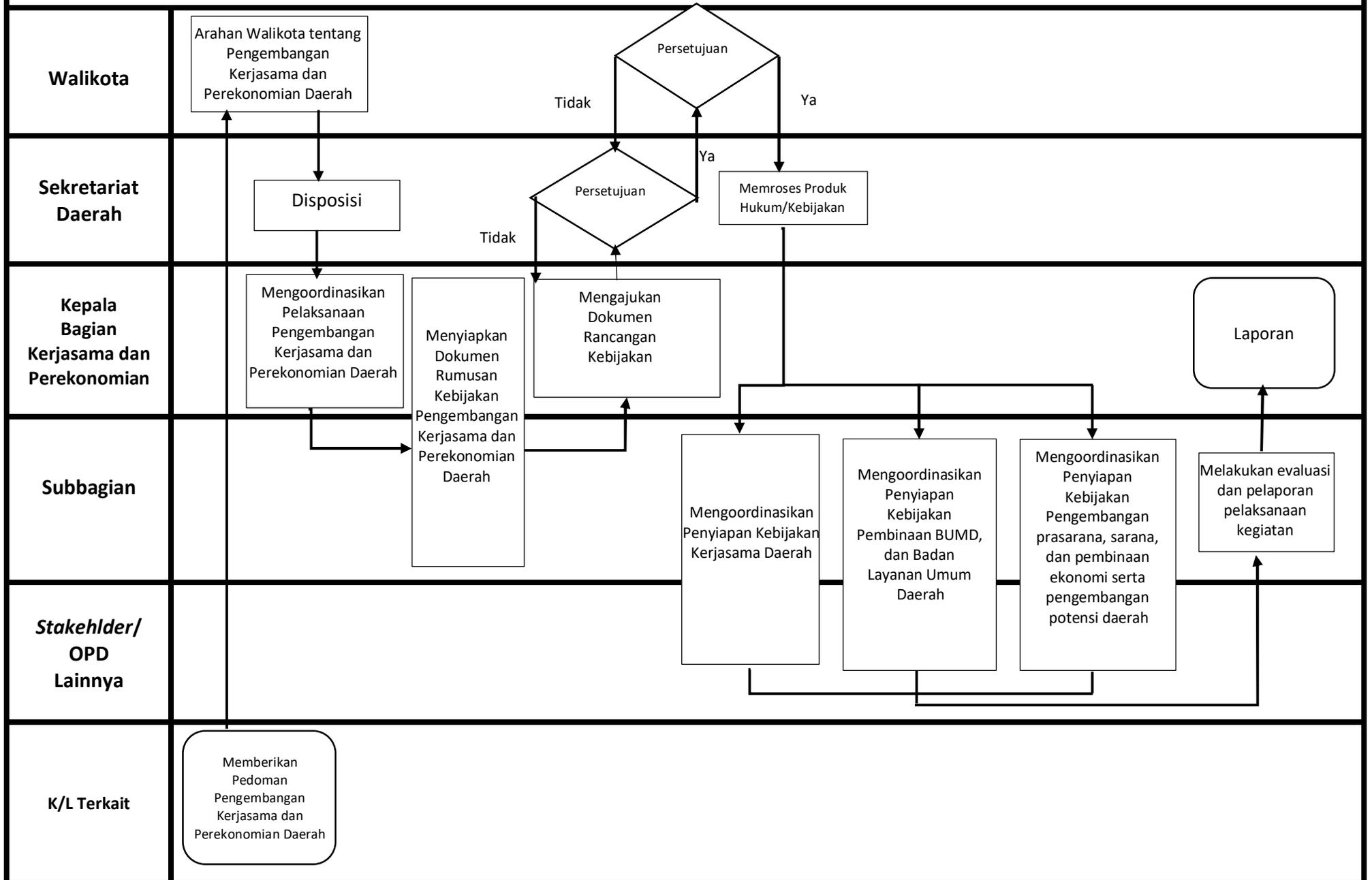
KT.14.07 : Pengembangan Perdagangan



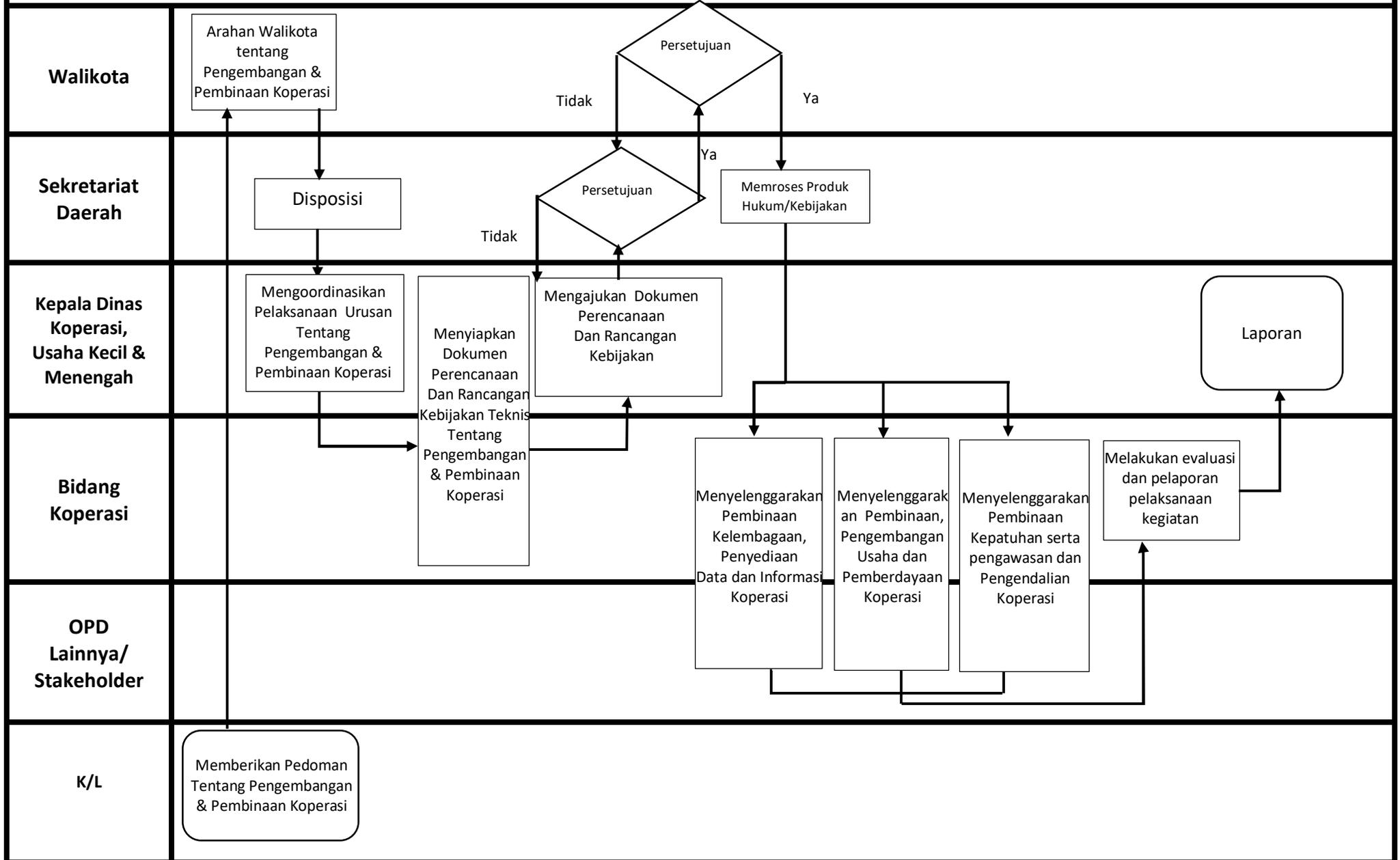
KT.14.08 : Pengembangan Priwisata



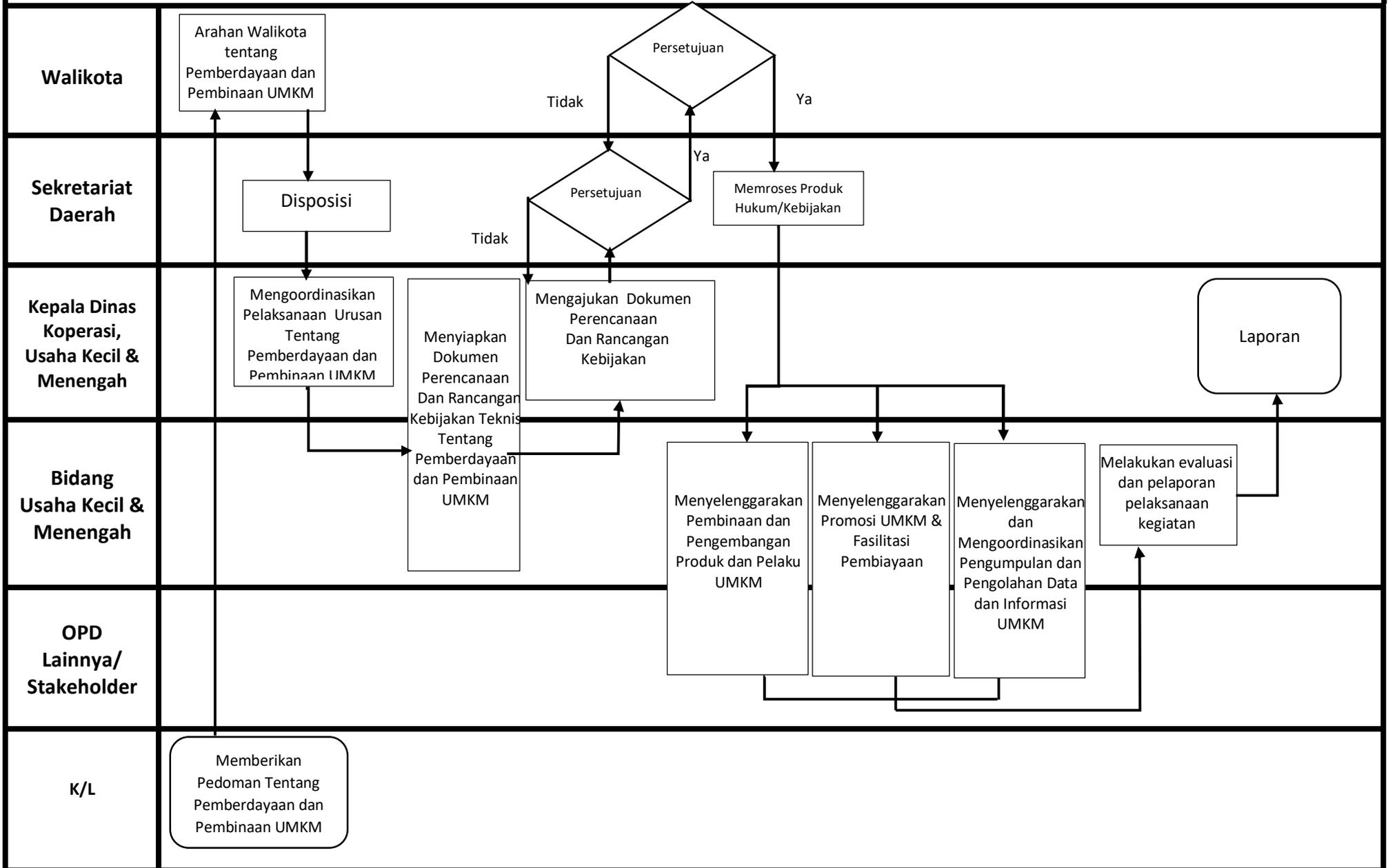
KT.14.09 : Pengembangan Kerjasama dan Perekonomian Daerah



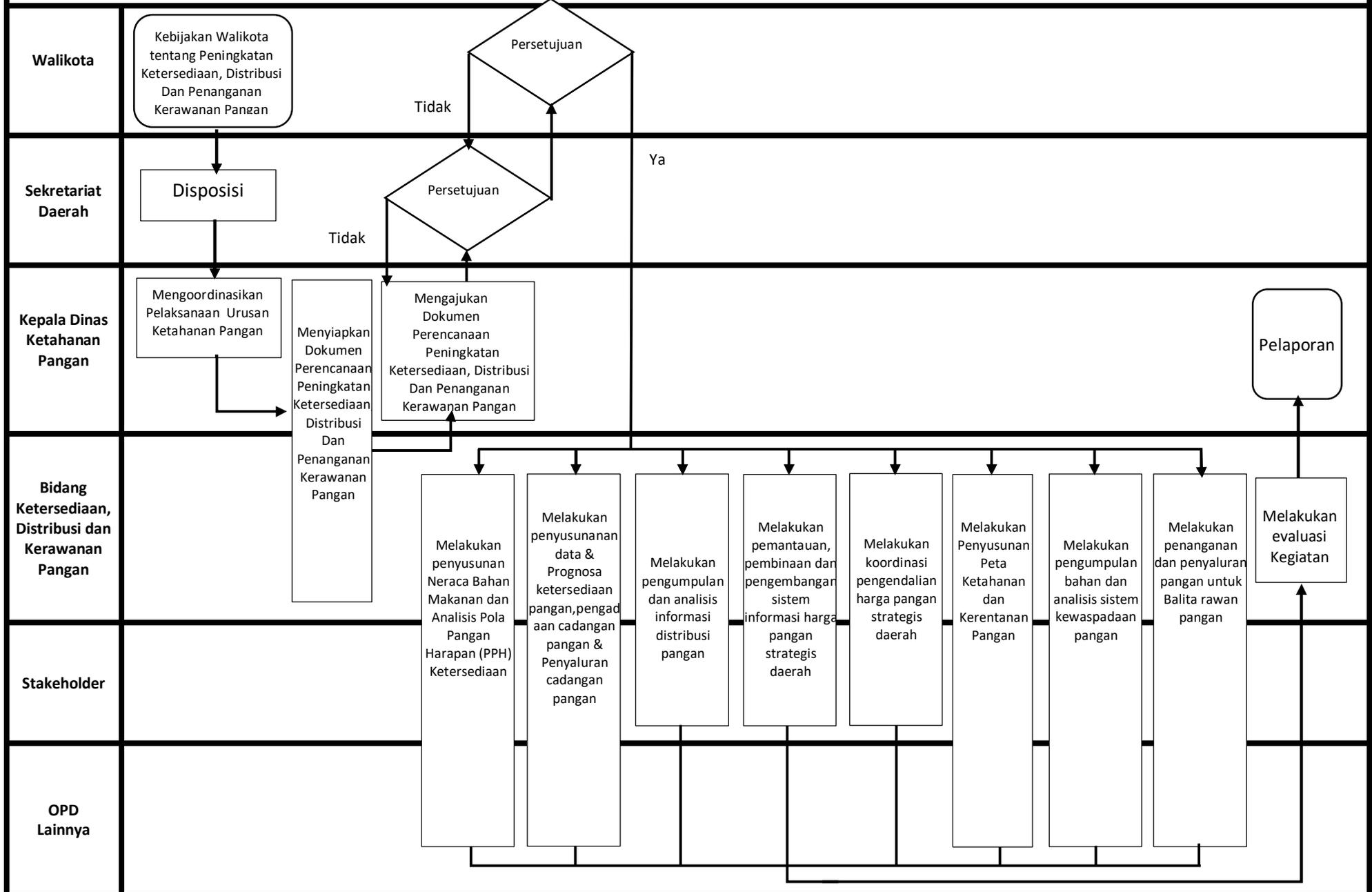
KT.15.01 : Pengembangan dan Pembinaan Koperasi



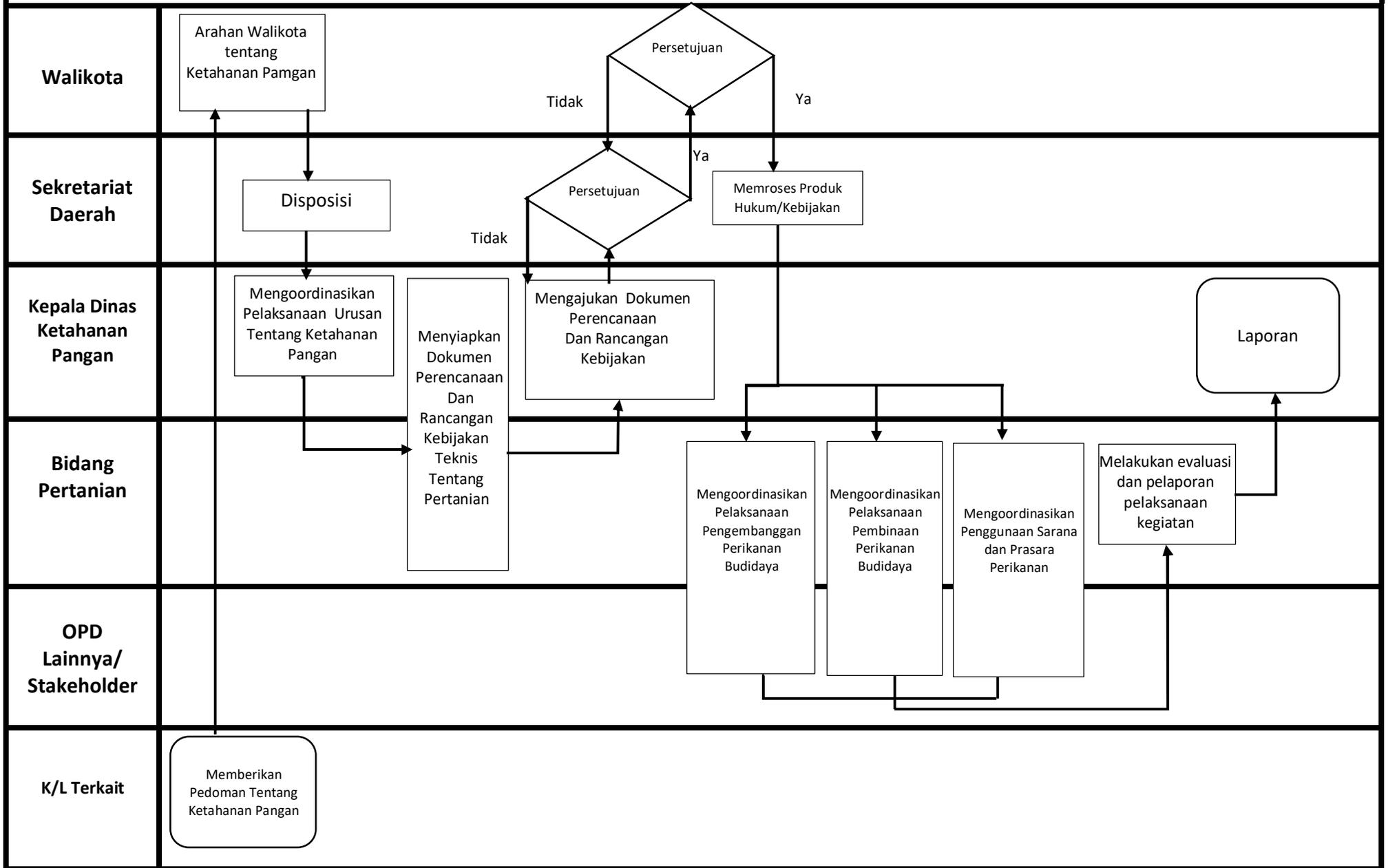
KT.15.02 : Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM



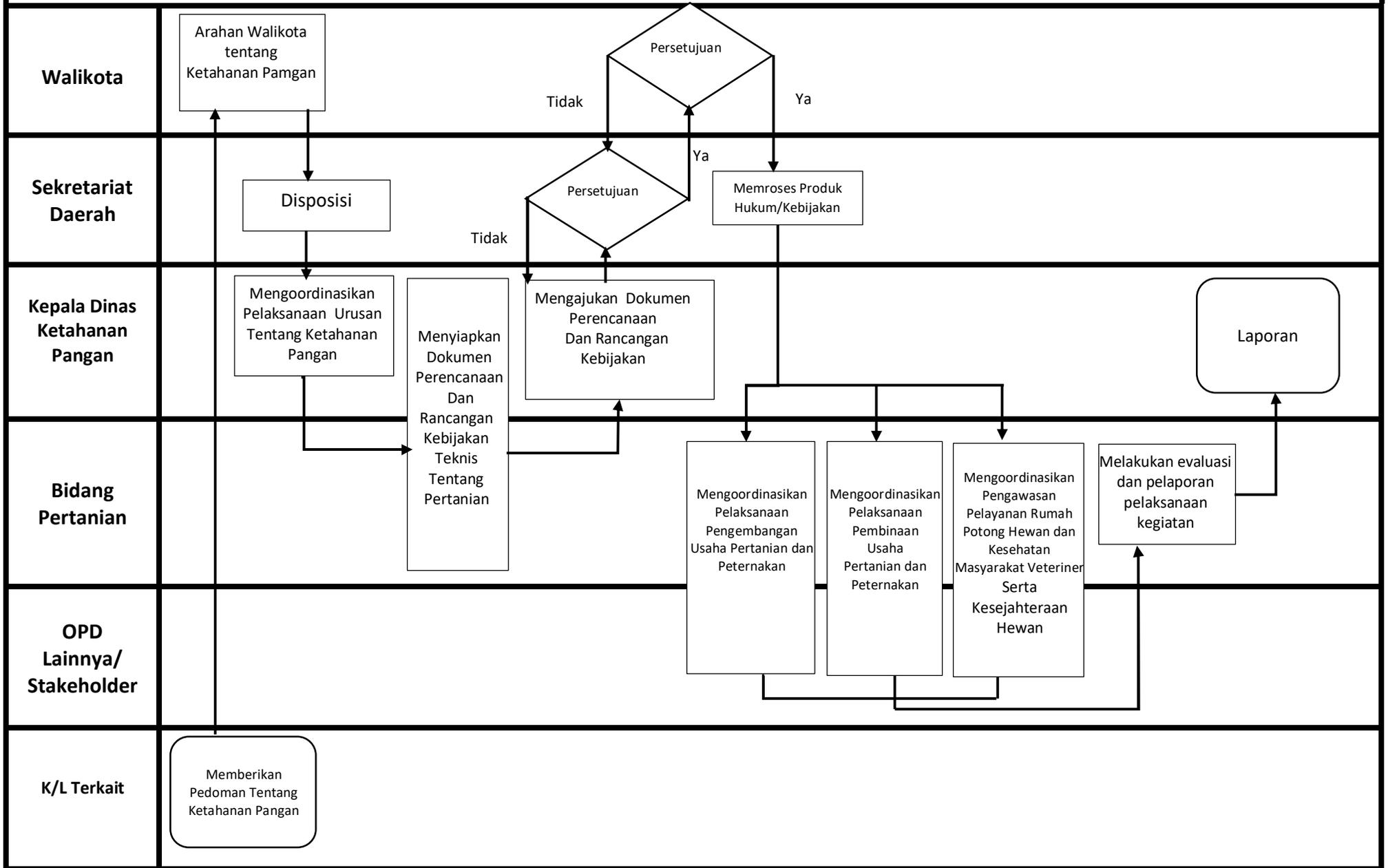
KT.15.03 : Peningkatan Ketersediaan, Distribusi Dan Penanganan Kerawanan Pangan



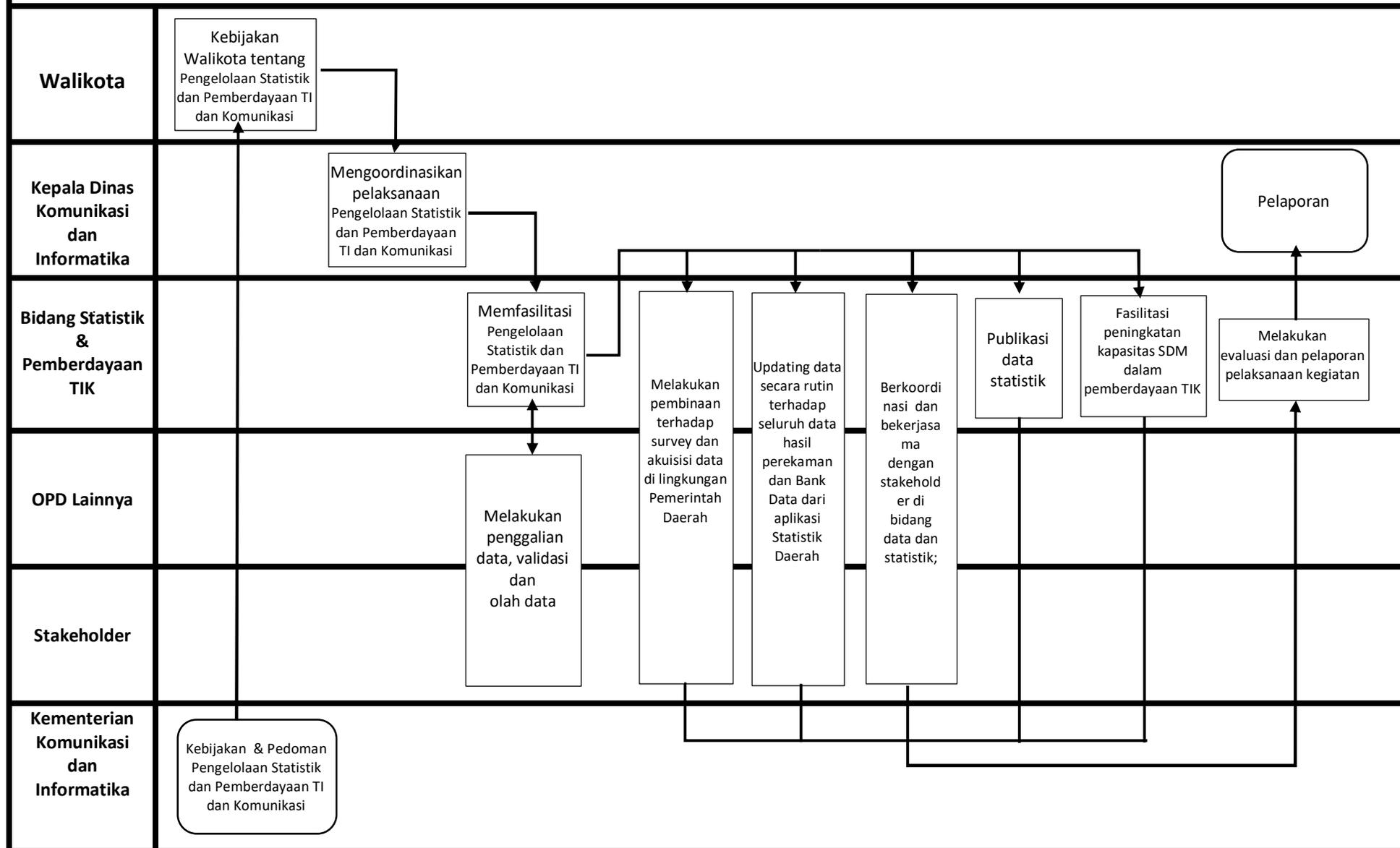
KT.15.04 : Peningkatan Produktivitas Perikanan



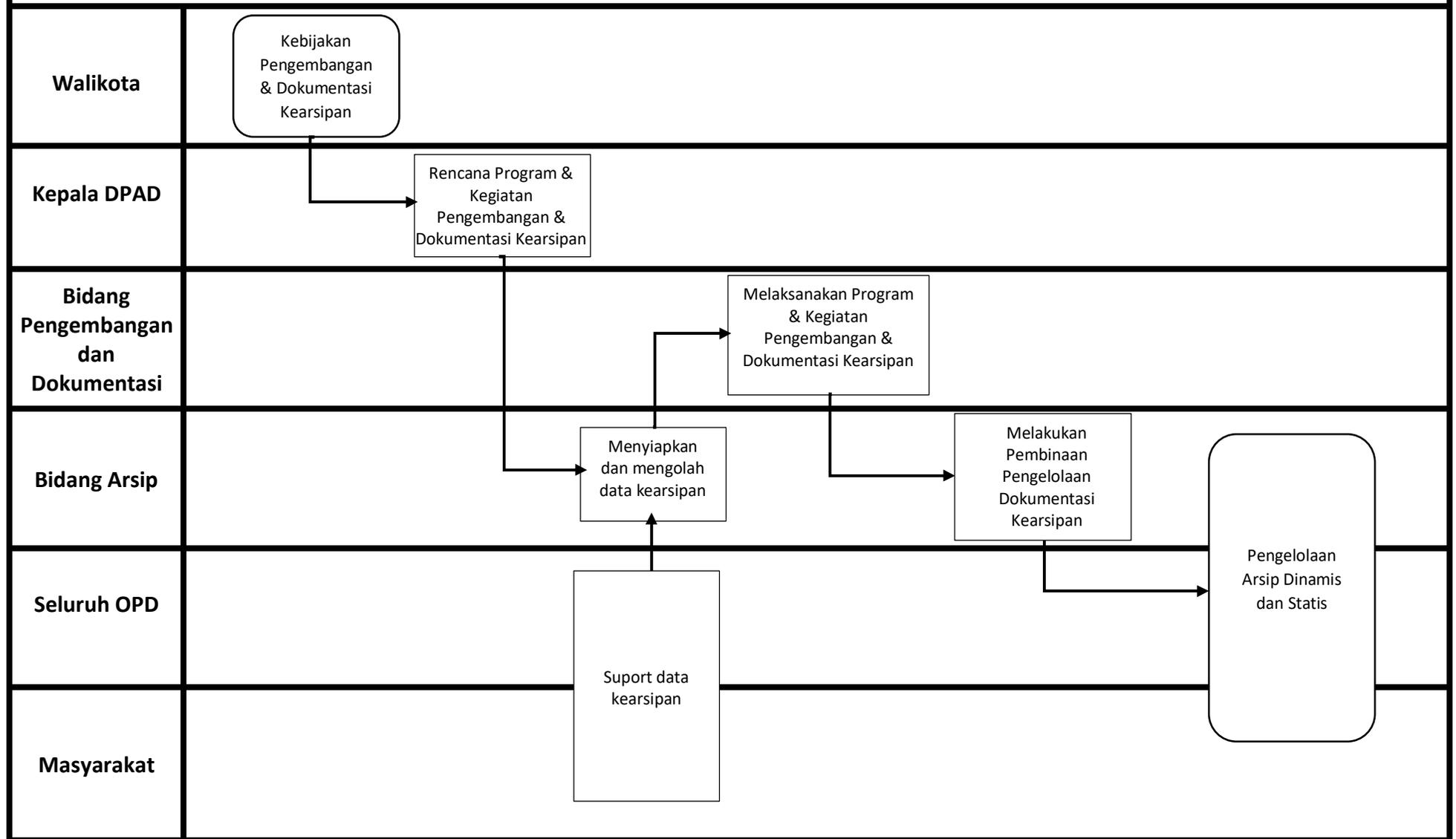
KT.15.05 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Peternakan



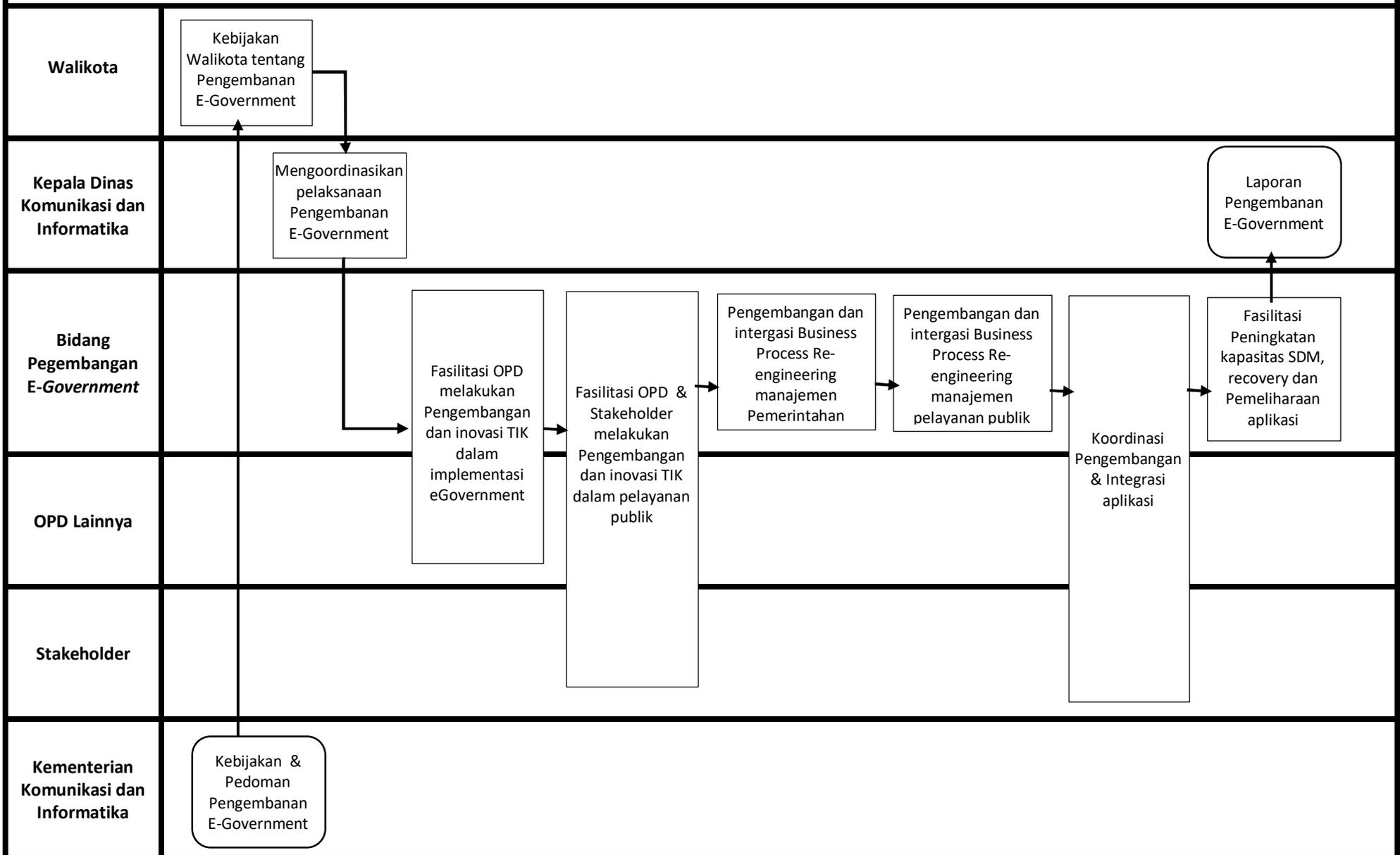
KT.16.01 : Pengelolaan Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi



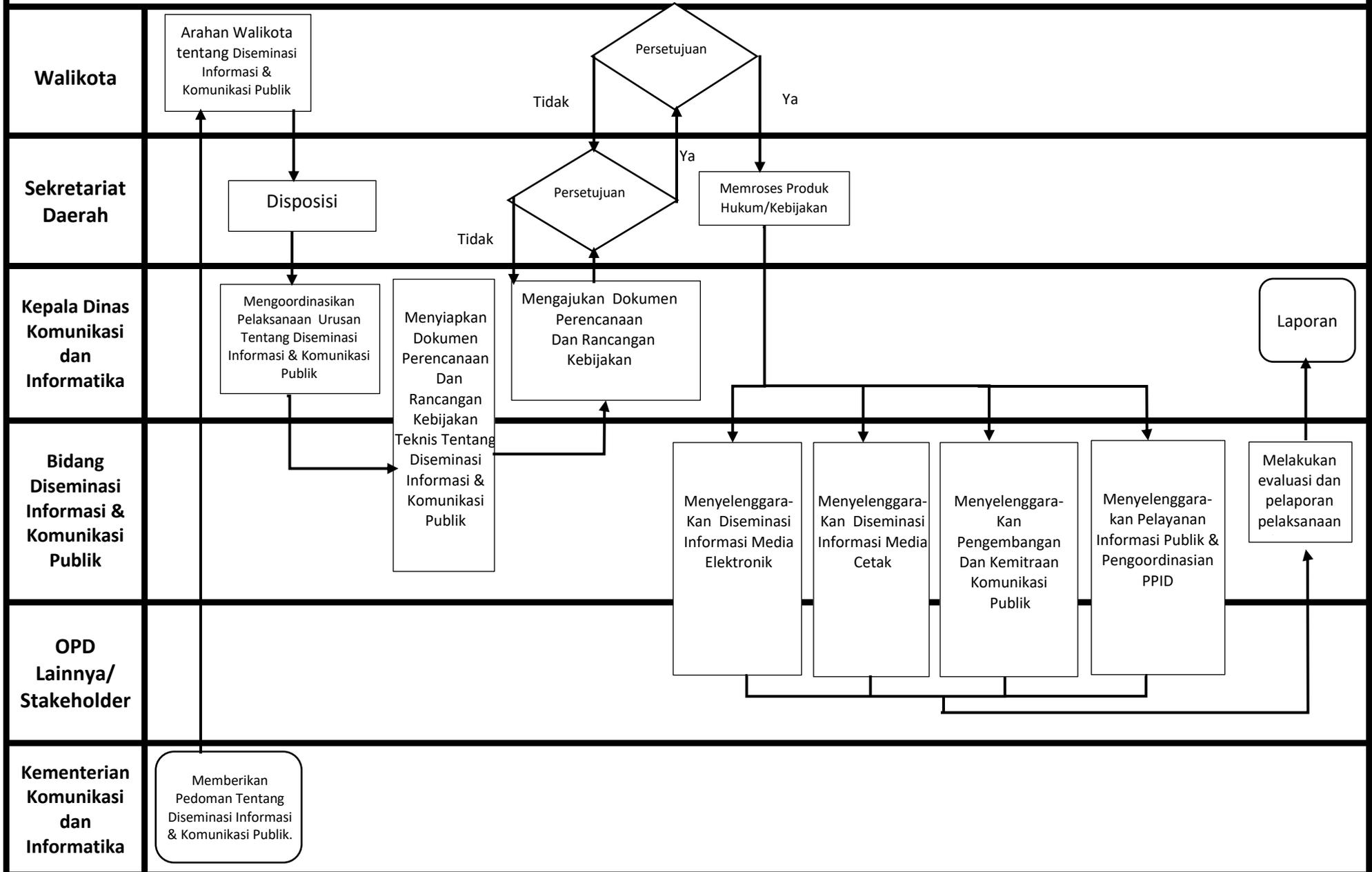
KT.16.02 : Pengembangan dan Dokumentasi Kearsipan



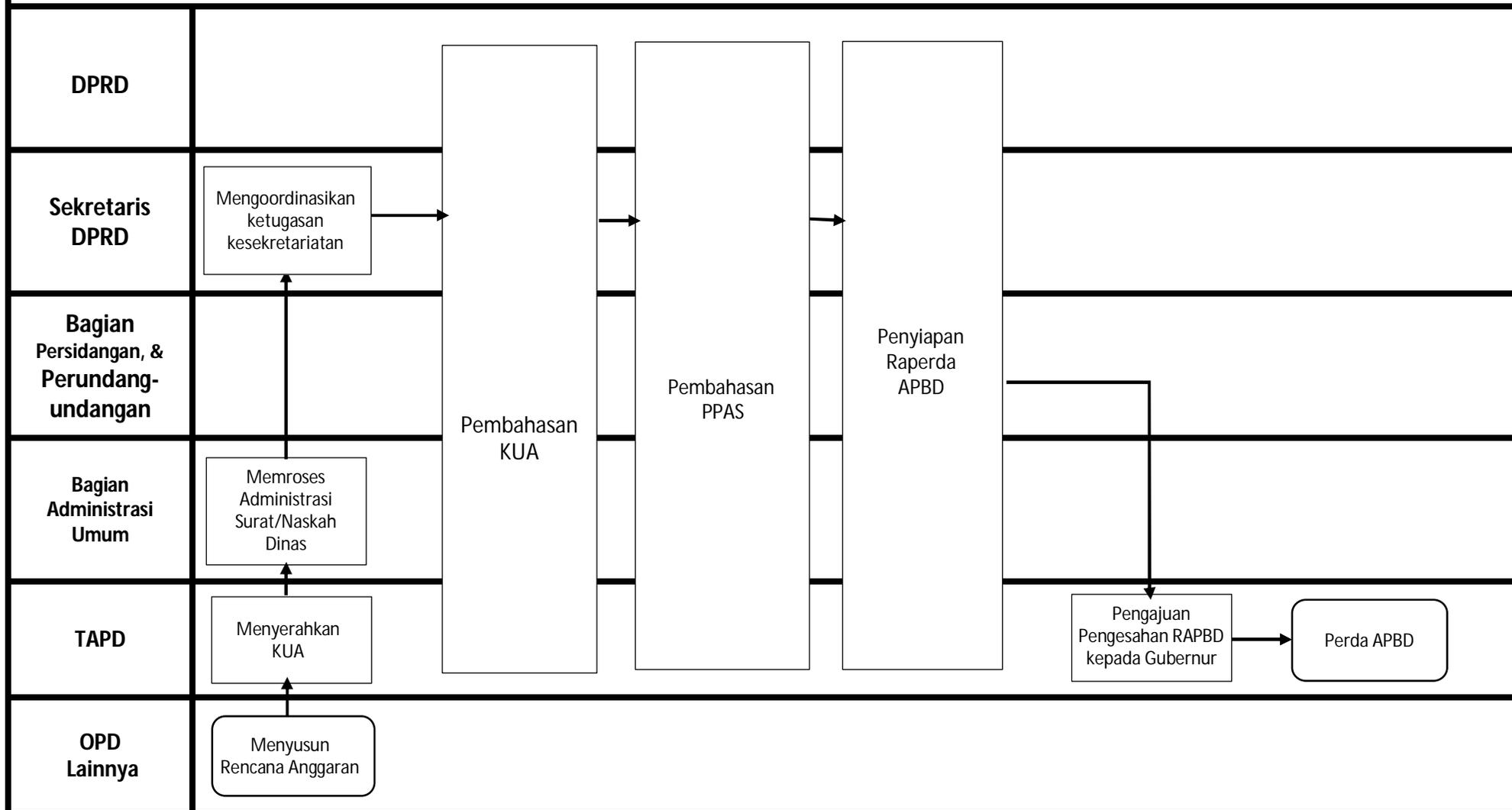
KT.16.03 : Pengembangan e-Government



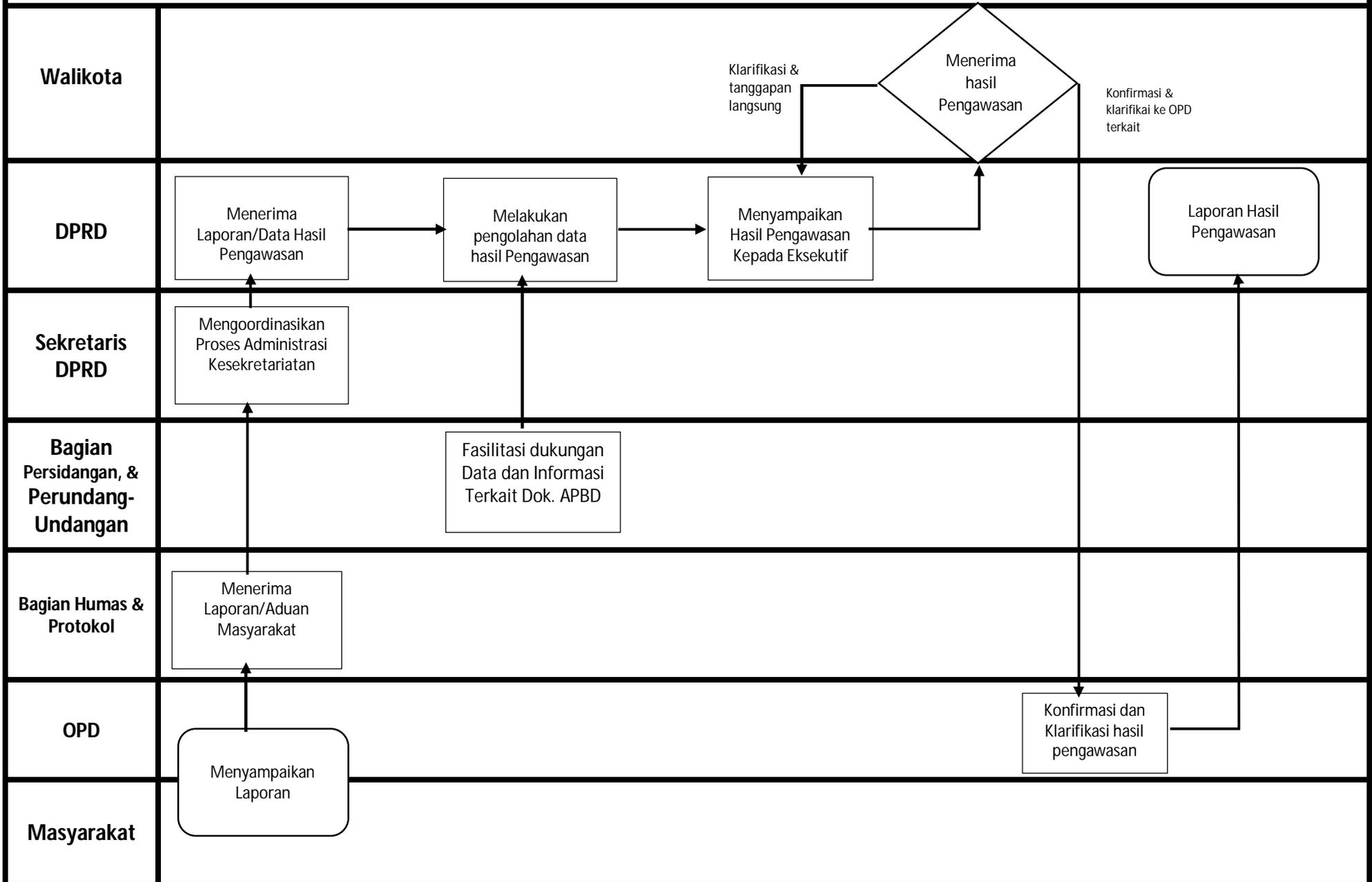
KT.16.04 : Peningkatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik



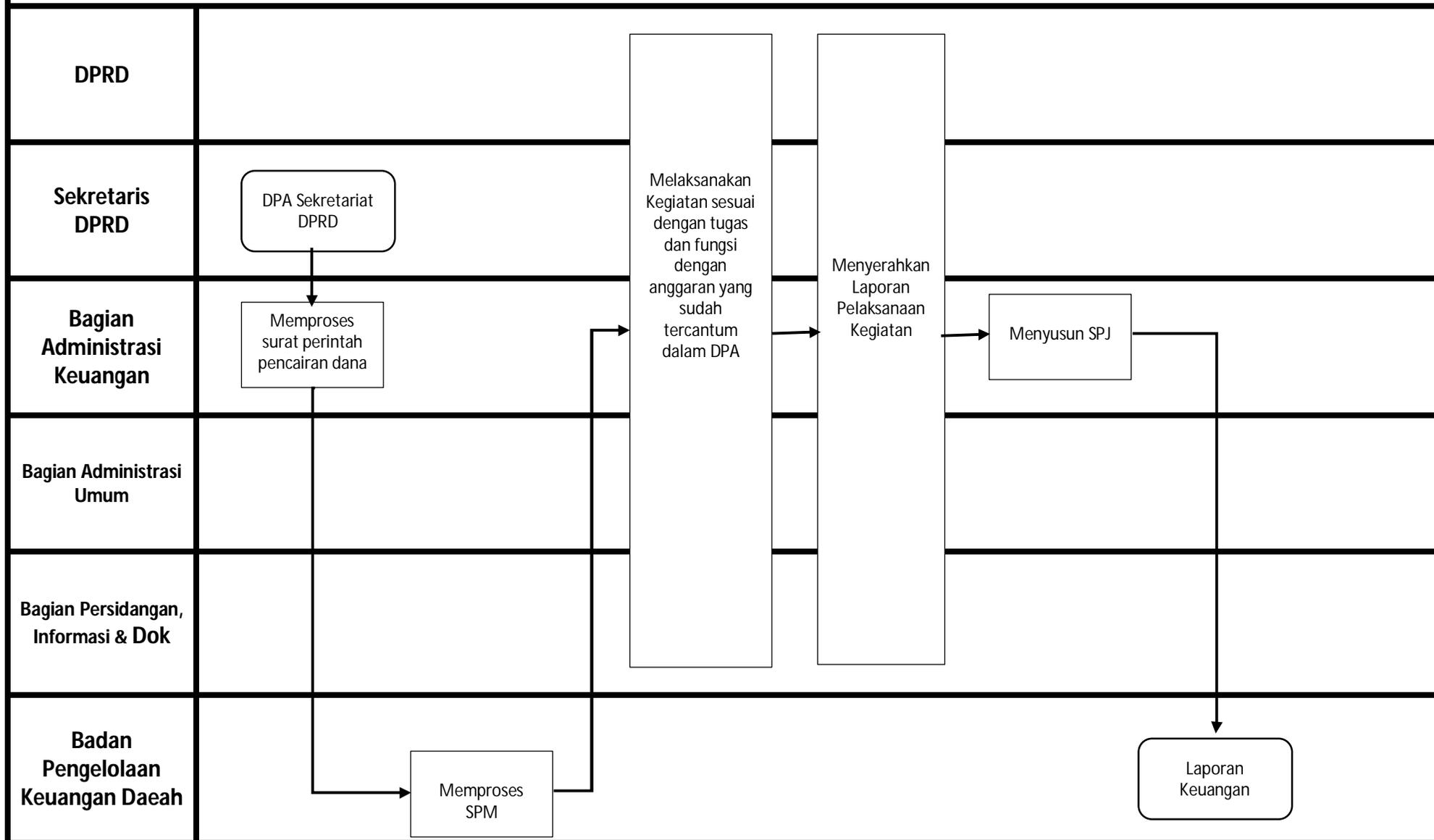
KT.18.01 : Fasilitas Penganggaran DPRD



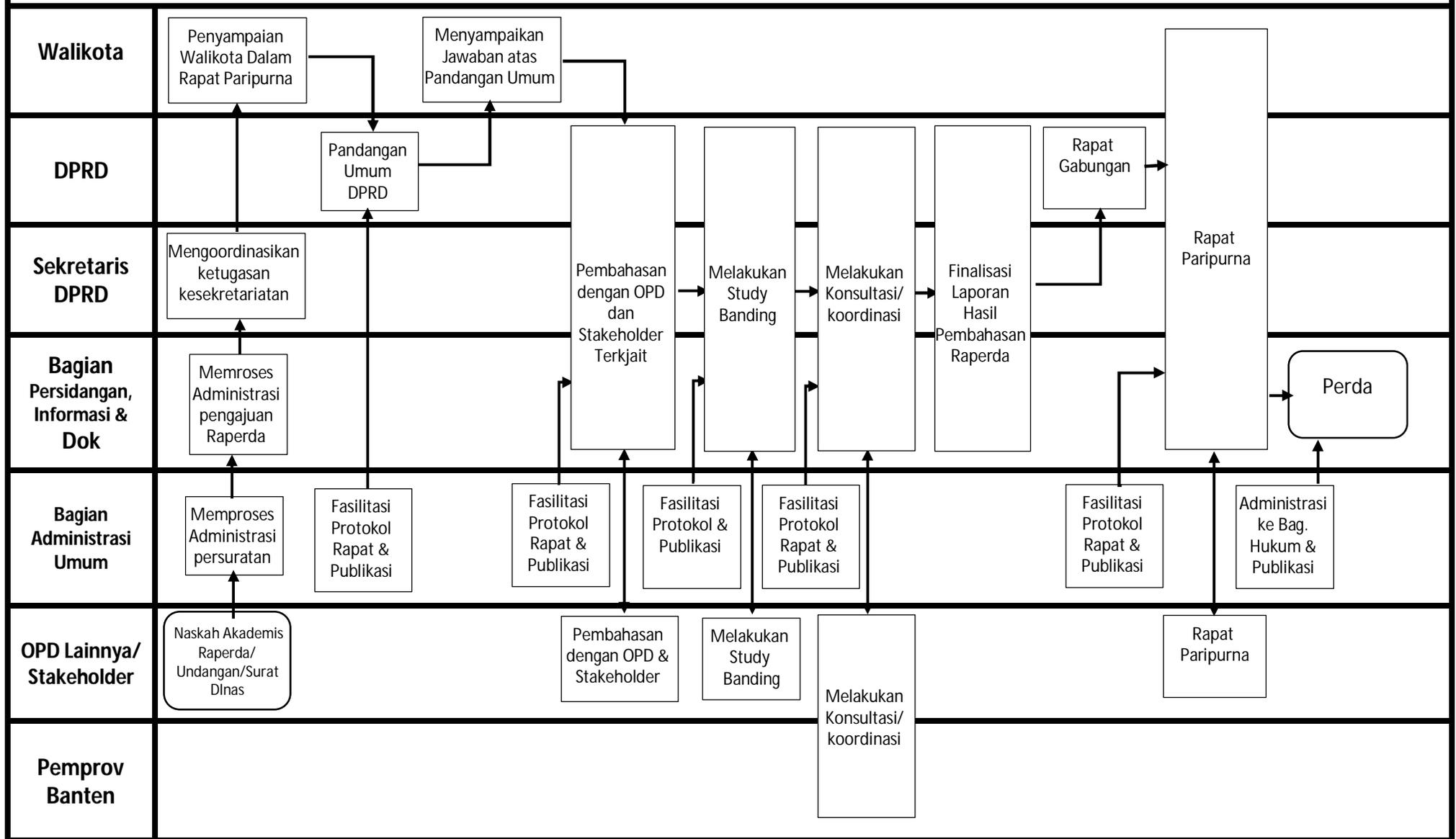
KT.18.02 : Fasilitas Pengawasan DPRD



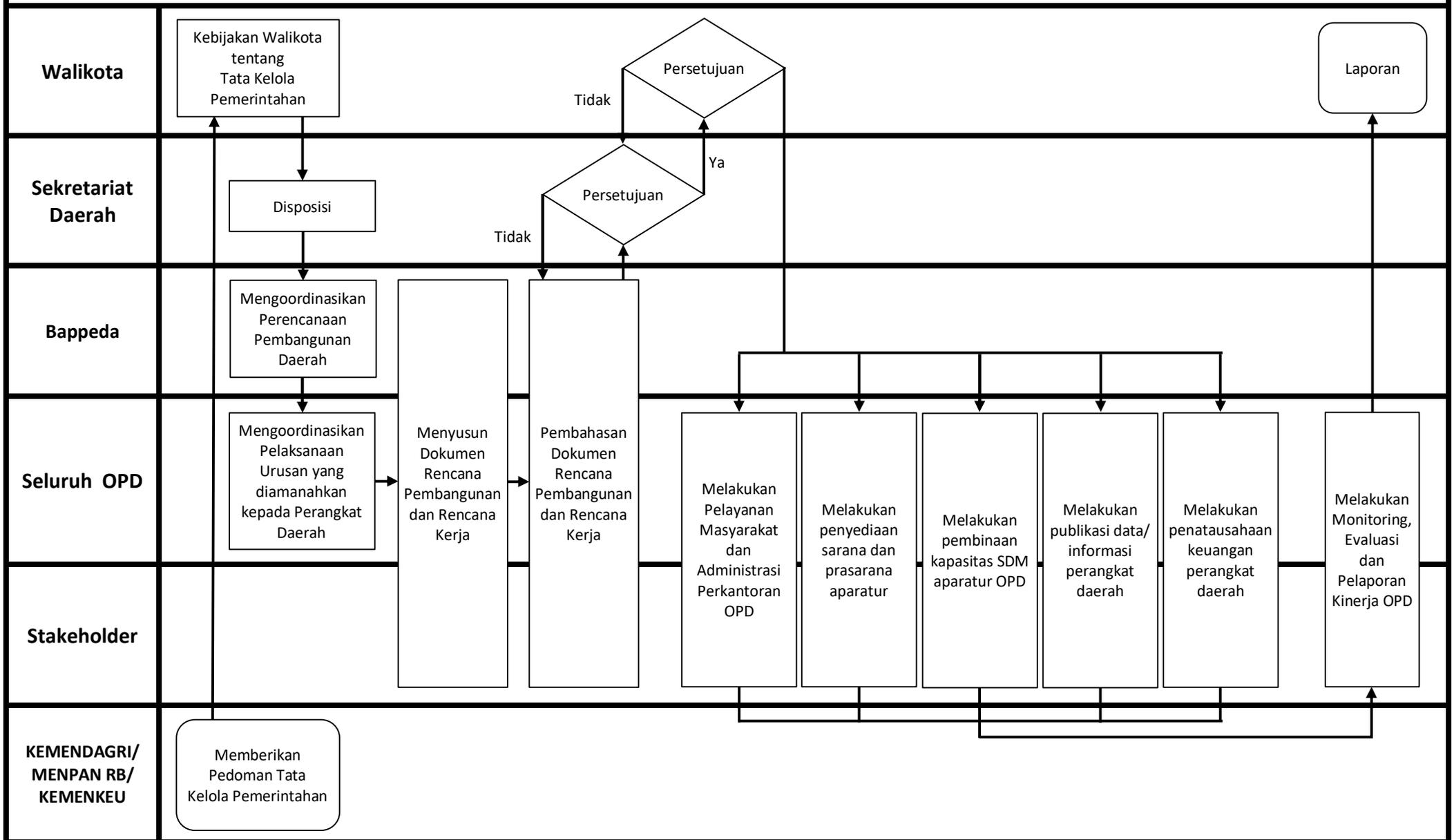
KT.18.03 : Fasilitas Administrasi Keuangan DPRD



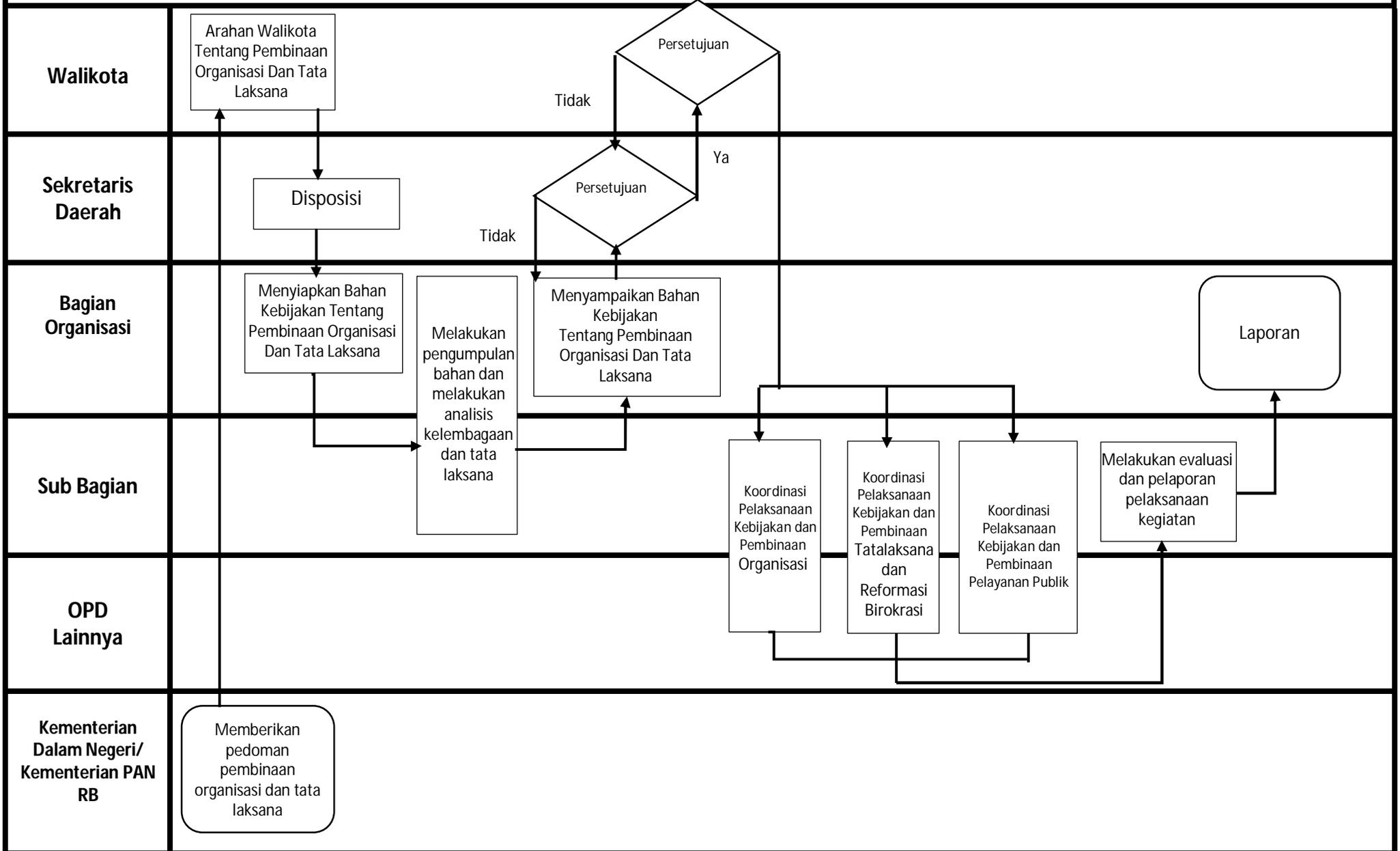
KT.18.04: Fasilitasi Persidangan Perundang-undangan dan Humas Protokol DPRD



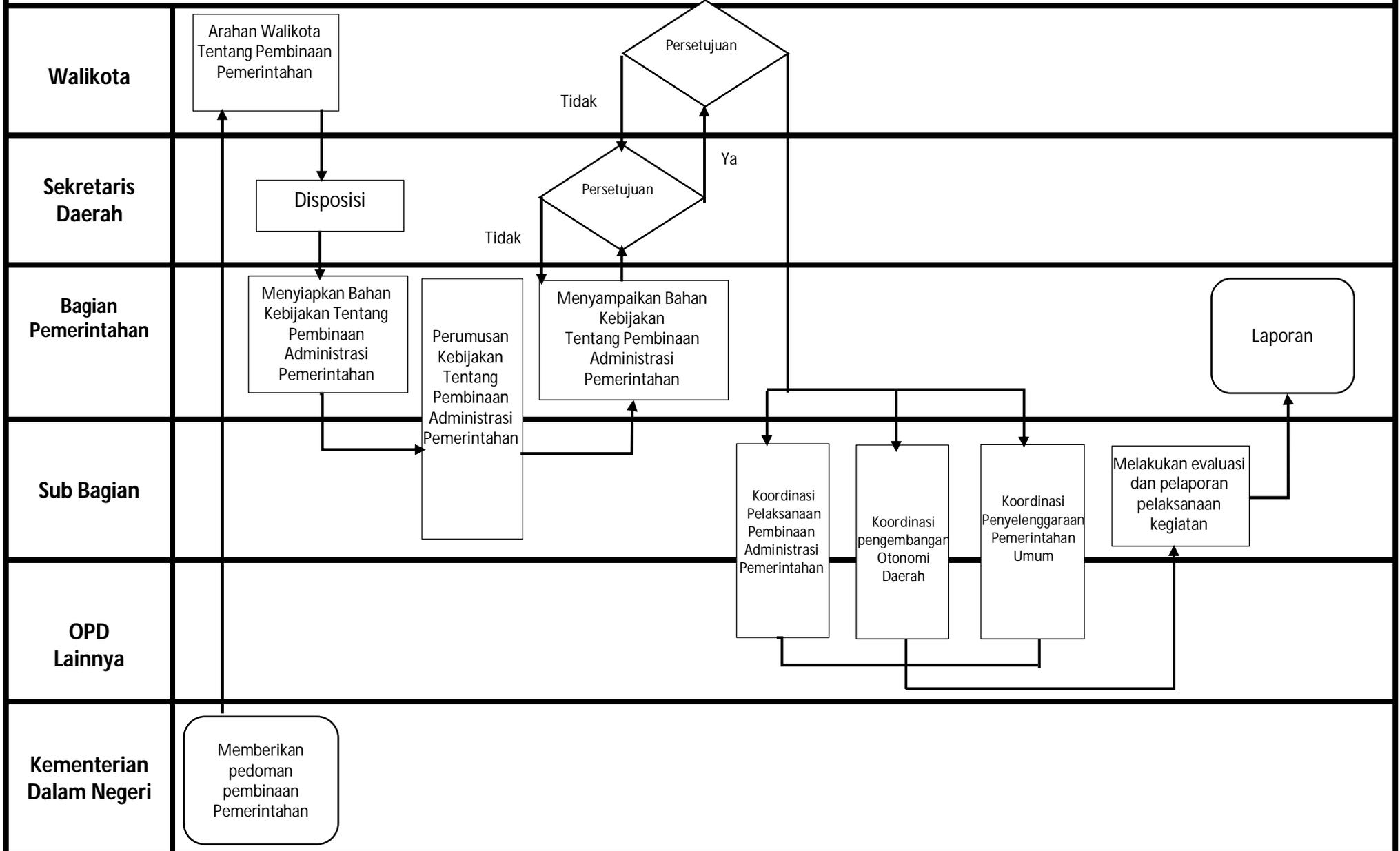
KT.18.05 : Tata Kelola Pemerintahan



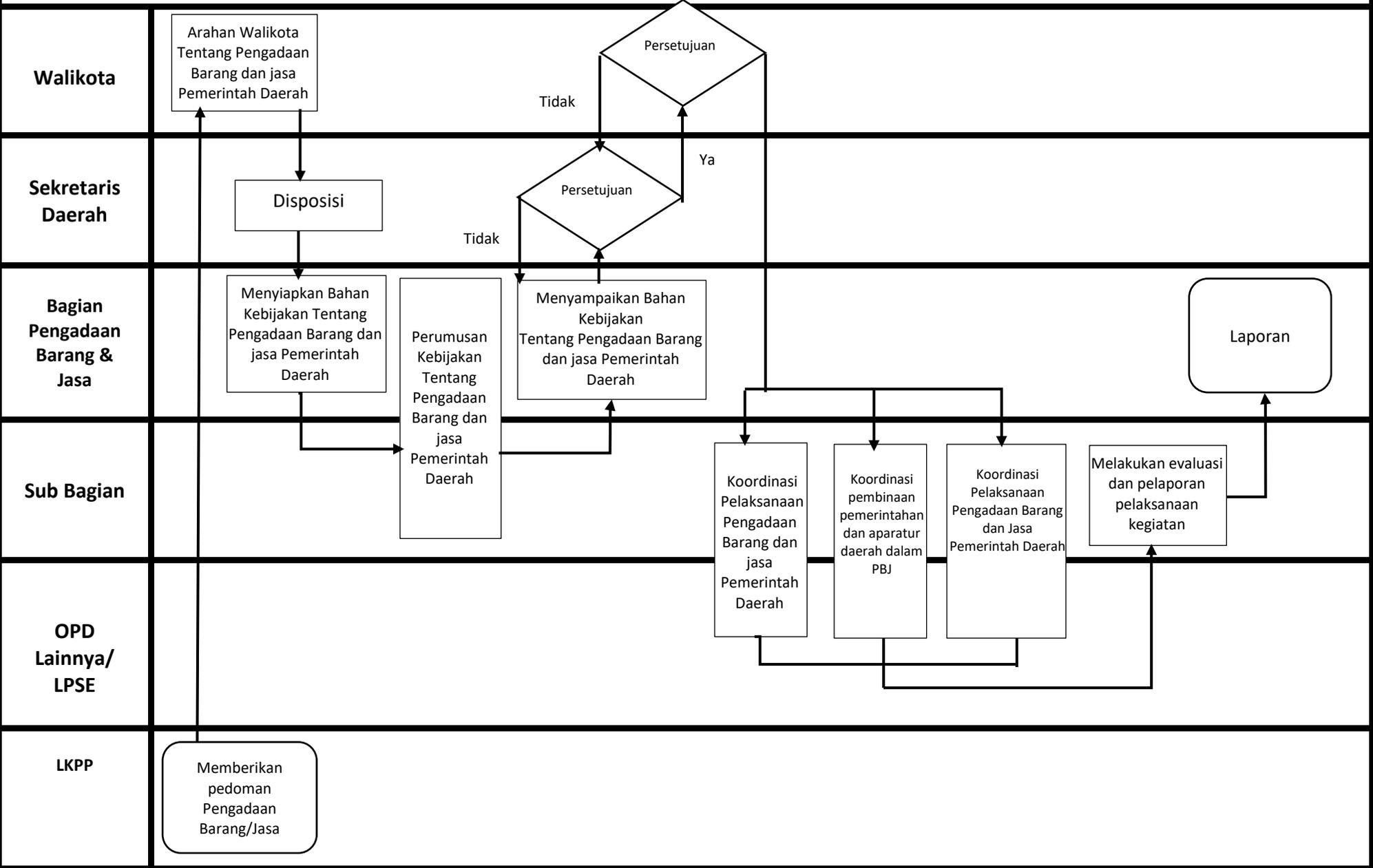
KT.18.06 : Pembinaan Organisasi Dan Tata Laksana



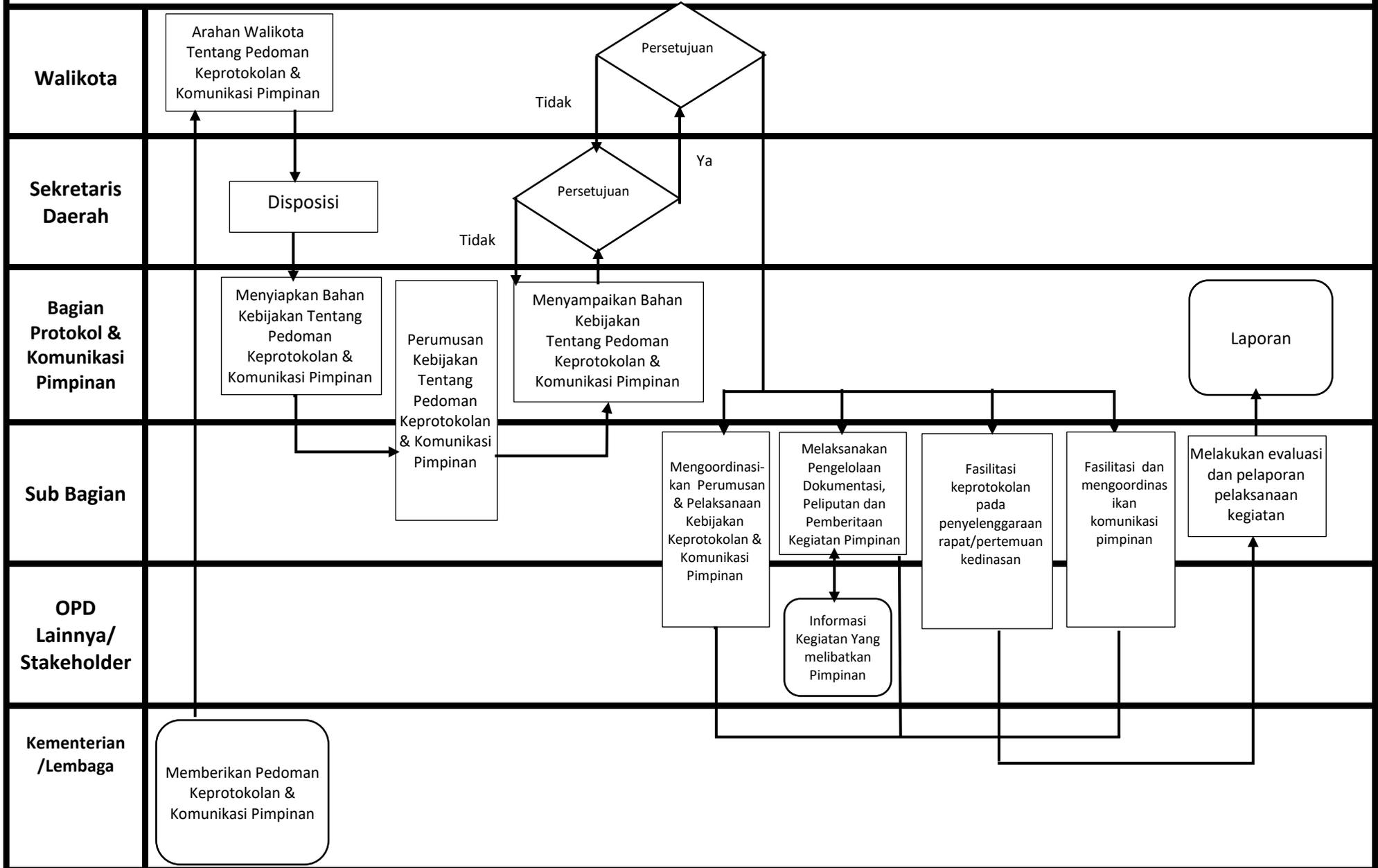
KT.18.07 : Pembinaan Pemerintahan



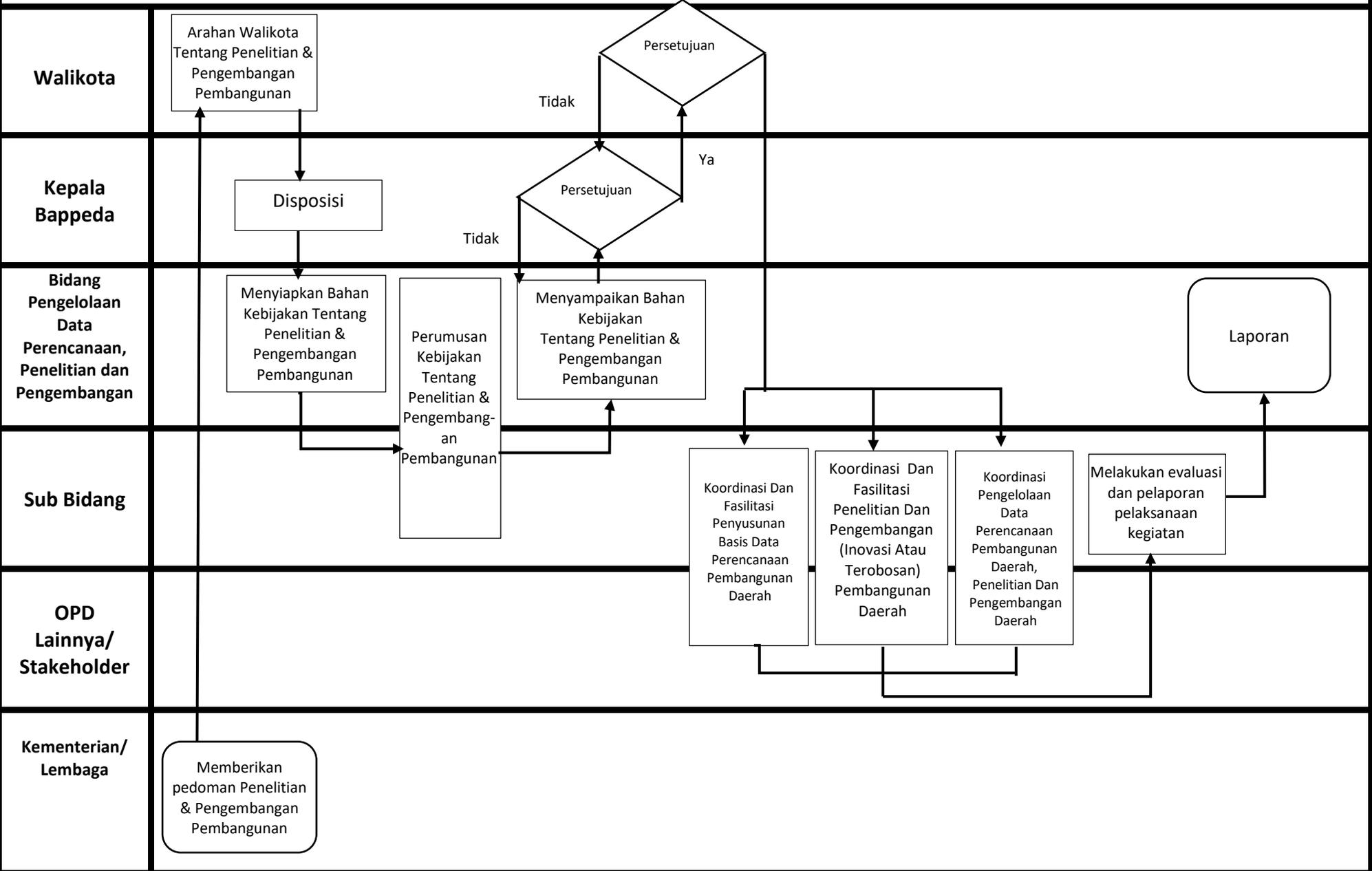
KT.18.08 : Pengadaan Barang dan Jasa



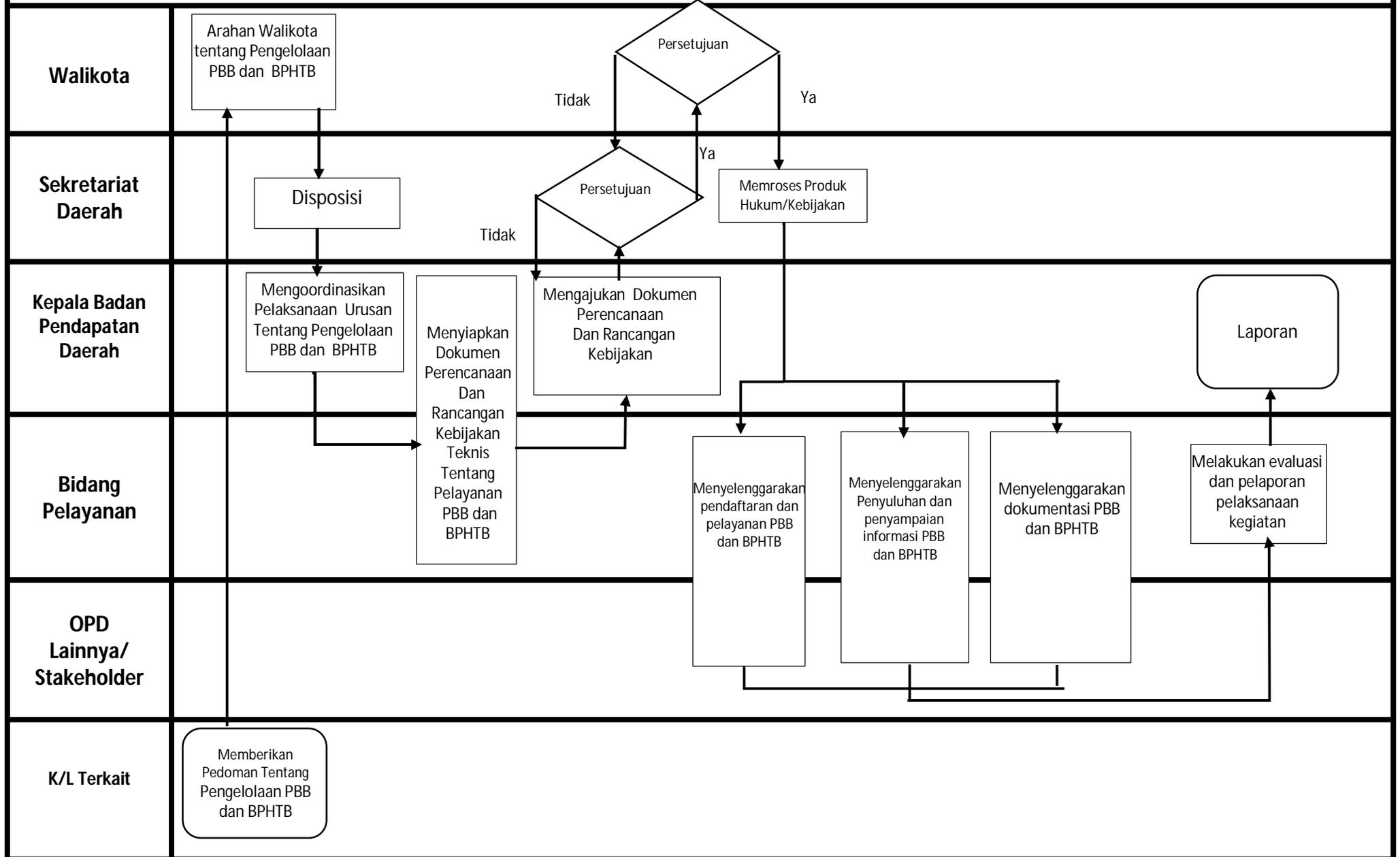
KT.18.09 : Pengelolaan Keprotokolan & Komunikasi Pimpinan



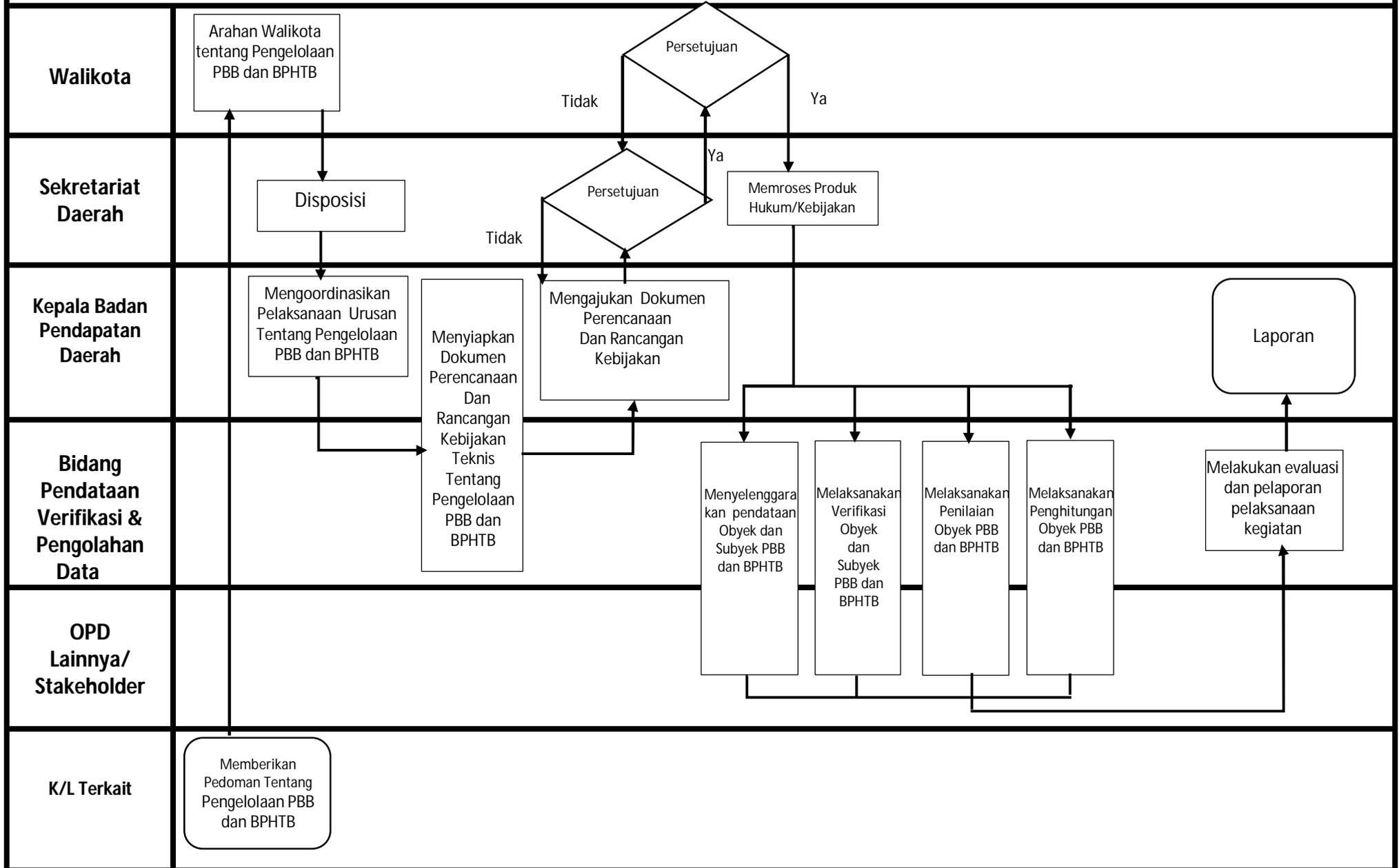
KT.18.10 : Penelitian dan Pengembangan Pembangunan



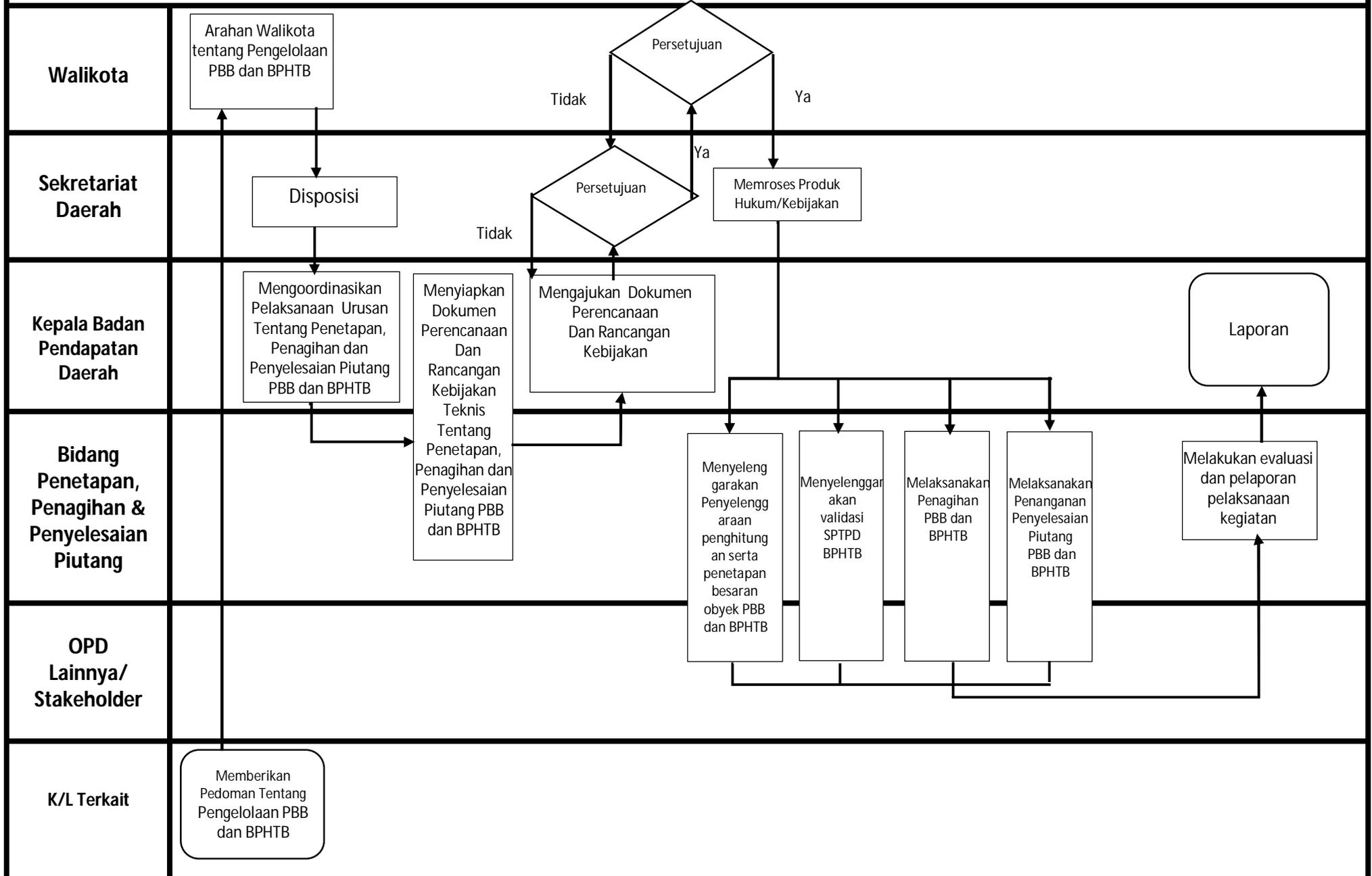
KT.19.01 : Pelayanan PBB dan BPHTB



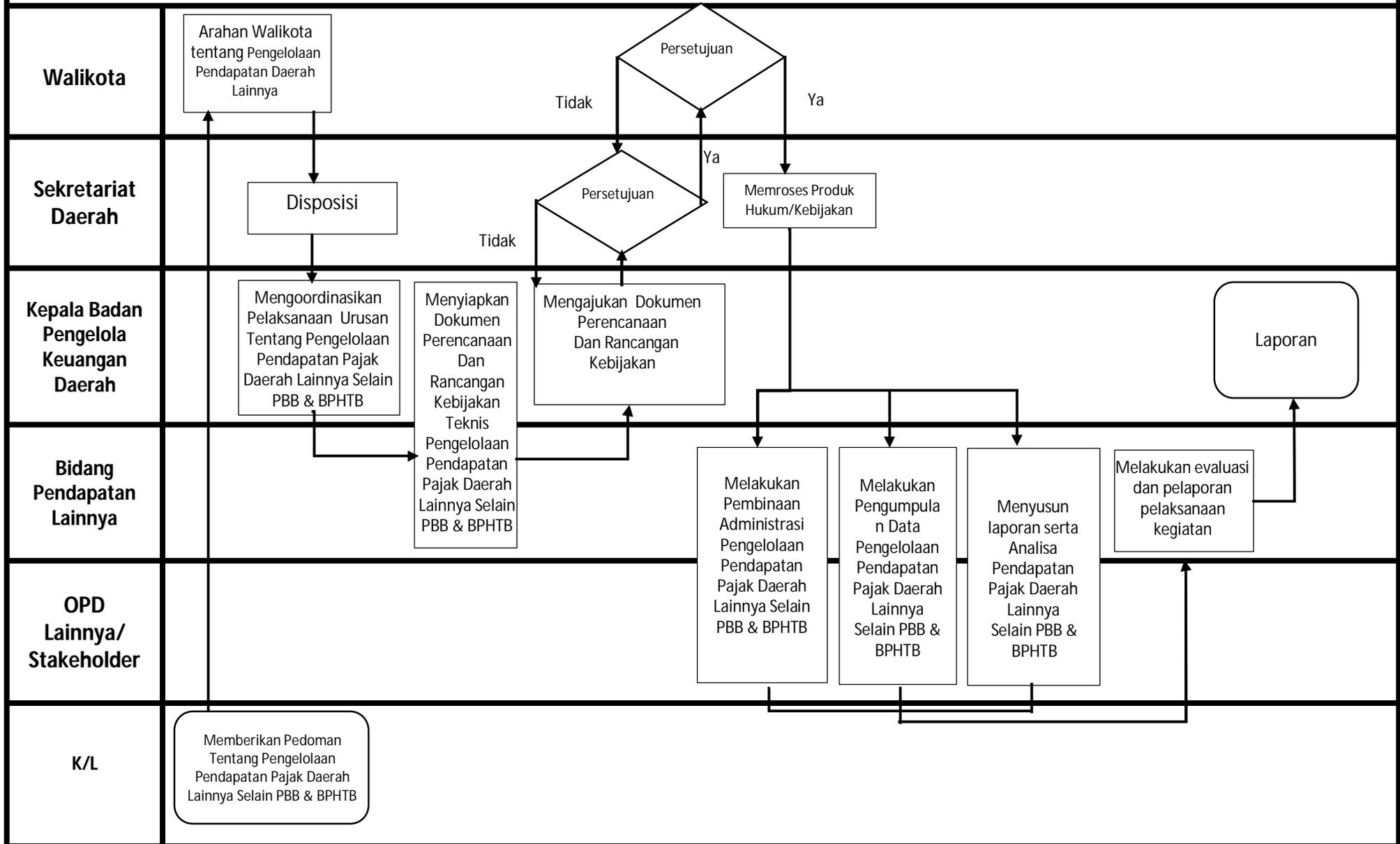
KT.19.02 : Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data PBB dan BPHTB



KT.19.03 : Penetapan, Penagihan dan Penyelesaian Piutang PBB dan BPHTB



KT.19.04: Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Selain PBB & BPHTB



WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH